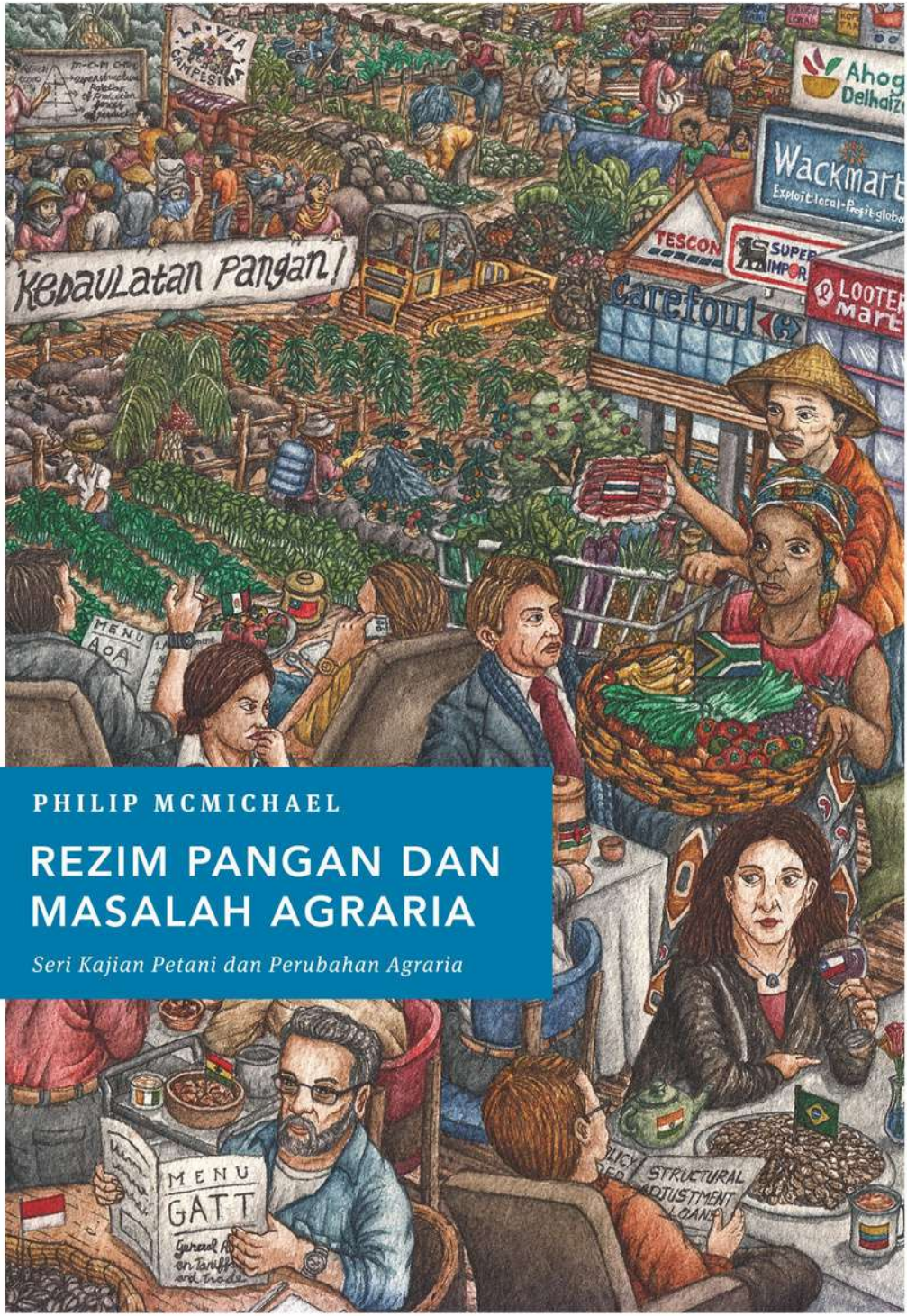

PHILIP MCMICHAEL

REZIM PANGAN DAN MASALAH AGRARIA

Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria

insist
INDONESIAN SOCIETY for SOCIAL TRANSFORMATION

PHILIP MCMICHAEL

Profesor di Departemen Sosiologi, Cornell University, dan penulis buku *Development and Social Change: A Global Perspective* (2012, Edisi Kelima) dan *Settlers and the Agrarian Question: Foundations of Capitalism in Colonial Australia* (1984).

REZIM PANGAN DAN MASALAH AGRARIA

REZIM PANGAN DAN MASALAH AGRARIA

PHILIP MCMICHAEL

PENERJEMAH
Nurhady Sirimorok

PENYUNTING AHLI
Francis Wahono

PENYUNTING
Marsen Sinaga
Achmad Choirudin

KOORDINATOR PENERBITAN
Laksmi A. Savitri

Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria

Diterbitkan oleh:

Bekerjasama dengan:

INSISTPress adalah anggota Indonesian Society for Social Transformation (INSIST)

Buku Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria edisi Indonesia ini diterbitkan INSISTPress atas kerjasama dengan Inter-Cruch Organization for Development Cooperation (ICCO), Institute of Social Studies (ISS), dan Initiatives in Critical Agrarian Studies (ICAS).

Buku ini diterjemahkan dari edisi Inggris berjudul *Food Regimes and Agrarian Questions*
© Philip McMichael terbitan Fernwood Publishing (2013).

Penerjemah: Nurhady Sirimorok
Penyunting Ahli: Francis Wahono
Penyunting: Marsen Sinaga dan Achmad Choirudin
Perjawahan Isi: Damar N. Sosodoro
Ilustrasi Sampul: Andi Bhatara

xxxiv + 308 hlm. ; 14 x 20 cm
ISBN: 978-602-0857-93-0

Cetakan ketiga, Maret 2024
Cetakan kedua, Mei 2021
Cetakan pertama, Agustus 2020

INSISTPress
Jalan Raya Kaliurang Kilometer 18
Padukuhan Sempu-Sambirejo, Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta 55582
Telepon: 085102594244
Surat elektronik: redaksi@insistpress.com
Tapakmaya: www.insistpress.com

DAFTAR ISI

TENTANG SERI KAJIAN PETANI DAN PERUBAHAN AGRARIA — xii
TERIMA KASIH — xvii
PENGANTAR PENYUNTING ICAS — xxi
PENGANTAR EDISI INDONESIA — xxv

BAB 1 PROYEK REZIM PANGAN — 1
Analisis Rezim Pangan — 4
Watak Rezim Pangan — 7
Metode Rezim Pangan — 10
Karakteristik Rezim Pangan — 13
Kesimpulan: Sebuah Dunia Pasca-Rezim Pangan? — 26

BAB 2 BENTUK-BENTUK HISTORIS REZIM PANGAN — 31
Tahap Prasejarah dari Rezim Pangan — 33
Bagaimana Rezim Pangan Terbentuk dan Terbentuk Ulang? — 36
Kesimpulan — 61

BAB 3 REZIM PANGAN KORPORAT — 63
Rezim Pangan Ketiga? — 64
Rezim Pangan Korporat — 73
Kedaulatan Pangan — 89
Kesimpulan — 93

BAB 4 REZIM PANGAN DAN MASALAH AGRARIA — 97
Perumusan Ulang Masalah Agraria? — 99
Masalah Agraria di dalam Rezim Pangan — 102
Masalah Agraria atau Krisis Agraria — 108
Membalikkan Politik Masalah Agraria — 115
Masalah Agraria Terkait Pangan — 124
Kesimpulan — 131

BAB 5 MERUMUSKAN ULANG REZIM PANGAN — 133
Analisis Rezim Pangan Tingkat Kawasan — 133
Relasi-Relasi Rezim Pangan — 152
Kesimpulan — 171

BAB 6 KRISIS DAN RESTRUKTURISASI — 173
Krisis? Krisis yang Mana? — 174
Krisis Akumulasi Kapital — 181
Restrukturasi Rezim Pangan Korporat — 186
Wilayah Rintisan bagi Kapital — 196
Merkantilisme Keamanan Pertanian — 199
Kesimpulan — 204

BAB 7 REZIM PANGAN DAN RELASI NILAI: NILAI YANG MANA? — 207
Relasi-Relasi Nilai — 209
Meninjau Ulang Masalah Agraria — 214
Reproduksi Sosial versus Reproduksi Kapital — 218
Pembentukan Kembali Kaum Tani: Menilai Ulang Masalah Agraria? — 229
Kedaulatan Pangan — 232
Perluasan Skala — 241
Kesimpulan — 245

GLOSARIUM — 249
DAFTAR PUSTAKA — 261
INDEKS — 299

Untuk mereka yang berjuang di garis depan
melawan rezim pangan
dan merusmukan ulang masalah agraria bagi masa depan

TENTANG SERI KAJIAN PETANI DAN PERUBAHAN AGRARIA

BUKU-BUKU Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria yang diprakarsai oleh Initiatives in Critical Agrarian Studies (ICAS) adalah "buku-buku kecil berisi debat teoretis tentang isu besar". Setiap buku dalam seri ini memuat penjelasan mengenai isu pembangunan tertentu yang didasarkan pada beberapa pertanyaan kunci. Pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud meliputi: Apa saja isu dan perdebatan terkini dalam suatu topik? Siapa saja sarjana/pemikir kunci dan praktisi kebijakan dalam topik itu? Bagaimana posisi tersebut muncul dan berkembang dari waktu ke waktu? Bagaimana alur masa depan yang mungkin terjadi? Apa saja materi yang menjadi rujukan kunci? Mengapa penting bagi para pekerja organisasi nonpemerintah, aktivis gerakan sosial, lembaga bantuan pembangunan pemerintah dan donor nonpemerintah, pelajar, akademisi, peneliti, dan ahli kebijakan untuk melibatkan diri secara kritis dengan poin-poin kunci yang dijelaskan dalam buku-buku Seri ini? Setiap buku memadukan pembahasan teoretis dan berorientasi kebijakan dengan contoh-contoh empiris dari latar lokal dan nasional yang berbeda.

Dengan menggunakan tema besar "perubahan agraria", inisiatif ini berusaha menghubungkan para sarjana, aktivis, dan praktisi pembangunan dari berbagai disiplin dan dari semua belahan dunia. "Perubahan agraria" di sini merujuk pada pengertian terluas, mengacu pada dunia pertanian-pedesaan-agraria yang tidak terputus dari, dan mempertimbangkan konteks, sektor-sektor dan perwujudan geografis lain semisal sektor industri dan perkotaan. Fokusnya adalah memberi kontribusi

terhadap pemahaman kita mengenai berbagai dinamika "perubahan". Artinya, kita memainkan peran tidak hanya dalam menafsir (ulang) dunia agraria dengan berbagai cara, tetapi juga ikut mengubahnya—dengan keberpihakan yang jelas bagi kelas pekerja, bagi kaum miskin. Dunia agraria yang telah diubah secara mendalam oleh globalisasi neoliberal masa kini menuntut cara-cara baru untuk memahami kondisi kelembagaan dan struktural, serta visi baru mengenai bagaimana mengubahnya.

ICAS adalah *komunitas* global para sarjana, praktisi pembangunan, dan aktivis yang berpemahaman sama dan bekerja pada isu-isu agraria. ICAS adalah *ranah pijak bersama*, ruang bersama bagi para sarjana, praktisi pembangunan, dan aktivis gerakan yang kritis. ICAS adalah inisiatif pluralis yang memungkinkan pertukaran pandangan dari perspektif-perspektif ideologi progresif yang berbeda. ICAS merespons kebutuhan akan inisiatif yang membangun dan berfokus pada *jaringan*—di kalangan akademisi, praktisi kebijakan pembangunan, dan aktivis gerakan sosial; antara Utara dan Selatan, serta Selatan dan Selatan; antara sektor pertanian pedesaan dan sektor industri perkotaan; juga antara ahli dan bukan ahli. ICAS mendorong untuk *saling memperkuat* produksi pengetahuan secara bersama dan berbagi pengetahuan dengan *saling menguntungkan*. ICAS mendorong *pemikiran kritis*, yang berarti asumsi-asumsi konvensional dipertanyakan, proposisi-proposisi populer ditelaah secara kritis, dan cara-cara baru untuk mempertanyakan masalah disusun, diusulkan, dan ditindaklanjuti. ICAS mendorong *penelitian terlibat dan pembelajaran*; menekankan pada penelitian dan pembelajaran yang menarik secara akademis dan relevan secara sosial, serta menyiratkan keberpihakan pada kelompok miskin.

Seri buku ini secara keuangan didukung oleh Inter-Church Organization for Development Cooperation (ICCO), Belanda. Penyunting seri ini adalah Saturnino M. Borras Jr., Max Spoor, dan Henry Veltmeyer. Serangkaian buku dalam seri ini tersedia dalam berbagai bahasa.

TERIMA KASIH

TERENCE K. HOPKINS adalah orang yang pertama kali memerkenalkan saya kepada masalah agraria, dengan suatu bacaan yang terilhami oleh buku karya Lenin, *Development of Capitalism in Russia*, saat saya mengikuti perkuliahan pertama pascasarjana. Ini menjadi penuntun bagi disertasi saya tentang masalah agraria di Australia masa kolonial, dengan dibimbing oleh Fred Buttel. Dengan kemampuan tinjauan masa depan yang tak tertandingi, Fred mengajak Harriet Friedmann dan saya untuk menulis bersama sebuah makalah seminar mengenai pangan dan sejarah kapitalisme. Penelitian brilian Harriet mengenai pasar gandum dunia membuka pintu bagi analisis rezim pangan. Saya belajar banyak dari tiga mitra bestari ini, selain dari Dale Tomich. Kami sempat tenggelam dalam masalah-masalah yang terilhami oleh aliran Binghamton, yang terbentuk di sekitaran Hopkins dan Immanuel Wallerstein, yang menyoroti dunia-sejarah politik kapital, formasi sosial agrarianya, dan metode historis Marx. Masalah-masalah besar ini memberi landasan bagi proyek rezim pangan, membentuk kolaborasi panjang dengan Harriet, meski kami hidup di bawah rezim-rezim yang agak berbeda. Saya pun belajar banyak dari rekan-rekan di Agri-Food Research Network.

Pada awal 1990-an, Fred Buttel dan saya mengucapkan salam perpisahan dengan masalah agraria, tetapi Farshad Araghi segera melakukan penyegaran melalui penelitian yang mengesankan tentang 'penyusutan kepetanian' (*depeasantization*). Dia dan Raj Patel telah menjadi provokator intelektual selama satu setengah dekade terakhir, demikian pula Dia DaCosta yang mengajarkan saya bagaimana berpikir di luar kotak kapital dan

menyadari dialektikanya. Karya-karya mahasiswa pascasarjana asuhan saya yang luar biasa dan karya Harriet tentang Dewan Kebijakan Pangan Toronto (Toronto Food Policy Council) menunjukkan saya berbagai cara untuk menautkan penelitian dengan dunia aktivisme. Pada awal 2000-an saya beruntung bertemu Nettie Wiebe di sebuah pertemuan pengorganisasian gerakan di Mexico City sebelum pertemuan antar-menteri WTO 2003. Nettie, anggota pendiri Vía Campesina, adalah orang yang pertama kali merangsang ketertarikan saya pada gerakan kedaulatan pangan. Nettie juga membawa saya berjumpa Jun Borras, yang berjasa bagi saya, terutama karena kepemimpin intelektual dan moralnya sebagai aktivis-pembelajar, juga karena dukungannya yang tanpa henti. Energi Jun bisa menjalar—suatu tanda bagi masa-masa kebersamaan kami, dan apa yang dia capai dengan menyunting seri buku ini dan *The Journal of Peasant Studies* merupakan persembahan berharga bagi para akademisi dan kaum pergerakan. Jun dan Farshad, serta Jason Moore, selalu menyodorkan pandangan-pandangan yang tajam serta dorongan kuat selama persiapan buku ini. Kate Kennedy menguatkan teks ini dengan penyuntingan naskah yang saksama, dan Beverley Rach telah menjalankan tugas sebagai redaktur pelaksana yang penuh simpati.

Buku *Rezim Pangan dan Masalah Agraria* ini merupakan upaya untuk menulis ulang proyek rezim pangan, bukan secara komprehensif tetapi ilustratif, guna mengemukakan masalah-masalah baru seputar ranah pertanian-pangan secara umum, dan pendekatan rezim pangan secara khusus. Karya awal yang saya tulis bersama Harriet memuat garis besar mengenai pentingnya makna politis relasi-relasi pertanian-pangan di skala global, untuk selanjutnya bisa dikembangkan oleh rekan-rekan pengkaji baik di dunia akademis maupun di kalangan aktivis. Saya berharap tafsiran yang akan muncul

bakal menyempurnakan dan meluaskan janji proyek ini sebagai lensa yang mengemukakan masalah-masalah pertanian-pangan sebagai isu politik.

PENGANTAR PENYUNTING ICAS

REZIM Pangan dan Masalah Agraria karya Philip McMichael adalah buku ketiga dari Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria yang diprakarsai oleh ICAS (Initiative in Critical Agrarian Studies). Buku pertama ditulis Henry Bernstein dengan tajuk *Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria*, dan buku kedua ditulis Jan Douwe van der Ploeg berjudul *Petani dan Seni Bertani: Maklumat Chayanovian*. Volume ketiga ini merupakan lanjutan yang sempurna dari kedua buku sebelumnya, dengan berpijak dan menautkan pembahasannya pada topik-topik kunci yang dibahas dalam kedua volume sebelumnya. Ketiga buku awal dalam Seri ini menegaskan kembali arti penting dan relevansi strategis dari lensa analitis ekonomi-politik dalam kajian agraria dewasa ini. Ketiganya benar-benar membentuk suatu standar dasar bagi Seri ini, baik dalam hal relevansinya secara politis maupun kecermatannya secara ilmiah.

Di sini kami memaparkan penjelasan singkat yang bisa membantu meletakkan buku ini dalam perspektif yang terhubung dengan kerja politik dan intelektual ICAS. Dewasa ini, kemiskinan global masih menjadi fenomena mendesak di pedesaan yang ditandai dengan tiga perempat kaum miskin dunia berasal dari desa. Maka, persoalan kemiskinan dan tantangan untuk mengakhirinya, sebagai isu multidimensi (ekonomi, politik, sosial, kultural, gender, lingkungan, dan sebagainya), memiliki kaitan erat dengan resistensi kelas pekerja pedesaan terhadap sistem yang terus mereproduksi kemiskinan di pedesaan, juga dengan perjuangan kaum miskin dalam rangka menjaga keberlanjutan penghidupan. Karena itu, perhatian dan fokus pada pembangunan pedesaan tetap sangat penting bagi kajian

pembangunan. Namun, perhatian dan fokus pada pedesaan tidak berarti memutus hubungan desa dengan persoalan perkotaan. Tantangannya ialah memahami kaitan antara keduanya, sebagiannya karena langkah-langkah pengentasan kemiskinan pedesaan dipandu oleh kebijakan neoliberal, juga karena berbagai upaya lembaga-lembaga keuangan dan pembangunan internasional arus utama yang terlibat dalam dan memimpin perang melawan kemiskinan global dalam banyak hal hanya mengganti kemiskinan pedesaan menjadi kemiskinan baru di perkotaan.

Pemikiran arus utama tentang kajian agraria mendapat pembiayaan melimpah sehingga mampu mendominasi produksi dan pustaka tentang penelitian dan kajian seputar isu-isu agraria. Lembaga-lembaga seperti World Bank yang mengarusutamakan pemikiran itu juga memiliki keterampilan untuk memproduksi dan menyebarluaskan terbitan yang sangat mudah diakses dan berorientasi kebijakan. Terbitan-terbitan semacam itu disemaikan di seantero dunia. Para pemikir kritis di lembaga-lembaga akademik pada dasarnya juga mampu dan memang menantang arus utama itu dengan banyak cara, tetapi umumnya terkurung di dalam lingkaran akademik dengan jangkauan populer dan dampak yang sangat terbatas.

Situasi itu meninggalkan lubang besar untuk memenuhi kebutuhan para akademisi (dosen, peneliti, dan mahasiswa), aktivis gerakan sosial, dan praktisi pembangunan di Selatan maupun Utara agar mampu mengakses buku kajian agraria kritis yang kokoh secara ilmiah tapi mudah dibaca, penad secara politis, berorientasi kebijakan, dan murah. Untuk merespons kebutuhan ini, ICAS meluncurkan seri buku kecil yang memuat "perkembangan terbaru", buku yang akan menjelaskan isu

pembangunan yang didasari dengan beberapa pertanyaan: Isu dan topik apa yang sedang diperdebatkan dewasa ini? Siapa ilmuwan, pemikir kunci, maupun praktisi kebijakan yang paling aktual? Bagaimana posisi tertentu bisa hadir dan terbentuk sejauh ini? Jalur-jalur apa yang mungkin terbentuk pada masa depan? Kepustakaan kunci macam apa yang menjadi bahannya? Bagaimana dan mengapa menjadi penting bagi pekerja organisasi nonpemerintah (ORNOP), aktivis gerakan sosial, lembaga donor pembangunan, dan agen lembaga donor nonpemerintah, mahasiswa, akademisi, peneliti, dan pengamat kebijakan untuk secara kritis terlibat dengan beberapa poin utama yang dijelaskan dalam buku ini? Setiap buku memadukan diskusi teoretis dan diskusi yang berorientasi kebijakan dengan disertai contoh-contoh empiris dari pelbagai negara dan kondisi lokal.

Buku-buku Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria akan tersedia dalam berbagai bahasa selain bahasa Inggris, setidaknya yang sudah diinisiasi ada empat, yakni Tiongkok, Spanyol, Portugis, dan Indonesia. Edisi Tiongkok diterbitkan melalui kerjasama dengan College of Humanities and Development, China Agricultural University di Beijing di bawah koordinasi Ye Jinzhong; edisi Spanyol dikoordinasikan oleh Program Doktoral, Kajian Pembangunan, Autonomous University of Zacacetas, Meksiko di bawah koordinasi Raul Deldago Wise; edisi Portugis bekerjasama dengan Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente (UNESP) di Brasil, dengan koordinator Bernardo Mancano Fernandes; sedangkan edisi Indonesia bekerjasama dengan INSISTPress dengan koordinator Laksmi A. Savitri.

Kami sangat bahagia dan merasa terhormat bisa menerbitkan buku Henry Bernstein sebagai volume pertama, lalu buku

Jan Douwe van der Ploeg sebagai volume kedua, dan buku McMichael ini sebagai volume ketiga dalam Seri ini: ketiga buku ini merupakan suatu perpaduan yang sempurna dalam hal topik, kemudahan dibaca, relevansi, dan kecermatan. Kami sangat bergairah dan optimis akan masa depan Seri ini!

Saturnino M. Borras Jr., Max Spoor, dan Henry Veltmeyer
Editor Seri Buku ICAS

PENGANTAR EDISI INDONESIA

BUKU-BUKU yang diterbitkan dalam Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria tak mungkin terhindar dari kesan 'buku serius'. Kebanyakan dari buku-buku ini memerlukan kesediaan pembaca untuk mendialogkan tiap buku dengan bacaan-bacaan lain yang memosisikan diri dalam pembahasan, bahkan debat, atas topik yang ditulis. Demikian pula buku *Rezim Pangan dan Masalah Agraria* yang ada di tangan Anda sekarang. Buku ini, sebagai buku terjemahan dari naskah asli yang diterbitkan pada 2013, bisa dikatakan telah diselamatkan oleh kelambatan kedatangannya ke dalam khazanah bacaan berbahasa Indonesia. Andai saja buku ini diterjemahkan pada tahun yang sama atau sebelum 2016, pembaca mungkin belum memiliki akses pada perdebatan bernas yang cukup keras, antara Henry Bernstein, Philip Mcmichael, dan Harriet Friedmann tentang Analisis Rezim Pangan yang diterbitkan oleh *The Journal of Peasant Studies* Vol. 43, No. 3.

Karena perdebatan tentang analisis rezim pangan tak mungkin dilepaskan dari keberadaan buku kecil di tangan Anda ini, sebagai pengantar membaca, kami mencoba mengajak untuk membayangkan serbasekilas saja cerita tentang perdebatan antara Bernstein, Friedmann, dan McMichael tentang analisis rezim pangan. Ajakan ini sekadar upaya untuk membuat kita bersama dapat mendudukkan argumentasi-argumentasi di dalam buku ini secara lebih jernih. Jernih dalam mengartikan perbedaan-perbedaan arah analisis yang mencuat dari buku ini, maupun jernih dalam memaknai posisi politik tulisan ini ke dalam aksi. Kemudian, dalam rangka mengantarkan buku ini, refleksi atas konteks Indonesia atau konteks negara-negara jajahan pada umumnya akan sedikit disinggung, karena sangat

mungkin pembaca kehilangan sangkutan diri pada teks akibat nasib Dunia Belahan Selatan kerapkali tertelan ceritanya oleh dominasi narasi tentang kuasa negara-negara digdaya dalam rezim pangan internasional.

Beberapa keberatan tentang arah, atau katakanlah, unsur pembentuk dari analisis rezim pangan datang pertama kali dari Henry Bernstein, seorang ahli agraria Marxis ternama dan penulis buku pertama yang diterbitkan dalam serial ini. Bernstein menyampaikan kritik cukup mendasar atas penggunaan rezim pangan sebagai metode analisis untuk memahami perubahan agraria global. Dengan sangat cermat, Bernstein (2016) mengurai delapan elemen dalam konsep rezim pangan dan memeriksanya satu per satu untuk memperlihatkan kegunaan yang canggih dari analisis rezim pangan, sekaligus menemukan kekosongan analisis pada satu-dua atau keseluruhan elemen tersebut. Misalnya, ia menggarisbawahi ketiadaaan kejelasan atas bentuk gerakan sosial seperti apa yang sesungguhnya memicu ketegangan dan kontradiksi sehingga memungkinkan terjadinya transisi dari rezim pangan satu ke yang lainnya. Selain itu, Bernstein juga menjadi pendebat keras dari konseptualisasi rezim pangan ketiga yang disebut McMichael sebaga Rezim Pangan Korporat. Menurut pandangannya, McMichael terjebak pada kategorisasi '*peasant*' secara politik, alih-alih mengupasnya secara analitis. Hal yang sama juga terjadi pada kategorisasi korporat yang terlalu struktural sehingga lebih berbau politis. Akibat dari 'politisasi' ini, Bernstein memandang bahwa analisis rezim pangan menghasilkan posisi biner semata-mata, bukan memperlihatkan kontradiksi internal dari proses akumulasi kapital pertanian. Langkah ini menutup kemungkinan untuk menghasilkan pertanyaan lebih jauh tentang dinamika kelas petani dan implikasinya pada transisi menuju rezim pangan ketiga. Bernstein mempertanyakan argumentasi McMichael yang

memosisikan gerakan petani untuk kedaulatan pangan sebagai penanding dari konsolidasi korporasi pangan dan pertanian, karena gerakan petani tersebut tidak diletakkan dalam analisis yang jernih tentang pendefinisian siapa yang disebut '*peasant*' dan dalam dinamika kelas seperti apa ia muncul.

Tentu saja kritik dan argumentasi yang disampaikan Bernstein tidak cuma itu, juga tidak sesederhana dan sesingkat itu. Banyak sekali dasar-dasar argumentasi disampaikan dengan sangat rinci dan sistematis yang justru sangat membantu pemahaman kita tentang daya kerja analisis rezim pangan. Oleh sebab itu, tidak kalah menarik sanggahan yang disampaikan oleh Philip McMichael atas kritik Berstein. Apalagi, dua perdebatan tersebut juga dibahas oleh Harriet Friedmann dengan sangat konstruktif.

McMichael mempertahankan argumentasinya tentang penyebutan rezim pangan ketiga sebagai rezim pangan korporat yang ditantang oleh politik kedaulatan pangan. Bagi McMichael poin tersebut menjadi poin kunci karena ia bisa menunjukkan bahwa ketika kerusakan ekologis akibat rezim pangan mulai dirasakan dampaknya dalam satu kurun historis, politik kedaulatan pangan muncul secara epistemik dan politik sebagai penanding dari sistem pangan yang berbasis relasi nilai atau relasi kapital dalam wujud agroindustri. Kapital agroindustri memiliki pengaruh besar dalam kemunculan institusi-institusi perdagangan global yang menundukkan kedaulatan nasional dan menyebabkan produksi makanan tak lagi diketahui asal muasalnya (Friedmann 2016: 664–665). Dengan kata lain, ia menandingkan cara ekonomi global menyubordinasi relasi produksi dan konsumsi pangan pada relasi nilai (harga terkendali, ekstraksi surplus terjamin) dengan cara-cara ekonomi lokal menghasilkan makanan yang lebih adil terhadap alam dan manusia. Baik McMichael maupun Friedmann me-

masukkan pertimbangan dan ulasan tentang bagaimana masalah lingkungan dan ekologi menjadi elemen penting dalam proses perubahan rezim pangan, meskipun mereka berpisah arah analisis ketika sampai pada peyimpulan apakah sudah terbentuk rezim pangan korporat-lingkungan sebagai rezim pangan ketiga. McMichael lebih condong meng-iya-kan adanya rezim pangan ketiga dengan menyebutnya sebagai rezim pangan korporat, sementara bagi Friedmann hal itu masih berupa pertanyaan terbuka.

Harriet Friedmann yang menulis bersama McMichael tentang rezim pangan sejak 1989, dan sebagai kawan intelektual yang menghargai Henry Bernstein sebagai ahli terkemuka dalam analisis masalah agraria dan perubahan agraria, menerima posisi sebagai pengulas debat dua kawan intelektual dengan sangat tidak enak, demikian pengakuan Friedmann. Hanya karena dilandasi oleh kepercayaan atas perkawanan yang kuat dan intelektualitas yang matang, maka perdebatan ini bisa dikembangkan oleh Friedmann menjadi percakapan meluas tentang transisi. Pisah-pandang antara Bernstein dan McMichael soal kapital, kelas, dan '*peasant*' bisa berakhir pada kesimpulan bahwa kalau rezim pangan ketiga sudah selesai dijelaskan, maka tidak lagi ia berguna dalam mendedahkan masalah agraria. Untunglah, Friedmann berhasil menarik keluar analisis rezim pangan dari potensi stagnasi tersebut. Dengan bernas ia mengajukan pertanyaan dalam hal apa rezim pangan masih berguna sebagai metode analisis?

Friedmann menunjukkan bahwa tekanan McMichael pada politik kedaulatan pangan perlu dipisahkan dari analisis rezim pangan, karena tidak membuka kesempatan untuk menelaah lebih jauh secara diakronis dan sinkronis berbagai elemen rezim pangan lainnya. Ia menganjurkan untuk memasukkan kembali metode McMichael, yaitu: 'perbandingan yang diinkorporasi-

kan' (*incorporated comparison*), untuk melihat lebih luas dan rinci elemen-elemen yang menyusun rezim pangan kontemporer dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Salah satu yang penting adalah bagaimana pengondisian saling dukung antara kapital dan kekuasaan terhadap korporasi pangan-pertanian (soal input, perdagangan, pengapalan, pengolahan, restoran, dan supermarket), terhadap praktik-praktik regulasi (standar, sertifikasi, buruh, masalah lingkungan), yang muncul bersamaan dengan hadirnya komoditas unggulan dan posisi penting/tidaknya pertanian secara nasional (Friedmann 2016: 674). Analisis atas elemen-elemen ini seakan dihablurkan oleh McMichael menjadi dua proposisi saja, yaitu: *food from nowhere vs. food from somewhere*. McMichael telah menanggalkan metodenya sendiri yang telah berkontribusi penting dalam analisis rezim pangan, itulah hal yang disayangkan oleh Friedmann.

Ketika mengaitkan analisis rezim pangan dengan masalah agraria, Friedman juga menunjukkan ada hal yang luput dari analisis Bernstein, yaitu masalah lingkungan dan ekologi. Bagi Friedmann, aspek tersebut bisa menjadi cara baru untuk melihat jalur linear perubahan menyejarah dari bertani (*farming*) menjadi usaha budidaya pertanian (*agriculture*) yang didasari oleh logika bagaimana kapital menginkorporasi *peasant*, seperti diajukan Bernstein. Jika dipandang secara sirkular, rezim pangan dapat menarik pelajaran berguna dengan menilik-ulang endapan sejarah yang tertinggal dari satu rezim ke rezim lainnya. Dalam hal perubahan historis dari bertani menjadi sektor usaha budidaya pertanian, Friedmann memandang analisis sejarah secara sirkular memungkinkan melihat adanya upaya-upaya untuk kembali ke bertani (*farming*) yang sekarang bermunculan di sana-sini sebagai sebuah gerak-balik, tapi dengan corak yang berbeda. Dengan demikian, arah linier menuju kapital industri pangan dan pertanian bukan jawaban

akhir. Pada titik itulah pertanyaan transisi menjadi penting untuk memanfaatkan analisis rezim pangan dalam mencari jawabannya.

Buku ini berada di tengah perdebatan teoretis yang sangat padat, namun pada bagian Pengantar ini terpaksa dipersingkat sedemikian rupa, juga terpaksa harus mereduksi banyak pengertian yang laiknya terbuka untuk eksplorasi lebih lanjut oleh pembaca. Eksplorasi lanjutan juga sangat dianjurkan untuk mempertimbangkan sejauh mana analisis rezim pangan ini bisa direfleksikan pada konteks Indonesia atau jejak sejarah kolonialisme di negara-negara bekas jajahan. Sering kali, kemampuan untuk bisa menemukan diri kita dalam sebuah narasi besar tentang dunia lebih memudahkan pemahaman atas hal-hal yang abstrak. Untuk membuka pintu ke arah penemuan itu, lagi-lagi secara serbasekilas, pengantar ini mencoba mengilustrasikan bagaimana kondisi pangan dan pertanian Indonesia bisa diceritakan dalam analisis rezim pangan internasional.

Sebagaimana disampaikan oleh Friedmann (1987), Friedmann dan McMichael (1989), serta McMichael (2009), analisis rezim pangan dapat membantu untuk memahami peran pangan dan pertanian dalam proses akumulasi kapital yang merentang dalam waktu dan ragam tempat secara global. Rezim pangan adalah sistem relasi, aturan, dan praktik yang membentuk struktur pembagian kerja internasional dan perdagangan pertanian dalam kapitalisme dunia sejak 1870-an, yaitu: ketika pertama kali dalam sejarah sistem pangan, sebuah produksi pangan pokok dilakukan secara masif dan ditransportasikan dalam jarak yang jauh dari petani-petani pemukim baru di Amerika Utara ke Inggris. Karena inilah, revolusi industri bisa memasuki fase kejayaan kedua dan menjadikan negara-negara Eropa Barat dan Amerika sangat hegemonik dalam percaturan kapital

industri dan perdagangan di dunia. Seterusnya adalah proses panjang memasuki rezim pangan kedua yang dikendalikan oleh hegemoni Amerika Serikat yang residunya masih cukup pekat hingga hari ini. Bagaimana nasib negeri-negeri nusantara pada masa-masa itu? Di manakah ia tersangkut di jejaring relasi produksi dan konsumsi pangan global?

Beberapa kata kunci dalam cerita tentang nusantara sampai dengan Indonesia bisa kita temukan kaitannya dalam analisis rezim pangan internasional, misalnya: a) pada Rezim Pangan Pertama (1870–1914): *Agrarisch Wet* 1870, pertanian monokultur dan perkebunan, produksi komoditas ekspor untuk industri, kuli kontrak dan buruh migran; b) pada Rezim Pangan Kedua (1945–1973): pelimpahan pangan (*food dumping*) oleh Amerika Serikat, revolusi hijau, diferensiasi kelas dan petani gurem, politik swasembada pangan; c) pada Rezim Pangan terkini: WTO, impor pangan, penggusuran dan perampasan tanah, ekspansi perkebunan sawit, dan *food estate*. Untuk menempatkan kata kunci-kata kunci ini dalam proses analisis rezim pangan, pembedahan Henry Bernstein (2016: 614) atas elemen-elemen yang menentukan, mendorong, membentuk, mendatangkan konsekuensi, menimbulkan ketegangan, krisis dan transisi dari sebuah rezim pangan ke rezim pangan lainnya, sangat membantu. Delapan elemen tersebut adalah: 1) sistem internasional negara; 2) pembagian kerja internasional dan pola perdagangan; 3) aturan dan legitimasi ideologis (Malthusian); 4) hubungan antara pertanian dan industri, termasuk perubahan teknis dan lingkungan pertanian; 5) bentuk dominan kapital dan akumulasinya; 6) kekuatan sosial ekologis; 7) ketegangan dan kontradiksi; dan 8) transisi antar-rezim pangan.

Tak cukup ruang di sini tentunya untuk mengoperasikan kedelapan elemen rezim pangan dalam rangka sekadar mengantarkan membaca diri dalam memahami dunia. Tapi seti-

daknya pada rezim pangan pertama, para pembelajar kajian agraria mungkin sudah cukup dekat dengan penjelasan-penjelasan bagaimana tanah Sumatera Timur diabdikan untuk menghasilkan tembakau, lalu getah karet, yang diekspor ke mancanegara, dengan mempekerjakan buruh migran dari Jawa dan Tiongkok, melalui pemberian hak *erfpacht* selama 75 tahun kepada pekebun dan perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh pemodal-pemodal luar negeri. Nasib Sumatera Timur ini mirip dengan wilayah-wilayah perkebunan karet di Amerika Selatan. Keduanya memasok getah karet yang diolah menjadi ban atau bahan lainnya yang memperlancar arus transportasi komoditas dan sirkulasi logistik di Eropa. Sumbangan seorang antropolog, Eric Wolf (1992), sesungguhnya dengan sangat baik menunjukkan bagaimana sistem perkebunan adalah kunci dari akumulasi kapital global dalam rezim pangan internasional, seperti dijelaskan pada bukunya yang berjudul *Europe and People Without History*. Dari pemetaan Wolf yang sengaja melakukan *decentering* terhadap Eropa, kita bisa mendapatkan narasi lengkap bagaimana Birma dan Thailand yang dikuasai oleh Inggris mulai memproduksi beras untuk diekspor ke India. Ternyata, pasokan pangan dari negeri tetangga tersebut telah memberi makan buruh industri kapas dan tekstil India dengan murah, sehingga memampukan India untuk terus-menerus membayar pungutan dan pajak yang menggemukkan kapital finansial di Inggris. Dalam cerita terakhir itu, spesialisasi regional untuk pergerakan komoditas—dalam istilah Wolf (1992)—mencerminkan sedikit banyak pembentukan beberapa elemen rezim pangan internasional, seperti: pembagian kerja internasional, hubungan antara pertanian dan industri, serta bentuk dominan kapital dan akumulasinya pada penghujung abad XIX dan awal abad XX yang terjadi di Asia dan Eropa.

Mungkin tak terbayangkan sebelumnya bahwa kuli Sumatera Timur senasib dengan *flagelados* (buruh karet migran) di Brasil, sama-sama sebagai tenaga kerja pelancar sirkulasi kapital industri pangan dan pertanian bagi Dunia Belahan Utara sana. Sementara itu, petani Birma, buruh India, dan para bankir di London berada dalam satu putaran sirkuit laba yang sama, hanya saja dalam posisi ekstraktif yang timpang. Imajinasi demikian ibarat tak henti ditarik ke sana-kemari oleh analisis rezim pangan, sangat mungkin bergerak dinamis sambil terus-menerus tersistematisasi. Oleh sebab itu, seperti disinggung di awal, buku ini tak mungkin berdiri sendiri. Ia perlu berada dalam sebuah percakapan meluas dengan beragam buah pikir lainnya yang dengan tekun mengeksplorasi bagaimana pangan dan pertanian menjadi bagian penting, kalau bukan pusat, dari proses akumulasi kapital yang terjadi secara mendunia. Setiap titik desa, setiap napas keluarga petani di tanah-tanah yang meradang, bisa jadi terjalin dalam rangkaian kecil dan besar rantai nilai yang menggemukkan dan melaparkan penduduk di sudut-sudut metropolis bumi. Seperti dikatakan Eric Wolf dua dekade lalu, kapitalisme adalah tentang kesalingterhubungan dan kekuasaan yang timpang; rezim pangan persis berguna untuk memahami tentang itu.

Laksmi A. Savitri
Koordinator Penerbitan

Pustaka

BERNSTEIN, H. 2016. "Agrarian Political Economy and Modern World Capitalism: The Contributions of Food Regime Analysis." *The Journal of Peasant Studies* 43 (3): 611–647. DOI: 10.1080/03066150.2015.1101456.

FRIEDMANN, H. 2016. "Commentary: Food Regime Analysis and Agrarian Questions: Widening the Conversation." *The Journal of Peasant Studies* 43 (3): 671–692. DOI:10.1080/03066150.2016.1146254.

___. 1987. "The Family Farm and The International Food Regimes." Dalam *Peasants and Peasantsocieties*, Second Edition, disunting oleh T. SHANIN, 247–258. Oxford (Inggris): Basil Blackwell.

FRIEDMANN, H. dan P. MCMICHAEL. 1989. "Agriculture and The State System: The Rise and Decline of National Agricultures, 1870 to the Present." *Sociologia Ruralis* 29 (2): 93–117.

MCMICHAEL, P. 2009. "A Food Regime Genealogy." *The Journal of Peasant Studies* 36 (1): 139–169.

___. 2016. "Commentary: Food Regime for Thought." *The Journal of Peasant Studies* 43 (3): 648–670. DOI: 10.1080/03066150.2016.1143816.

WOLF, E. 1992. *Europe and People Without History*. Berkeley (Amerika Serikat) dan London (Inggris): University of California Press.

BAB 1

Proyek Rezim Pangan

PROYEK rezim pangan adalah analisis yang tak pernah final, yang dikerjakan oleh para ilmuwan dan aktivis yang mempelajari geografi-politik sistem pangan dunia. Di setiap ujung rantai panjang pasokan pangan, para produsen dan konsumen kian awas akan jangkauan global dari sistem pangan abad XXI (Patel 2007). Para produsen, mulai dari para petani kontrak, pekerja migran dan buruh perkebunan, sampai petani kecil yang kehilangan tanah atas nama efisiensi sistem pangan dunia, sangat paham bagaimana tenaga kerja, sumberdaya, dan ruang hidup mereka melayani para konsumen di mana saja. Sementara para konsumen, yang bersantap di sepanjang mata-rantai pangan global, dari hamburger hingga bistik sapi, semakin dihadapkan pada disparitas antara 'pangan dari suatu tempat' (*food from somewhere*) dan 'pangan dari antah-berantah' (*food from nowhere*) (Bové dan Dufour 2001). Pokok bahasan dari proyek rezim pangan adalah bagaimana, melalui komodifikasi, rantai pangan mengikat dan mengubah beragam budaya dunia.

Konsep "rezim pangan" merupakan produk zamannya: era surutnya regulasi nasional dan menguatnya "globalisasi". Analisis mengenai rezim pangan memadukan konsep 'sistem dunia'-nya Wallerstein (1974) dan konsep 'regulasi akumulasi kapital' dari Michael Aglietta (1979). Analisis ini menempatkan kebangkitan dan kemerosotan pertanian nasional dalam sejarah geopolitik kapitalisme. Analisis ini bukan melulu tentang

pangan, melainkan soal perpolitikan dalam relasi rantai pangan. Definisi awal rezim pangan dirumuskan sebagai sesuatu yang mengaitkan "hubungan internasional dalam hal produksi dan konsumsi pangan dengan bentuk-bentuk akumulasi yang memilah periode-periode transformasi kapitalisme sejak 1870" (Friedmann dan McMichael 1989: 95). Periode-periode kapitalisme ditentukan dalam kerangka geopolitik, dan periodisasinya beriringan dengan dua momen berbeda dalam perkembangan negara-bangsa. Analisis ini menafsir kondisi-kondisi menyejarah yang memunculkan negara-bangsa melalui lensa perdagangan hasil pertanian-pangan (*agri-food*). Analisis ini dibangun dari pemikiran bahwa ekonomi nasional yang terpadu—tidak terdapat dalam strategi "pabrik dunia" (*workshop of the world*) ala Inggris—muncul di negara-negara pendudukan (*settler states*) Dunia Baru. Di sana, *sektor* pertanian dan industri nasional saling bergantung, yang satu membentuk yang lain.

Proyek rezim pangan muncul pada akhir 1980-an dalam konteks "denasionalisasi", yakni ketika negara-negara menghadapi prospek transformasi 'dari dalam' lewat penataan ulang struktur pertanian-pangan dalam skala global, dan 'dari luar' seiring diperdebatkannya prinsip-prinsip multilateral baru di Putaran Uruguay untuk Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariffs and Trade [GATT]) selama 1986–1994. Prinsip-prinsip ini mampu menyubordinasi negara di bawah relasi properti internasional yang muncul dalam penataan ulang pertanian-pangan. Setelah sedekade neoliberalisme, era ini menjadi momen transisi yang penting dalam pengorganisasian negara dan ekonomi, sistem politik, imperium, dan tatanan dunia. Strategi-strategi global korporasi transnasional sedang menggulung regulasi nasional dalam hal perdagangan usai Perang Dunia II. Istilah "globalisasi" berkembang dari sekadar berita bisnis di media massa menjadi

wacana akademik dan perdebatan publik. Sektor agrobisnis—baik yang bermain dalam input pertanian, perkebunan, dan pertanian kontrak, maupun dalam pengolahan dan distribusi—semakin mengendalikan rantai-rantai komoditas global yang memasok buah dan sayuran sepanjang tahun dari wilayah-wilayah yang berbeda musim. Menu makanan di Barat pun mengikuti perdagangan biji-bijian berskala global. Penataan ulang struktur pertanian-pangan telah melancarkan kekuatan-kekuatan digdaya yang mengintegrasikan rantai pangan, dengan melakukan standarisasi proses di banyak tempat atau membentuk ulang relasi spasial sebagai serentetan elemen yang dianekaragamkan dalam sebuah proses global bersama (McMichael 1994: 3). Dalam pemahaman ini, "globalisasi" merupakan proses yang bersifat 'membentuk' (formatif) dan 'bertentangan' (kontradiktif)—sebuah *mekanisme penataan ulang struktur*, bukan hasil akhir yang tak terhindarkan sebagaimana sering diasumsikan dalam wacana ilmu sosial maupun perdebatan awam.

Karena itu, proyek rezim pangan mencuat sebagai prakarsa metodologis untuk menghadirkan uraian spesifik mengenai hubungan antara penataan dunia dan perdagangan hasil pertanian-pangan. Proyek ini mengajukan klaim bahwa episode penataan ulang struktur dan proses transisi globalisasi terikat pada periode akumulasi yang stabil. Pada hakikatnya, ini adalah sebuah pendekatan *komparatif* atas sejarah dunia modern, dalam kerangka bahwa rezim pangan datang dan pergi dengan penataan ulang politik, dalam dinamika yang saling membentuk (antara pangan dan politik). Perbedaan dua rezim pangan pertama dapat dilihat pada peran penting pangan dalam menancapkan hegemoni global. Pada rezim pertama, proyek "pabrik dunia" ala Inggris mengaitkan keuntungan kapitalisme industri dengan perluasan kawasan pemasok pangan di selu-

ruh dunia. Pada rezim kedua, Amerika Serikat menggunakan bantuan pangan untuk membentuk aliansi, pasar, dan peluang bagi model pertanian industrial yang bersifat intensif. Hegemoni pasar membentuk rezim pangan ketiga beserta perannya dalam proyek neoliberal secara umum yang diarahkan untuk mengamankan perputaran uang dan komoditas (termasuk pangan) secara mendunia—dengan menggusur petani kecil agar menjadi pekerja musiman dunia bagi kapital. Rezim pangan memiliki dampak yang meluas dengan siklus tertentu serta meninggalkan jejak transisinya; kedua hal ini memberi tanda mengenai apa yang terjadi di baliknya, yakni bahwa sistem negara berakar kuat dalam relasi-relasi pertanian-pangan. Sebagaimana kini kita ketahui, pada abad XXI ini, peradaban tidak lagi punya fondasi yang lebih penting daripada ekosistem dan pasokan pangan. Sayangnya, penataan politik kontemporer mengabaikan hal ini sehingga membahayakan ekosistem dan pasokan pangan dan kita semua.

Analisis Rezim Pangan

Konsep "rezim pangan" awalnya dirumuskan oleh Harriet Friedmann (1987), yang berasal dari penelitian sebelumnya mengenai tatanan pangan internasional seusai Perang Dunia II. Di sana dia memetakan pasang surut program bantuan pangan Amerika Serikat sebagai senjata geopolitik dalam Perang Dingin (Friedmann 1982). Bukti mengenai stabilitas nisbi harga gandum dunia selama berlangsungnya program ini (1954 hingga 1970-an) mengingatkan pada penelitian mengenai episode serupa pengendalian harga gandum dunia pada akhir abad XIX (Friedmann 1978)—ketika itu Inggris memapankan diri dengan "imperium perdagangan bebas"-nya melalui impor pangan—dan khususnya negara-negara pendudukan yang mengeks-

por gandum dan daging. Penelitian mengenai 'masalah agraria' (*agrarian question*) dan munculnya negara pendudukan (McMichael 1984) menunjukkan bahwa dua episode ini saling terkait dan muncul berurutan, ditandai oleh berubahnya penguasa negeri jajahan: dari Inggris ke negara pendudukan yang paling kuat, yaitu Amerika Serikat. Pusat kendali ekonomi dunia kapitalis bergeser dari Inggris ke Amerika Serikat seiring surutnya kekuasaan Inggris dan kian matangnya ekonomi nasional Amerika Serikat dengan keberhasilan "penjinakan" benua itu. Proses pematangan sistem negara-bangsa ini sangat berhubungan dengan transformasi pertanian dan perannya dalam perdagangan pangan dunia.

Demikian, pada 1989, sebuah artikel yang kaya penjelasan berjudul "Agricultural and the State System: The rise and decline of national agricultures, 1870 to the present" terbit di jurnal *Sociologia Ruralis*. Dinyatakan bahwa artikel ini melakukan eksplorasi atas "peran pertanian dalam perkembangan ekonomi dunia kapitalistis, dan dalam lintasan sistem negara" (Friedmann dan McMichael 1989: 93). Alasan pemilihan fokus ini adalah pengaruh berkepanjangan pembangunanisme seusai Perang Dunia II, suatu pengaruh yang kini melemah karena menghadapi rentetan kritik dari pengkaji ketergantungan dan sistem-dunia. Dua klaim kunci dalam diskusi tersebut menunjukkan bentuk proyek rezim pangan. Aliran pembangunanisme konvensional menekankan posisi saling melengkapi antara sektor pertanian dan industri dalam "ekonomi nasional" modern sebagai sumberdaya pembangunan (Rostow 1960). Aliran ketergantungan menilai bahwa posisi saling melengkapi ini hanya tampak pada ekonomi "kapitalis maju", sementara ekonomi negara-negara pinggiran dibentuk oleh ketergantungan terhadap ekspor selama masa kolonial (Amin 1974; de Janvry 1981). Dinamika ekonomi Amerika Seri-

kat memang berasal dari dinamika "internal" semacam itu selama periode krisis dan transisi model "orientasi keluar" ala Inggris (pada awal abad XX). Meski begitu, konsep rezim pangan menekankan pada corak pertanian ekspor negara-negara pendudukan dan jajahan, dan dengan demikian dinamika hubungan antarsektor dalam ekonomi nasional ditampakkan sebagai perwujudan *ideal* bagi realitas sejarah yang jauh lebih rumit. Proyek-proyek pembangunan Amerika Serikat setelah Perang Dunia II memang mengumumkan "ekonomi nasional" sebagai tujuan universal (ideal) bagi negara-negara bekas jajahan (McMichael 1996).

Oleh sebab itu, analisis rezim pangan berporos pada peran Amerika Serikat dalam menyediakan pangan bagi Eropa, lalu bagi Dunia Ketiga, dari pertanian komersial yang ekstensif dan kemudian intensif, yang melintasi periode ketika ekonomi dunia dihegemoni oleh Inggris dan lalu oleh Amerika Serikat. Analisis rezim pangan tidak hanya tentang relasi produksi dan konsumsi internasional di bidang pertanian, tetapi juga mengenai peran pertanian komersial dalam proses pembentukan negara di era modern. Di sepanjang dua periode ini, rezim pangan menyediakan bahan baku dan pangan bagi kompleks-kompleks industri di kawasan urban yang tengah bertumbuh (di dalam maupun luar negeri), sehingga memperkuat industri nasional. Selama masa ini pula, pertanian di Dunia Baru (Benua Amerika) menjadi penentu bagi bertumbuhnya industrialisasi, pertama di negera-negara Eropa dan berikutnya di negara-negara Dunia Ketiga.

Dalam pemahaman ini, rezim pangan memelihara relasi pasar dan negara. Hal ini senantiasa dihubungkan dengan tatanan ekonomi politik internasional yang terlembagakan dalam era hegemoni negara (Inggris dan Amerika Serikat), dan belakang-

an dalam era dominasi organisasi dagang dunia World Trade Organization (WTO), sebagai organisasi beranggotakan negara, yang bertanggung jawab atas aturan-aturan perdagangan internasional. Dua tatanan dunia yang pertama (hegemoni oleh Inggris dan Amerika Serikat) masing-masing diatur dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas dan bantuan pembangunan (diiringi prinsip kebebasan wirausaha). Sementara sistem dagang yang muncul belakangan diatur dengan prinsip-prinsip neoliberal sembari mengadopsi kebebasan perdagangan dan wirausaha. Prinsip-prinsip ini telah diterapkan secara timpang, di mana para wirausaha tani korporat di Utara mendapatkan subsidi besar dengan mengorbankan petani di Selatan (melalui sistem pelimpahan [dumping] surplus pangan di pasar dunia). Petani di Selatan tidak lagi diberi perlindungan, dan di Selatanlah agrobisnis yang didominasi negara-negara Utara menikmati keleluasaan untuk bergerak secara mendunia.

Watak Rezim Pangan

Pertama, rezim pangan yang berpusat di Inggris (1870 hingga 1930-an) memadukan impor barang-barang tropis dari negeri jajahan ke Eropa, dengan impor biji-bijian dan ternak dari negeri-negeri koloni. Keduanya secara umum memasok kelas-kelas industrial yang sedang bertumbuh, dan khususnya menyokong "pabrik dunia" Inggris. Melengkapi pertanian monokultur yang dipaksakan di negeri-negeri jajahan, Inggris melakukan pencarian lahan di wilayah koloni untuk memproduksi bahan pangan pokok mereka pada pertengahan abad XIX, dengan mengeksploitasi lahan-lahan rintisan (*frontier*) di Dunia Baru. Pengembangan sektor pertanian komersial di negara-negara pendudukan (utamanya Amerika Serikat, Kanada, dan Austra-

lia) membentuk model bagi pengertian "pembangunan" pada abad XX, sebagai dinamika hubungan antara sektor pertanian dan industri.

Kedua, rezim pangan yang berpusat di Amerika Serikat (1950-an hingga 1970-an) mengubah rute aliran (surplus) pangan dari Amerika Serikat ke wilayah-wilayah jajahannya, yaitu negara-negara bekas jajahan di garis depan Perang Dingin. Surplus pangan—yang diperoleh dari program-program subsidi harga pangan hasil pertanian—telah memandu program bantuan pangan murah guna menyubsidi upah di industri manufaktur bagi negara-negara Dunia Ketiga terpilih. Hal ini menjamin loyalitas antikomunis dan pasar di negeri-negeri (bekas) jajahan. Negara-negara berkembang kemudian menerapkan model industrialisasi pertanian nasional ala Amerika Serikat, mengadopsi teknologi-teknologi Revolusi Hijau, dan melembagakan reforma agraria untuk meredam perlawanan petani dan melebarkan jangkauan relasi pasar hingga ke desa-desa. Sementara itu, agrobisnis mematangkan ikatan-ikatan transnasional di sektor pertanian, yang dipilah-pilah ke dalam serangkaian pertanian terspesialisasi yang dihubungkan oleh rantai-rantai pasokan global (misalnya, 'tatanan kompleks industri protein hewani' transnasional yang menghubungkan gandum/karbohidrat, kedelai/protein, dan penggemukan ternak). Dengan kata lain, sementara model pembangunan ekonomi nasional membentuk kerangka politik dekolonialisasi, "pembagian kerja internasional baru" dalam pertanian muncul di seputar rantai komoditas transnasional (Raynolds *et al*. 1993).

Ketiga, rezim pangan korporat (1980-an hingga 2000-an) memperdalam proses ini, dengan menggabungkan wilayah-wilayah baru ke dalam rantai protein hewani (misalnya Brasil/Tiongkok), memusatkan rantai-rantai pasokan yang beragam ke dalam suatu "revolusi supermarket" (Reardon *et al*. 2003),

dan memilah-milah kualitas dan standarisasi pangan untuk memenuhi kebutuhan menu pangan kelas-kelas yang berbeda. Dumping surplus pangan bersubsidi dari Utara (misalnya gandum, susu bubuk, daging) kian intensif di bawah aturan-aturan liberalisasi WTO, menyingkirkan petani yang "takefisi-en", menciptakan penduduk kawasan kumuh yang terusir dari desa-desa, sekaligus memunculkan gerakan-gerakan tandingan oleh petani, nelayan, penggembala, dan buruh tani tunakisma. Sebuah prinsip penyatu, 'kedaulatan pangan', mengadvokasi kebijakan demokratis mengenai hak-hak petani, keamanan pangan lokal, dan pertanian ekologis demi kesehatan tanah dan manusia. Terilhami baik oleh cita-cita sosial atau oleh tekanan politis (ekologis) dari suatu sistem pangan yang bergantung pada bahan bakar fosil, gerakan tandingan semacam itu menunjukkan kian mendalamnya krisis pertanian industrial.

Masing-masing periode, dan transisi yang berlangsung di antara periode-periode itu, telah mengubah kerangka politik pembangunan berikut cakupan dan posisi penting teknologi pertanian dan pangan, termasuk dampak-dampaknya di masa depan (terkait keberlanjutan lingkungan, akses dan keamanan pangan, energi, hak kekayaan intelektual (HKI), penggusuran, gizi, dan kesehatan masyarakat). Dalam pengertian ini, konsep rezim pangan menawarkan suatu lensa analisis historis-komparatif yang unik mengenai relasi-relasi politis dan ekologis dalam era kapitalisme modern.

Setiap rezim pangan memang punya corak kelembagaannya sendiri, tetapi elemen-elemen dari rezim-rezim sebelumnya dibawa oleh rezim-rezim penggantinya, tentu dengan perumusan ulang. Rezim pangan akhir abad XIX berperan penting bagi perkembangan pasar dunia—hal ini dimungkinkan oleh manipulasi Inggris terhadap standar [nilai] emas. Jika demikian, maka krisis rezim pangan pada awal abad XX memun-

cak pada tuntasnya transisi sistem antarnegara (dengan dekolonisasi) di bawah hegemoni Amerika Serikat—melalui sebuah rezim pangan baru yang memadukan blok antikomunis dengan bantuan dan investasi untuk mengamankan proses pembangunan bangsa seusai penjajahan. Sebagai penerus, rezim pangan korporat memadukan elemen-elemen dari rezim-rezim sebelumnya, memulihkan prinsip pasar dunia melalui sebuah simpul kontradiktif antara proteksionisme sektor pertanian Utara dan liberalisasi sektor pertanian dan pasar pangan di Selatan. Prinsip penataan baru neoliberal melibatkan subordinasi terang-terangan negara oleh pasar serta sebuah rezim yang bersandar pada komodifikasi penyediaan pangan. Rezim inilah yang menjadi basis bagi konsep "rezim pangan kapital" dari Araghi (2003), yang didasarkan pada relasi-relasi nilai global—pertama kali muncul dalam rezim pangan yang berpusat di Inggris lalu tampak lagi pada akhir abad XX (bandingkan, McMichael 1999). Meskipun regulasi perdagangan pangan—yang dimungkinkan oleh mata uang internasional (poundsterling/emas dan dolar/emas)—boleh jadi merupakan fokus awal analisis rezim pangan, hal ini membutuhkan penelusuran lebih lanjut mengenai relasi-relasi nilai yang menyokongnya, atau dinamika akumulasi, yang memungkinkan pembentukan simpul negara/pasar di masing-masing tatanan pangan dunia, termasuk relasi teknologi, finansial, tenaga kerja, dan ekologis.

Metode Rezim Pangan

Menyatakan bahwa rezim pangan terbentuk melalui berderet relasi negara/pasar, berarti secara sederhana menggarisbawahi dimensi politik dari pasar. Tetapi ini akan tetap bersifat abstrak sampai kita melihat secara spesifik hubungan negara/

pasar dalam waktu dan ruang tertentu. Analisis atas rezim pangan sejauh ini berfokus pada titik-titik koordinat waktu dan ruang yang berhubungan dengan relasi temporal dan spasial berbasis Anglo-Amerika—sangat mungkin karena titik-titik koordinat ini telah membentuk tatanan dunia kontemporer dan/atau bagaimana kita memikirkan tatanan semacam itu. Titik-titik koordinat ini kehilangan posisi penting dalam dunia masa kini yang berkutub jamak, dan karenanya konsepsi rezim pangan awal mengalami transformasi seiring pengalaman kita menghadapi transisi dan ketakmenentuan besar-besaran yang mendunia.

Apakah analisis rezim pangan akan mengerjakan tugas menafsir perkembangan terbaru, itu bergantung pada bagaimana analisis ini digunakan. Analisis ini kebanyakan telah digunakan sebagai penanda periode bagi tatanan pertanian-pangan yang nisbi stabil. Bill Pritchard (2007: 8) melihatnya sebagai sebuah "alat melihat ke belakang. Analisis ini dapat membantu menata dan menyusun realitas politik pangan global kontemporer yang berantakan, tetapi penerapannya harus bersandar pada situasi masa depan yang sedang berjalan dan belum dapat diketahui." Situasi masa depan itu masih terbuka terhadap interpretasi, khususnya karena periode transisi juga mengekspresikan patahan rezim sebelumnya sebagai konsekuensi dari ketegangan struktural dan diskursifnya. Karena analisis rezim pangan berawal dari relasi-relasi negara/pasar, periode transisi akan mengikutkan transformasi dalam relasi-relasi tersebut, sebab transformasi-transformasi itu merupakan syarat yang memungkinkan pengorganisasian dan pemanfaatan pertanian global. Meskipun perseteruan sosial dan politik bisa bersifat kontekstual, perhatian rezim pangan pada relasi-relasi ekonomi-politik yang mencuat dan ketegangan-ketegangan yang dihasilkannya tetap membantu mengorganisir

pemahaman kita mengenai parameter-parameter dan apa yang sedang dipertaruhkan. Inilah yang akan kita lihat secara menyejarah.

Proyek rezim pangan melakukan penyejarahan dengan merinci tatanan politik pertanian-pangan yang dibentuk oleh, dan membentuk, dinamika akumulasi tertentu. Dalam pemahaman ini, rezim pangan dan sejarah kapital dapat dipahami sebagai dua hal yang saling membentuk. *Secara formal*, konsep rezim pangan mendefinisikan sebuah tatanan dunia kapitalistis yang dikendalikan oleh aturan-aturan yang menyusun struktur produksi dan konsumsi pangan dalam skala global (Friedmann 1993: 30–31). *Secara substantif*, konsep rezim pangan meletakkan perhatian pada pembentukan kekuasaan melalui sirkuit pangan yang dihasilkan oleh relasi-relasi produksi dan akumulasi kapital yang spesifik secara historis. *Secara abstrak*, rezim pangan dapat dipahami sebagai "wajah politik dari relasi-relasi nilai global yang bersifat menyejarah" (Araghi 2003: 51). Ini mengacu pada pembentukan struktur politik kapitalisme dunia, dan pengorganisasian pertanian untuk menyediakan tenaga kerja dan/atau konsumen dengan cara tertentu guna mengurangi upah sekaligus meningkatkan laba. *Secara konkret*, rezim pangan mencerminkan sebuah lintasan dunia-historis tertentu di mana serangkaian aturan menentukan suatu hubungan yang mengendalikan harga dunia untuk penyediaan pangan.

Aturan-aturan semacam itu mengekspresikan bentuk-bentuk historis penggunaan kekuasaan, melalui ideologi yang membentuk legitimasi, seperti pasar bebas, bantuan pembangunan, dan kebebasan wirausaha. Tiga periode semacam itu telah teridentifikasi, beriringan dengan lintasan ekonomi-geopolitik yang didominasi oleh Inggris (1870-an sampai 1930-an), Amerika Serikat (1950-an sampai 1970-an), dan kekuatan

korporat-keuangan (1980-an sampai 2000-an). Tatanan kekuasaan di masing-masing periode ini cukup bisa dikenali, dicirikan oleh adanya pengorganisasian produksi dan sirkulasi pangan dunia untuk mempertahankan tatanan kekuasaan tersebut, yang berakar dalam dinamika akumulasi tertentu. Dua klaim yang menyusul adalah: (1) kapitalisme tidak melewati jalur linear, tetapi melibatkan siklus akumulasi yang diorganisasikan secara politis; dan (2) relasi-relasi pertanian pangan menempati posisi sentral dalam beragam pengorganisasian politis tersebut sejauh mereka mampu mempertahankan prasyarat-prasyarat material dan legitimasinya. Klaim tambahan yang akan diurai di bawah yakni bahwa rezim pangan bersandar pada berbagai bentuk penutupan akses atas tanah (*enclosure*) di berbagai ruang dan waktu—konsisten dengan sejarah kapital. Dimensi ini sangat penting, sebab penutupan akses atas tanah mengubah relasi ekologis: mengganti proses ekstraktif lokal menjadi proses ekstraktif global, sehingga menggadaikan masa depan lokal untuk masa depan kapitalis yang dikendalikan oleh pasar yang luwes sekaligus takstabil, alih-alih bertahan melayani kebutuhan sosial-ekologis.

Karakteristik Rezim Pangan

Disebut "proyek rezim pangan" karena analisis ini menekankan daya adaptasi analisis rezim pangan. Khususnya, daya adaptasi ini meliputi evolusi konseptual oleh sejumlah pengkaji (yang juga diusahakan buku ini) serta penerapannya dalam proses atau kemunculan-kemunculan sistem tertentu. Hal ini dilakukan guna menempatkan dan memperjelas dampak-dampak historis atau politisnya yang lebih luas. Richard Le Heron dan Nick Lewis (2009: 346), misalnya, menyatakan: "Biasanya, abstraksi dalam teori-teori rezim menyokong pemahaman mengenai dunia yang

mengeksklusi subjek dan subjektivitas .... Literatur awal tentang rezim pangan dan sejumlah karya berikutnya secara khas dicirikan dengan dorongan untuk merinci perbedaan berbagai rezim—dengan risiko mengaburkan keberagaman dan kecairan dari berbagai relasi, aktor, standar pengukuran, penerjemahan, dan konteks." Peringatan ini akan diulas lebih lanjut nanti.

Sementara itu, Friedmann mendefinisikan rezim pangan sebagai sebuah "struktur aturan terkendali bagi produksi dan konsumsi pangan dalam skala global" (1993: 30–31). Bagaimana aturan-aturan tersebut muncul dalam proses pembentukan relasi-relasi global dalam produksi dan konsumsi pangan akan diulas lebih terperinci di bab selanjutnya. Di titik ini cukuplah menyatakan bahwa aturan-aturan tersebut memperlihatkan hasil pertarungan serta negosiasi sosial dan kelembagaan dalam proses pembentukan serangkaian ketentuan pemenuhan pangan serta dalam kontestasi kekuasaan yang berkaitan. Friedmann (2005: 234) berargumen bahwa "rezim pangan mencuat dari pertarungan antara gerakan sosial dan lembaga-lembaga digdaya, juga mencerminkan suatu kerangka yang dinegosiasikan untuk melembagakan aturan-aturan baru. Deretan hubungan dan praktik dalam sebuah rezim akan segera tampak alami. Ketika rezim berjalan dengan sangat mapan, konsekuensi-konsekuensi dari berbagai tindakan akan dapat ditebak, dan rezim itu pun beroperasi seolah tanpa aturan."

Definisi tentang 'aturan terisat' (*implcit rule*) itu mengisyaratkan hadirnya kompromi kelas, atau berlangsungya hegemoni dari proses normalisasi, dengan mana relasi-relasi pangan global membentuk struktur ekonomi dunia dan elemen-elemen penyokongnya di masa tertentu dengan cara tertentu, sehingga tampak rasional. Dengan begitu, rezim pangan pertama yang berpusat di Inggris dikerangkakan di dalam:

> suatu retorika umum mengenai perdagangan bebas dan cara kerja standar [nilai] emas. Pasar gandum dunia yang berkembang pada dekade-dekade setelah 1870 sebenarnya bukan cita-cita semua orang. Tetapi pengiriman gandum secara internasional memungkinkan para aktor mewujudkan apa yang betul-betul mereka inginkan .... Gandum menciptakan pendapatan bagi rel kereta dari jasa pengiriman, memperluas wilayah negara demi merebut teritori dari mereka yang digusur, dan menciptakan diaspora orang Eropa yang datang untuk mencari kerja. (Friedmann 2005: 231–232)

Dengan gandum sebagai utasnya, rezim pangan ini menyambungkan para petani pemukim asing (*settler farmers*) [di Amerika Serikat] dengan konsumen industrial (perusahaan-perusahaan dan para pekerja berupah) di seberang Atlantik [Inggris]. Lewat suatu proses pembentukan-negara [Amerika Serikat], pengorganisasian lahan-lahan baru untuk gandum membentuk sumber penyediaan pangan bagi tenaga kerja pabrik yang sedang bertumbuh dan membutuhkan pangan murah, dan sebaliknya. Akhirnya, pembangunan di kawasan-kawasan rintisan (*frontier*) ini—yang dilancarkan demi mendapatkan pangan murah—melayani kepentingan kapital, khususnya kebutuhannya untuk mereproduksi tenaga kerja dengan ongkos murah. Tata aturan implisit itu berkaitan dengan pematangan relasi-relasi perdagangan internasional (melampaui yang sebelumnya berupa perdagangan langsung dalam sistem kolonial), dipicu oleh penghapusan Undang-Undang Gandum (*Corn Laws*)—yang melindungi petani Inggris dari impor produk pertanian—dan difasilitasi oleh standar emas dan manipulasi neraca sterling di pusat keuangan City of London untuk mempertahankan dan meluaskan hubung-

an dagang (McMichael 1984). Pembagian kerja internasional yang membentuk sistem kolonial telah memperdalam dan mempercepat laju perdagangan antarnegara, menjadi aturan tersirat utama yang menyokong rezim pangan. Ini sejalan dengan prinsip "keunggulan komparatif" Ricardian, bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada bagaimana bangsa-bangsa melakukan spesialisasi dalam produksi dan perdagangan produk sesuai dengan cadangan sumberdaya yang mereka miliki.

Gagasan Friedmann mengenai aturan tersirat merupakan metode subtil untuk menyatakan bahwa rezim pangan mencakup suatu periode yang berisi "serangkaian hubungan yang nisbi stabil," dengan "sesekali terjadi periode-periode takstabil yang dibentuk oleh pertarungan politik guna memenangkan cara baru untuk bergerak maju" (Friedmann 2005: 228). Artinya, di bawah kondisi historis tertentu, apa yang berlaku bukanlah ekspresi terbuka yang mewakili kepentingan satu pihak, melainkan abstraksi dari pertarungan politik di antara kelompok-kelompok sosial yang berseberangan. Meski demikian, kekuasaan di era kapitalis utamanya terletak pada relasi kepemilikan pribadi dan kekuatan komodifikasi. Sehingga, walaupun masing-masing episode mencerminkan pertarungan yang berbeda seiring perubahan lanskap sosial dan ekologis, akhirnya politik kapitallah yang membentuk kerangka resolusinya. Dengan begitu, pangan murah adalah syarat bagi akumulasi kekuasaan (bandingkan, Moore 2012). Pangan murah tidak hanya menyangkut penurunan ongkos untuk upah tenaga kerja, tetapi juga membangun legitimasi bagi tatanan sosial-politik tertentu, baik untuk mencukupi kebutuhan berbagai kelas di negara-negara industri Eropa, membantu industrialisasi negara-negara Dunia Ketiga di garda depan Perang Dingin,

maupun untuk memasok pabrik-pabrik pengolahan pangan dan "revolusi supermarket" di era neoliberal yang melejitkan angka obesitas (Reardon *et al*. 2003). Masing-masing rezim punya syarat tertentu bagi pengadaan pangan murah, dan rangkaian hubungan yang nisbi stabil di masing-masing rezim terwujud dalam tatanan harga dunia yang mengendalikan produksi, sirkluasi, dan konsumsi pangan.

Fokus Friedmann bergeser ke pertarungan sosial, dan pematangan aturan-aturan tersirat melunakkan konsepsi awal kalangan strukturalis mengenai rezim pangan. Konsepsi awal itu telah menggabungkan gagasan dari teori regulasi dengan gagasan dari pendekatan sistem-dunia. Teori regulasi menawarkan gagasan tentang suatu "corak regulasi" yang mengekspresikan sebuah lingkungan kebijakan yang kondusif bagi "rezim akumulasi" dan upaya normalisasinya (Aglietta 1979). Dalam rumusan ini, rezim pangan mencerminkan suatu tatanan stabil yang mengatur relasi-relasi pangan internasional yang diarahkan untuk mendukung bentuk akumulasi tertentu. Maka, penekanan pada pengurangan biaya upah buruh pabrik Eropa pada akhir abad XIX dengan menyediakan pangan murah dari negara-negara jajahan dan negara-negara pendudukan menandakan sebuah rezim "akumulasi ekstensif". Pada pertengahan abad XX, sebuah rezim "akumulasi intensif" yang baru menyertakan industrialisasi pertanian sebagai bagian dari model kapitalisme konsumen ala "Fordis". Di sini akumulasi bergantung pada produksi massal pangan olahan/tahan lama, ketimbang hanya mengurangi biaya upah pekerja. Pendekatan sistem dunia berfokus pada konstruksi dan rekonstruksi pembagian kerja internasional dan geopolitik penyediaan pangan internasional di masing-masing periode. Konsep rezim pangan menggabungkan dua aliran ini, utama-

nya menekankan bagaimana hubungan pembangunan pertanian dengan pembentukan negara menjadi dasar untuk memahami kebangkitan dan keruntuhan suatu tatanan dunia secara periodik.

Para penganut pendekatan regulasi telah mendapat kritik dari para pemikir pascamodern dan neoempiris yang menganggap analisis rezim pangan sebagai narasi besar yang menyeragamkan dan mencampuradukkan pertanian dan industri, sebelum mereka bergerak mundur untuk menelaah studi-studi kasus pertanian pangan lokal yang bersifat anomali (bandingkan, Goodman dan Watts 1994, 1997)—"partikularisme pertanian" membuang bak mandi bersama bayinya (Araghi 2003: 51). Para kritikus ini terburu-buru mencirikan rezim pangan sebagai globalisme abstrak, sehingga luput melihatnya sebagai suatu teori historis yang mengurai sejarah politik kapital taklinear melalui lensa komodifikasi pangan dalam skala dunia. Sementara pascamodernisme mempromosikan lokalisme abstrak, konsep rezim pangan menjadikan konkret relasi-relasi historis antara pembentukan negara, kolonisasi lahan di wilayah terhuni dan rintisan, sirkuit pangan, industrialisasi pertanian, pembentukan pola konsumsi, strategi korporasi transnasional, gerakan pangan dan agraria tandingan, dan masih banyak lagi (simak penjelasan selanjutnya). Dengan menolak lokalisme abstrak (pascamodernisme) dan globalisme abstrak (analisis sistem-dunia), rezim pangan merupakan kerangka komparatif yang tidak punya makna di luar titik koordinat dunia-historisnya (Araghi dan McMichael 2006). Ini tidak hanya menyangkut pertanian, atau geografi pedesaan, proyek rezim pangan berupaya mengkonseptualisasikan bagaimana relasi-relasi pangan tertentu yang kompleks (dari teknologi benih, sistem budidaya, hingga pengolahan pangan) dan sirkulasi pangan di masing-masing rezim menyokong ker-

ja kekuasaan tertentu dalam meluaskan dan mempertahankan dominasi pasar dan ideologi.

Relasi-relasi kuasa dalam sistem negara melibatkan mobilisasi sosial. Para petani, pekerja, dan konsumen bergabung dengan perusahaan dan negara (juga lembaga-lembaga multilateralnya bila relevan) dalam pembentukan dan pembentukan ulang rezim pangan. Dengan memberi penekanan pada mobilisasi, Friedmann (2005: 229) menggeser fokus ke transisi-transisi rezim, di mana gerakan-gerakan sosial bertindak sebagai "mesin penggerak pembentukan rezim sekaligus krisis rezim." Dengan demikian, dia menunjukkan peran kunci para buruh dan petani dalam pembentukan rezim pangan "kolonial-diasporik" dan "industrial-merkantilis". Rezim pertama turut dibentuk oleh pemberontakan kelas pekerja dan migrasi mereka ke wilayah-wilayah koloni, di mana para pemukim asing membentuk keluarga-keluarga petani perintis. Para petani perintis ini, menurut Friedmann (2005: 236), "bisa ada hanya karena perdagangan internasional, dan akan merasakan penderitaan paling hebat dari keruntuhan rezim tersebut." Terburainya rezim ini selama kejatuhan harga biji-bijian dan kekeringan pada dekade 1930-an telah menciptakan "tipe dan makna baru politik pertanian" yang menekan negara Amerika Serikat untuk menstabilkan tindakan-tindakan mereka, dan itu tampak dalam penamaan "merkantilis" di rezim pangan kedua. Rezim kedua ini dibangun dengan fondasi program-program bantuan dan perlindungan pertanian yang mendorong industrialisasi pertanian di belakang perlindungan tarif. Hal ini kemudian menciptakan surplus hasil pertanian yang digunakan untuk program bantuan pangan. Friedmann lantas menempatkan fondasi bagi rezim pewaris berikutnya, yakni rezim "korporat-lingkungan" (*corporate-environmental*), di mana Friedmann mengidentifikasi kontradiksi dalam "kapitalisme hi-

jau". Di dalam "kapitalism hijau" inilah "satu putaran baru akumulasi muncul di sektor pertanian pangan, yang berbasis pada pengambilalihan secara selektif tuntutan-tuntutan gerakan lingkungan, termasuk isu-isu yang disuarakan oleh para aktivis 'perdagangan adil' (*fair trade*), kesehatan konsumen, dan perlindungan hewan" (Friedman 2005: 229).

Penamaan ulang rezim-rezim ini oleh Friedmann cukup mencuri perhatian karena permainan pasangan kata dalam penamaan tersebut. Di rezim pertama, bila istilah "kolonial" punya konotasi *residual* (sesuatu yang tersisa dari era sebelumnya), "diasporik" menandakan migrasi petani ke wilayah-wilayah rintisan ekonomi dunia dan dengan begitu menggagas *kemunculan* suatu dinamika politik yang menjelaskan gelar "merkantilis" bagi rezim berikutnya. Gelar "industrial" mengantisipasi sistem pangan korporat yang bangunan rezimnya masih dalam proses pembentukan, dengan mengambil alih sejumlah simbol dan tuntutan gerakan lingkungan. Pasangan kata-kata ini mengemban tugas untuk mengidentifikasi ketegangan-ketegangan kunci di dalam masing-masing rezim pangan. Untuk rezim pertama, pemilahan penjajah/pemukim-asing merujuk pada proyek baru pembentukan-negara di 'pinggiran' Eropa yang kelak menjadi kekuatan hegemonik. Terkait rezim kedua, pelimpahan-surplus-makanan yang dikelola negara sebagai bantuan (dumping) nantinya akan digantikan oleh penyatuan transnasional yang terbentuk dari dinamika industri pertanian. Dan terkait rezim ketiga, pertarungan terus berlangsung dalam mengusahakan standar-standar mutu dan lingkungan. Pasangan kata-kata ini mencirikan ketegangan-ketegangan sosio-politik masing-masing rezim.

Bagi Friedmann, rezim "korporat-lingkungan" belum terwujud. Sebab, belum ada kondisi-kondisi yang menyerupai-rezim sebagaimana terdefinisikan dalam kepustakaan Organisasi-Or-

ganisasi Internasional (Krasner 1983). Kondisi-kondisi menyerupai-rezim itu yakni "serangkaian hubungan, norma, lembaga, dan aturan spesifik (kadang tersirat), yang menjadi simpul bagi ekspektasi semua aktor yang relevan" (Friedmann 2009: 335). Secara khusus, rezim korporat-lingkungan versi Friedmann tidak punya mata uang internasional (hegemonik) yang berperan menstabilkan pasar, yang mengatur perdagangan dalam dunia yang berkutub jamak (Friedmann 2009: 399). Maka: "uang semakin takstabil dan berbahaya. Ini berhubungan langsung dengan kekuasaan antarnegara, yaitu konflik-konflik perebutan hegemoni yang tak kunjung usai" (Friedmann 2009: 388). Inti pernyataan Friedmann adalah bahwa rezim ini baru mulai terbentuk (dengan masa depan yang belum pasti), karena ketiadaan mekanisme pengaturan keuangan yang mengelola hubungan-hubungan dagang di antara negara-negara, juga karena Friedmann (2009: 340, catatan kaki) memiliki "keraguan [mendalam] akan kemampuan kapital untuk mengatur diri sendiri."

Terdapat beberapa isu sekaligus di sini. Pertama, di seluruh periode rezim pangan, kapital telah mentransformasikan dirinya sendiri dan sistem negara. Pada saat bersamaan, mata uang sterling dan dolar memainkan peran penting dalam menata sistem negara: sterling menyuntikkan pinjaman-pinjaman kepada negara melalui rekayasa perhitungannya di London, dan dolar menetapkan nilai tukar mata uang melalui sistem Bretton Woods (Block 1974). Kedua, dolar telah beroperasi sebagai mata uang utama dunia sejak awal 1970-an, direkayasa sedemikian rupa oleh kebijakan keuangan adidaya, yang sedang surut, untuk menarik kapital ke Amerika Serikat (Arrighi 1994). Ketiga, penyediaan pangan di bawah rezim pangan yang berpusat di Amerika Serikat saat itu dikelola melalui kebijakan pelimpahan surplus (*Public Law*-480) dalam

perdagangan bilateral. Hal ini menghasilkan deposit dana dampingan di bank-bank negara penerima yang meminggirkan sistem moneter Bretton Woods. Keempat, perdagangan pangan selama era rezim pangan "korporat" (1980-an hingga 2000-an) dibentuk oleh kebijakan-kebijakan penyesuaian struktural dan kesepakatan-kesepakatan dagang bilateral (North American Free Trade Agreement [NAFTA]) dan multilateral (WTO) sesuai dengan sistem dolar. Dan kelima, pergerakan pangan dalam jumlah besar kini berlangsung di dalam dan di antara anak-anak perusahan korporasi transnasional. Hal ini dimungkinkan oleh aliran keuangan internasional yang dipereteli regulasinya (deregulasi), termasuk pada jasa-jasa keuangan mereka sendiri (lihat, misalnya, Pritchard dan Burch 2003). Bahkan Burch dan Lawrence (2009: 277) menyatakan: "proses finansialisasi inilah yang 'membentuk kerangka' proses-proses sosial lainnya." Pernyataan ini menubuatkan terjadinya penataan ulang struktur rezim pangan korporat (Bab 6), yang memang sudah tampak dalam upaya-upaya supermarket memberagamkan ritel dan saham investasinya, juga melalui pencaplokan lahan besar-besaran (*land grabbing*) untuk tujuan spekulasi keuangan.

Relasi-relasi tersebut memiliki daya adaptasi di sepanjang era modern. Dengan daya adaptasi itulah berbagai rezim pangan mengekspresikan hubungan-hubungan secara spesifik dalam titik koordinat ruang/waktu rezim-rezim itu sendiri, dengan beragam model pembentukan struktur yang bisa berubah-ubah. Stabilitas menjadi nisbi bagi periode-periode historis yang berbeda, dan "kovergensi" dapat terwujud secara kokoh, sebagaimana terwujud dalam harga pangan dunia, dalam tatanan pertanian pangan yang mungkin atau tidak mungkin berporos pada satu mata uang dominan atau hegemonik. Dalam pengertian ini, "rezim pangan korporat" (McMichael 2005) bergantung pada penerapan prinsip-prinsip pasar neoliberal

oleh negara-negara dalam rangka menjalankan privatisasi sesuai mandat penyesuaian struktural dan kesepakatan-kesepakatan perdagangan bebas—sebagai alternatif terhadap mata uang internasional yang hegemonik dan stabil. Fakta ketimpangan mencolok terkait kemampuan Uni Eropa dan Amerika Serikat dalam mempertahankan subsidi pertanian (menggantikan jaminan harga-harga komoditas pertanian dengan suatu harga dunia), menunjukkan relasi-relasi kuasa yang mengelola pasar komoditas selama sekitar seperempat abad. Secara sistematis, neoliberalisme menggantikan perdagangan-dengan-mata-uang-teregulasi, dengan memaksakan "suatu bentuk ekstrem rezim perdagangan bebas internasional baik untuk aset tetap (semisal barang dan jasa) maupun aset tak berwujud (seperti investasi utang, saham, dan obligasi)," serta HKI, dengan tata kelola finansial internasional bergeser "dari negara ke lembaga-lembaga 'swasta' seperti Bank of International Settlements" (Nesvetailova dan Palan 2010: 7–8).

Pertanyaannya kemudian, apakah prasyarat yang menstabilkan suatu rezim: perdagangan, mata uang, atau relasi produksi pertanian-pangan beserta realisasinya melalui perdagangan? Rezim bantuan pangan yang berpusat di Amerika Serikat tentu akan memenuhi kriteria yang terakhir—mengingat bahwa perdagangan pangannya, dengan harga-harga khusus, telah menstabilkan harga-harga pangan dunia (Tubiana 1989). Demikian pula, pasar gandum dunia pada akhir abad XIX ditandai oleh jatuhnya harga, sebagaimana terlihat pada 1990-an ketika harga pangan pokok dunia jatuh ke titik terendah setelah 150 tahun (*The Economist*).

Isu stabilisasi itu menerangkan pandangan Pritchard bahwa kita belum bisa melihat rezim pangan ketiga. Baginya, pertanyaan kunci bagi para pengkaji rezim pangan adalah "bagaimana melakukan teorisasi atas peleburan pertanian ke

dalam WTO." Dia tidak melihat WTO sebagai mekanisme kelembagaan bagi tata kelola pasar untuk relasi-relasi antara pangan dan masyarakat, melainkan sebagai suatu "warisan dari politik masa krisis rezim pangan kedua yang berpusat di negara, ketimbang mewakili sesuatu yang diasumsikan sebagai pelanjut," juga menganggap kegagalan Putaran Doha pada 2008 sebagai penanda kegagalan untuk melembagakan "aturan pasar tanpa penghalang" (Pritchard 2009: 297). Artinya, Kesepakatan Pertanian (*Agreement on Agriculture* [AoA]) WTO telah membawa warisan proteksi bagi petani di Utara, walaupun mengklaim telah melakukan liberalisasi sistem pangan dunia—suatu argumen yang juga dikembangkan Winders, yang berfokus pada kebijakan pertanian intervensionis Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemoni (Pritchard 2009). Pritchard (2009: 301) menilai:

> selama lima tahun pertama setelah berakhirnya Putaran Uruguay, efek utama dari memasukkan pertanian ke dalam WTO bukanlah penataan ulang pertanian global agar sesuai dengan rasionalitas pasar, tetapi mempertajam ketimpangan peluang dalam sistem pangan dunia. Kombinasi dari restrukturisasi aturan yang dipaksakan dan keberlanjutan program-program subsidi di sebagian besar negara OECD telah memperkuat kuasa atas pangan dunia di tangan kepentingan elite Utara.

Tentu di sinilah poinnya, bahwa WTO adalah peranti tambahan, di luar kebijakan-kebijakan penyesuaian struktural, untuk menata ulang struktur relasi-relasi pertanian dan perdagangan dunia, sehingga mendorong "suatu 'pembalikan' arus pertukaran pangan global antar-belahan dunia"—para produsen komersial Utara mengekspor komoditas tanaman, ternak,

dan susu dengan harga yang lebih murah, dan negara-negara Selatan memperkuat ekspor hasil pertanian bernilai tinggi yang diperkenalkan selama rezim utang 1980-an. Maka: "sementara warga negara-negara Selatan semakin banyak diberi makan jagung dari Amerika Serikat, gandum Eropa, dan susu bubuk Australia dan Selandia Baru, konsumen di Utara yang makmur memenuhi troli belanja mereka dengan produk-produk pangan yang semakin banyak diangkut dengan pesawat dari dunia Selatan" (Pritchard 2009: 301).

Dengan demikian, rezim pangan korporat dicerminkan oleh pembentukan tatanan pangan dunia bergaya WTO—suatu rezim yang utamanya berakar dari pengaruh korporasi pertanian-pangan terhadap pemerintah Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang "menekankan akan suatu lembaga supranasional yang dapat secara legal menguatkan kendali mereka dan mempertahankan otoritas untuk memperluasnya lebih jauh" (Weis 2007: 132). Rezim ini punya kaitan dengan logika normatif liberalisasi (Weis 2007: 159), meskipun norma itu diterapkan secara timpang dengan menggantikan subsidi pertanian di Utara dengan sistem 'kotak' dalam AoA WTO. Hasilnya adalah suatu pembagian kerja pertanian secara internasional yang dikonstruksi secara politis.

Satu simpul dalam pembagian kerja ini (berasal dari rezim-rezim sebelumnya) telah memapankan lumbung pangan di Utara yang berpusat di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Mereka mengekspor surplus pangan (gandum, produk susu, serta produk olahan daging dan jagung/kedelai) melalui aturan-aturan perdagangan bebas WTO yang diterapkan secara timpang di balik pagar subsidi pertanian dan perlindungan dari impor produk pangan olahan atau semiolahan bagi Amerika Serikat dan Uni Eropa. Simpul lainnya, berasal dari rangkaian kebijakan penyesuaian struktural sejak 1980-an, berpusat di

sejumlah negara Selatan dengan meluasnya ekspor pertanian nontradisional untuk menutupi utang "Negara-Negara Pertanian Baru" (Friedmann 1991).

Sebagai efeknya, penataan struktur politik atas nama disiplin pasar telah menciptakan pasar-pasar global bagi pangan murah. Hal ini dilakukan dengan mengeksploitasi tanah dan buruh murah untuk ekspor pertanian dari Selatan dan limpahan (dumping) pangan dari Utara yang seolah-olah dibuat lebih murah. Di kasus yang mana pun, petani kecil, khususnya di Selatan, dihadapkan pada kebijakan dan ketentuan-ketentuan yang menguntungkan usaha tani berorientasi ekspor dan padat modal. Hal ini mengorbankan lahan dan sistem budidaya petani kecil. Kebijakan dan ketentuan-ketentuan itu juga memperparah penggusuran yang sudah berlangsung sebelumnya. Inilah rezim agrobisnis transnasional yang memperdagangkan dan mengolah komoditas hasil pertanian di Selatan. Rezim ini pun menyulap petani kecil menjadi cadangan tenaga kerja bagi pabrikan negara-negara Utara yang butuh buruh dan beroperasi di negara-negara Selatan. Sebuah ironi gamblang tampak di sini: rezim ini sangat mirip dengan rezim pangan penjajah yang berdiri di atas perluasan pertanian Inggris ke berbagai wilayah. Di kasus yang mana pun, tatanan perdagangan pangan adalah kunci bagi penataan struktur tertentu atas sistem negara.

Kesimpulan: Suatu Dunia Pasca-Rezim Pangan?

Demikianlah, rezim pangan awal berporos pada ketegangan antara sistem kolonial dan kebangkitan negara-bangsa merdeka. Maka demikian pula, rezim pangan korporat berporos pada ketegangan antara dua hal: pertanian pangan berorientasi ekspor ("pertanian tanpa petani") dan pertanian berorientasi pasar lokal yang dikerjakan oleh kebanyakan petani. Dalam

kerangka teritorial, ketegangan ini utamanya berlangsung antara dua poros: bentuk-bentuk integrasi transnasional ranah produsen dan konsumen, yang semakin ditentukan oleh standarisasi pangan (yang diproduksi secara monokultur dan inputnya berasal dari belahan dunia lain), dengan sistem-sistem 'hayati kawasan' (*bioregional*) dan pangan lokal yang berusaha memangkas jarak antara produsen dan konsumen. Sistem pangan lokal ini menjadi tujuan bagi gerakan kedaulatan pangan, bersama seruan mereka untuk memperkecil skala sistem pangan agar dapat dikendalikan secara demokratis serta menciptakan menu dan praktik ekologis yang cocok—dengan catatan bahwa penurunan skala ini menekankan kekhasan berbagai ekosistem pertanian. Ketegangan inti antara "pangan dari antah-berantah" dan "pangan dari tempat tertentu" (McMichael 2002) menunjukkan kesia-siaan rezim pangan. Menjadi demikian ketika ketegangan ini mencita-citakan lokalisasi ulang sistem pangan sebagai solusi tidak sekadar terhadap ketegangan dalam rezim pangan, tetapi juga terhadap persoalan keberlanjutan sosio-ekologis di era pertanian-pascaindustrial.

Campbell menguatkan pandangan tersebut dengan mengklaim bahwa rezim 'pangan dari antah-berantah' telah menghasilkan rezim 'pangan dari suatu tempat'. Klaim ini didasarkan pada hadirnya "tanggapan dan penanda ekologis sebagai pemicu munculnya strategi-strategi adaptif" (Campbell 2009: 317). Menimba wawasan seputar lingkungan dari Friedmann (2000), Campbell menggarisbawahi ketegangan terkini antara abstraksi dan situasi budaya pangan. Ini merupakan ketegangan antara kerangka kultural yang menekankan harga murah, kenyamanan, pengolahan yang menarik perhatian, dan penyamaran bahan asal makanan, dengan status kultural para konsumen makmur yang melekat pada makanan yang mena-

rik perhatian masyarakat dan berakar secara ekologis. Berbeda dengan Friedmann yang melihat rezim korporat-lingkungan sebagai sesuatu yang baru mulai terbentuk, Campbell (2009: 318) melihat hadirnya dua pihak yang timpang: rezim 'pangan dari tempat tertentu' yang "kecil namun penting sebagai logika tandingan baru" terhadap rezim 'pangan dari antah-berantah'. Campbell (2009: 312) mencatat bahwa rezim pangan awal punya "kemampuan menyamarkan apa yang Marx ... gambarkan sebagai suatu patahan metabolis—yang tidak dapat dipulihkan dan taktampak—yang semakin mengganggu interaksi antara manusia dan alam." Patahan metabolis inilah—yakni gangguan terhadap siklus pemulihan kesuburan tanah (Foster 1999)—yang dapat mendorong desentralisasi pertanian pangan, ketika manusia dipaksa untuk memulihkan tanah, biomassa, dan keanekaragaman hayati agar dapat bertahan hidup pada masa pasca-bahan bakar fosil.

Konsepsi ini berporos pada pemikiran awal mengenai sebuah rezim pangan yang mewujudkan suatu situasi historis yang mengandung prinsip-prinsip kontradiktif. Dinamika rezim-rezim sebelumnya berpusat pada ketegangan antara prinsip-prinsip geopolitik yang berlawanan—relasi kolonial/nasional di rezim pertama, relasi nasional/transnasional di rezim kedua. Maka begitu pula, rezim pangan korporat mewujudkan kontradiksi antara pertanian dunia dan bentuk pertanian agroekologi berbasis lokal. Selain itu, rumusan ini memusatkan perhatian pada kondisi para petani kecil, nelayan, dan penggembala, juga pada mobilisasi tandingan yang mengusung panji kedaulatan pangan melawan narasi modernis yang melihat para petani skala kecil sebagai sesuatu yang mubazir (McMichael 2006). Sementara rezim pangan pertama berakar dari gerakan sosial para petani migran dalam dinamika siklisnya (Friedmann 2005),

dinamika rezim pangan yang sekarang melibatkan gerakan sosial petani yang melawan migrasi (McMichael 2005).

Ada beragam keselarasan relasi dalam seluruh fenomena ini. Abad panjang rezim pangan kapital dibentuk oleh petani pemukim asing pada akhir abad XIX yang merintis pembukaan dan pengolahan padang rumput untuk mengekspor pangan murah. Melalui spesialisasi budidaya komoditas dan sentralisasi agrobisnis, bahan pangan murah secara sistematis telah meminggirkan petani kecil melalui sirkulasi pangan murah dalam skala global pada akhir abad XX—sekaligus membangkitkan gerakan kaum tani tandingan. Di luar keselarasan itu, poin yang lebih besar adalah bahwa rezim pangan kapital telah menebar krisis agraria dalam skala besar, yang kini menjadi salah satu sasaran gerakan yang tengah bertumbuh untuk mengamankan pedesaan, melindungi planet bumi, dan mendorong kedaulatan pangan dengan melawan serangan baru terhadap budaya bertani dan keanekaragaman oleh "rantai nilai" dan pencaplokan lahan berskala besar.

Catatan

BAB 2

Bentuk-Bentuk Historis Rezim Pangan

SAMA dengan kapitalisme, terdapat beragam bentuk rezim pangan dalam sejarahnya. Sesungguhnya, kapitalisme sendiri adalah suatu rezim pangan, sejauh keberlangsungannya bergantung pada penyediaan bahan pangan yang mutlak dibutuhkan untuk reproduksi (ekonomis) tenaga kerjanya. Hal ini terjadi dengan mengubah pertanian dan pangan menjadi relasi-relasi komoditas yang, selain membuat pangan jadi murah, juga menjadikan pertanian dan pangan sebagai bagian dari strategi-strategi investasi. Akhir-akhir ini, strategi-strategi ini mencakup tindakan spekulasi pada saham-saham perusahaan pangan yang memiliki dampak inflasi.

Di dalam kecenderungan-kecenderungan di atas, faktor mendasarnya adalah bagaimana akumulasi berlangsung pada tahap-tahap tertentu rezim pangan. Keruntuhan rezim terjadi bersamaan dengan transisi menuju dinamika akumulasi baru. Ini terjadi dengan cara menggeser titik pusat dan konsekuensi dari komodifikasi pertanian di dalam suatu siklus ekspansi baru dengan batasan-batasan baru, dan demikian seterusnya. Di sini, rezim pangan sedemikian rupa turut serta membentuk konjungtur 'modernisasi' pertanian dunia dalam lingkup lebih luas—sebuah konjungtur yang nonlinear dan kontradiktif. Kontradiksi-kontradiksi yang terjadi lantas dikontrol perluasannya dan/atau diselesaikan lewat proses perluasan jangkauan, dengan menunda 'keterkurasan absolut' ekosistem global (Moore 2012; Araghi 2009). Pada saat yang sama, terjadi kerusakan

terus-menerus dalam ekosistem. Sekarang mulai disadari bahwa keberlangsungan ekosistem ada batasnya. Maka, tiap tahap rezim pangan merupakan suatu bagian yang berurutan dalam konjungtur yang berkembang secara menyejarah (era pertanian industrial). Dengan kata lain, rezim-rezim pangan tertentu dan konjungtur yang lebih luas bersifat saling memengaruhi. Setiap rezim merupakan pelembagaan kekuatan-kekuatan politik dan sosio-ekologis. Kekuatan-kekuatan inilah yang membentuk struktur relasi-relasi international terkait hasil pertanian-pangan sembari memperdalam cengkeraman relasi-relasi komoditas terkait hasil pertanian-pangan.

Rezim-rezim yang silih berganti ini adalah wujud pelembagaan relasi-relasi yang berperan menata bentuk-bentuk penyediaan pangan yang senantiasa berubah. Bagaimana relasi-relasi ini diatur dan dijelaskan (atau dibenarkan), cukup beragam di tempat dan waktu yang berbeda. Satu rezim tertentu ditandai oleh suatu *prinsip penataan* yang sekaligus merupakan wujud atas kuasa atau hegemoni. Dengan begitu, tatanan ekonomi-politik dalam relasi-relasi pangan secara internasional sejak akhir abad XIX telah menghasilkan tiga bentuk peristiwa berbeda yang telah terlembagakan dalam bentuk aturan-aturan yang dikendalikan oleh tujuan-tujuan strategis berbagai kekuatan dominan yang menentukan peristiwa-peristiwa tersebut, dan dibenarkan oleh ideologi-ideologi kaum penguasa, yaitu Inggris/multilateralisme-perdagangan-bebas; Amerika Serikat/bantuan-luar-negeri, pembangunan dan kebebasan berwirausaha; serta WTO/perdagangan-bebas dan supremasi sistem pasar. Di masing-masing kasus, perdagangan pangan dunia, lewat satu komando harga dunia, telah menjangkau suatu wilayah komodifikasi pertanian yang terus meluas serta suatu proses pendalaman terkait relasi konsumsi yang kian dibelah oleh kelas-kelas selera makan.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, rezim pangan punya dimensi generik (menurunkan sifat tertentu) dan episodik (membangun peristiwa). Meskipun setiap episode memperlihatkan suatu tatanan kekuasaan tertentu yang bersandar pada peredaran-peredaran pangan tertentu, sudut pandang generik memandang episode-episode itu sebagai kejadian-kejadian yang berputar dalam suatu proses akumulasi kapital berjangka panjang yang melintasi ruang dan waktu (bandingkan, Arrighi 1994). Dua pertanyaan muncul dari rumusan ini: (1) apa arti membayangkan masa prasejarah dari rezim-rezim pangan ini? (2) mengingat bahwa episode-episode ini muncul berurutan, apakah kekuatan penggerak yang membentuk struktur rezim-rezim pangan ini?

Tahap Prasejarah dari Rezim Pangan

Ada godaan untuk menarik konsep rezim pangan mundur ke belakang, dari akhir abad XIX ke masa kolonial. Awalnya, buah dari imperium penjajahan (dan perbudakan) mencakup barang-barang pemberi kenikmatan yang cukup terkenal—perangsang rasa, tembakau, kopi, teh, dan gula, yang semuanya memenuhi "hasrat untuk mendapatkan zarah-zarah baru yang bisa dimakan, yang menimbulkan rasa nikmat, serta yang bisa dijadikan bahan obat-obatan, yaitu barang-barang yang punya efek langsung dan kuat terhadap tubuh orang-orang yang mampu mengonsumsinya" (Sheller 2003: 77). Gula, yang awalnya merupakan barang mewah bagi kalangan bangsawan Eropa, kemudian menjadi barang yang diperebutkan dengan sengit oleh para penjajah, dan akhirnya menjadi komoditas sehari-hari rumah tangga di Inggris pada abad XIX.

Sidney Mints (1985) telah memetakan sejarah pengerahan kekuatan negara-negara penjajah untuk mengamankan koloni-

koloni penghasil gula di Karibia. Saat itu, ia sudah membayangkan peran kekuatan ekonomi-politik dewasa ini dalam menata relasi konsumsi dalam kapitalisme industrial, dan itulah rezim pangan. Gula berubah dari barang langka pada 1650, menjadi barang mewah pada 1750, lalu akhirnya menjadi kebutuhan sehari-hari pada 1850. Perubahan posisi gula menunjukkan bangkitnya kapital industrial yang mendorong Inggris untuk menciptakan suatu imperialisme perdagangan bebas, dan dengan demikian menciptakan sebuah pasar dunia yang bersandar pada standar [nilai] emas internasional. Sebuah rezim pangan muncul lewat "penyediaan substitusi pangan berbiaya murah seperti tembakau, teh, dan gula untuk kelas buruh metropolitan. Dengan memberi efek positif terhadap hasil energi dan produktivitas pekerja, pengganti pangan semacam itu menjadi barang penting dalam menyeimbangkan neraca kapitalisme" (Mintz 1985: 148–149). Kekuatan cerita Mintz ini terletak pada kemampuannya merekam perubahan tatanan geopolitik ketika relasi-relasi nilai sudah terbentuk kokoh.

Dengan begitu, pangan dunia seperti gula menjadi bagian tak terpisahkan dalam perhitungan nilai dalam kapitalisme. Di dalam perhitungan nilai itu, angkatan kerja global, yang kendati timpang namun nasibnya sama, dibentuk dan dihidupi melalui relasi penjajahan yang telah terajut. Penjajah tidak hanya mengamankan wilayah-wilayah jajahan penghasil gula di Kepulauan Karibia dan Brasil sebagai zona pemasok komoditas bagi Eropa, tetapi juga mengimpor sumber karbohidrat (tepung) seperti buah sukun dari Pasifik Selatan, dan sumber protein seperti ikan kod asin dari Atlantik Utara. Pasokan karbohidrat dan protein ini diimpor untuk melengkapi buah-buahan lokal guna meningkatkan daya tahan tubuh para buruh perkebunan. Selain itu, sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, kentang, dan beras tersedia banyak di seluruh Atlantik, sehingga

menyediakan "nutrisi yang cukup untuk menopang hidup kaum buruh yang melarat .... Berbagai pangan karbohidrat itu telah menurunkan ongkos reproduksi rumah tangga dan membuat buruh murah tersedia dalam jumlah banyak" (Tomich 2013). Sebagaimana dicatat Dale Tomich (2013), wilayah-wilayah jajahan ini telah muncul sebagai:

> barangkali pertanian yang paling radikal dan inovatif, produksi komoditas tropis untuk pasar dunia ... pusat lahan, buruh, dan kapital bagi produksi komoditas ekspor, yang berarti bahwa makanan dan pasokan lain—barang-barang pabrikan, biji-bijian, hewan untuk kerja dan konsumsi, kayu, dan berbagai jenis ikan—harus diimpor dari tempat lain di seputar Atlantik.

Dengan cara ini, transformasi dunia agraria di masa penjajahan melekat erat dengan relasi-relasi rumit terkait menu makan, yang pada gilirannya menjadi keadaan-keadaan yang melanggengkan produksi komoditas tropis dan subtropis yang akhirnya melahirkan rezim pangan. Dengan begitu, rezim pangan dapat diposisikan secara historis sebagai suatu "tatanan kompleks dari banyak tujuan" yang bersembunyi di balik wujud fenomenal dari perputaran komoditas utama (Marx 1973: 101). Dalam keadaan demikian, rezim pangan bisa punya bentuk gaya tersendiri dalam menandai episode historis khas yang dapat dikenali lewat wajah kekuasaan tertentu, tetapi isi dari rezim pangan itu tetap bergantung pada tatanan seperangkat relasi-relasi produksi *dan* reproduksi yang rumit secara historis—suatu kerumitan yang mustahil dijabarkan di sini tanpa bantuan contoh-contoh ilustratif.

Masa-masa awal, ketika kolonialisme Eropa mengubah berbagai belahan dunia non-Eropa menjadi pengekspor pro-

duk-produk monokultur bagi negara-negara metropolitan dengan berbagai produk tropis, sangat tepat disebut sebagai persiapan untuk pembentukan rezim pangan. Sebagai contoh, perdagangan pangan subtropis masa-masa awal dari Amerika Serikat telah menopang ekonomi kawasan Atlantik, di mana Baltimore secara langsung memasok terigu ke kawasan-kawasan perkebunan di Kepulauan Karibia dan Brasil (Gilbert 1977: 250). Tetapi sistem harga dunia untuk makanan pokok baru muncul pada perempat akhir abad XIX, dengan gandum sebagai produk utama (Woodruff 1967: 268; Friedmann 1978). Akhirnya, sebuah rezim pangan melibatkan pula penaklukan jaringan peredaran bahan pangan internasional ke bawah sistem harga yang diatur oleh logika pasar. Bagaimana harga pasar itu ditetapkan adalah soal nomor dua. Pengintegrasian kawasan-kawasan penghasil produk adalah proses yang lebih penting dibanding bagaimana harga pasar ditetapkan, yaitu proses yang membuat para produsen dari segala penjuru dunia kapitalis berhadapan dengan satu sistem harga. Sistem harga tunggal inilah yang merupakan wujud dari prinsip penataan utama dari suatu rezim, karena di situ terlihat bagaimana kekuatan pasar diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan politik.

Bagaimana Rezim Pangan Terbentuk dan Terbentuk Ulang?

Pertanyaan kedua di atas, mengenai kekuatan penggerak yang membentuk struktur rezim pangan, membutuhkan penjelasan sejarah tertentu. Di sini, konsep rezim pangan menjadi satu kunci untuk menyingkap tidak hanya tahap-tahap dan peralihan yang sengaja dirancang dalam sejarah relasi pangan kapitalis, tetapi juga sejarah kapitalisme itu sendiri. Tiap rezim menetapkan satu harga dunia untuk menjembatani perdagangan antarnegara. Sementara sejarah kapital bergantung pada

kawasan rintisan budidaya bahan pangan untuk mendorong akumulasi (Moore 2000), rezim pangan di akhir abad XIX merupakan tonggak penanda bagi konsolidasi pasar dunia yang diatur, pada prinsipnya, oleh relasi-relasi nilai (Arighi 2003; McMichael 1999). Artinya, rezim pangan menandakan terjadinya proses komodifikasi pangan dan perancangan secara rinci relasi perdagangan yang bertopang pada pesatnya konversi budidaya pertanian menjadi sebuah industri dunia. Tentu ini bukan proses sekali jadi, dan meskipun telah terjadi kecenderungann berkepanjangan ke arah ini, episode-episode yang terjadi berulang-ulang—di mana kecenderungan ini makin kokoh—berlangsung di dalam hubungan-hubungan penuh pertentangan. Relasi-relasi nilai muncul melalui wahana politik kekerasan, dengan konsekuensi-konsekuensi sosio-ekologis tertentu—termasuk kategori ini adalah usaha meluaskan jajahan (sering melalui perantara penguasa-penguasa lokal) ke daerah-daerah non-Eropa dengan kerugian material dan kultural bagi penduduk pribumi beserta ruang hidup mereka. Dengan begitu, rezim pangan dapat menampilkan praktik pelaksanaan kekuasaan global secara umum sekaligus, sejauh itu dapat, menancapkan episode-episode sisipan beserta syarat-syarat politik dan materialnya. Bila kita meneorikan rezim pangan sebagai "wajah politis dari relasi-relasi nilai dunia yang menyejarah" (Araghi 2003: 51), maka wajib bagi kita untuk memerinci "wajah politis" ini dalam bentuk-bentuk kesejarahannya.

Rezim pangan sering kali dihubungkan dengan penataan secara politis atas ekonomi kapitalis global melalui penggunaan kekuasaan oleh negara-negara Inggris dan Amerika serta pemerintahan negara neoliberal. Kekuasaan dipancangkan dengan peranti militer, keuangan, dan kelembagaan, hingga membentuk relasi-relasi geopolitik dan corak akumulasi kapi-

tal dengan dikawal oleh ideologi pembangunan. Hegemoni Inggris dan Amerika, disokong oleh kekuatan militer atau keuangan, telah dipancangkan di atas prinsip-prinsip ekonomi-politik (yaitu perdagangan bebas dan kemudian kebebasan wirausaha) yang diadopsi oleh negara-negara pesaing sebagai prinsip-prinsip penataan universal (Arrighi 1994). Demikian pula, WTO melembagakan suatu prinsip penataan yang diterima secara universal (yakni liberalisasi perdagangan dan kewirausahaan), dengan kekuatan hukum (dan ekonomi) sebagai faktor pemaksa negara-negara anggotanya agar menerapkan prinsip itu, kendati terjadi ketimpangan dalam hal kepatuhan atas kesepakatan antara negara-negara Utara dan Selatan.

Bentuk-bentuk aturan menerangkan proses pembentukan struktur rezim pangan, tetapi apakah tujuan utama aturan-aturan tersebut? Produksi dan penyediaan pangan untuk mempertahankan dinamika akumulasi tertentu adalah jawaban mudahnya, tetapi bagaimana itu dijalankan membutuhkan penjelasan yang lebih rumit. Di tiga rezim pangan, ciri mereka yang sama adalah pangan murah, dengan satu harga dunia merangsang munculnya bentuk-bentuk akumulasi dalam sistem negara. Tetapi pangan murah juga punya beragam fungsi: menurunkan biaya untuk upah, meningkatkan upah riil, meredam kegelisahan buruh, mengambil alih sumber-sumber pangan, menciptakan ketergantungan, menyelesaikan utang, melumpuhkan produsen, dan lain-lain. Kesamaan dari semua fungsi ini adalah sifat pelaksanaan kekuasaan. Maka, berikutnya adalah penjelasan peran pangan sebagai bentuk penguasaan di setiap rezim.

Rezim Pangan Penjajahan di Bawah Inggris

Eksploitasi wilayah-wilayah jajahan oleh imperium-imperium Eropa punya beberapa tujuan, yang terpenting di antaranya

adalah untuk menguasai dan memastikan terpenuhinya pasokan bahan pangan dan perangsang rasa (yang terbilang mewah) bagi konsumsi kelas atas, untuk meningkatkan kemakmuran nasional (kerajaan induk) melalui kebijakan-kebijakan merkantilis, dan untuk membuka wilayah-wilayah baru akumulasi demi mengangkut keuntungan dan menunda kehancuran ekologis (Moore 2000; lihat Wallerstein 1974). Pasokan produk-produk tropis adalah pintu masuk awal bagi rezim pangan pertama yang berporos di Inggris. Sebagaimana disebut di atas, kisah tentang gula menunjukkan makin mapannya pintu masuk itu di mana barang mewah yang awalnya diproduksi oleh para budak perkebunan telah menjadi menu umum masyarakat kelas bawah sebagai sumber kalori untuk mempertahankan para buruh pabrik dan keluarganya ketika industri tengah tumbuh. Penyediaan pangan yang bersifat universal seperti itu membuat pencaplokan tanah dan pemerasan tenaga kerja di masa penjajahan menjadi basis pentingnya, selain tentu saja ketersediaan secara fisik (nilai guna) pangan tropis yang dihasilkan, sehingga memungkinkan kapital membuat harga pangan yang dibeli dengan upah menjadi murah bagi para buruhnya. Sebagaimana dicatat oleh Mintz (1985) dan Sébastien Rioux (2012), baik budak maupun kaum proletar (beserta keluarganya) secara berbarengan mengalami suatu proses umum penurunan tingkat reproduksi tenaga untuk bekerja.

Posisi saling melengkapi antara pangan tropis dan subtropis merupakan faktor pembentuk rezim pangan pertama pada paruh kedua abad XIX. Posisi ini menandai bangkitnya Inggris sebagai imperium perdagangan bebas, yang dirancang untuk mendukung upaya akumulasi dan kekuatan dagang Inggris di pasar dunia yang sedang tumbuh. Bill Winders menetapkan 1860 sebagai awal rezim pangan pertama, menyusul pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas antara Inggris dan Pran-

cis pada 1859 di mana konsesi yang dulu diberikan hanya kepada Prancis kini diberlakukan bagi semua bangsa dan dengan demikian menciptakan kesepakatan perdagangan bebas multilateral pertama (2009: 318; McMichael 1984: 21). Tetapi sebelum itu, sebagaimana disebutkan oleh Winders, pencabutan Undang-Undang Gandum (proteksi pertanian) pada 1846 sangat dipengaruhi oleh perubahan koalisi kelas dalam politik Inggris. Secara khusus, pencabutan undang-undang itu sangat dipengaruhi oleh kelas industrial yang kian solid dan mapan secara politis, serta tengah mencari cara mengurangi upah buruh dalam kerjasama dengan para produsen ternak yang juga mencari biji-bijian lebih murah dari seberang lautan (Winders 2009: 323–324). Dengan bertumbuhnya persaingan industrial antar-negara-bangsa baru, yang didorong oleh kegiatan-kegiatan "pabrik dunia" Inggris, koalisi-koalisi dalam negeri di tempat-tempat lain berporos pada perdagangan bebas sebagai sarana untuk mengimpor teknologi dan bahan baku (termasuk pangan). Para pelaku budidaya pertanian di mana-mana bersaing mendapatkan pasar, mengalami surplus produksi dalam kaitannya dengan permintaan konsumen dan jatuhnya harga produk-produk pertanian (Winders 2009: 327). Dari 1859 hingga 1889, produksi gandum dan jagung Amerika Serikat melonjak hampir tiga kali lipat, seiring melonjaknya jumlah usaha tani juga nyaris tiga kali lipat (dari 2 juta menjadi 5,7 juta) antara 1869 dan 1900 (Winders 2009: 327). Dan antara 1875 dan 1913, harga tanah melonjak tiga kali lipat di Dunia Baru (O'Rourke 1997: 786), sehingga turut menjamin tewujudnya infrastruktur publik (termasuk juga kekuatan militer) dan investasi rel kereta swasta yang membuka wilayah-wilayah rintisan bagi para migran Eropa untuk bermukim sebagai petani gandum dan peternak (Friedmann 1978; McMichael 1984). Eric Hobsbawm mencatat:

> Segera setelah aliran bahan pangan murah secara besar-besaran membanjiri kawasan-kawasan urban Eropa—pada 1870-an—harga pasar produk pertanian anjlok, tidak hanya di kawasan-kawasan penerima, tetapi juga di wilayah-wilayah produsen yang saling bersaing di seberang lautan. Terjadi perlawanan para petani Populis di Amerika Utara, gelegar revolusi agraria yang lebih berbahaya di Rusia pada 1880-an dan 1890-an, juga lentingan pemberontakan agraria dan nasionalis di Irlandia pada era Liga Tanah (*Land League*); semua ini menjadi bukti bahwa anjloknya harga tersebut sangat memengaruhi kawasan-kawasan pertanian kaum tani atau pertanian keluarga, kawasan-kawasan yang *secara langsung maupun tidak langsung bergantung pada belas kasih harga-harga yang berlaku di dunia*. (1969: 128–129, cetak miring saya tambahkan)

Sistem perdagangan bebas telah terkonsolidasikan kendati proteksionisme menguat di kalangan kelas-kelas pertanian Eropa, sebab tarif tidak secara langsung mengatur produksi atau harga (Friedmann 1979). Produsen biji-bijian Inggris, karena terisolasi dalam perjuangan mempertahankan Undang-Undang Gandum, tidak terlindungi dari serbuan harga gandum impor yang murah (Winders 2009: 328). Di London, harga rata-rata roti batangan 1,8 kilogram jatuh dari 10,75 penny pada 1855 menjadi 8 penny pada 1870, lalu menjadi 5,08 penny pada 1895 (Rioux 2012: 55). Sebagaimana didokumentasikan oleh Rioux (2012), tidaklah memadai menimpakan kejatuhan harga roti ini pada kondisi kawasan-kawasan rintisan semata—pangan murah di Inggris juga bergantung pada metode baru distribusi (dan pengoplosan) pangan di kalangan penduduk perkotaan. Di sini, gerombolan pedagang kaki-lima yang miskin dan pemilik toko kecil (beserta pekerja mereka) bersekongkol dan membuat

murah harga pangan untuk rumah tangga kelas buruh. Meskipun pangan murah menandakan naiknya upah riil selama periode ini, makanan untuk para perempuan, anak-anak, dan pedagang kecil yang jumlah dan kualitasnya telah dikurangi mengisyaratkan hal sebaliknya. Karena itu, dalam lingkup global, berlangsunglah swaeksploitasi secara bersamaan yang dilakukan oleh produsen di wilayah-wilayah rintisan pemukim asing dan oleh buruh perkotaan, yang disebabkan oleh model baru perdagangan gandum. Inilah bentuk ekstensif akumulasi kapital yang bergantung pada eksploitasi tenaga kerja secara sederhana yang diintegrasikan melalui bentuk baru perputaran pangan yang disebutkan di atas.

Dengan demikian, relasi-relasi nilai (*value relations*) telah menata ulang kehidupan sosial di seluruh wilayah yang dikuasai rezim pangan dengan dampak besar terhadap masyarakat adat, ras, kelas sosial, dan gender. Sangat fenomenal, bagaimana sistem perdagangan bebas yang dibangun Inggris (didukung sterling sebagai mata uang internasional) itu telah menciptakan sebuah pasar gandum dunia. Dalam pasar gandum dunia itu terjadi pemusatan (konvergensi) nisbi di antara bangsa-bangsa antara 1870 dan 1913, dan pemusatan absolut antara Inggris dan Amerika Serikat—dari selisih 54% pada pemusatan nisbi menjadi -0,8% pada pemusatan absolut (O'Rourke 1997: 782).

Sebagai sebuah pasar yang terlembagakan, rezim pangan merupakan wajah pemusatan kekuatan dan relasi-relasi sosial serta geopolitik yang dirancang untuk memperkuat kekuasaan internasional dan imperial Inggris. Perdagangan bebas bisa diibaratkan pisau tajam bermata dua. Pertama, dengan memindahkan produksi pertanian ke wilayah seberang, Inggris sanggup mengembangkan spesialisasi sebagai "pabrik dunia" pada suatu rentang waktu, dengan memanfaatkan modal sumberdaya ekologis dan keluarga pekerja di wilayah rintisan pemu-

kim asing untuk menekan ongkos pemenuhan pangan kelas proletar yang tengah bertumbuh (di negara induk, Inggris). Kedua, perdagangan bebas mendorong munculnya persaingan industrial dan proteksionisme yang pada gilirannya melucuti dominasi tunggal tatanan moneter berbasis standar sterling-emas, dan dengan begitu juga sistem perdagangan bebas (bahkan saat sistem itu mendorong pergeseran besar-besaran investasi Inggris ke negara-negara jajahan/pendudukan).

Siklus ini mewakili pasar dunia yang pertama, yang benar-benar terintegrasi, yang tidak terpisahkan dari komodifikasi buruh, uang, dan pangan (bandingkan, Polanyi 1957). Kekuasaan dan persaingan antarnegara berporos pada ketersediaan pangan murah, sebuah artefak dalam proses pematangan sistem negara-bangsa dengan mata uang bersama yang dominan. Secara teoretis, episode pembentukan negara ini merupakan wajah fenomenal dari suatu proses tak kenal lelah pembentukan relasi-relasi nilai secara global—yaitu pengintegrasian industri dunia dan pertanian dunia dalam wujud harga, suatu proses dengan akibat menonjol terhadap kelas sosial. Pada level negara, di mana pasar dunia mendorong spesialisasi, input komersial menggantikan input biologis dalam pertanian-campur-pertenakan (*mixed farming*) yang pada awalnya dipraktikkan oleh para pemukim asing. Ini membuka jalan bagi industrialisasi pertanian yang mengaitkan pertanian dan industri sebagai dua sektor yang saling melengkapi bagi suatu ekonomi modern yang dikelola secara nasional (Friedmann dan McMichael 1989: 102).

Di kawasan padang rumput, dataran rendah, dan hutan-hutan Amerika Utara dan belahan bumi Selatan, penduduk asli digusur dan/atau dilenyapkan agar lahan mereka bisa digunakan untuk padang penggembalaan dan produksi gandum. Di Argentina dan Paraguay, para pengusaha membagi hamparan

luas dataran rendah menjadi petak-petak besar lahan gandum dan padang penggembalaan untuk memasok pasar Eropa. Mereka mengimpor mesin-mesin pertanian dari Amerika Serikat dan Eropa, serta mempekerjakan buruh-buruh migran dari Eropa (Burbach dan Flynn 1980: 93). Sementara itu, korporasi-korporasi Amerika Serikat seperti Hersehey, W.R. Grace & Co., dan United Fruit berinvestasi untuk pengadaan lahan, pengapalan, pupuk, infrastruktur transportasi, dan fasilitas pengolahan di Amerika Tengah dan Selatan untuk memperbesar luasan perkebunan komoditas-komoditas tropis berorientasi ekspor (Burbach dan Flynn: 94).

Sementara para penduduk padang rumput dan dataran rendah secara umum dimusnahkan dengan kekuatan militer, para penduduk tanah jajahan mengalami apa yang disebut Davis (2001) sebagai *holocaust*. Perempat akhir abad XIX dilanda kelaparan serentak akibat El Niño yang menyebabkan kekeringan dahsyat di seluruh negeri tropis, dibarengi dengan gelombang kematian akibat kelaparan (30–60 juta orang) dari India sampai ke utara Tiongkok hingga Brasil. Di India, kolonialisme Inggris memusnahkan sistem lumbung gandum pedesaan ketika gandum diubah menjadi komoditas ekspor. Sistem transportasi, termasuk telegraf dan kaitannya dengan lonjakan harga, tanpa mempertimbangkan kondisi lokal, telah memungkinkan para saudagar di sepanjang jaringan tersebut untuk mengusung cadangan gandum dari pedalaman yang dilanda kekeringan menuju pusat-pusat penimbunan. Melalui skenario ini, India "dipaksa bergabung ke dalam pasar dunia," dengan ekspor gandum meningkat dari 3 juta menjadi 10 juta ton per tahun; bersamaan dengan itu, terjadi lonjakan angka kematian yang diperkirakan mencapai 12–19 juta jiwa. Davis (2001: 7, 26, 285) berkomentar, "pada kenyataannya, orang-orang London memakan roti orang India," dan ia menulis bahwa "konsekuen-

si jahat dari sebuah pasar tunggal adalah dipindahkannya kelaparan, lewat inflasi harga, ke penduduk miskin pedesaan di wilayah-wilayah yang sebenarnya mengalami surplus gandum."

Di wilayah-wilayah yang kini disebut sebagai Dunia Ketiga muncul reaksi berupa gerakan merindukan datangnya ratu adil yang bersifat antipenjajah. Reaksi ini menyulut gerakan kemerdekaan abad XX. Sementara Polanyi menampilkan modernitas sebagai pengaturan sosial oleh pasar, Davis memungkasi ceritanya dengan mengungkap "rahasia sejarah abad XIX"—dengan mendokumentasikan dampak mendalam dari standar emas terhadap bangsa-bangsa non-Eropa. Bagi bangsa-bangsa non-Eropa, modernitas adalah proses penundukan kehidupan material mereka di bawah aturan harga. Harga ibarat sebuah pengungkit yang mampu meniadakan beragam kebutuhan maupun sumberdaya baru tanpa kekuatan berarti, dan melalui harga pula, beragam kebutuhan maupun sumberdaya baru itu bisa disebarkan oleh para saudagar-penentu-harga kepada para konsumen Eropa yang mampu membeli.

Relasi-relasi nilai telah ditata sedemikian rupa melalui sarana kekerasan penjajah dan pemiskinan kualitas reproduksi tenaga kerja dan ekologi. Dan bisa disimpulkan, hal ini telah memadukan kelas-kelas tertentu dan meminggirkan kelas-kelas lainnya. Proses ini terjadi dalam kerangka penguatan sebuah rezim pangan yang berlandaskan pada tindakan mempermurah harga pangan dengan mengubah statusnya menjadi komoditas global. Sebagai pembenaran, praktik rezim pangan seperti itu sering kali ditempatkan dalam cerita tentang pengenalan peradaban, di mana Inggris menyebut bahwa dirinya justru telah menyelamatkan India dari "kelaparan berkepanjangan"—meskipun disebutkan oleh suatu kajian pada 1878, dalam *Journal of Statistical Society*, bahwa "31 kali insiden kelaparan

serius terjadi dalam kurun 120 tahun penjajahan Inggris, dibandingkan dengan hanya 17 insiden kelaparan yang tercatat selama 2 abad" (Davis 2001: 299). Sementara itu, komodifikasi tenaga kerja di Inggris telah menggelembungkan jumlah kelas pekerja, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan akan pangan, sehingga membuat seorang aparat penjajah, Cecil Rhodes, berujar pada 1895: "Penjajahan, sebagaimana selalu saya katakan, adalah persoalan roti dan keju [buah simalakama, *penerjemah*]. Jika ingin menghindari perang sipil, Anda harus menjadi penjajah" (dikutip dalam Patel 2007b: 84). Sebagaimana disarankan oleh Raj Patel (2007b: 87), solusi untuk menghindari perang antarkelas dari bawah "ialah dengan cara menerapkan suatu kontrak sosial tak tertulis, menjaga tingkat kelaparan dan kemiskinan dalam batas-batas yang masih mungkin dikendalikan dengan memastikan ketersediaan pangan murah dalam jumlah yang cukup."

Kalkulasi seperti di atas melahirkan apa yang disebut oleh Kautsky dan Lenin sebagai "elitisme pekerja" (*aristrocacy of labor*) di pusat-pusat negeri penjajah, sementara di tempat-tempat lainnya pangan murah menuntut tersedianya para budak dan pekerja pertanian berupah murah" (Patel 2007b: 87). Meski begitu, Sandra Helperin (2005: 34) mencatat bahwa meskipun rata-rata kekayaan Inggris meningkat nyaris tiga setengah kali lipat antara 1830 dan 1914, "perbedaan besaran pendapatan di kelompok berpendapatan sedang tidak menyusut secara signifikan; orang kaya semakin kaya ketimbang kelompok berpendapatan menengah, dan yang miskin semakin miskin—sehingga pada 1914, sepertiga jumlah penduduk, pendapatannya tidak cukup untuk membeli pangan guna menopang kesehatannya sepanjang tahun" (Floud 1997, dikutip dalam Helperin 2005: 34). Lebih jauh Floud berpendapat, "Meskipun 30% orang hidup di bawah garis [kemiskinan], mungkin 40% lainnya,

atau lebih, hidup sangat dekat dengan garis tersebut sehingga mereka terpaksa, dan memang sering terjadi, hidup di bawah garis itu karena berbagai macam peristiwa kehidupan" (dikutip dalam Helperin 2005: 34).

Intinya, dinamika akumulasi yang terjadi dalam sebuah rezim pangan tertentu melibatkan proses-proses pemiskinan reproduksi (*under-reproduction*), sehingga klaim-klaim kemajuan mengenai peradaban, atau pembangunan, atau keamanan pangan, sungguh perlu dipertanyakan. Karena keberadaan sebuah "rezim" tergantung pada normalisasi klaim-klaimnya (yang menjelaskan "aturan-aturan tersirat"), maka rezim itu mesti tampil sebagai tatanan yang masuk akal, atau alamiah, dan menjadi tatanan dunia masa itu. Dengan demikian, legitimasinya harus berasal dari mitos-mitos tentang penyebarluasan; salah satu mitos utamanya adalah "beban bangsa kulit putih" untuk berbagi hasil dari kerja dan pengetahuan yang lebih unggul. Cara berbagi seperti ini melibatkan pemerasan tenaga kerja serta perampasan pengetahuan bangsa taklukan. Ilusi mengenai bantuan lantas mengalihkan perhatian dari relasi eksploitatif dalam suatu tatanan yang sedang berlangsung.

Tatanan seperti itu, yang dibentuk melalui pembentukan struktur relasi-relasi komoditas, pada saat bersamaan juga membentuk ulang dunia kehidupan orang-orang yang lingkungannya menjamin relasi-relasi nilai. Maka, sementara Kemaharajaan Britania (kerajaan Inggris di India [*British Raj*]) saat itu menganggap dirinya telah menyelamatkan sub-benua India dari kelaparan, para peternak Amerika Serikat di kawasan rintisan, dengan gelontoran investasi modal dari Inggris guna memuaskan kebutuhan akan daging sapi di Inggris, tidak mau ketinggalan: "sesudah membantai sapi dan mengusir warga Indian dari dataran-dataran luas hingga dapat menggembala-

kan ternak di sana, para penggembala ternak tersebut kemudian berbalik arah dan menjual daging sapi kepada pemerintah guna memberi makan orang-orang Indian yang lapar karena sumber pangannya telah mereka musnahkan" (Rifkin 1993: 83). Kolonisasi budaya lewat pembentukan ulang struktur penyediaan pangan semacam itu adalah bagian mendasar dari sebuah rezim pangan, sebagaimana akan kita lihat.

Surutnya ekonomi dunia yang berpusat di Inggris pada awal abad XX disebabkan oleh memuncaknya gerakan tandingan yang bersifat protektif melawan hukum pasar (gerakan kelas dan dekolonisasi, bersamaan dengan persaingan antarnegara), diiringi oleh konflik nasional dan imperial di antara negara-negara Eropa dan runtuhnya standar emas. Depresi ekonomi dan pengangguran perkotaan sebagai buntut dari Perang Dunia I, selain krisis pertanian yang meluas di Eropa akibat murahnya harga biji-bijian dari tanah-tanah seberang, telah menghasilkan meluasnya praktik proteksionisme. Nasionalisme ekonomi di Eropa dan bencana ekologis berupa kekeringan berkepanjangan di Amerika telah menutup model eksploitasi tanah di kawasan rintisan dan perdagangan bebas ala rezim pangan. Stabilisasi sektor pertaian Amerika Serikat melalui intervensi pemerintah dengan program-program komoditas, menjadi awal bagi sebuah rezim pangan yang dikelola negara sesudah Perang Dunia II.

Rezim Pangan Intensif yang Berporos Amerika Serikat

Pembangunan kembali pertanian Amerika Serikat setelah Perang Dunia II telah menggabungkan program-program nasional yang menguatkan bentuk pertanian padat modal, yang bersandar pada spesialisasi komoditas (khususnya biji-bijian makanan pokok), dengan suatu rezim internasional yang melimpahkan surplus pertanian industrial. Prakarsa yang ber-

wujud program antikelaparan dari organisasi perserikatan bangsa-bangsa (United Nations [UN]) menjadi cikal bakal rezim pangan yang bersandar pada geopolitik dekolonisasi dan Perang Dingin (Phillips dan Ilcan 2003; McMichael 2007) ini. Tujuan dari program "memberi makan dunia" adalah mengatasi kondisi kemelaratan akibat penjajahan dan peperangan, dengan menggunakan politik 'pembatasan ruang gerak' (*containment*). Inilah saat ketika gerakan komunis sedang mengancam kepentingan Barat di dalam dan luar Eropa. Di sini, kelangkaan pangan kemudian menjadi pendahuluan untuk mengubah pangan menjadi alat kekuasaan. Maka pada 1949 Presiden Truman memproklamirkan dalam pidato kemenangannya:

> Kita harus memulai sebuah program yang berani sedemikian rupa agar manfaat kemajuan ilmu pengetahuan dan industri kita bisa digunakan untuk perbaikan dan pertumbuhan wilayah-wilayah terbelakang. Lebih dari setengah warga dunia hidup dalam kondisi yang mendekati kemelaratan. Mereka tidak memiliki cukup makanan .... Kemiskinan mereka adalah rintangan sekaligus ancaman, baik bagi mereka sendiri maupun bagi wilayah-wilayah yang lebih makmur. (http://avalon.law.yale.edu/20th_century/truman.asp)

Dengan cara ini, Amerika Serikat memanfaatkan krisis hak asasi manusia (HAM) untuk kepentingan-kepentingan politik. Pada awal 1940-an, organisasi pangan dan pertanaian UN, FAO, didirikan dengan mandat untuk menstabilkan pertanian dunia dan mengusahakan keamanan pangan dunia. Untuk tujuan itu, peran FAO adalah mendorong dan mengelola perdagangan internasional bahan pangan. Pada 1946, dengan mengesampingkan sebuah proposal FAO dan badan penanganan darurat dan urusan rehabilitasi UN (United Nation Relief and

Rehabilitation Administration [UNRRA]) untuk membentuk sebuah dewan pangan dunia World Food Board, Amerika Serikat lebih memilih pengembangan jaringan program bantuan bilateral sendiri, yang dikemas dalam Rencana Marshall (*Marshall Plan*), untuk mengirim pangan ke Eropa yang kelaparan pada era pascaperang (Cleaver 1977). Dengan begitu, Amerika Serikat telah meletakkan ancangan akan apa yang di kemudian hari menjadi rezim bantuan-pangan lebih luas.

Sementara itu, pada 1947, GATT, yang dibentuk untuk mengurangi hambatan perdagangan, memberi pengecualian pada komoditas pertanian—hal ini berarti memberikan pembenaran pada gagasan akan usaha membangun ekonomi nasional yang memadukan sektor manufaktur dengan pertanian, sebagaimana dijalankan di Amerika Serikat sebagai sebuah model pembangunan ideal untuk direplikasi (Friedmann dan McMichael 1989). Model Amerika Serikat semakin moncer menyusul kemampuannya mengatasi bencana kekeringan di Amerika Serikat pada 1930-an, dengan teknologi-teknologi hibrida yang mempromosikan spesialisasi, dan juga membangun ulang sabuk pertanian Amerika Serikat sebagai arena politik. Solusi bagi krisis ini adalah pertanian industrial yang mendapat dukungan negara, terutama lewat program-program stabilisasi komoditas di mana pemerintah Amerika Serikat memberlakukan berbagai subsidi dan suatu kebijakan pengelolaan pasokan dalam negeri melalui dukungan harga dan pembelian surplus komoditas—sederetan kebijakan yang diadopsi secara luas, misalnya di Argentina, Australia, Inggris, Kanada, India, Korea Selatan, Jepang, Meksiko, sebagian besar Eropa, dan banyak negara lain (Winders 2009: 135).

Model agroindustri Amerika Serikat pascaperang bergantung pada pengalihan produksi nitrogen semasa perang (untuk bom) menjadi pupuk nonorganik. Pupuk kimia ini mengganti-

kan nitrogen yang sebelumnya bersumber dari kotoran ternak dan tanaman kacang-kacangan pemulih nitrogen. Seiring dengan mekanisasi, penggunaan pupuk nonorganik meningkatkan permintaan akan minyak bumi dan listrik, "dengan demikian meningkatkan ketergantungan pertanian pada sektor energi, dan hal ini pun menjadikan sektor energi sebagai bagian sangat penting dari bisnis pertanian, dengan tingkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya" (Cleaver 1977: 17). Selanjutnya, FAO menyetujui sebuah rencana bisnis, atas nama kampanye Bebas dari Kelaparan usulan UN (1960), untuk menyediakan layanan penyuluhan dalam rangka melimpahkan surplus pupuk nonorganik di Dunia Ketiga. Inilah upaya memperdalam ketergantungan pertanian pada sektor energi (Cleaver 1977: 28). Prakarsa multilateral semacam ini menegaskan hegemoni model pertanian padat-energi ala Amerika Serikat.

Terjadi pergeseran penting dalam dinamika akumulasi di sini. Akumulasi secara ekstentif pada rezim pangan pertama lewat penyediaan pangan pokok berharga murah berganti dengan akumulasi secara intensif. Akumulasi intensif ini berlangsung dengan menggabungkan dua proses, yaitu menjadikan pengolahan pangan sebagai bagian tak terpisahkan dari akumulasi itu sendiri, dan melimpahkan bahan pangan pokok secara internasional melalui program bantuan pangan yang dikelola oleh pemerintah Amerika Serikat, yang berbasis program-program dukungan harga. Inti dari akumulasi ekstensif adalah "relasi kompleks terkait makanan awetan" (*durable food complex*) yang memiliki fungsi ganda: menggantikan "cara pengolahan sederhana dan para pembeli produk-produk pertanian tropis sebagai konsumen akhir," dengan "bahan-bahan kimiawi dan biologis pengganti untuk bahan baku industri, termasuk bahan pemanis dan lemak ... [seperti] gula dan minyak goreng dari kacang, sawit, dan kelapa" (Friedmann 1994: 263).

Industrialisasi pangan telah membuka arena baru akumulasi dalam bidang pengolahan dan ritel makanan kemasan, khususnya dengan sirup jagung berfruktosa tinggi, juga bahan-bahan pemanis industrial lainnya yang menyebabkan perubahan mendasar dalam pasar biji-bijian, yaitu dari biji-bijian yang diproses menjadi produk pangan sederhana seperti roti, berubah menjadi bahan baku untuk berbagai makanan olahan. Sementara itu, minyak kedelai, yang semula diproduksi untuk industri mentega, dikembangkan lebih lanjut menjadi makanan kedelai olahan, ditambah lagi dengan jagung hibrida untuk industri ternak yang intensif. Sebagaimana ditunjukkan Friedmann, tiga hal yang rumit ini—gandum, makanan awetan, dan ternak—semakin saling berkait-kelindan sebagai dampak dari dinamika akumulasi yang baru (1994).

Pergeseran pemenuhan kebutuhan pangan Eropa ke arah perengkuhan Dunia Ketiga ke dalam ranah agrobisnis digambarkan sebagai sesuatu yang mendasar bagi "proyek pembangunan" internasional (McMichael 1996). Dengan alasan untuk menyebarkan pertumbuhan ekonomi nasional sesuai model Amerika di masa pascakolonial, proyek yang disponsori Amerika Serikat ini dirancang untuk mempromosikan kebebasan berwirausaha, termasuk modernisasi pertanian. Proyek ini disokong oleh program bantuan militer dan ekonomi secara besar-besaran (untuk menebus defisit dolar), termasuk bantuan pangan bagi negara-negara strategis di garda depan Perang Dingin, seperti Tiongkok di bawah pimpinan Chiang Kai-shek yang merupakan kekuatan antikomunis pada akhir 1940-an (Cleaver 1977: 16). Araghi (2009: 129) berpendapat bahwa tatanan pangan dunia ini "seharusnya dilihat tidak hanya sebagai respons terhadap politik pertanian di Amerika Serikat, tetapi juga sebagai satu cara untuk membatasi ruang gerak nasionalisme sosialis." Di dalam kondisi historis seperti

ini, keamanan pangan yang diusahakan melalui bantuan terhubung erat dengan doktrin pembangunan melalui pembatasan ruang gerak lawan, dan sebaliknya.

Program bantuan pangan Amerika Serikat, yang dilembagakan lewat *Public Law* 480 (PL-480) pada 1954, mendaur ulang surplus pangan dari program-program stabilisasi komoditas sebagai subsidi pangan berskema konsesi untuk negara-negara terpilih di Asia (termasuk Jepang yang sudah diduduki), Timur Tengah, dan Amerika Latin.

> Pada 1950-an dan 1960-an, andil Amerika Serikat dalam ekspor gandum dunia mengalami pertumbuhan, dari hanya sepertiga menjadi lebih dari setengah. Dan ketika Eropa menggantikan produksi domestik dengan impor [replikasi], Dunia Ketiga dan Jepang menjadi importir utama. Andil Dunia Ketiga dalam impor gandum tumbuh dari 19% pada akhir 1950-an menjadi 66% pada akhir 1960-an. (Friedmann 1994: 260)

Program PL-480 menyubsidi kapitalis industri nasional Dunia Ketiga dengan pangan murah. Selain itu, melalui program dana pendamping, program itu meluaskan cakupan produksi agroindustri dengan cara mengekspor teknologi revolusi hijau (pertanian intensif) kepada kapitalis pertanian di negara-negara kunci Dunia Ketiga, termasuk Meksiko, Brasil, Argentina, Venezuela, Filipina, Indonesia, dan India. Dengan cara ini, program "pembangunan nasional" mengokohkan rancangan global Amerika Serikat yang hegemonik, dengan menyediakan dukungan bagi kelas-kelas penguasa setempat atas nama keamanan pangan. Bukti jelas dari fenomena ini adalah transformasi banyak negara Dunia Ketiga menjadi kawasan-kawasan defisit pangan. Di Amerika Latin, selain Argentina dan

Uruguay, seluruh negara berubah dari pengekspor biji-bijian menjadi pengimpor biji-bijian antara 1930-an dan 1970-an (de Janvry 1981: 70). Di Dunia Ketiga secara umum, rasio impor pangan terhadap ekspor pangan meningkat dari 50% selama 1955–1960 menjadi 80% pada 1975 (Araghi 1995). Dan sementara kontribusi Dunia Ketiga dalam impor gandum hanya 10% pada 1950-an, pada 1980-an angka ini melonjak menjadi dua per tiga (Grigg 1993: 241).

Pembangunan nasional adalah salah satu titik poros rezim pangan ini, di mana kekuatan negara yang militeristis di Dunia Ketiga dikaitkan dengan tujuan-tujuan Perang Dingin. Di Amerika Latin, misalnya, investasi negara dalam modernisasi pertanian melaju pesat. Di Kolombia, misalnya, "belanja negara untuk pertanian (termasuk program seperti kredit investasi, bantuan teknis, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya) membengkak lima puluh kali lipat antara 1950 dan 1972" (Burbach dan Flynn 1980: 97), bahkan ketika 78% konsumsi gandum dipasok melalui bantuan Amerika Serikat (Friedmann 1994: 261).

"Modernisasi" pertanian merupakan proyek berbasis kelas dalam dua pengertian: selain memantapkan ikatan antara negara dan tuan tanah dalam rangka memperkuat agrobisnis, juga meredam perlawanan petani dengan "mengakomodasi kebutuhan mereka akan tanah di dalam sistem pasar" (Araghi 2009: 125), sekaligus menyediakan cara berbeda dari contoh yang ditunjukkan oleh revolusi Kuba 1960. Hasilnya, terjadi gelombang penambahan jumlah petani dengan lahan kecil ("*peasantization*") melalui reforma agraria di Dunia Ketiga. Gelombang *pesantization* ini melucuti hak istimewa tuan tanah dan menjerumuskan para petani kecil ke dalam jeratan pasar dan kredit serta skema-skema pemasaran (Araghi 1995). Hasilnya: "sebagian besar unit pertanian keluarga yang bersifat

nyaris subsisten berubah menjadi produsen komoditas skala kecil (yang bergantung pada pemerintah), dan reforma agraria itu secara umum membiarkan sebagian besar tanah paling produktif tetap berada di tangan tuan tanah" (Arighi 2009: 127–128). Di Amerika Latin, sebagian dari tuan tanah besar mengalami transisi dari *latifundistas* (pemilik tanah pertanian besar) menjadi penguasaha agroindustri komersial seiring modernisasi negara, dan dengan dukungan Amerika Serikat, mereka "mengubah reforma agraria menjadi faktor penting dalam kemunculan kelas borjuasi pertanian modern" (Burbach dan Flynn 1980: 100).

Cita-cita pembangunan nasional telah membentuk titik poros kedua rezim pangan yang berpusat di Amerika Serikat, yaitu transnasionalisasi pertanian dan konsumsi pangan. Menyangkut konsumsi, program bantuan pangan memperkenalkan menu pangan ala Amerika Serikat kepada budaya makan lainnya—yang terkenal di antaranya adalah Nigeria dengan impor gandum yang memerangkap ekonomi dalam negeri sehingga harus mengganti sistem penyediaan pangan lokal (Andrae dan Beckman 1985); lalu Mesir dengan rangkaian kebijakan impor gandum yang juga memungkinkan penguatan industri pakan ternak berbahan gandum untuk memenuhi kebutuhan protein hewani para konsumen kelas atas (Mitchell 1991); dan Korea Selatan dengan dana pendamping dari PL-480 telah mendorong munculnya kelas pembuat roti-lapis (*sandwich*) bagi para ibu rumah tangga (Wessel 1983: 173). Dewan yang mengurusi pakan ternak berbahan biji-bijian Amerika Serikat, Feed Grain Council, telah menyalurkan dana-dana pendamping, melalui lebih dari 400 usaha agrobisnis, untuk pengembangan industri ternak dan unggas lokal. Sebuah laporan tahunan PL-480 mencatat bahwa fasilitas semacam ini "akan secara berarti meluaskan pasar pakan ternak berbahan biji-bijian dan pakan ternak

dengan bahan-bahan lainnya" (George 1977: 171–172). Dengan cara ini, penyediaan pangan menjadi lebih bergantung pada pasokan pasar dunia.

Transnasionalisasi agroindustri punya dua ciri: spesialisasi internasional dalam hal input komponen ke arah produk pangan olahan, dan elaborasi kegiatan agrobisnis di hulu dan hilir. Mengenai ciri pertama, Friedmann memopulerkan konsep *"livestock complex"* (tatanan relasi-relasi rumit dalam peternakan), yang mencakup tanaman-bahan-pakan yang baru sebagai input bagi industri pembuatan pakan ternak transnasional yang memasok peternakan intensif (sapi, unggas, babi, ikan/udang) yang kerap dioperaikan secara industrial serta berskala transnasional (1994: 267). Sebagai sesuatu yang betul-betul internasional, tatanan ini meliputi "revolusi produksi jagung (ala Amerika Serikat) dengan mengandalkan bibit hibrida yang mensyaratkan input mekanik dan kimiawi secara intensif: pengenalan besar-besaran satu tanaman Asia, yakni kedelai, yang menggantikan tanaman pakan komersial dengan hijauan yang dimakan ternak dengan merumput (... yang tidak berguna lagi ketika traktor menggantikan hewan pembajak lahan); dan industri bahan pakan baru yang bersifat padat modal, pengelola tanaman pangan sekaligus ternak, serta mengorganisir kedua sektor ini melalui kontrak jangka panjang" (Frietmann 1994: 267–268). Ini bermula dari kesepakatan seusai Perang Dunia II di mana Masyarakat Ekonomi Eropa (*European Economic Community* [EEC]) mengizinkan impor jagung dan kedelai dari Amerika Serikat, sembari menjalankan strategi nasionalisme ekonomi dengan melindungi petani gandum Eropa. Perusahaan-perusahaan transnasional seperti Continental, Cargill, Unilever, dan Bunge and Born meluaskan perdagangan terspesialisasi ini, termasuk mengimpor biji-bijian tropis penghasil

minyak dari Dunia Ketiga (Friedmann 1994: 268–269). Peran sebagai perantara semacam ini paling marak di Amerika Latin, yang dalam konteks gelombang nasionalisasi pada awal 1960-an menyaksikan rententan korporasi agrobisnis beralih dari produksi langsung menuju kegiatan pengolahan dan distribusi. Castle & Cook, misalnya, "melakukan diversifikasi perusahaan induknya di Amerika Tengah menjadi beberapa pabrik, yakni pembuatan bir, pabrik mentega, pabrik pembotolan, dan pabrik minyak biji kapas, selain mengelola tanah-tanah perkebunannya" (Burbach dan Flynn 1980: 103).

Apa yang disebut revolusi hijau adalah wajah nasional dan internasional rezim pangan yang berpusat di Amerika Serikat. Revolusi ini mendaur ulang slogan "memberi makan dunia" dengan cara mendorong penggunaan benih-benih hibrida varietas unggul (gandum dan padi)—yang bergantung pada input kimia (pestisida, herbisida, dan pupuk), irigasi, dan mekanisasi—sebagai kunci bagi modernisasi pertanian. Revolusi ini menggabungkan dua hal, yakni filsafat neo-Malthusian yang mengaitkan peningkatan panen dengan "hantu pertumbuhan populasi" (Gupta 1998: 54–56) dan antikomunisme Perang Dingin, dengan memagari revolusi merah dengan revolusi hijau yang mengutamakan petani komersial; revolusi ini pertama-tama di Meksio, lalu ke Argentina, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Asia Tenggara (Patel 2013: 9, 33). Para petani makmur dilepaskan dari budaya berbagi benih dalam sistem pertanian tumpang sari, agar terpaku dengan sistem monokultur tanaman pangan pokok demi mencukupi konsumsi masyarakat perkotaan. Di balik mitos menciptakan "benih ajaib", persekongkolan revolusi hijau memadukan kekuatan negara, filantropi, United States Agency for International Development (USAID), World Bank, dan agrobisnis, dengan kredit, pemasaran, dan

berderet layanan pendukung bagi kelas pemilik tanah terpilih untuk memastikan keberhasilan hasil panen dan menguatkan cengkeraman ideologi produktivisme (Patel 2013).

Secara nasional, teknologi revolusi hijau berfungsi mengusahakan substitusi impor dalam konteks program bantuan pangan; secara transnasional, revolusi ini mengintegrasikan kawasan-kawasan produsen di Dunia Ketiga ke dalam sirkuit kapital dalam wujud teknologi-teknologi agrobisnis. Konsisten dengan dinamika inklusi/eksklusi rezim pangan, revolusi hijau diwujudkan melalui meningkatnya ketimpangan di pedesaan—antara kawasan-kawasan dengan kualitas ekologis berbeda, antarpetani, antar-buruh tani yang terpapar zat-zat kimia beracun, dan antar-anggota rumah tangga di mana perempuan ditutup aksesnya atas input-input pertanian dan pelayanan penyuluhan. "Pangan kaum tani" (*"peasant foods"*) mengalami diskriminasi, misalnya ketika sayuran hijau tradisional (sumber nutrisi mikro seperti vitamin A) didefinisikan ulang sebagai "gulma" dan menjadi sasaran herbisida dalam proses mengoptimalkan "pangan yang dibeli dengan upah" (*"wage foods"*) sebagai sumber nutrisi utama (Shiva 1991). Produktivitas memang mampu dipertahankan, untuk beberapa waktu, tetapi setelah itu terus merosot (sejalan dengan merosotnya kondisi ekosistem). Pada 1984, seorang petani India berkata: "pupuk kimia membuat hasil tanaman melonjak … sementara pupuk organik membuat tanaman menjadi kuat. Bilamana tanaman tidak kuat, berapa pun pupuk buatan Anda gunakan, lahan tidak akan menghasilkan panen" (dikutip dalam Gupta 1998: 4).

Selama rezim pangan pascaperang ini berlangsung, harga komoditas pertanian nisbi stabil karena perdagangan bahan pangan diatur negara (Tubiana 1989). Rezim ini runtuh ketika pada 1972–1973 untuk pertama kalinya setelah masa perang, hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet membaik dan ber-

sepakat menghapus kebijakan menimbun surplus produksi biji-bijian. Harga biji-bijian dan minyak nabati naik tiga kali lipat, hingga menciptakan krisis pangan dunia pada 1974. Inflasi pangan diiringi pula oleh krisis akumulasi secara umum. Harga bahan bakar melonjak, kerentanan mata uang dolar dalam kancah pasar nilai tukar mata uang pun mendorong dolar Amerika Serikat tergelincir keluar dari standar nilai emas sehingga menanggalkan tatanan moneter Bretton Woods, sementara tingginya tingkat upah menambah tekanan terhadap tingkat keuntungan industri. Semua ini berujung pada pembentukan ulang struktur kapital secara besar-besaran dalam skala global ketika perusahaan dan bank beroperasi secara internasional untuk menangkap peluang tenaga kerja murah di Dunia Ketiga (O'Connor 1984).

Pada 1974, FAO mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pangan Dunia (*World Food Summit*), ketika "jutaan orang dianggap mengalami 'rawan pangan' karena habisnya cadangan surplus Amerika Serikat dan melonjaknya harga biji-bijian dunia" (Friedmann 1993: 245). "Keamanan pangan" saat ini menjadi tujuan mencolok dalam kebijakan UN melalui negara-negara anggotanya, di mana produksi dan distribusi pangan dikaitkan dengan bantuan pangan yang tujuannya secara tersurat dinyatakan sebagai misi kemanusiaan (di mana skema hibah menggatikan penjualan berskema konsesi). Direktur Jenderal FAO Addeke Boerma menegaskan: "Pangan tidak seperti komoditas lain. Jika umat manusia sungguh punya hak atas hidup, maka mereka punya hak atas pangan" (dikutip dalam Jarosz 2009: 50)—pernyataan yang mengingatkan kembali konsep asali tentang keamanan pangan.

Akan tetapi, karena muncul gugatan-gugatan bahwa FAO tidak mampu mengantisipasi dan mengelola krisis pangan, maka Direktur Jenderal FAO berikutnya, Edward Saouma (1976–

1993), berjanji untuk melakukan desentralisasi dan reformasi di dalam tubuh FAO. Situasi ini mencerminkan adanya ketegangan geopolitik yang diperburuk oleh gerakan dekolonisasi radikal dan gairah solidaritas sesaat dari Dunia Ketiga melalui persatuan negara-negara pengekspor minyak Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan Tatanan Ekonomi Internasional Baru (*New International Economic Order* [NIEO])—dan ketegangan itu merembet juga ke FAO. Negara-negara yang tergabung dalam Organzation for Economic Cooperation and Development (OECD) merasa terancam oleh perlawanan Dunia Ketiga, lantas memanfaatkan krisis pangan dan bahan bakar untuk melemahkan mandat kelembagaan FAO mengenai pangan dan pertanian. Mereka mengambil alih pekerjaan "sejumlah badan kerjasama antarnegara yang sering kali mandul secara politis seperti International Fund for Agricultural Development (IFAD), World Food Programme (WFP), Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), World Food Council (WFC) (yang kini sudah dibekukan), dan sebuah agenda pertanian yang sudah sangat kokoh di World Bank" (ETC 2009). Akibatnya, FAO (sebuah institusi dengan sistem satu-negara-satu-suara) dilemahkan oleh tata kelembagaan kompleks yang mewakili negara-negara donor. Visi awal FAO pudar pada 1986, ketika World Bank mendefiniskan ulang keamanan pangan menjadi kemampuan untuk membeli pangan (Jarosz 2009: 51). Pada tahun yang sama juga negosiasi Putaran Uruguay GATT dimulai, yang berujung pada pembentukan WTO pada 1994 serta pelembagaan rezim "perdagangan bebas" yang memang diperlukan untuk mewujudkan visi pasar mengenai "keamanan pangan".

Kesimpulan

Demikianlah, pemenuhan pangan di dua rezim pangan ini mengambil bentuk yang agak berbeda. Pada periode rezim pangan pertama, proses industrialisasi di Inggris dan Eropa semakin digerakkan oleh ekspor biji-bijian murah dari kawasan subtropis dan daging dari Dunia Baru. Proses ini diorganisir dalam bentuk akumulasi ekstensif yang diarahkan untuk menjaga agar upah industrial tetap rendah. Krisis yang dialami rezim ini—dalam wujud ausnya lahan-lahan di wilayah rintisan dan depresi ekonomi secara umum menjelang Perang Dunia II—telah merangsang peralihan ke sebuah bentuk akumulasi intensif yang berpusat pada industri pangan dan sabuk pertanian berorientasi ekspor di Amerika Serikat. Krisis pangan akibat inflasi, yang terjadi karena terbukanya Blok Soviet bagi biji-bijian Amerika Serikat pada 1972–1973, berlangsung sepaket dengan krisis akumulasi secara umum serta kekhawatiran baru akan terjadinya kelaparan dunia.

Pada awal 1970-an, krisis pangan telah memisahkan bantuan pangan kemanusiaan dari pangan yang dijual secara komersial/konsensional. Hal ini membuka pintu bagi pemaduan kembali antara "keamanan pangan" dan penyediaan pangan melalui mekanisme pasar. Pembentukan ulang struktur ini berpusat pada intensifikasi peran Amerika Serikat sebagai "lumbung pangan dunia", suatu prakarsa negara merespons kriris akumulasi (Revel dan Riboud 1986). Proses ini menghasilkan "pembagian kerja internasional yang baru" di sektor pertanian. Pembagian kerja itu terbentuk dalam lingkup tatanan kompleks seputar komoditas transnasional di mana relasi-relasi pro-

duksi dan konsumsi yang melintasi batas-batas negara makin terintegrasi dengan Amerika Serikat sebagai poros perdagangan biji-bijian (Reynolds *et al*. 1993). Dengan demikian, kebebasan berwirausaha di bawah hegemoni Amerika Serikat telah melemahkan cita-cita ideal pertanian (dan ekonomi) nasional, dan dengan begitu membuka jalan bagi rezim perdagangan global yang kian terswastanisasi dan dikelola oleh korporasi transnasional (Cutler 2001), dan muncullah rezim pangan korporat.

BAB 3

Rezim Pangan Korporat

MESKIPUN masing-masing rezim pangan mempunyai wajah dan peran sendiri-sendiri dalam menjalankan kekuasaannya, benang pemersatunya adalah sumbangan pangan terhadap akumulasi kapital melalui penataan sistem negara. Di dalam rezim pangan, definisi tentang sumberdaya pangan dan akses atasnya dipadukan dengan bentuk-bentuk pelimpahannya ke pasar. Perpaduan ini tak lain ditujukan untuk memperkuat relasi-relasi kuasa, dengan cara menyediakan pangan bagi kelas-kelas sosial dan negara-negara, dan/atau dengan menggeser produsen yang tidak mampu bersaing dengan kekuatan pasar yang disubsidi dan dimonopoli. Cara yang disebut terakhir ini merupakan inti dari rezim pangan korporat (McMichael 2005).

Secara kesejarahan, kebangkitan dan terkonsolidasinya kapital sangat bergantung pada pangan—sebagai pembentuk 'politik atas jasad hidup' (*biopolitic*) atau bahan pengolahan guna memenuhi kebutuhan pangan buruh dan memperbesar laba—dan ini pada gilirannya bergantung pada akses atas sumberdaya untuk memproduksi pangan: lahan-lahan rintisan, petani dan buruh tani, jenis-jenis tanaman dan hewan, serta teknologi (dari benih hasil pemuliaan hingga transgenik). Bagaimana pertanian ditata dan pangan diperedarkan bergantung pada perubahan tatanan kekuasaan, ketika negara-negara menaklukkan kawasan rintisan, mengelola wilayah-wilayah yang dikuasai, serta turut membentuk relasi-relasi

kelembagaan-bersama yang memperlihatkan sifat dominan suatu bentuk historis kapital dalam suatu rezim pangan. Rezim pangan korporat menandai munculnya era setelah keruntuhan rezim moneter Bretton Woods—sebuah era di mana 'kiprah merajanya uang' (finansialisasi) dan tatanan neoliberal dalam sistem pasar semakin kuat sebagai sistem pengaturan, yang waktunya membentang dari 1980-an hingga akhir 2000-an.

Rezim Pangan Ketiga?

Apakah rezim pangan "ketiga" sudah terbentuk atau belum masih menjadi perdebatan seru di kalangan para pengkaji rezim pangan (McMichael 2009a; Friedmann 2009; Magnan 2012). Friedmann (2005) melihat periode ini sebagai masa transisi, di mana korporasi transnasional (khususnya pengecer pangan global beserta asosiasinya, GLOBALG.A.P) mengorganisir rantai pasokan pangan-hasil-pertanian dengan menetapkan sendiri aturan mengenai standar mutu pangan sedemikian rupa guna menjawab kepedulian lingkungan dari konsumen, dan aturan itu dimaksudkan untuk menemukan bentuk akumulasi baru serta mengesampingkan standar-pangan umum. Melihat perkembangan ini sebagai "periode uji coba dan pertarungan yang takrampung," Friedmann (2009: 335) mempertanyakan "apakah sudah ada konstelasi relasi-relasi pangan-hasil-pertanian yang cukup stabil yang memungkinkan negara, individu, korporasi, gerakan sosial, dan aktor-aktor lainnya memprediksi hasil dari tindakan-tindakan yang mereka ambil," suatu konstelasi hubungan yang dijadikan lumrah sebagai syarat pembenaran bagi suatu rezim pangan "korporat-lingkungan". Rezim ini mencakup diferensiasi rantai pasokan pangan, yang "digerakkan modal swasta, di mana kadang beberapa

perusahaan yang sama menjual komoditas bermutu dan murah kepada kelas-kelas konsumen berbeda. Di Amerika Serikat, dua supermarket waralaba yang berperan mendefinisikan dua kelas pasar adalah Whole Foods (sangat menarik, nama ini mengambil istilah budaya-tanding era 1960-an) dan Walmart" (Friedmann 2005: 254).

Friedmann (2005: 261) mencatat, suatu sistem pangan mengalami percabangan dalam skala dunia, sebagai "sistem pelengkap di dalam suatu rezim pangan yang sedang bertumbuh." Catatan ini menangkap inti relasi-relasi pangan-hasil-pertanian di dalam suatu pasar yang didominasi korporasi, suatu pasar yang berperan memenuhi ragam permintaan menu pangan berdasarkan kelas sosial. Dalam hal bentuk rezim, muncul pertanyaan mengenai regulasi, juga seputar ada tidaknya "semacam 'tata aturan' yang dapat disimpulkan oleh para pengkaji berdasarkan perilaku ajek dan konsisten dari para aktor terkait: negara, perusahan, korporasi, gerakan sosial, konsumen, dan ilmuwan" (Friedmann 2009: 336). Dalam rumusan ini, suatu rezim membutuhkan "kerangka-bersama hasil negosiasi guna menyusun aturan-aturan baru"—kerangka yang akhirnya bersifat "tersirat" karena proses normalisasi (Friedmann 2005: 234–235). Dan normalisasi membutuhkan stabilitas, yaitu stabilitas sistem moneter internasional yang menciptakan suatu lingkup kebijakan yang memungkinkan aktor-aktor terkait untuk membuat prediksi, serta mencerminkan hegemoni sebuah model pertanian-pangan, "misalnya negara mana yang khusus membudidayakan komoditas tertentu dan negara mana yang menjadi importir" (Friedmann 2005: 234). Ketiadaan mata uang yang benar-benar menjadi mata uang internasional—dalam rangka mencegah Amerika Serikat mengalami defisit dalam anggaran negara dan dalam perdagangan hanya kare-

na dolar terus menjadi mata uang gagal—berarti sistem moneter internasional saat ini bersifat sementara dan takstabil (Friedmann 2009: 339).

Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai unsur pembentuk suatu rezim pangan. Dalam hal ini, Friedmann lebih suka definisi dari Krasner (1983), sebagai fondasi yang menjelaskan kaitan erat antara norma dan aturan main. Definisi ini senada dengan konsep Gramscian dari Giovanni Arrighi (1994) perihal hegemoni internasional, di mana negara dominan menyebut kepentingannya sendiri sebagai kepentingan negara-negara lawan atau bawahannya. Cara kerja hegemoni yang tepat adalah melalui mata uang dominan yang digunakan sebagai mata uang cadangan internasional, sedemikian rupa guna memfasilitasi perdagangan antarnegara. Hegemoni juga adalah selubung yang menyembunyikan relasi-relasi produksi dan kekuasaan.

Dua rezim pangan pertama kurang lebih sesuai dengan definisi tersebut, meskipun dalam pengertian yang sangat berbeda. Emas telah dipilih sebagai komoditas uang dalam skala dunia. Dalam teori, negara-negara berdaulat kiranya bakal mengadopsi standar emas guna mempermudah hubungan-hubungan dagang tanpa memerlukan otoritas keuangan internasional. Tetapi dalam praktiknya, poundsterling Inggris-lah—yang meraja di mana-mana—yang diperlakukan "setara emas" (Polanyi 1957), dan City of London, sebagai pusat keuangan dunia, mendorong perdagangan dengan cara mendistribusikan ulang likuiditas internasional dengan merekayasa saldo sterling mereka (McMichael 1984: 26–27). Akan tetapi, sebagaimana ditunjukkan oleh Polanyi (1957: 214–215), tekanan-tekanan di tingkat nasional yang melekat dalam sistem mata uang dunia telah mendorong negara-negara Eropa untuk membatalkan kerjasama dagang dengan wilayah-wilayah jajahan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyesuaian ekonomi yang

dipersyaratkan oleh sistem pertukaran uang yang menuntut stabilitas di bawah standar emas. Akhirnya, Inggris dipaksa turut serta, dengan memutar haluan perdagangan dan investasi ke negeri-negeri jajahan dan Amerika Serikat pada perempat akhir abad XIX (McMichael 1984: 27–30)—dan barangkali inilah yang menjadikan rezim pangan sebagai sebuah artefak geografis dari ketegangan-ketegangan yang melekat pada rezim emas/sterling. Lebih jauh, negara-negara ini mengembangkan langkah-langkah protektif "yang dirancang untuk menangkal efek buruk perdagangan bebas dan kurs tetap, dan kemampuan mereka memengaruhi kiprah mekanisme-mekanisme tersebut terlihat dari sejauh mana mereka sanggup menangkal efek buruk itu" (Polanyi 1957: 217).

Pada era pascaperang, dolar Amerika Serikat menjadi mata uang cadangan internasional. Tetapi, di bawah kesepakatan Bretton Woods (demi tujuan stabilitas mata uang), beberapa mata uang tidak dapat ditukarkan satu sama lain, dan mobilitas kapital dibatasi. Di sini, likuiditas internasional bergantung pada bantuan luar negeri, baik bantuan ekonomi/pangan ataupun pinjaman lunak oleh World Bank. Walaupun begitu, di dalam rezim ini, korporasi-korporasi multinasional menghindari kontrol Bretton Woods dengan menempatkan laba di luar negeri, yaitu di pasar mata uang Eropa, yang berpusat di London. Didorong oleh belanja militer Amerika Serikat, pada 1960-an, deposit dolar Eropa beranak pinak dari US$3 milyar menjadi US$75 milyar, hingga menimbulkan tekanan berat pada kemampuan dolar untuk menebus klaim dengan emas (Helleiner 1996: 111–113). Kondisi ini takstabil dan, pada 1971, membuat Presiden Nixon memutuskan untuk mengakhiri sistem Bretton Woods terkait nilai kurs tetap.

Pertanyaannya di sini sekarang adalah apakah model yang sama berlaku untuk periode selanjutnya, yaitu periode mere-

dupnya hegemoni Amerika Serikat. Perlu dicatatat dulu bahwa pada dua rezim pertama melekat standar yang membedakan negara/pasar secara biner. Berikutnya kita berurusan dengan sebuah era yang dicirikan dengan bentuk-bentuk baru aturan pasar sebagai sifat yang melekat pada hegemoni korporasi dan penggunaan utang sebagai mekanisme pendisiplinan demi keuntungan dagang dan finansial. Maka pertanyaan berikutnya, apakah standar pembedaan tersebut cukup memadai untuk memotret kerumitan era ini? World Bank atau International Monetary Fund (IMF) telah melakukan pendisiplinan terhadap negara-negara yang terjebak utang. Selain itu, WTO (organisasi yang beranggotakan negara) telah meliberalisasi hubungan dagang (mengurangi proteksi domestik) melalui perluasan pasar multilateral. Hal ini memungkinkan terbentuknya sebuah "rezim swasta" yang terdiri atas korporasi-korporasi transnasional. Mereka inilah yang mendapatkan keistimewaan yang dijamin dalam kesepakatan-kesepakatan WTO (Cutler 2001). Sebagaimana ditunjukkan oleh Claire Cutler, bilamana rezim legal berfokus pada negara sebagai subjek legal, maka rezim swasta berusaha untuk membatasi regulasi pemerintah demi meleluasakan "suasana kompetisi" neoliberal, sehingga menegakkan kembali otoritas sipil melalui kekuasaan informal. Pada gilirannya, kekuasaan informal itu diformalkan dalam kebijakan-kebijakan neoliberal, dan "oleh karenanya lebih berdaulat dari negara" (Cerny 1995: 618). Pokok pendapat Cutler (2001: 144) adalah:

> korporasi-korporasi transnasional semakin berperan dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum internasional secara langsung. Ditambah lagi, pemerintah juga ambil bagian dalam memperluas hak dan kekuasaan korporasi.

> Sebagaimana dicatat Jan Scholte: "pemerintah-pemerintah telah memudahkan perusahan-perusahaan global untuk bergerak dan meraih laba, dengan merancang jaminan kepemilikan, aturan tentang mata uang, rezim pajak, hukum ketenagakerjaan, dan perlindungan oleh aparat kepolisian sebagaimana dikehendaki oleh perusahaan-perusahaan itu."

'Tatanan kompleks pertanian kedelai berorientasi ekspor di Brasil' (*Brazilian soybean agro-export complex*) sesungguhnya memperlihatkan munculnya rezim agrobisnis swasta lewat jalur belakang, yaitu lewat serangkaian tuntutan kepada badan penyelesaian perselisihan WTO, Dispute Settlement Board, dan juga lewat pendanaan lembaga kajian perdagangan dan perundingan internasonalnya Brasil, Institute for the Study of Trade and International Negotiations (ICONE), guna memperkuat agenda-agenda perdagangan bebas yang digerakkan oleh simpul korporasi/negara (Peine 2010: 141–143). Dalam dirinya sendiri, WTO sebenarnya bukan kekuatan hegemonik, mengingat strukturnya yang kompromistis dan bagaimana negara-negara G-20 memperlakukannya. Namun, WTO tetap kelihatan seolah-olah mendukung prinsip keunggulan komparatif dengan mempromosikan kebebasan berinvestasi dan peredaran komoditas oleh korporasi. Ini mengisyaratkan adanya hegemoni korporasi, dalam pengertian bahwa doktrin neoliberal untuk menempatkan "pasar" di atas "negara" telah mengubah negara menjadi pelayan pasar, di mana kuasa-pengaturan keuangan internasional bergeser "dari tangan negara ke lembaga-lembaga 'swasta' seperti Bank of International Settlement" (Nesvetailova dan Palan 2010: 7–8). Dalam konteks ini, World Bank, IMF, dan Bank of International Settlement (BIS) bersekutu dengan OECD,

G-8, dan G-20 dalam mengoordinasikan bank-bank sentral dan departemen-departemen keuangan "untuk mamapankan tata keuangan global yang tengah menguat demi mewujudkan suatu simpul negara-sektor keuangan internasional" (Harvey 2011: 51). Di sinilah barangkali letak ironinya: sementara rezim standar emas melahirkan perlawanan nasional berbasis solidaritas terhadap efek buruk mekanisme kurs mata uang (yang dikelola negara), rezim finansial yang berlaku mensyaratkan suatu perpecahan dalam suatu negara, di mana kelas-kelas berkuasa menegosiasikan stabilitas mata uang melalui perwakilan-perwakilan mereka di lembaga-lembaga keuangan internasional.

Inilah inti rezim swasta. Dari sudut pandang yang melihat negara sebagai pusat, rezim seperti itu mungkin saja tidak memenuhi syarat untuk mewujudkan stabilitas, karena rezim seperti itu merupakan wujud dari konjungtur baru di mana negara-negara semakin diswastanisasi. Di bawah tata aturan seperti ini, para pembayar pajaklah yang menjadi korban saat terjadi krisis. "Stabilitas" semakin tidak didasarkan pada kesesuaian kepentingan dari seluruh elemen dalam sistem negara (yang terwujud dalam mata uang cadangan devisa), tetapi lebih pada kekuatan militer dan ekonomi di bawah anggapan bahwa keamanan ekonomi bergantung pada kesehatan finansial. Pada 1980-an, lebih dari tujuh puluh negara Selatan melaksanakan program penyesuaian struktural, dan ketika memasuki 1990-an, utang mereka sudah bertambah 61% dari nilai utang pada 1982 (Bello *et al*. 1994). Akibatnya, terjadilah pengurangan upah dan layanan-layanan publik secara besar-besaran. Di sini, stabilitas menjadi istilah yang nisbi, di mana "stabilisasi pasar" telah sangat ditentukan oleh hantaman krisis pengetatan anggaran publik (dan krisis keuangan) selama tiga dekade di Selatan, dan merembet ke Utara pada dekade 2000-an. Sebagai rezim yang kejam, premisnya neoliberalisme adalah redistribusi kekayaan,

bukan redistribusi produksi (Araghi 2009; Harvey 2011; Sassen 2011). Rezim pangan korporat sudah sangat identik dengan meluasnya pemiskinan para petani kecil dan peralihan banyak orang menjadi pekerja musiman dalam skala dunia.

Pemiskinan ini sejalan dengan penegasan Pritchard (2009: 297) bahwa WTO "lebih sebagai kelanjutan dari politik krisis rezim pangan kedua, ketimbang sungguh-sungguh menjelma sebagai pengganti rezim itu." Dari perspektif ini, Pritchard (2009: 297) hendak menyampaikan bahwa persoalan utama yang dihadapi para pengkaji rezim pangan adalah "bagaimana menyusun teori yang menjelaskan proses merasuknya pertanian ke dalam WTO." Terdapat sifat khas yang melekat pada rezim pangan korporat, yaitu bahwa untuk pertama kalinya para petani di seluruh dunia diposisikan berhadapan langsung dengan harga pasar dunia. Maka, kalaupun memang masih ada sisa yang berlanjut ke dalam politik pertanian di balahan dunia utara, bagaimana politik seperti itu ditampilkan *secara global* dalam bentuk serangan harga terhadap budaya-budaya kaum tani tetap tak dapat lagi disebut sebagai sisa yang berlanjut itu. Hal itu lebih tepat disebut sebagai babak baru dalam "proses menyatunya pertanian," di mana WTO sudah tunduk patuh pada kepentingan korporasi, ketertundukan yang terlihat dari bagaimana WTO merancang tata harga dunia (bersubsidi) yang bersifat artifisial sebagai inti rezim pangan murah yang digunakan untuk melawan para petani kecil di mana saja.

Konsep "rezim internasional" muncul ke permukaan melalui logika (*episteme*) yang melihat negara sebagai poros. Konsep ini melahirkan proyek rezim pangan yang dalam analisisnya menempatkan relasi-relasi pertanian-pangan sebagai bagian dalam proses pembentukan negara, dan juga melihat sebaliknya. Akan tetapi, mengingat bahwa sistem negara adalah sebuah struktur yang menyejarah, bagaimana sistem itu

berubah dalam ruang dan waktu mengharuskan adanya analisis kesejarahan juga atas konsep tentang rezim itu sendiri. Pada rezim pangan pertama, proyek "pabrik dunia" Inggris telah mengintegrasikan kapitalisme industrial Eropa yang baru tumbuh dengan rantai pasokan pangan yang berasal dari imperium kapital di seberang lautan; pada rezim pangan kedua, Amerika Serikat memanfaatkan secara politis surplus pangan murah untuk menciptakan sekutu dan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh rezim-akumulasi-intensifnya. Meskipun industrialisasi pertanian merupakan kelaziman pada semua rezim, struktur sosial akumulasi dan sistem hubungan antarnegara sangat berbeda dalam dua era tersebut.

Ada kondisi-kondisi yang menyebabkan keruntuhan dua rezim pertama, yaitu ketika para pesaing Inggris memilih langkah melindungi ekonomi nasional masing-masing, dan korporasi transnasional merongrong "liberalisme melekat" (Ruggie 1992) yang didominasi Amerika Serikat pada periode pascaperang. Kondisi-kondisi itu menunjukkan bahwa kontradiksi internal masing-masing rezim tengah berada dalam proses pematangan. Bisa dibilang, rezim pangan korporat telah mengalami suatu siklus serupa: sebuah semimultilateralisme yang dibakukan melalui aturan-aturan WTO yang mengutamakan model 'pertanian industrial berorientasi ekspor' telah menunjukkan pertanda krisis pada akhir 2000-an. Keruntuhan itu terkait erat dengan pemaknaan ulang "keamanan pangan", sebuah kerangka kunci dalam rezim pangan korporat.

Friedmann menilai bahwa pada saat rezim mengalami momen-momen krisis, "aspek-aspek tersirat dari kerangka kunci itu jadi terungkap, yaitu saat rezim tidak lagi bekerja dengan baik, saat tindakan yang sama tidak lagi membuahkan hasil yang sama sesuai harapan. Alhasil, terjadilah perdebatan seputar cara-cara alternatif untuk mengatasi masalah, yang

sebagiannya berkutat pada pemberian nama aspek-aspek dari rezim yang sedang membusuk itu. Bila penamaan itu 'berhasil', itulah pertanda bahwa rezim memang sedang mengalami krisis," misalnya saat menamai ulang 'bantuan makanan' sebagai 'dumping' (Freidmann 2005: 234–235). Ciri khas rezim swasta yang disponsori oleh subsidi negara sebagaimana ditetapkan dalam protokol-protokol WTO adalah suatu asumsi tersembunyi bahwa pasar merupakan sarana paling efisien untuk mempromosikan keamanan pangan dunia. Asumsi ini tidak terbukti pada abad XXI, terlihat dari melonjaknya angka kelaparan selama "krisis pangan". Hasilnya adalah serangkaian debat yang belum selesai mengenai alternatif—mulai dari mengubah harapan akan pertanian skala kecil (dari para pembela agrobisnis hingga pendukung agroekologi), pencaplokan lahan besar-besaran, proteksi produk domestik, hingga HAM (bandingkan, McMichael dan Schneider 2011).

Rezim Pangan Korporat

Rezim pangan korporat membawa warisan rezim pangan sebelumnya, walaupun tetap menampakkan momen baru dalam sejarah politik kapital yang secara konseptual bisa dinamai "proyek globalisasi" neoliberal (McMichael 1996). Proyek ini pada intinya membalikkan tatanan "proyek pembangunan" sebelumnya di mana negara mengelola kekuatan pasar. Sebaliknya sekarang, negara menjadi pelayan bagi sistem pasar. Konsolidasi aturan-aturan pasar berlansung melalui finansialisasi: suatu proses yang memanfaatkan beberapa jalur, dan dimungkinkan oleh krisis utang besar-besaran yang lama menumpuk lalu dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan finansial yang baru (lihat Bab 5).

Secara historis, finansialisasi erat kaitannya dengan kekuatan hegemoni yang menyebabkan surut dan hilangnya batas-batas geografis ekonomi sedemikian rupa sehingga para investor beralih dari kapital tetap menuju bisnis-bisnis keuangan yang lebih fleksibel (misalnya, merger dan surat berharga: mengkonsolidasikan dan menjual utang). Arrighi (2007: 145) menghubungkan finansialisasi dengan upaya terakhir pemerintah Amerika Serikat pada 1980-an, yakni ketika melembagakan aturan-aturan yang mempromosikan pasar-pasar modal yang liberal dan deregulasi perbankan dengan maksud menarik arus modal masuk ke Amerika Serikat dengan meningkatkan suku bunga demi mengatasi surutnya kapasitas produktif industrinya. Deregulasi finansial dimulai pada 1970-an, dengan daya konversi dolar memungkinkan petro-dolar menyebar ke segala penjuru pasar uang untuk melayani kepentingan korporasi dan perbankan global, serta memberi utang kepada negara-negara Dunia Ketiga. Para bankir global (mereplikasi peran City of London pada awal abad XX) mendistribusikan uang kepada negara-negara "pengikut aliran pembangunan" untuk merangsang produksi ekspor (Daly dan Logan 1989: 59). Proses distribusi ini diamankan oleh para bankir utama negara-negara OECD melalui BIS (Cox 1987: 301). Ketika Amerika Serikat menaikkan suku bunga pada 1980, negara-negara pengutang menjadi sasaran program penyesuaian struktural (liberalisasi samua transaksi, privatisasi perusahaan negara, dan desentralisasi politik) di bawah arahan lembaga-lembaga Bretton Woods (World Bank dan IMF) atas nama pemerintah dan bank-bank dari negara-negara Utara (lihat Cammack 2003). Pinjaman Penyesuaian Struktural telah mengubah tatanan negara, karena memaksa negara untuk meliberalisasi kebijakan-kebijakan ekonomi dan menata ulang pembagian kekuasaannya dari kementerian-kementeri-

an berorientasi program (layanan sosial, pertanian, pendidikan, dan sebagainya) kepada bank sentral dan kementerian perdagangan dan keuangan, sehingga merendahkan kedaulatan nasional (Canak 1989).

Ketika menggambarkan gelombang perubahan dalam sejarah politik kapital, Moore (2010: 232) mencatat bahwa pada awal 1980-an "kapital finansial mencuat sebagai kekuatan hegemonik dalam proses akumulasi, sekaligus sebagai kekuatan politik di negara-negara Utara .... Terjadi perubahan epik dari *revolusi* teknologi ke *redistribusi* teknologi, diperkuat oleh aliansi kapital finansial dengan aparatur negara untuk meredistribusi kekayaan dan kekuasaan dari kelas miskin dan kelas produsen ke orang-orang superkaya." Hal ini awalnya dicapai melalui dua perkembangan yang saling berhubungan: pemindahan pabrik dan pertanian dari Utara ke Selatan, dan pematangan rezim utang untuk mendisiplinkan negara melalui kebijakan-kebijakan pengetatan yang ditautkan dengan pertanian berorientasi ekspor. Sebagaimana ditunjukkan Patel (2007: 93, 96), "ekonomi-politik pangan yang baru tidak bersandar pada kendali melalui surplus pangan Amerika Serikat, tetapi melalui utang fiskal negara-negara Selatan ... pihak Utara dapat mengakses pangan murah dari Selatan dengan alasan kebaikan hati—tiap sesuap pangan murah yang dimakan di Utara membantu Selatan membayar utang." Meskipun negara-negara menginternalisasi hegemoni kapital finansial, Friedmann (2009: 339) menjelaskan dampaknya dalam bentuk pemaksaan politis dengan menggunakan kerangka pascahegemoni:

> Maka IMF menjadi peranti penagihan utang atas nama bank-bank Utara; dolar tetap menjadi mata uang dunia tanpa aturan, dan Amerika Serikat mempertahankan kekuatan veto lewat aturan-aturan IMF. Hasilnya, negara-negara Du-

nia Ketiga secara umum beralih dari kebijakan-kebijakan pertanian pangan nasional (termasuk manajemen ekspor) menjadi ekspor yang didominasi korporasi (untuk 'komoditas-komoditas nontradisional' seperti buah-buahan, sayuran dan bunga, serta ikan yang produksinya tidak terikat musim) dan juga memperdalam ketergantungan mereka pada impor biji-bijian.

Rezim utang era 1980-an telah mengonsolidasikan pergerakan internasional yang sudah mulai berlangsung pada rezim pangan sebelumnya; konsolidasi ini terlihat saat negara-negara Selatan mengadopsi model pertanian berorientasi ekspor sebagai wujud dari model "keunggulan komparatif" yang dikendalikan korporasi, di bawah istilah "internasionalisasi baru pertanian" (Reynolds *et al*. 1993). Friedmann (1991) menamai negara-negara ini sebagai "Negara-Negara Pertanian Baru" (*New Agricultural Countries* [NACs]) sebagai pasangan Negara-Negara Industri Baru (*Newly Industrializing Countries* [NICs])—menekankan peran relasi-relasi pertanian pangan dalam pembentukan ekonomi-politik internasional.

Fenomena Negara-Negara Pertanian Baru memunculkan kajian-kajian tentang "rantai nilai", yakni proses-proses mengontrol dan mengambil manfaat dari ekspor nontradisional buah-buahan dan sayuran dari Selatan (Le Heron 1993; Friedland 1994; Llambi 1994; Reynolds *et al*. 1994). Fenomena ini juga merangsang munculnya penelitian susulan mengenai beragam komoditas seperti udang, unggas, boga bahari (*seafood*) kalengan, nanas kemasan, dan buah segar dari Thailand (Goss dan Burch 2001); kacang hijau, wortel dan jagung, serta kacang kapri dari Kenya (Dolan dan Humprey 2000); tomat produksi korporasi dari Meksiko (Barndt 2008); juga analisis global

Pritchard dan Burch (2003) mengenai sumber dan bentuk-bentuk berbeda produksi tomat.

Pada awal 1990-an, "penyediaan global" (*global sourcing*) pangan yang dikendalikan oleh korporasi transnasional paling tampak pada teknologi modifikasi benih, pendinginan, dan pengawetan; dan pengangkutan buah serta akses atas sayur nonmusiman, atau sepanjang tahun, bagi konsumen yang relatif makmur menjadi tersedia melalui pengelolaan perkebunan-perkebunan besar di negara-negara Salatan. Di sini korporasi-korporasi transnasional menjalin kontrak dengan petani-petani Dunia Ketiga untuk memproduksi tanaman-tanaman holtikultura tertentu dan buah-buahan serta sayuran nonmusiman, juga pangan olahan seperti jus buah, buah kalengan, sayuran beku, daging sapi kemasan, dan potongan-potongan ayam (umumnya di zona-zona industri pangan olahan untuk ekspor). Hal ini ditujukan untuk memasok supermarket-supermarket yang sedang berkembang di Eropa, Amerika Utara, dan Asia-Pasifik. "Revolusi hijau kedua" memungkinkan proses global ini (DeWalt 1985), yang dapat dibedakan dengan revolusi hijau pertama dengan melihat beberapa *peralihan*: dari prakarsa negara ke swasta, dari pangan pokok menjadi pangan bernilai tinggi (protein hewani, buah dan sayuran, bahan pakan ternak kimiawi), dan dari pasar domestik menjadi global.

Transnasionalisasi peredaran pangan telah menggantikan model ekspor pangan bilateral dan teknologi agroindustri yang dikelola negara, yang merupakan ciri dari rezim pangan pascaperang. Memasuki abad XXI, sekitar sepertiga perdagangan ini adalah jual beli antar-anak perusahaan korporasi. Dengan munculnya ritel global, pengambilalihan sistem pangan domestik Dunia Ketiga oleh korporasi (termasuk sektor benih, pupuk, dan input kimia) meluaskan pasar global serta ran-

tai pasokan global dan regional. Sebagaimana dicatat John Wilkinson (2010: 157): "selama 1980-an, bioteknologi yang sangat mengandalkan paten tengah merevolusi sektor-sektor input genetik dan kimia pertanian. Lobi-lobi bersama yang dilakukan oleh sektor ini dan sektor farmasi telah menggiring negara-negara berkembang untuk menerima pemberlakuan paten untuk produk-produk pangan, juga telah membangun prakondisi agar negara-negara berkembang bergabung dengan WTO." Pemberlakuan paten itu dilembagakan dalam kesepakatan seputar hak atas kekayaan intelektual dalam perdagangan dunia, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Penerapan kesepakakatan TRIPs harus dibayar dengan pelemahan atas kedaulatan negara, demi penerimaan sebagai anggota WTO—dan ini merupakan pelemahan ganda, sebab negara-negara Selatan merupakan tempat asal sebagian besar informasi genetika (Wiessman 1990). Dari sini, tuduhan belangsungnya "penjajahan ulang" (Raghavan 1990) menjadi relevan.

Dengan terbentuknya pembagian kerja pertanian internasional, kecenderungan-kecenderungan yang sudah ada dari rezim pangan sebelumnya telah berkembang dan makin mapan, di antaranya peningkatan porsi ekspor biji-bijian oleh OECD dari 73% menjadi 82% antara 1976 dan 1996, dan negara-negara Selatan mengimpor 60% dari volume biji-bijian dunia. Pada saat bersamaan, Negara-Negara Pertanian Baru meningkatkan porsi ekspor boga bahari dan membuat pasar dunia bagi buah dan sayuran membengkak tiga kali lipat. Negara-negara OECD menjadi pemasok utama varietas tanaman dunia. Di sini, peralihan paling penting bersifat politis. Pistorius dan van Wyk (1991: 51) merumuskannya sebagai berikut:

Munculnya Tatatan Pertanian Pangan Ketiga menyingkap suatu kecenderungan di mana industri swasta menggantikan negara sebagai pusat pengembangan budidaya komoditas. Sejak 1980-an, pertumbuhan investasi negara dalam Penelitian dan Pengembangan pertanian telah surut, dan industri swasta telah memegang kendali lebih besar dalam hal alokasi dana publik untuk Penelitian dan Pengembangan pertanian, sementara investasi swasta dalam penelitian pertanian meningkat pesat. Perkembangan ini diiringi penataan ulang sektor pembenihan yang merangsang pertumbuhan konglomerat industrial bidang pengembang budidaya komiditas yang berbasis di negara-negara OECD. Dengan kapasitas teknologi yang tak tertandingi dan menumpuknya finansial pada konglomerasi-konglomerasi industri ini, sepertinya mereka akan menjadi aktor-aktor utama dan kekuatan penggerak pengembangan budidaya komoditas di tatanan Pertanian Pangan Ketiga.

Tata Kelola

Tatanan baru ini muncul melalui perpolitikan seputar Putaran GATT yang berujung pada terbentuknya WTO. Politik tersebut ditandai transisi mendasar yang berlangsung dalam ekonomi dunia—antara prinsip *residu-nasional* (*residual national*) yang berasal dari sebuah periode dengan perdagangan dan investasi yang lumayan terkelola, dan prinsip *pemunculan-global* (*emergent global*) yang lebih ditandai oleh kebebasan dalam perdagangan dan pergerakan kapital. Prinsip-prinsip ini tidak terpilah secara tegas, sebagaimana tampak dalam kemampuan Amerika Serikat dan Uni Eropa khususnya dalam mempertahankan (secara terselubung) subsidi-subsidi perta-

nian sembari mengampanyekan norma liberalisasi universal. Bisa dikatakan bahwa secara formal multilateralisme GATT memang mencerminkan kerjasama antarnegara, tetapi secara substantif memuat upaya penyusunan mekanisme-mekanisme regulasi global yang melemahkan kedaulatan negara guna memperkuat suatu tatanan sosial yang khas demi akumulasi global. Menonjolnya suara korporasi di Putaran GATT memperlihatkan gelagat ini. Di sini, perusahaan-perusahaan pangan, para pedagang biji-bijian, dan khususnya industri kimia mendesak GATT untuk menghentikan program-program pertanian, menghapuskan sistem pengelolaan pasokan dan menurunkan harga-harga dengan cara membiarkan para produsen berhitung dengan perbedaan ongkos tenaga kerja di seluruh dunia (Ritchie 1993: 27). Multilateralisme GATT diperumit oleh hadirnya internasionalisasi kapital produktif dan finansial (Hoogvelt 1997). Di sini, "penyediaan global" oleh perusahaan-perusahaan transnasional melemahkan strategi kompetisi internasional yang dijalankan oleh ekonomi nasional, dan pasar modal global melucuti kekuasaan pengambil keputusan di tingkat nasional untuk mempertahankan mata uang mereka (McMichael 1993).

Peralihan yang dijalankan GATT dari perdagangan komoditas pertanian bilateral ke multilateral, via standarisasi aturan main dan penyusutan tarif secara umum, menunjukkan satu dimensi konstitusional yang mengaktifkan anggota-anggota (baru) (Winters 1990: 1298). Kecenderungan konstitusional itu memberi legitimasi bagi rezim perdagangan bebas yang baru, kendati tidak ada suatu negara hegemonik yang membentuk aturan-aturan mainnya sendiri. Negara-negara anggota menetapkan aturan pasar dunia yang disebut sebagai "arena yang setara" dan "harmonisasi". Penamaan seperti itu digunakan untuk mengistimewakan kepentingan negara-negara

Utara (dengan sumberdaya yang tak dapat dijangkau negara-negara Selatan), di mana sistem subsidi dibiarkan tetap berlangsung.

Meskipun merupakan warisan dari rezim sebelumnya, beragam subsidi itu kini berperan sebagai peranti pasar dunia yang kompetitif, yang menguntungkan para pedagang dan ritel pangan, dan secara institusional melekat pada WTO. Kalau subsidi awalnya diadakan sebagai mekanisme pengaturan di tingkat nasional, dan menyokong rezim bantuan pangan Amerika Serikat, kini subsidi itu memperkuat rezim pasar korporat. Mekanisme baru ini, yang bersandar pada arahan dari lembaga keuangan internasional, mensyaratkan pengurangan perlindungan negara terhadap pasar nasional, serta penataan ulang sistem negara untuk mengamankan peredaran pangan transnasional. Selain itu, cakupan kelembagaan dan kompleksitas dari warisan institusional hegemoni Amerika Serikat (BIS, IMF, dan World Bank) merupakan "faktor utama yang memperkuat otonomi ... dari setiap negara anggota dalam sistem antarnegara ... dan korporasi-korporasi transnasional telah berkembang menjadi sebuah sistem terintegrasi dalam hal produksi, pertukaran, dan akumulasi, yang tidak tunduk pada pemerintah mana pun tetapi punya kuasa untuk membuat setiap negara anggota dari sistem antarnegara itu tunduk pada 'hukum'-nya" (Arrighi 1990: 403). WTO memadukan warisan ini dengan merumuskan "konstitusi tunggal ekonomi global" (Ruggiero 1996). Artinya, bukannya memajukan kedaulatan rakyat dan melindungi kehidupan di atas laba, ini "pada dasarnya merupakan konstitusi pertama yang berlandaskan aturan-aturan dagang dan aturan-aturan wirausaha" (Shiva 2000: 58).

Dengan mengabaikan Piagam UN mengenai HAM (1947), WTO mengambil alih regulasi-regulasi nasional dalam sek-

tor kesehatan, sosial, dan lingkungan yang membatasi perdagangan, lalu mendesak agar regulasi-regulasi seperti itu diterjemahkan ke sistem tarif yang jelas dan dapat dihitung, yang bisa diturunkan seiring waktu. Selanjutnya, suatu hierarki subsidi dibangun, di mana beragam subsidi (yang hanya sanggup dibiayai oleh negara-negara Utara) dimasukkan ke dalam "kotak-kotak", yang disusun menurut derajat proteksinya (Herman dan Kuper 2003: 35–36). 'Sistem kotak' ini sudah terbukti menguntungkan negara-negara Utara yang memasukkan pembayaran-pembayaran terpisah (*decoupled*) subsidi pertanian ke dalam Kotak Hijau, sebagai subsidi yang "tidak-mendistorsi-perdagangan". Pembayaran-pembayaran "terpisah" itu adalah pembayaran langsung kepada petani ketimbang menggunakan subsidi harga yang mendistorsi "perdagangan bebas". Kebijakan Pertanian Bersama (*Common Agricultural Policy* [CAP]) Eropa, khususnya, menjustifikasi penataan seperti itu melalui prakarsa "pembangunan desa" di mana pembayaran secara langsung kepada produsen pertanian mendukung "keanekagunaan" (*multifunctionality*) pertanian (tetapi lihat McMichael 2011a). Kombinasi pengurangan bea masuk melalui "tarifikasi", dan perlindungan atas subsidi-subsidi pertanian di Utara melalui 'sistem kotak', mensyaratkan adanya suatu sistem regulasi yang mengalihkan sumberdaya dari negara ke tangan swasta di Utara, dan mengekspor kerawanan pangan ke Selatan melalui dumping.

Akibatnya, rezim WTO mewakili suatu bentuk baru tata kelola pembangunan dengan seperangkat aturan bersama (berbeda dengan syarat-syarat penyesuaian struktural yang diterapkan secara terpisah oleh lembaga-lembaga Bretton Woods). Tata kelola ini ditopang oleh kesepakatan multilateral dan diterapkan oleh masing-masing negara anggota dalam sebuah institusi yang memiliki ranah kekuasaan independen.

Aturan-aturan ini mensyaratkan situasi pasar yang seragam seolah-olah seluruh negara setara (dengan beberapa pengecualian bagi apa yang disebut 'negara-negara tertinggal', *Least Developed Countries* [LDCs]). Skema ini disokong oleh mekanisme terpadu dalam hal penyelesaian perselisihan, yang memungkinkan pendisiplinan kebijakan negara seturut aturan-aturan "perdagangan bebas". Protokol Kesepakatan Pertanian (AoA), mendukung pengurangan universal dalam hal proteksi dagang, subsidi pertanian, dan intervensi pemerintah; dalam protokol ini termuat asumsi tersirat bahwa pasar adalah alat menuju keamanan pangan dunia. Aksioma ini terlihat pada klaim Amerika Serikat selama Putaran GATT yang menyatakan "kemandirian dan keamanan pangan tidak sama dan sebangun. Keamanan pangan—kemampuan untuk mendapatkan makanan yang Anda butuhkan ketika Anda membutuhkannya—paling baik disediakan melalui pasar dunia yang bekerja dengan lancar" (dikutip dalam Ritchie 1993: 25). Kesadaran yang makin tumbuh mengenai kelemahan-kelemahan yang melekat pada tata ekonomi dunia di mana tidak ada pengakuan hak asasi atas pangan menjadi penanda kuat atas krisis rezim pangan masa kini (De Schutter 2012)—lihat bab 6.

Perputaran Pangan, Pemiskinan, dan Ketergantungan

Rezim perdagangan bebas WTO telah menggalakkan peredaran pangan yang ditandai dengan pembangian kerja pertanian secara global. Hal ini mengakibatkan tertekannya harga pangan dunia sekurang-kurangnya sepertiga selama setengah dekade (Ritchie 1999). AoA melarang sistem dukungan harga yang "artifisial", dan menuntut negara-negara Selatan melakukan deregulasi, sementara negara-negara Utara "menempatkan dalam kotak" subsidi mereka (yang dikhususkan membantu pertanian korporat). Hal ini memungkinkan pemisahan subsidi dari

harga, menghilangkan harga dasar, dan menetapkan "harga pasar" artifisial (jauh di bawah ongkos produksi) bagi surplus biji-bijian Utara yang dilimpahkan melalui dumping ke pasar dunia, dan korbannya adalah para petani nonkorporat di mana-mana. Pada 2002, harga rata-rata ekspor produk pertanian Amerika Serikat berada di bawah biaya produksi, 43% untuk gandum, 25% untuk kedelai, 13% untuk jagung, dan 35% untuk beras (IATP 2004: 3).

Aturan WTO mengenai impor minimum (menyasar strategi kemandirian nasional) mengintensifkan dampak pengurangan harga dunia ini terhadap petani yang tidak dapat berkompetisi, yang berujung pada semakin cepatnya pemiskinan petani kecil. Pada 2000, Oxfam bertanya: "Bagaimana mungkin seorang petani yang memperoleh US$230 setahun (rata-rata pendapatan per kapita di negara-negara tertinggal) berkompetisi dengan petani yang menikmati subsidi sebesar US$20.000 per tahun (rata-rata subsidi di negara-negara OECD)?" (dikutip dalam Bailey 2000). Antara 1998 dan 1999, pendapatan pertanian di Inggris Raya turun 75%, sehingga memaksa 20.000 petani meninggalkan ladang, dan pendapatan pertanian di Amerika Serikat berkurang nyaris 50% pada 1990-an (Lehman dan Kerbs 1996; Gorelick 2000: 28–30). Di dunia Selatan, perkiraan konservatif FAO di enam belas negara Selatan mengklaim bahwa antara 20 sampai 30 juta orang telah kehilangan tanah akibat liberalisasi perdagangan produk pertanian (Madeley 2000: 75). Kecenderungan yang mengiringinya adalah "deagrarianisasi": di Afrika pada akhir 1990-an, sejumlah bukti menunjukkan bahwa sekitar 60%–80% pendapatan rumah tangga pedesaan berasal dari sumber-sumber di luar lahan pertanian (Bryceson 2004: 618–619), dengan rumah tangga termiskin paling bergantung pada sumber di luar pertanian, yakni pada pekerjaan informal dan musiman (Bernstein 2005; Bezner Kerr

2005). Di Asia, antara 30%–40% pendapatan rumah tangga petani disokong dari sumber nonpertanian (Kabeer dan Tran Thi Van Ahn 2002), sementara sebagian besar petani kecil Amerika Latin adalah semiproletar yang mengalami tekanan ganda dalam mengakses tanah dan pekerjaan: "akses mereka atas sumber pendapatan nonpertanian, umumnya kerja upahan musiman, memungkinkan mereka mempertahankan tanah, sehingga menghambat proses proletarisasi total" (Kay 2006: 472; bandingkan Scoones 2009).

Pada 2000, Kementerian Pertanian India menemukan: "pertumbuhan pertanian melemah selama 1990-an. Pertanian telah menjadi profesi yang kurang menjanjikan karena rezim harga yang tidak menguntungkan dan rendahnya nilai tambah, yang menyebabkan ditinggalkannya pertanian dan terjadinya migrasi dari wilayah pedesaan" (dikutip dalam Paringaux 2004: 4). Hampir 2 juta *campesinos* Meksiko kehilangan ladang jagungnya akibat ekspor jagung murah dan bersubsidi besar dari negara-negara Utara, dalam kerangka Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), dan petani Amerika menghadapi digenjotnya impor buah-buahan dan sayuran Meksiko yang sangat kompetitif, dengan sekitar 33.000 usaha tani kecil lenyap—enam kali lipat dari penurunan yang terjadi selama setengah dekade sebelumnya (Carsen 2003; Public Citizen 2001a: iv). Dengan kata lain, subsidi-subsidi bagi korporasi beserta peredaran pangan transnasional telah berpadu dalam menyerang petani kecil dari segala arah.

NAFTA adalah contoh nyata dari proses pencaplokan tanah petani kecil di seluruh dunia. Pada 1994, NAFTA memaksa Meksiko untuk terbuka bagi 100% hak penanaman modal asing (sebagai awal ke arah perjanjian tentang aturan-aturan investasi terkait dengan perdagangan, *Trade-Related Investment Measures* [TRIMs] di bawah WTO). Ketika itu, anak perusahaan

Green Giant dari Pillsbury memindahkan pengolahan makanan beku mereka dari California ke Meksiko untuk mendapatkan buruh murah, standar keamanan makanan yang minim, dan tarif gratis untuk mengekspor kembali ke Amerika Serikat. Cargill membeli pabrik pengolahan sapi dan ayam di Saltillo, dan Cargill de Mexico menanamkan investasi nyaris US$200 juta dalam pengolahan minyak goreng dan kedelai di Tula. Selanjutnya, Tyson Foods membuka operasinya di Meksiko, Brasil, Argentina, dan Venezuela; ConAgra mengolah minyak nabati di Argentina; Archer Daniels Midland menggiling biji-bijian dan menyuling minyak nabati, menggiling jagung dan membuat tepungnya, serta melakukan rekayasa biologis untuk pakan ternak di Meksiko, Amerika Tengah, dan Selatan; dan Wal-Mart membuka usaha di Meksiko, Argentina, dan Brasil (Public Citizen 2001a: ii–iv, 19–21). Public Citizen (2001b: 13) mencatat: "agrobisnis telah menciptakan platform-platform baru bagi ekspor yang membuat para petani dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada saling berhadap-hadapan dalam pertarungan untuk mempertahankan diri seiring semakin rendahnya harga yang dibayarkan kepada produsen."

Aturan AoA mengenai impor minimum menjamin "hak mengekspor", dan dengan begitu melembagakan "keamanan pangan" berbasis pasar. Pada pertengahan 1990-an, setengah dari jumlah valuta asing di 88 negara berpendapatan rendah dan defisit pangan digunakan untuk impor pangan (LeQuesne 1997), dan terjadi kenaikan biaya pembelian pangan di negara-negara dengan ketergantungan pangan, sebesar rata-rata 20% antara 1994 dan 1999, meskipun harga sangat rendah (Murphy 1999: 3). Pada pertengahan 2000-an, 70% negara-negara Selatan menjadi net-impotir, yakni negara-negara dengan tingkat impor pangan lebih tinggi daripada ekspornya (GRAIN 2008: 2).

Ketergantungan atas pangan merupakan pasangan dari proses sentralisasi cadangan pangan global—60% di tangan korporasi, enam di antaranya mengendalikan 80% perdagangan gandum dan beras dunia, dengan hanya tiga negara memproduksi 70% jagung untuk ekspor (Angus 2008). Dari 1970 sampai 2000, terjadi penurunan persentase ekspor produk pertanian dari Afrika (10% menjadi 3%), dari Amerika Latin dan Karibia (14% menjadi 12%), dan dari "negara-negara tertinggal" (5% menjadi 1%), berkebalikan dengan peningkatan persentase ekspor dari negara-negara Utara, dari 64% menjadi 71% (FAO 2004). Sementara korporasi pangan negara-negara Utara mendominasi perdagangan internasional, "penjualan lokal oleh anak-anak perusahaan pengolahan pangan melonjak lima kali lipat tingkat ekspor pangan olahan dari Amerika Serikat ke negara-negara lain (Reardon dan Timmer 2005: 28). Dengan kata lain, raksasa-raksasa ritel seperti Tesco (Inggris Raya), Wal-Mart (Amerika Serikat), Ahold (Belanda), dan Carrefour (Prancis) mengolonisasikan pasar-pasar domestik dari dalam, menggenapi warisan para pedagang biji-bijian pada rezim pangan sebelumnya.

Secara keseluruhan, komoditas-komoditas ini membentuk kemanunggulan sistem pangan dunia yang digerakkan untuk memasok kelas konsumen yang terbagi dua, masing-masing dengan pangan bernilai tinggi dan rendah. Jumlah konsumen ini kurang dari setengah populasi dunia. Lalu siapa yang setengahnya lagi? Pada rezim pangan sebelumnya, penyediaan pangan murah memenuhi tujuan-tujuan strategis negara adikuasa, yang terbatas pada tenaga kerja upahan tertentu. Penyediaan pangan global melalui perdagangan secara umum, atas nama "keamanan pangan" dunia, diungkapkan oleh petinggi Cargill: "Keyakinan bahwa kebutuhan terbesar sektor perta-

nian di negara-negara berkembang adalah mengembangkan kapasitas untuk menumbuhkan bahan pangan bagi konsumsi lokal adalah keliru. Keyakinan ini menyesatkan. Negara-negara itu seharusnya memproduksi apa yang paling baik bisa mereka produksi—dan mereka perdagangkan" (dikutip dalam Lynas 2001). Rezim perdagangan pangan korporat menyasar konsumen dari kalangan pekerja upahan demi tujuan ganda, yaitu memperbesar kelenturan konsumsi pangan (dari "dagingisasi" ke diferensiasi produk) dan untuk memperluas pasar pangan melalui perdagangan yang takadil. Kendati terus mengusung klaim tentang jaminan pangan murah, rezim ini berdampak negatif terhadap mayoritas penduduk dunia penghasil pangan (ETC 2009: 1), melemahkan praktik bertani dan penyediaan pangan informal yang terjadi melalui pasar tradisional, pedagang kaki-lima, dan sistem sumberdaya-bersama.

Sebagaimana dirumuskan oleh gerakan tani internasional Vía Campesina (2000): "pergerakan pangan secara besar-besaran di seluruh dunia juga memaksa peningkatan pergerakan manusia," yakni beralihnya keluarga petani kecil menjadi tenaga kerja musiman (McMichael 1999), dan dengan begitu meneguhkan pentingnya menganggap rezim pangan sebagai relasi nilai global yang menyeluruh. Rezim seperti itu mensyaratkan penggunaan 'senjata harga' dalam melawan para produsen skala kecil, juga mensyaratkan penggabungan relasi-relasi konsumsi dan sumberdaya pangan di tingkat lokal ke dalam sistem peredaran pangan global. Paradoks rezim pangan korporat terlihat saat rezim ini mengaku sebagai penjamin keamanan pangan, tetapi sesungguhnya ia memperburuk kondisi manusia dengan pelaksanaan kuasa monopolinya. Konsekuensi negatif pasar global yang terpadu adalah menyebarnya kemelaratan; hal ini terjadi karena pasar "bebas" menyingkirkan dan/atau menyebabkan kelaparan orang-orang

yang telah mengalami pemiskinan karena penerapan pasar bebas itu; pasar "bebas" itu juga menyebabkan orang-orang dari wilayah pedalaman di tanah jajahan mengalami kekurangan pangan secara tak terlihat dan diskriminasi ras, suatu prasyarat agar pembangunan dan konsumsi melimpah di perkotaan bisa terpenuhi. Krisis agraria yang makin mendalam secara global sebagai cerminan atas kontradiksi mendasar dalam rezim pangan menumbuhkan perlawanan meluas terhadap korporasi pertanian. Perlawanan ini mewujud dalam gerakan kedaulatan pangan yang mengklaim bahwa "pangan pertama-tama dan terutama adalah sumber nutrisi, dan setelahnya baru sebagai barang dagangan" (Vía Campesina 2002: 8)

Kedaulatan Pangan

Perintis gerakan "kedaulatan pangan", Vía Campesina, terbentuk dari sebuah pertemuan di Mons, Belgia pada Mei 1993 yang diikuti kelompok-kelompok petani dari benua Amerika, Eropa, dan Asia. Krisis agraria yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan neoliberal adalah pemicu bagi sebuah gerakan yang akan secara terbuka memperjuangkan kedaulatan pangan di KTT Pangan Dunia FAO di Roma pada 1996 (Nicholson 2008: 456). Nicholson (2008: 457) merangkum pengertian kedaulatan pangan itu sebagai berikut: "Kami mengusulkan pasar pangan lokal, hak bagi semua negara untuk melindungi tapal batas mereka dari pangan impor, pertanian berkelanjutan dan pelestarian keanekaragaman hayati, pangan sehat, lapangan kerja dan penghidupan yang kokoh di wilayah pedesaan." Gerakan itu sendiri menegaskan:

> Kebijakan-kebijakan neoliberal mengutamakan perdagangan internasional, bukannya pangan untuk rakyat. Kebijak-

> an-kebijakan itu sama sekali tidak melakukan apa pun dalam rangka pemberantasan kelaparan di dunia. Sebaliknya, kebijakan-kebijakan itu telah meningkatkan ketergantungkan rakyat terhadap produk-produk pertanian impor, juga telah menguatkan industrialisasi pertanian, sehingga membahayakan warisan genetika, budaya, dan lingkungan planet kita, serta kesehatan kita. Mereka telah memaksa ratusan juta petani untuk meninggalkan praktik-praktik pertanian tradisional, untuk beramai-ramai meninggalkan desa atau merantau. Lembaga internasional seperti IMF, World Bank, dan WTO telah menerapkan kebijakan-kebijakan yang diarahkan oleh kepentingan perusahaan-perusahaan raksasa internasional dan kekuatan-kekuatan besar .... WTO sama sekali tidak kompeten menangani persoalan-persoalan pangan dan pertanian. Karena itu, Vía Campesina menghendaki agar WTO keluar dari [urusan] pertanian. (Vía Campesina 2003)

Bagi Vía Campesina, rezim pangan korporat mengandung kontradiksi mendasar: "antara pertanian industrial yang tersentralisasi dan dikendalikan korporasi versus produksi berkelanjutan berorientasi pasar domestik yang terdesentralisasi berbasis petani kecil dan keluarga." Karena perbedaan ini disembunyikan dalam perundingan-perundingan dagang, maka WTO "sungguh lembaga yang takmemadai untuk pengambilan keputusan yang demokratis" mengenai kedaulatan pangan dan keberlanjutan sosial dan ekologis (Vía Campesina 1999: 3).

Sebagai suatu intervensi strategis, kedaulatan pangan adalah gabungan dua hal sekaligus, yaitu secara formal mengatasi kebutuhan-kebutuhan mendesak dan secara substantif sebagai ancangan mengenai alternatif-alternatif jangka panjang. Secara formal, kedaulatan pangan menyuarakan hak bangsa-bang-

sa untuk melindungi produksi dan produsen pangan dalam negeri, yaitu mereka yang "saat ini memproduksi mayoritas pangan dunia" (Vía Campesina 2008). Sudah terlihat upaya-upaya awal untuk memperbaiki konstitusi negara agar memuat pelembagaan kedaulatan pangan. Secara substantif, gerakan ini menawarkan ontologi alternatif: menegaskan hak-hak yang melampaui hak-hak berbasis pasar, di mana identitas agraria didasarkan pada tatanan nilai yang mengikat subjektivitas dan kepedulian pada ekologi sebagai syarat bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial. Mempertahankan "jalan petani" ("*peasant way*") bukan berarti menjaga suatu "budaya", tetapi menguatkan praktik-praktik budaya yang tidak menempatkan pangan dan pertanian melulu dalam bentuk harga. Dengan langkah seperti itu, gerakan kedaulatan pangan menegaskan bahwa beragam budaya pertanian-pangan tidak bisa sejalan dengan rezim pangan monokultur yang menjadikan pangan sekadar sebagai objek dan komoditas (fetisisme) demi akumulasi kapital.

Cita-cita kedaulatan pangan, untuk jangka panjang, menggoyahkan tatanan yang berpusat pada negara. Gerakan ini memperjuangkan peninjauan ulang teritorialisasi negara dengan menghidupkan kembali prinsip ekologi pangan lokal dan pengakuan terhadap hak rakyat atas tanah. Visi ini memperlihatkan logika pikir (*episteme*) pemberadaban sebagai buah dari krisis umum kapitalisme yang terlihat jelas (lihat Bab 7). Di luar soal makin surutnya hegemoni negara, kontradiksi rezim pangan korporat adalah bom waktu yang suatu saat meledak mengingat bahwa pertanian industrial membahayakan lingkungan dan mengakibatkan penyingkiran kelas-kelas sosial tertentu. Sadar bahwa negara terlibat dalam proyek pasar neoliberal, gerakan kedaulatan pangan berupaya menata ulang negara (dan relasi-relasi keruangannya) melalui

politik "kewargaan agraria" (Wittmann 2009). Politik seperti ini berusaha mengembalikan fokus pada hak-hak kolektif, membangun koalisi dengan gerakan keadilan sosial lain, dan menjadikan ekologi, alih-alih pasar, sebagai pengikat relasi sosial. Marc Edelman (2009) berpendapat bahwa lebih dari sekadar kategori analitis, "kepetanian" ("*peasantness*") itu bersifat politis. Patel (2007: 88, 91) memandang hak-hak atas kedaulatan pangan sebagai "sarana untuk menggerakkan relasi-relasi sosial," yang kemudian menjadi "sebuah seruan untuk meletakkan pangan kembali menjadi politik berbasis massa, dengan mengajak rakyat untuk menemukan makna hak atas pangan bagi komunitas mereka sendiri dengan menimbang kebutuhan, iklim, geografi, prarasa pangan, kontur sosial dan sejarah mereka sendiri." Singkatnya, ini merupakan seruan akan hak atas tata kelola mandiri di mana hak-hak digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.

Mengembalikan pangan sebagai isu politis seperti itu sedang berlangsung di banyak komunitas lokal di seluruh dunia, dengan petani dan warga melakukan eksperimen sistem pangan alternatif (Wittman, Desmarais, dan Wiebe 2010; Fairbairn 2012; Rose 2012; Andree *et al*. 2013). Pada tahap-tahap awalnya, sebagaimana dirangkum Jose Bové dari Konfederasi Petani Prancis, kedaulatan pangan bergantung pada akses atas kredit, tanah, dan harga-harga yang adil, yang mesti ditetapkan melalui aturan-aturan bikinan UN yang telah direformasi serta lembaga-lembaga multilateral alternatif seperti Convention of Food Sovereignty and Trade in Food and Agriculture, International Court of Justice, World Commission on Sustainable Agriculture and Food Sovereignty, dan sebagainya (Bové dan Defour 2001: 8). Bové bertanya: "Mengapa pasar global mesti menghindari ketentuan hukum internasional atau konvensi-konvensi HAM yang dikeluarkan UN?" (Bové dan Defour 2001:

165). Alasannya, tentu saja, adalah keikutsertaan gerakan tani dalam perumusan kebijakan-kebijakan pertanian dan pangan secara demokratis. Ekonomi moral global yang mengemuka ini akan diperkuat kalau UN mengadopsi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Petani (*Internasional Convention on Peasant Rights*), yang sedang disidangkan (Edelman dan James 2011).

Kesimpulan

Bab ini telah merangkum proses-proses rezim pangan korporat. Sementara dua rezim pertama berporos pada negara adikuasa yang didukung mata uang internasional dan kekuatan militer, rezim ketiga menampilkan hegemoni korporasi yang didukung oleh aturan-aturan keuangan internasional dan multilateral. Stabilitas masing-masing rezim bersandar pada variasi gabungan unsur paksaan dan persetujuan, seturut dinamika akumulasi tertentu dalam penyediaan pangan murah.

Di bawah rezim pangan korporat, pangan murah bergantung pada penyatuan biji-bijian Atlantik Utara dan buah-buahan, sayuran, dan hasil laut negara-negara Selatan ke dalam suatu pembagian kerja pertanian secara internasional yang digerakkan oleh rantai pasokan berbasis korporasi transnasional, di mana hubungan-hubungan dagang tunduk pada kebijakan-kebijakan penyesuaian struktural dari lembaga-lembaga keuangan internasional dan protokol-protokol WTO. Akibat pengaruh gabungan dari perlindungan HKI, sentralisasi dan subsidi agrobisnis, serta standar mutu swasta bagi ritel global, maka model ekspor pangan-hasil-pertanian memperkuat suatu fenomena "pertanian dunia", di mana produsen dituntut untuk memenuhi standar tertentu demi kepentingan supermarket dunia. Para petani yang tidak mampu memenuhi persyaratan sertifikasi atau yang tidak mampu bersaing dengan aliran biji-

bijian murah akan mengalami penggusuran dan pemiskinan, sehingga memperburuk kelaparan dunia. Kontradiksi mendasar seperti inilah yang sekarang mewujud dalam suatu rezim pangan *global*, yang menjadi ciri rezim pangan korporat. Kontradiksi ini terlihat dalam upaya gerakan kedaulatan pangan untuk menjadikan rezim pangan sebagai isu politis serta kemunculan kembali debat mengenai keamanan pangan dalam konteks "krisis pangan" yang tengah berlangsung—semuanya memperlihatkan tanda-tanda awal krisis tata kelola, dan barangkali titik gawat krisis keberlanjutan.

Catatan

BAB 4

Rezim Pangan dan Masalah Agraria

MASALAH agraria adalah inti dari kajian agraria. Menjelang abad XX, kaum revolusioner perkotaan mengajukan masalah agraria sebagai masalah politik terkait arah masa depan kepetanian Eropa. Pertanyaan mendesaknya: betulkah dan sejauh mana relasi-relasi kapitalis saat itu sedang menghabisi kepemilikan berbasis tanah model prakapitalis di pedesaan? Dan bagaimana situasi itu dapat mendorong terwujudnya aliansi antara buruh perkotaan dan pedesaan? Sejak saat itu, masalah agraria terkait erat dengan analisis transformasi kelas di pedesaan, ditilik dari sudut pandang kapitalisasi atas tanah.

Bab ini akan menjelaskan pendekatan itu dalam penerapannya pada masalah agraria, dengan meletakkan kembali masalah itu dalam konteks kesejarahan-dunia, melalui kacamata rezim pangan. Melalui kacamata ini, keluasan dan kedalaman relasi-relasi yang dibentuk oleh masalah agraria akan terlihat, dan dengan begitu memperlihatkan bahwa pendekatan dengan kacamata rezim pangan yang klasik dan kapitalsentris itu mengesampingkan ekologi berbasis tanah, juga mengesampingkan para petani/pelaku usaha tani sebagai subjek sejarah. Pada saat bersamaan, kacamata rezim pangan sendiri menggeser fokusnya sedemikian rupa untuk memasukkan ekologi-politik dan kepelakuan produser (*producer agency*) ke dalam lingkupnya.

Rezim pangan dan masalah agraria telah terhubung melalui relasi-relasi nilai yang terbentuk secara global pada akhir abad

XIX. Demikianlah, gairah rezim pangan dalam memapankan pasokan pangan dari seberang lautan (Dunia Baru) dalam rangka menekan ongkos upah di Eropa merupakan konsekuensi dari, sekaligus aspek penting bagi, relasi-relasi berbasis tanah di Eropa. Ketika produk biji-bijian membanjiri pasar Eropa pada akhir abad XIX, para tuan tanah, petani kapitalis, dan petani kecil sama-sama dihadapkan pada harga-harga produk pertanian yang terus turun. Keadaan terhimpit seperti ini mendorong para pelaku usaha pertanian di Eropa melakukan kapitalisasi produksi pertanian, dengan mengubah lahan-lahan mereka agar sesuai dengan logika kapitalis, dan akhirnya mengenyahkan kelas pemilik tanah dan petani kecil yang berjuang bertahan hidup. Dengan demikian bisa dikatakan, pola masalah agraria terbentuk di dalam relasi-relasi nilai yang ada di rezim pangan, dengan konsekuensi-konsekuensi tingkat global (Araghi 2003).

Sejak itu, persoalan yang awalnya hanya terkait transformasi kelas di pedesaan Eropa telah meluas ke kawasan yang lebih besar. Perluasan ini terjadi melalui dinamika rezim pangan yang silih berganti, kendati prosesnya tidak berlangsung secara linear. Berikutnya berlangsunglah pemaksaan dan/atau adopsi pertanian industrial secara universal. Hal ini menandai semakin kuatnya cengkeraman sistem pasar kapitalis secara global, di mana dekolonisasi mendorong perluasan teknologi revolusi hijau. Proses ini lantas membuka jalan bagi rezim perdagangan yang mensyaratkan ketergantungan pangan negara-negara Selatan serta pertanian berorientasi ekspor yang terspesialisasi di dunia Selatan. Semua ini akhirnya mengakibatkan peminggiran pertanian skala kecil. Pertanian industrial yang didukung subsidi energi dan agrobisnis terus diperbarui melalui metode-metode "penerabasan biofisik" (Weis 2007), yang lebih mementingkan manfaat finansial jangka pendek ("penerabas-

an nilai") daripada keberlanjutan ekologis jangka panjang. 'Penerabasan nilai' (*value override*) oleh rezim pangan punya konsekuensi ekologis yang sangat penting sehingga masalah agraria perlu dirumuskan ulang.

Perumusan Ulang Masalah Agraria?

Perumusan ulang ini merupakan bagian dari upaya awal menempatkan masalah agraria dalam skala global (McMichael 1997), dengan memusatkan perhatian pada bagaimana dinamika rezim pangan dan masalah agraria saling membentuk melintasi ruang dan waktu. Rumusan ini banyak merujuk pada refleksi-refleksi mutakhir mengenai masalah agraria (Akram-Lodhi dan Kay 2009; Bernstein 2010), yang menyiratkan bahwa refleksi ini terutama didorong oleh kebutuhan untuk menemukan titik temu antara realitas-realitas agraria (dan perkotaan) masa kini dengan dalil-dalil teoretis dari abad XIX.

Proses menemukan titik temu itu mensyaratkan penyusunan ulang (narasi) pembangunan yang kapitalistis pada suatu era di mana pertanian telah menjadi industri global yang meminggirkan pertanian dan menghasilkan sebuah "planet kumuh" (*planet of slums*) (Davis 2006). Bentuk-bentuk baru relasi-relasi sosial berbasis tanah telah muncul bersamaan dengan beragam bentuk relasi-relasi agraria berbasis kelas yang ditemukan pada akhir abad XIX; keadaan inilah yang mengembalikan minat pada ekonomi-politik perubahan agraria tetapi tanpa *ekologi-politik* perubahan agraria. Tiap kali aspek ekologi muncul, perubahan agraria cenderung dilihat hanya dari perspektif hambatan biofisika terhadap penguasaan oleh kapital, hambatan-hambatan yang mesti diatasi dengan metode-metode "pengambilalihan" seperti mekanisasi, pupuk sintetis, dan bibit transgenik (Goodman, Sorj, dan Wilkinson

1988). Dengan narasi seperti ini, analisis utamanya menyasar pada pergerakan kapital, dengan mengorbankan penyelidikan mengenai kondisi ekologis. Demikianlah, yang diutamakan adalah analisis bagaimana dan sejauh mana kekuatan kapital mampu melakukan "penguasaan nyata" atas tenaga kerja pertanian dan proses-proses biologis; analisis ini menguatkan versi klasik masalah agraria. Tetapi rumusan ini—bahwa kapital akan menyelesaikan masalah agraria—tetap tidak lengkap. Sebagai akibatnya, cara pandang seperti itu melanggengkan suatu asumsi yang bias modernitas, bahwa proses-proses sosial terlepas (otonom) dari basis ekologisnya.

Perumusan ulang ruang lingkup masalah agraria dewasa ini sangat mungkin mengemukakan juga suatu masalah ekologis, yakni masalah yang diajukan bukan oleh para analis atau petinggi agroindustri melainkan oleh orang-orang yang merawat ladang. Gagasan tentang "masalah ekologis" tidak hanya merujuk pada kerusakan dan/atau pemulihan ekosistem, tetapi juga pada isu-isu ekologi *manusia* termasuk urbanisasi berlebihan, sebagaimana terangkum misalnya dalam perumusan ulang masalah agraria oleh Araghi (2000) dalam konteks "pencaplokan lahan skala global di masa sekarang" (lihat juga Menon 2010). Selain itu, meningkat juga perhatian pada "biologi populasi" yang digambarkan oleh Friedmann (2006: 464) sebagai sindrom yang "muncul dari praktik-praktik pertanian dan peternakan industrial yang melipatgandakan tidak hanya jumlah umat manusia tetapi juga beragam makhluk hidup yang disukai di pasar pangan-hasil-pertanian, yang semuanya mengorbankan banyak mahluk hidup dan hubungan-hubungan di dalam ekosistem-ekosistem yang mandiri." Baik rumusan tentang "masalah ekologi" maupun "biologi populasi" menggarisbawahi dampak-dampak industrialisasi pertanian dan pemiskinan pedesaan, juga menghidupkan berbagai

gerakan kedaulatan atas tanah dan pangan yang mengaitkan diri dengan masalah-masalah ekologis mengenai perbaikan atas patahan metabolis (Schneider dan McMichael 2010; Borras dan Franco 2012).

Merumuskan ulang masalah agraria dalam hal ini berarti menggeser pusat perhatian dari bagaimana kapital melakukan subordinasi terhadap kepemilikan tanah ke bagaimana kapital melakukan subordinasi terhadap tanah itu sendiri, di mana subordinasi pertama merupakan prasyarat untuk yang kedua. Artinya, mengajukan resolusi-resolusi berciri kelas atas masalah pertanahan adalah satu hal, namun bagaimana resolusi-resolusi itu memberi efek terhadap masalah pertanahan adalah hal lain. Lebih jauh, kalau kita menggunakan kapital sebagai titik berangkat metodologis, habitat pedesaan pasti akan digambarkan secara tunggal sebagai "wilayah rintisan" (*frontier*) bagi kapital (atau rintangan yang mesti diatasi). Kalaupun penggambaran seperti ini mungkin diperlukan bagi perumusan teori perubahan agraria modern di mana kapital merupakan sumbu dominan, penggambaran ini meremehkan budaya-budaya bertani dan, sangat mungkin juga, perlawanan petani terhadap pemiskinan/perampasan. Dan perlawanan ini tidak hanya terkait dengan hilangnya kuasa atas tanah, tetapi juga hilangnya pengetahuan mengolah lahan sebagai sarana untuk bertahan hidup. Dengan begitu, masalah agraria yang dirumuskan ulang (dan diletakkan dalam konteks sejarah) mengusung pertanyaan sederhana: siapa yang akan mengggarap tanah dan untuk tujuan sosial-ekologis seperti apa?

Dengan perumusan ulang ini, rumusan klasik masalah agraria bisa dibongkar sedemikian rupa untuk menggarisbawahi pentingnya mobilisasi petani dewasa ini terkait masalah hak-hak atas tanah dan pertanian ekologis. Kendati mungkin terabaikan selama abad XX, masalah-masalah itu kini sedang

mengeras di tengah krisis rezim pangan korporat. Artinya, sepanjang abad XX, rezim pangan telah menguatkan relasi-relasi kontradiktif di dalamnya, yang dewasa ini mewujud dalam krisis agraria global dan mobilisasi di pedesaan untuk merebut kembali hak-hak atas tanah dan perawatannya. Ada dua isu yang saling terkait di sini. Gerakan kedaulatan pangan adalah perlawanan terhadap derap kapital dalam rezim pangan korporat. Perlawanannya terhadap industrialisasi pertanian menghablurkan proses panjang kerusakan sosial-ekologis, juga menjadi bukti menguatnya suatu keyakinan bulat bahwa agroekologi memiliki peran restoratif yang kuat saat kondisi lingkungan kita kian rentan—suatu momen dunia yang menyerajah.

Masalah Agraria di dalam Rezim Pangan

Menjelang peralihan abad XX, masalah agraria menaruh perhatian pada politik transisi kapitalis di dalam pertanian, khususnya bagaimana kaum tani akan memaknai kepentingan-kepentingannya selama masa perubahan. Keadaan ini pertama-tama menjadi bagian penting dari politik nasional, mengingat tumbuhnya kesadaran politik di pedesaan. William Roseberry (1993: 336) telah memperlihatkan bagaimana masalah agraria dirumuskan sebagai masalah politis yang jawaban utamanya bersifat ekonomis—dengan kata lain, relasi kaum tani dengan politik nasional dinilai berdasarkan keragaman posisi kelas sosial mereka. Dalam kerangka pemikiran Lenin (1972), identitas politik dapat diuji melalui pertanyaan apakah kaum tani "membedakan diri" sebagai satu kelas sosial atau sebenarnya mengalami proses "pemisahan" (disentegrasi). Dalam kaitannya dengan peralihan bentuk-bentuk kelas ini, Karl Kautsky (1988: 317) menemukan bahwa:

> Yang menentukan apakah seorang petani siap bergabung dengan barisan proletariat dalam perjuangan bukan apakah dia kelaparan atau terjerat utang, melainkan apakah dia memasuki pasar sebagai penjual tenaga kerja atau sebagai pedagang bahan pangan. Keadaan lapar dan terjerat utang tidak serta-merta membangun ikatan kepentingan pada sesama kaum proleter secara keseluruhan; hal itu justru bisa mempertajam kontradiksi antara petani dan proletar ketika kelaparan telah diatasi dan utang terbayar, seandainya harga pangan naik dan para pekerja tidak mungkin menikmati pangan murah.

Relasi-relasi kelas yang saat itu sedang membentuk ulang dunia kepetanian Eropa tidak sekadar soal bagaimana kekuatan kapital "menyelesaikan" masalah agraria, yaitu apakah dan bagaimana relasi-relasi produksi prakapitalis atau semikapitalis saat itu sedang menghilang. Kenyataannya, transisi-transisi terkait kelas juga dipengaruhi oleh relasi-relasi nilai secara global. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa sebagian besar subordinasi kepemilikan tanah oleh kekuatan kapital umumnya terjadi secara taklangsung. Alih-alih mengikuti gambaran umum bagaimana kapital meresap ke dalam relasi-relasi agraria, sejarah memperlihatkan bahwa secara politis kekuatan kapital yang menekan upah buruh dengan memindahkan produksi pangan ke negeri seberang telah memengaruhi pembentukan ulang relasi-relasi kelas di pedesaan secara taklangsung.

Kautsky mengaitkan isu aliansi kaum tani dan buruh dengan harga pangan yang terus turun sejak 1870-an, suatu kenyataan yang tidak sejalan dengan kepentingan para produsen pertanian di Eropa, bersamaan dengan terbentuknya pasar gandum dunia yang tunduk pada aturan-aturan rezim pangan (perdagangan bebas) yang berpusat di Inggris. Friedmann

(1978) mendokumentasikan kekhasan situasi historis pertanian rintisan di Dunia Baru (tanah murah, tenaga kerja berbasis rumah tangga, teknologi transportasi), sebagai situasi yang menyebabkan turunnya harga gandum dan memunculkan ancaman serius terhadap petani Eropa. Kautsky (1988: 243) menulis:

> Bukan volume pangan impor yang mengancam pertanian Eropa, melainkan *kondisi bagaimana pangan itu diproduksi*. Produk-produk itu tidak harus menanggung beban yang ditekankan oleh corak produksi kapitalis. Begitu produk-produk itu dipasarkan, pertanian Eropa tidak mungkin terus-terusan mengalihkan beban yang mereka tanggung kepada para konsumen, yakni beban yang terus meningkat karena kepemilikan pribadi atas tanah dan produksi komoditas yang bercorak kapitalistis. *Pertanian Eropa harus menanggung beban itu sendiri. Dan inilah inti krisis agraria dewasa ini*. (catak miring saya tambahkan)

Sementara masalah agraria umumnya dirumuskan dalam kerangka yang memandang negara sebagai pusat kekuasaan, di Eropa Barat masalah agraria jelas-jelas dibentuk oleh rezim pangan akhir abad XIX. Para produsen di pedesaan dan buruh perkotaan sama-sama mengalami rendahnya harga-harga pangan, tetapi mereka juga sama-sama makin terpapar relasi-relasi nilai, yakni relasi-relasi yang ditandai komodifikasi tanah dan tenaga kerja. Muncullah gerakan-gerakan tanding dari kaum tani dan buruh yang kendati terpisah tetapi menyatukan kekuatan untuk sama-sama melindungi modal-modal sosial; gerakan-gerakan seperti ini berperan dalam pembentukan negara berhaluan sosial-demokrat di abad XX (Polanyi 1957). Dengan kata lain, efek-efek rezim pangan terkait pembentukan

kelas banyak memengaruhi proses pematangan negara-bangsa di Eropa, dan dengan begitu berperan dalam pembentukan kebijakan proteksionis yang bersifat sementara pada masa-masa peralihan dari rezim pangan yang dikuasai Inggris ke rezim pangan berikutnya. Polanyi menyebutkan bahwa belanja besar untuk infrastruktur transportasi internasional bisa dibenarkan jika "keuntungan yang diperoleh cukup besar"—yaitu akses atas bahan pangan murah dari kawasan-kawasan rintisan: "Pasar bebas internasional, bila tidak diawasi, pasti akan menghilangkan semakin banyak orang yang berperan sebagai produsen pertanian .... Begitu investasi besar yang ditanamkan dalam pembangunan kapal uap dan rel kereta berhasil, maka terbukalah semua benua, dan impor biji-bijian pun akan membanjiri Eropa yang malang" (1957: 182).

Catatan Polanyi menggarisbawahi konsekuensi-konsekuensi dari rezim pangan perdagangan bebas ala Inggris, baik terkait aspek politis maupun pembentukan kelas, juga menggarisbawahi reaksi dalam bentuk proteksionisme yang merupakan wujud dari "kegunaan sosial" dari langkah "menstabilkan pedesaan Eropa dan ... meredam gejolak di kota-kota yang merupakan ancaman masa itu" (Polanyi 1957: 185). Dalam pandangan Polanyi (1957: 188), fakta-fakta seperti "agrarianisme yang penuh semangat di Eropa pascaperang," dan "'reagrarianisasi' Eropa Tengah yang dipicu oleh ketakutan terhadap gerakan Bolshevik" merupakan kunci untuk memahami suatu paradoks di mana proyek pasar bebas yang dilembagakan Inggris malah menghasilkan proteksionisme di bidang pertanian. Mengenai persaingan akibat biji-bijian murah, Polanyi (1957: 183–184) menulis: "para pedagang sudah tidak lagi menyadari bahwa tanah merupakan bagian dari ranah kekuasaan negara, dan bahwa sifat teritorial kedaulatan negara tidak muncul dari pertautan-pertautan sentimental semata, tetapi oleh sekian banyak

fakta, termasuk fakta ekonomis." Dipahami demikian, masalah agraria sungguh terkait erat dengan rezim pangan, dan, secara kebetulan, membuka jalan bagi munculnya gerakan kedaulatan pangan pada masa sekarang.

Bukan berarti bahwa para pengusung masalah agraria tidak menyadari dampak dari penjajahan dan perdagangan terhadap produsen agraria. Kautsky khususnya sangat sadar bahwa asal-usul krisis agraria bersifat internasional, suatu krisis yang ia ramalkan dengan lumayan akurat akan terjadi dewasa ini. Intinya di sini, bagaimanapun juga, yakni bahwa masalah agraria dikendalikan oleh teori-teori perubahan yang berlaku di sektor pertanian saja. Di dalam kerangka masalah agraria, potensi politis kaum tani terutama dilihat dalam kaitannya dengan ancaman penghisapan oleh proses-proses pasar yang kapitalistis (Lenin 1899) atau dalam kaitannya dengan pencadangan kaum tani (sebagai "proletariat tersamar") di dalam hubungan-hubungan yang menyerupai penyewaan tanah dengan petani kapitalis (Kautsky 1899). Dengan kata lain, di sini masalah yang bersifat politis dipahami melalui kerangka pikir ekonomis yang cakupannya tidak memadai—tidak hanya karena ekonomi punya cakupan global, tetapi juga karena ekonomi selalu dijalankan dalam kerangka politik tertentu. Dengan begitu, analisis mengenai rezim pangan jadi berguna untuk mengurai bagaimana politik berperan dalam pasar dunia khususnya dalam hal hubungan-hubungan pertanahan, dan dalam lingkup yang lebih luas, bagaimana masalah agraria dirumuskan.

Peran aspek politik dalam pembentukan pusat pasar dunia pada pertengahan abad XIX hadir secara tersirat dalam konsep rezim pangan. Fokus Polanyi pada apa yang disebut sebagai "pasar yang mengatur diri sendiri" memang menggarisbawahi kenyataan bahwa pasar seperti itu adalah bangunan-global-

hegemonik para elite liberal yang menjalankan pemerintahan Inggris dengan topangan kekuatan militer dan dagang. Kekuasaan Inggris bersumber dari dua hal: pembukaan pasar di wilayah-wilayah jajahan terhadap perdagangan dunia (pasar yang juga jadi andalan kekuatan-kekuatan pesaing dalam perdagangan dunia) dan pengamanan pasar global dalam cara merkantilis yang jelas-jelas mengikuti "sistem kolonial" tetapi tunduk pada ideologi perdagangan bebas ("imperialisme pasar bebas"). Liberalisasi di bawah arahan Inggris menghasilkan peningkatan 50% komoditas budidaya dunia antara 1840–1880, peralihan dalam perdagangan dari barang mewah ke pangan pokok, dan menguatnya perdagangan bahan pangan pokok dengan harga dunia ketimbang harga lokal (Woodruff 1967: 268).

Inilah konteks masalah agraria secara internasional sebagaimana dirumuskan di Eropa. Tetapi mengapa hanya Eropa? Apakah rumusan masalah agraria seperti ini akan menjadi model bagi rumusan-rumusan selanjutnya mengingat bahwa berbagai rezim pangan yang muncul kemudian telah memperkenalkan pertanian padat modal ke wilayah di luar Eropa? Jika rumusan masalah agraria di Eropa akhir abad XIX sangat terkait dengan pusaran yang disebabkan oleh suatu rezim pangan internasional, apakah ada pengaruh atau masalah yang muncul di wilayah lain? Hal ini tidak sesederhana mengulang pertanyaan yang sama di konteks yang berbeda. Hal ini juga berarti mempertimbangkan apa yang terjadi kalau masalah politik yang memosisikan negara sebagai pusat (*state-centric political question*) dipadukan dengan teori yang memandang kapital sebagai pusat—dua perspektif ini membuat pemahaman kita mengenai serangkaian faktor-penentu dan dampak-dampaknya jadi sangat terbatas. Berikut ini adalah satu contohnya.

Masalah Agraria atau Krisis Agraria?

Pendekatan klasik digunakan untuk mencari tahu bagaimana kekuatan kapital akan menyelesaikan masalah agraria. Sebagaimana dinyatakan Henry Bernstein: rumusan masalah yang klasik menaruh perhatian pada perkembangan *pasar dalam negeri* yang melayani kepentingan kapital; masalah ini disebut sebagai "*masalah agraria terkait kapital*, dan secara khusus lagi *kapital sektor industri*. Dalam konteks transisi (-transisi) menuju kapitalisme, rumusan klasik ini juga diasumsikan memuat masalah agraria terkait tenaga kerja maupun kapital, sejauh kedua kelas berbeda dari kapitalisme yang tengah mengemuka ini sama-sama berkepentingan dengan keruntuhan/transformasi feodalisme serta praktik-praktik dan relasi-relasi sosial dari era prakapitalis secara umum" (Bernstein 2003: 209).

Kalaupun perspektif negarasentris yang menjadikan pasar dalam negeri pelayan kapital sebagai fokus perhatian mungkin tepat sebagai titik berangkat untuk mengkaji "masalah petani" di Eropa (yaitu, sejauh mana rumusan masalah itu makin takrelevan), perspektif seperti itu tetap saja mengulang-ulang narasi pembangunanisme. Artinya, perubahan yang terlihat di negara-negara Eropa adalah potret dari digantinya pertanian kaum tani dengan pertanian kapitalis, suatu proses yang digerakkan oleh transformasi kelas di dalam lingkup satu negara. Entah proses ini sejalan dengan alur cerita Lenin mengenai perpecahan kaum tani, atau skenario Kautsky tentang adanya tendensi-tendensi perlawanan, logika "subordinasi" tetaplah menjadi tujuan utama, di mana prosesnya sangat ditentukan oleh relasi kapital terhadap sistem kepemilikan berbasis tanah. Semua masalah ini menempatkan *teori* tentang kapital lebih penting dari sejarah politik kekuatan kapital.

Transformasi kelas memang berlangsung, tetapi prosesnya dipengaruhi oleh rezim pangan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, relasi-relasi agraria di Eropa dipengaruhi secara langsung oleh pasar pangan Dunia Baru. Lebih jauh, pasar dunia telah membawa kaum tani di seluruh dunia ke dalam relasi tertentu sehingga nasib mereka menjadi saling bergantung. Contohnya, selain para petani berbasis rumah tangga di Dunia Baru, para petani kecil di Turki juga mendapatkan akses ke pasar Eropa untuk mengekspor biji-bijian agar dapat membayar pajak kepada negara (Luxemburg 1951). Di India, kebijakan pajak dan irigasi *Raj* Inggris juga telah memaksa para petani untuk mengekspor hasil pertanian, sehingga membuat Inggris pada 1900 bergantung pada India untuk hampir 20% konsumsi gandum (Davis 2001: 26).

Cara pandang pembangunanisme atas perubahan-perubahan ini pun luput menangkap arti penting relasi-relasi dalam sejarah politik kapital yang menyejarah secara mendunia—relasi-relasi yang terjadi karena masalah politis negarasentris telah meletakkan teori kapital ke dalam lingkup lebih sempit, yaitu lingkup ekonomi nasional. Padahal, pada periode inilah fondasi bagi upaya-upaya pencarian sumber-sumber pertanian di luar negeri mulai dibangun, dan pada periode ini jugalah struktur historis akumulasi kapital bergantung pada pasar dunia (rezim pangan di bawah kuasa kapital). Karena itu 'masalah agraria tiga dimensi' dari Terry Byers (1996)—konfrontasi bersejarah dari kepemilikan tanah dengan kapital, keseimbangan kekuatan politik dalam hubungannya dengan transisi agraria, dan peran kapital agraria dalam proses akumulasi—membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Memang tiga dimensi ini bertolakbelakang, tetapi tafsiran atas ketiganya melalui kacamata nasional menghilangkan aspek

historis kapitalisme, mengabaikan bahwa politik dunia yang menyejarah menopang transisi-transisi agraria yang terjadi di negara-negara kapitalis Eropa.

Politik transisi agraria di Inggris jelas bukan sekadar pertarungan melawan tuan tanah domestik (sebagai penghambat bagi kapital/produktivitas). Politik kelas juga berkelindan dengan upaya mencapai hegemoni. Pada 1840-an, Liga Anti Undang-Undang Gandum (*Anti-Corn Law League*) yang dikampanyekan Richard Cobden telah memfasilitasi aliansi antara para pengusaha manufaktur dan kalangan buruh, suatu aliansi yang memperjuangkan cita-cita ideal "pabrik dunia" sebagai strategi untuk pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana disebutkan Ricardo pada 1822: "selalu akan ada batas bagi kejayaan kita selagi kita menumbuhkan pasokan pangan kita sendiri" (dikutip dalam Semmel 1970: 71). Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa pertanian Inggris memberi makan "salah satu golongan populasi yang bertumbuh paling cepat dalam sejarah, dan hal itu dimungkinkan oleh suatu sistem yang menjamin peningkatan panen terus-menerus *tanpa membutuhkan input eksternal*" (Duncan 2000: 193). "Pertanian tinggi" telah berlangsung dengan mengandalkan bentuk-bentuk pemeliharaan sapi-domba-jagung secara canggih yang di dalamnya berlangsung daur ulang unsur hara tanah, perbaikan tanah terus-menerus, dan pengendalian hama.

Colin Duncan (2000: 193) berpendapat bahwa Inggris tidak punya kelas tuan tanah "predator", dengan menyebut bahwa Marx tidak meneliti hal ini karena cara pandang Marx berasal dari kelompok Radikal kelas menengah "yang membenci aristokrasi dan menganggap bahwa pertanian mengalami kekurangan modal dan karena itu produksinya rendah." Dalam relasi kepemilikan berbasis tanah di Inggris, keluarga-keluarga bangsawan menyewakan tanah kepada petani kapitalis melalui

sebentuk penyewaan bersyarat (merawat tanah bagi generasi-generasi selanjutnya). Praktik seperti ini berbeda dengan Eropa Barat di mana pertanian-peternakan keluarga semakin padat modal melalui penggunaan pupuk sintetis dan pakan terspesialisasi. Petani kecil Rusia menyubsidi industrialisasi melalui pajak atas ekspor biji-bijian (Duncan 1996: 104). Petani yang sudah canggih dan padat modal ini menghadapi pesaing ketika rezim pangan memperkenalkan biji-bijian dari Dunia Baru yang "diproduksi dengan cara-cara yang mirip pertambangan ketimbang pertanian yang benar" ketika para pemukim asing di wilayah rintisan mengambil alih padang rumput (dari penduduk asli), memanfaatkan lapisan humus, dan menghidupkan kembali "metode berladang yang secara teknis 'primitif' yaitu perladangan bergilir" (Duncan 1996: 102).

Tesis Duncan menyatakan bahwa pertanian kapitalis, di bawah kondisi tertentu, dapat bersifat regeneratif (bisa memperbarui diri) secara ekologis. Pertanian di seberang lautan, yang dikerjakan oleh diaspora pemukim dan mengandalkan pasar ekspor, menggambarkan bagaimana "relasi-relasi nilai" bekerja. Sebagaimana dicatat Friedmann, ketergantungan pemukim diasporik terhadap rel kereta dan pedagang untuk mendapatkan barang-barang konsumsi dan peralatan telah mendorong spesialisasi pertanian, dan "ketergantungan mereka terhadap tenaga kerja tanpa upah dari kalangan laki-laki, perempuan, dan anak-anak—eksploitasi terhadap tenaga kerja rumah tangga—telah memungkinkan mereka secara nisbi menurunkan biaya pertanian dibandingkan di Inggris dan tempat lain, termasuk bekas wilayah pengekspor di Eropa Timur" (Friedmann 2005: 238). Mengolah tanah belum terjamah di kawasan rintisan yang "terbuka" adalah berkah ekologis berjangka pendek tanpa memedulikan cara bertani yang berkelanjutan, sehingga dapat menyediakan gandum dengan

harga murah dalam jangka pendek. Tetapi harga yang mesti dibayar dalam jangka panjang adalah kerusakan ekologis yang terjadi ketika pertanian-pertanian keluarga menghasilkan produksi berlebih agar bertahan menghadapi kejatuhan harga di abad baru (abad XX), memaksa lahan untuk terus berproduksi dan menyebabkan kekeringan luas di Amerika Serikat pada 1930-an serta kian mendalamnya proteksionisme yang menyebar dari Eropa.

Sebagaimana disinggung di atas, Kautsky mengidentifikasi kondisi-kondisi di pertengahan abad XIX yang memunculkan proteksionisme pertanian Eropa pada awal abad XX. Kondisi-kondisi tersebut sejatinya adalah ancaman dari kehadiran biji-bijian murah dari Dunia Baru terhadap pertanian Eropa, membuat pertanian Eropa merugi secara ekonomis. Kautsky menilai bahwa ancaman ini bersifat permanen, suatu prediksi ke depan berdasarkan situasi pada akhir abad XIX, yang secara tersirat menegaskan model 'pengikut-jalur' (*path-dependent*):

> Kalau tiba waktunya seluruh lahan gandum atau gandum hitam (*rye*) sudah penuh, dan harga biji-bijian otomatis mulai naik, akan segera muncul semangat untuk memecahkan masalah bagaimana menggantikan makanan sereal sehari-hari dengan makanan dari produk-produk tropis. Negara-negara tropis yang tidak cocok untuk pertanian gandum—Amerika Tengah, Brasil Utara, sebagian besar Afrika, India, Asia Tenggara—juga akan segera bergabung dengan pesaing mereka para petani gandum di Eropa ... selama masyarakat kapitalis masih berlanjut, krisis agraria akan selalu mengiringinya. Dan sebagaimana pertanian yang kapitalistis pernah menyebabkan depresi di Eropa Barat, hal yang sama kini mulai terjadi pada para pesaingnya di Amerika Serikat, Rusia, dan seterusnya; semua ini bukan-

> lah bukti bahwa krisis agraria di Eropa Barat akan berakhir. Ini hanya membuktikan bahwa krisis sedang meluaskan cengkeramannya. (Kautsky 1988: 252)

Akan tetapi, pertanian di kawasan rintisan pun secara ekologis (dan karenanya juga secara ekonomis) tidak berkelanjutan. Depresi pada 1930-an telah menyebabkan model pertanian yang menguras kesuburan tanah sebagaimana dilakukan pemukim asing di kawasan rintisan tidak bisa lagi berlanjut karena alasan ekologis; hal ini mendorong munculnya program untuk menstabilkan komoditas dengan subsidi pertanian dan pembelian surplus pangan oleh pemerintah demi mengendalikan harga produk pertanian, yang dilindungi oleh kontrol terhadap impor. Inilah cikal bakal rezim pangan yang dikuasai Amerika Serikat.

Dengan demikian, krisis agraria yang diidentifikasi oleh Kautsky, dibatasi lingkupnya oleh struktur-struktur yang merkantilis. Artinya, asumsi dari cara pikir Kautsky yang linear tidak menduga akan hadirnya sisipan merkantilis pada rezim pangan pascaperang, dan deretan konsekuensinya adalah: menghentikan krisis agraria di Dunia Pertama, melemahkan pertanian Dunia Ketiga, dan menawarkan model-model agrobisnis guna makin memapankan ekspor hasil pertanian non-Eropa sebagai model penyediaan pangan bagi negara-negara Utara. Prediksi Kautzsky luput melihat bagaimana politik pada momen tertentu memanfaatkan krisis agraria yang kronis. Intinya, suatu cara pandang teoretis yang deduktif tidak mampu memahami bagaimana syarat-syarat politik bagi akumulasi kapital mengalami transformasi, dan secara khusus gagal memahami perubahan konteks dan *konten* historis dari politik kepemilikan berbasis tanah di seluruh dunia. Perubahan terkait kepemilikan berbasis tanah ini memungkinkan terjadinya

kelebihan-produksi komoditas pertanian di Amerika Serikat dan kemudian Uni Eropa. Cara Amerika Serikat dan Uni Eropa mengelola surplus produksi pangan ini adalah cikal bakal praktik "dumping" yang berlanjut hingga hari ini. Maka, resolusi merkantilis bagi krisis agraria versi Kautsky (awal abad XX di Dunia Pertama) menjadi faktor yang memperdalam krisis agraria di Selatan pada peralihan ke abad XXI, ketika impor pangan murah dari Utara membuat jumlah pertanian skala kecil berkurang drastis secara global (McMichael 2005).

Analisis rezim pangan membuka kemungkinan untuk memahami bahwa munculnya krisis agraria di dunia Selatan adalah dampak dari bagaimana krisis agraria di dunia Utara dijawab melalui rezim pangan yang merkantilis. Dan jalan keluar berupa rezim pangan merkantilis itu memuat sesuatu yang penting karena memperlihatkan luputnya faktor ekologis dalam narasi kapital—dalam dua pengertian. Pertama, prediksi Kautsky mengenai krisis agraria bersifat ekonomis sehingga luput menghitung "efek samping" ekologis yang akhirnya menampakkan diri pada krisis 1930-an, keadaan yang membantu kita memahami konsep "penerabasan nilai", di mana petani hanya peduli pada harga hingga merusak ekosistem. Kedua, solusi bagi berkurangnya kesuburan tanah adalah pengenalan bentuk "penerabasan biofisik" yang sama sekali baru (Weis 2007) melalui program komoditas New Deal Amerika Serikat, yang memapankan "pertanian padat energi fosil" (*petro-farming*) (Walker 2005) dan menyembunyikan kondisi ekologis yang problematis di baliknya. Dan model agroindustri ini telah menjadi model universal.

Membalikkan Politik Masalah Agraria

Fokus masalah agraria mengalami pergeseran pada era pascaperang. Awalnya merupakan kegelisahan kaum sosialis mengenai peran politik kaum tani Eropa dalam revolusi, masalah agraria kemudian menjadi keprihatinan terkait penjajahan. Demikianlah, dalam konteks Perang Dingin, masalah yang berkaitan dengan upaya pembubaran barisan kaum tani di kawasan pascakolonial dan negara-negara yang menyokongnya di mana tanah dikuasai para elite untuk melawan gerakan-gerakan komunis, ternyata telah membalikkan aspek politik dari masalah agraria awal (bandingkan Araghi 2000: 148). Faktor yang berperan di sini adalah nasionalisme ekonomi pascaperang yang bertopang pada industrialisasi seiring modernisasi pertanian melalui reforma agraria, teknologi revolusi hijau, dan dukungan bagi sektor pertanian dengan kredit pedesaan dan sarana-sarana pemasaran. Modernisasi pertanian terdiri atas penyediaan bahan pangan dalam jumlah yang semakin banyak ke kompleks-kompleks industri perkotaan, serta intensifikasi pertanian berorientasi ekspor yang sudah dimulai sejak masa kolonial. Gabungan dua hal yang kontradiktif ini kemudian mengisi debat mengenai "masalah petani" yang dapat dikatakan "menerapkan pembelajaran dari debat awal untuk tujuan yang sama sekali berbeda, dengan mengubah masalah petani yang awalnya bersifat politis menjadi masalah petani dalam perspektif pembangunanisme terkait pembangunan di dunia ketiga" (Araghi 2009: 118).

Reforma pertanahan berorientasi kapital berusaha meniru model pertanian keluarga Amerika, sebagai strategi untuk stabilisasi pedesaan dalam rangka membendung pemberontakan—strategi yang sering diterapkan seiring dengan serang-

kaian kebijakan yang menguntungkan kelas-kelas perkotaan. Lawan dari reforma pertanahan berorientasi kapital, yaitu reforma pertanahan sosialis di Tiongkok, Kuba, dan Vietnam, telah menghapus kepemilikan atas tanah dan membagikannya sebagai lahan-lahan garapan kolektif. Reforma agraria di Asia Timur (Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan), dilaksanakan pada akhir 1940-an, merupakan satu model tersendiri dalam dua pengertian: (1) militansi petani kecil dan petani penggarap cukup kuat sebelum reforma agraria yang disokong Pemerintahan Militer Amerika Serikat; (2) reforma ini mengurangi model lahan garapan dan mempromosikan pemilik-pengguna dalam skala kecil (McMichael dan Kim 1994). Sejak masa itu, reforma agraria "berlangsung dengan sistem 'siapa berontak pertama, akan dilayani pertama'," yang memperlihatkan watak konservatifnya (Araghi 1995). Reforma agraria di dalam sistem kapitalis secara umum mengabaikan model perladangan yang dikembangkan secara komersial (Araghi 1995), memperkuat lagi para produsen subsisten sebagai produsen tanaman komoditas skala kecil sekaligus mendukung industrialisasi pertanian (de Janvry 1981: 203).

'Pembentukan kembali kaum tani' (*repeasantization*) memang berlangsung di sejumlah wilayah seusai redistribusi lahan dan pendudukan kawasan-kawasan rintisan baru sebagai cara untuk memagari tuntutan kaum tani (tetapi dengan mengorbankan penduduk asli). Di Afrika, ekspor yang lazim dari tanah jajahan seperti teh dan kopi ditata ulang berbasis perladangan skala kecil di Kenya dan Pantai Gading (Grigg 1993: 145). World Bank mendanai skema-skema pemukiman skala besar, khususnya di Indonesia (transmigrasi), Brasil, Malaysia, dan India. Skema-skema seperti ini sering hanya memindahkan kemiskinan, dan telah cukup lama disebut sebagai "perang melawan pesatnya penurunan jumlah hutan tropis bumi" (Rich

1994: 95). Di Amerika Latin, dua per tiga produksi makanan tambahan antara 1950 dan 1980 berasal dari kolonisasi lahan baru (Grigg 1993: 185), di mana jumlah produsen skala kecil tanaman komoditas dengan lahan rata-rata 2 hektare naik sebesar 92% (Araghi 1995). Di Honduras, kolonisasi Lembah Aguan yang disponsori pemerintah telah memagari potensi ketakstabilan melalui program pemukiman ulang (Kerssen 2013: 100). Secara keseluruhan, di Amerika Latin, "lahan garapan bertambah 94 juta hektare (109%); di Asia naik 103 juta hektare (30%), [sementara di Afrika] sangat mungkin terjadi penurunan signifikan .... Pada 1970-an, lahan baru di seluruh dunia berubah jadi kawasan hunian dengan kecepatan 4–5 juta hektare per tahun, selain pertambahan lahan garapan dengan kecepatan 0,3% per tahun; tetapi pada 1980-an pertambahannya kurang dari 3 juta hektare, dengan kecepatan 0,2% per tahun" (Grigg 1993: 103–104).

Araghi (2009: 130) menamai kontradiksi dalam sektor petani kecil selama era pembangunanisme ini sebagai "pembentukan kaum tani nasional dan penyusutan kaum tani global"—untuk menggambarkan satu paradoks pembangunan di mana 'pembentukan kembali kaum tani' melalui reforma pertanahan dipukul balik dengan 'penyusutan kaum tani' (*depeasantization*) melalui rezim bantuan pangan. Kecenderungan "penyusutan kaum tani secara nisbi" berlangsung beriringan dengan fakta bahwa "reforma itu membiarkan sebagian besar lahan produktif tetap dikuasai oleh pemilik skala besar" (Araghi 2009*:* 128).

Di dalam kerangka pembangunan, reforma agraria memadukan model pertanian kapitalis dan produksi komoditas skala kecil dengan kombinasi yang beragam dan dengan hasil yang beragam juga bagi kaum tani bersangkutan. Tujuan utamanya adalah menguatkan negara dengan memasukkan kaum tani ke dalam relasi-relasi pasar. Sebagian petani kaya disasar untuk

pelaksanaan revolusi hijau—satu prakarsa pembangunan dengan motif politis untuk mengamankan pangan bagi buruh perkotaan melalui sebentuk pertanian substitusi impor, dan untuk memamerkan produktivitas dari model agrobisnis Barat (Patel 2012). Penggabungan produsen skala kecil ke dalam sirkuit komoditas membuka jalan bagi perluasan model pertanian kontrak (Little dan Watts 1994). Dalam pengertian ini, Skema Bantuan Kaum Miskin Pedesaan dari World Bank pada 1970-an—disebutkan untuk membantu 700 juta petani kecil (atau tunakisma) dengan kredit—memasukkan petani kecil menjadi bagian dari jejaring teknologi revolusi hijau, satu skema yang penerapannya kian diarahkan untuk mengembangkan ekspor hasil pertanian yang baru seperti ternak, pakan ternak, buah, sayuran, hasil hutan, dan sebagainya, dengan mengandalkan tenaga kerja dan/atau produksi dari petani kecil (Feder 1983: 169–170).

Maka, berubahnya masalah agraria menjadi sayap politis dari proyek pembangunan sebuah imperium telah memperkuat terbentuknya rezim pangan yang dikuasai oleh Amerika Serikat. Meluasnya relasi-relasi komoditas di pedesaan telah melahirkan relasi-relasi kelas yang beragam, yang terjadi karena perampasan, pertanian kontrak, dan konsentrasi tanah untuk diperjuabelikan, suatu keadaan yang mudah untuk dimasuki oleh model-model agroindustri. Dari revolusi hijau yang awalnya untuk produksi bahan pangan pokok, revolusi hijau kedua menyebar ke sektor lain, yang ditandai dengan penggantian tanaman pangan pokok dengan pangan olahan, pangan bernilai tinggi untuk ekspor, dan akhirnya supermarket-supermarket domestik yang dimiliki asing.

Dengan demikian, masalah agraria dalam versi ini berporos pada terbentuknya pembagian tenaga kerja pertanian secara internasional yang terjadi melalui transformasi parsial pasar

dalam negeri di dunia Selatan untuk melengkapi pasokan biji-bijian Atlantik Utara, juga melalui 'penyusutan kaum tani' secara nisbi, yaitu mengganti budidaya bahan pangan pokok menjadi budidaya komoditas komersial untuk menyediakan bahan bagi industri pertanian dan makanan bagi konsumen elite di tempat lain. Reforma agraria yang terkait, baik yang diatur oleh negara maupun jenis berikutnya yang berorientasi pasar (World Bank), telah memapankan penataan seperti ini untuk menguntungkan kelas tuan tanah dan mengorbankan kebutuhan kaum miskin dan tunakisma pedesaan akan tanah dan sumber penghidupan (Borras 2003, 2007; Borras, Kay, dan Lahiff 2008). Berbeda dengan masalah agraria awal dengan ilham sosialis, masalah agraria akhir abad XIX muncul dengan wajah konservatif.

Satu cara untuk memahami hasil seperti ini adalah dengan menjelaskannya sebagai masalah agraria mengenai tenaga kerja (Bernstein 2003), dalam konteks di mana agrobisnis telah berjaya secara global dan menciptakan tenaga kerja cadangan dalam jumlah besar di seluruh dunia. Akan tetapi, rumusan ini tidak menjawab "masalah petani" sebagai satu aspek dari masalah agraria, kecuali ada asumsi bahwa pedesaan hanya dihuni oleh angkatan kerja. Tentu saja setiap orang adalah tenaga kerja, dan tenaga kerja adalah kategori lintas-sejarah. Pandangan bahwa masalah agraria adalah masalah yang hanya terkait kapital dan tenaga kerja mungkin betul demikian dalam kerangka klasik, tetapi pandangan seperti ini tidak sesuai dengan kenyataan kontemporer. Ketaksesuaian itu terutama terlihat dalam kenyataan di mana penghuni perkampungan kumuh perkotaan adalah petani yang tergusur dan menganggur sekaligus tenaga kerja. Lantas bagaimana dengan mereka yang tetap tinggal di desa, para tunakisma dan kaum tani yang masih bekerja?

Rumusan masalah agraria yang diperbaharui ini tampaknya bakal membalikkan jalur pemikiran klasik, yang beranggapan bahwa buruh berjuang "untuk tanah melawan bentuk-bentuk 'yang nyata-nyata ada' menyangkut kepemilikan berbasis tanah yang kapitalistis (Bernstein 2004: 202), dengan tujuan agar buruh kembali ke lahan—melawan benih-benih modernitas. Perspektif seperti ini lahir dari fokus pada *relasi-relasi produksi* agraria, dan dengan demikian dari kecenderungan tenaga kerja yang telah mengalami (semi)proletarisasi. Rumusan ini—yaitu kalau kekuatan kapital telah mengatasi masalah agraria yang melekat padanya, yang tersisa hanyalah masalah tenaga kerja yang diatasi dengan memulihkan keberadaan suatu bentuk kaum tani—sungguh bertolak belakang dengan narasi pembangunanisme *dan* petunjuk metodologis Marx. Sejarah tampak sedang membalik arah perubahan. Sejarah memunculkan pertanyaan "mengapa buruh memilih berjuang untuk tanah ketimbang lapangan kerja?" (McMichael 2006: 410).

Perjuangan merebut kembali tanah—sebagai bentuk perlawanan terhadap tawaran dari teori kapital sebagaimana terumus dalam masalah agraria klasik—memperlihatkan bahwa subjek dari masalah itu (yaitu kaum tani) sedang menegaskan keberadaannya, juga pada akhirnya membuktikan bahwa pengabaian atas keberadaan kaum tani tidak diperhitungkan dalam narasi pembangunan kapitalis. Moyo dan Yeros menjadi saksi akan hal ini ketika mencatat bahwa gerakan-gerakan pedesaan dewasa ini memancangkan klaim tanah dengan menggunakan "taktik okupasi tanah oleh massa … demi mengamankan penghidupan mereka" dengan menentang kekuatan politik yang ditopang oleh kepemilikan atas tanah (Moyo dan Yeros 2005: 35). Cerita mereka membenarkan klaim Araghi bahwa masalah petani telah menjadi masalah pembangunanisme, ketika Moyo dan Yeros (2005: 52) menyimpulkan bahwa

kenyataan-kenyataan ekonomi-politik "menuntut agar prioritas penataan diarahkan untuk menyatukan petani-buruh melintasi pemilahan kota-desa, dengan tujuan mempertahankan proses akumulasi yang padu." Artinya, "masalah agraria, kendati tetap bagian dari globalisasi, terkait sangat erat dengan masalah nasional" (Moyo dan Yeros 2005: 55).

Dalam upayanya mereproduksi pembangunanisme, Moyo dan Yeros mengabaikan relasi-relasi ekonomi-politik internasional yang sangat memengaruhi perjuangan petani tingkat nasional/lokal. Ada dimensi lain dari perjuangan mengenai masalah agraria di lingkup nasional. Dimensi itu terkait dengan kebijakan agraria. Di dunia Selatan khususnya, kebijakan agraria telah dipermak sedemikian rupa agar sesuai dengan rezim pangan neoliberal, hingga membawa para petani kecil yang masih bertahan bersaing langsung dengan pangan impor yang dengan sengaja dibuat murah dari pusat-pusat kekuasaan emperial, juga menerapkan reforma agraria berorientasi pasar demi memperkuat ekspor komoditas pertanian. Di sini negara-negara menginternalisasi relasi-relasi transnasional sirkulasi (pangan) yang punya efek nyata secara nasional (seperti pemiskinan, semiproletarisasi, dan kelaparan). Karena itu, bukan tanpa alasan kalau perlawanan kaum tani terbentuk dengan membawa slogan "*kedaulatan* pangan", satu strategi yang tegas demi terwujudnya otonomi nasional dalam hal pangan dan kebijakan agraria yang memang dibutuhkan untuk terbangunnya dukungan dalam negeri bagi produsen pangan lokal (Desmarais 2007). Ringkasnya, hal-hal penting di tingkat nasional (berikut implikasinya secara politik dan/atau kebijakan) tidak terjawab secara memadai kalau perhatian hanya dipusatkan pada relasi-relasi produksi, karena cara pandang seperti ini tidak memperhatikan relasi-relasi sirkulasi yang dikuasai oleh rezim pangan atau kekuatan yang menjajah.

Pendekatan yang hanya fokus pada relasi-relasi produksi membuat kondisi agraria dilepaskan dari konteks historisnya (bandingkan, Tomich 2004). Masalah agraria mereduksi sejarah menjadi sekadar teori (kelas), dengan lebih menyoroti logika kapital ketimbang sejarah politiknya. Sejarah politik meliputi gerakan perlawanan atas nama kedaulatan pangan—bukan sebuah anomali dalam narasi yang ada melainkan sebuah mobilisasi untuk menantang kerangka pikir kapitalis. Ciri khas gerakan kedaulatan pangan terlihat dari kenyataan bahwa perjuangannya berpusat pada relasi-relasi penundukan yang dijalankan kapital, tetapi gerakan itu tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam relasi-relasi tersebut (Beverley 2004: 266). Meski petani dan buruh tani bisa saja menjadi korban pelbagai konsekuensi dari "penerabasan biofisik", mereka tidak mesti mengamini "penerabasan nilai". Artinya, kaum tani yang mengalami tekanan karena pertanian industrial tidak selalu menerapkan sepenuhnya sistem relasi komoditas dalam praktik-praktik rumah tangga/penghidupan mereka (lihat Bab 7). Mereka juga tidak mesti melihat alam melalui sudut pandang harga, yaitu melalui relasi-relasi nilai yang kapitalistis. Ini terlihat jelas dalam politik gerakan kedaulatan pangan. Cara gerakan ini melakukan mobilisasi politik menyiratkan perbedaan dalam memahami masalah agraria.

Di sini, ketimbang meletakkan masalah agraria sebagai pertanyaan perihal bagaimana kapital membentuk (dan mempekerjakan?) angkatan kerja dengan mengubah pertanian secara mendasar, sebaliknya masalah agraria dapat diajukan dari perspektif orang-orang yang mengalami proses-proses perubahan mendasar. Ini bukanlah perspektif esensialis mengenai kaum tani yang ditaklukkan, melainkan

sebuah persepektif yang terbentuk karena kondisi-kondisi historis yang timpang dan kontradiktif di tempat mereka berada. Dan kondisi-kondisi ini tidak melulu merujuk pada kegagalan kapitalisme neoliberal dalam "membangun" negara-negara Selatan atau mengelola perpindahan tenaga kerja dari sektor-sektor di pedesaan ke sektor-sektor di perkotaan, atau untuk melestarikan cara hidup petani. Tetapi, kondisi-kondisi ini terkait dengan masalah hak: hak atas tanah, bercocok tanam, benih bersama, perawatan lingkungan, fasilitas warga negara, dan sebagainya. Lebih khusus lagi, terkait dengan keberadaan petani kecil, penggembala, dan nelayan kecil yang dianggap sebagai sisa-sisa masa lalu, hal ini pertama-tama berarti hak untuk memiliki hak, yang adalah dimensi transenden gerakan petani (meskipun masih cukup beragam) dewasa ini (Patel 2007). Sebagai langkah nyata pertama, Vía Campesina (2005: 25, 31) mengajukan program mengenai hak-hak pokok: "Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan untuk memulihkan kondisi ekonomi petani kecil dengan membagi secara adil sumberdaya-sumberdaya untuk produksi [air, hutan, gen lokal, dan wilayah pesisir] kepada petani, mengakui hak mereka sebagai kekuatan yang berperan membentuk masyarakat, dan mengakui hak komunitas dalam mengelola sumberdaya lokal." Di level global, sebuah Deklarasi Hak 'Petani' sedang dibahas di UN (Edelman dan James 2011).

Maka, ketimbang meletakkan relasi-relasi agraria sebagai bagian di dalam narasi tentang bagaimana industri telah melakukan subordinasi dan eliminasi, atau marginalisasi, terhadap petani, gerakan kedaulatan pangan membangun narasi alternatif yang ruang geraknya tetap dalam konteks globalisasi korporat, tetapi tidak tunduk pada resep-

resepnya. Secara khusus, gerakan kedaulatan pangan pada umumnya (diwakili oleh Komite Perencanaan Internasional untuk Kedaulatan Pangan [International Planning Committee for Food Sovereignty]) berupaya membalik proses pemiskinan dan anggapan bahwa hal itu bersifat alamiah, dan dengan begitu membuat petani tidak terlalu tunduk pada kekuatan kapital—secara material maupun wacana. Gerakan agraria kontemporer adalah perlawanan terhadap ontologi kapitalisme neoliberal, dan karena itu menghadapi hambatan-hambatan material yang nyata, serangan-serangan lewat kebijakan, dan ideologi-ideologi yang menopang dan memberi pembenaran bagi hambatan dan kebijakan-kebijakan seperti itu. Bentuk dari konfrontasi tersebut adalah politik alternatif terkait kemungkinan-kemungkinan yang disediakan oleh tanah, dan dengan begitu merumuskan kembali masalah agraria dari sudut pandang petani (McMichael 2006: 475).

Masalah Agraria Terkait Pangan

Dengan semakin kuatnya kesadaran tentang "efek samping" dari sistem pertanian-pangan (perubahan iklim, kerusakan ekosistem, terkurasnya sumberdaya, bahan bakar hayati, kesehatan masyarakat, merebaknya kampung kumuh, dan seterusnya), tidak lagi memadai kalau masalah agraria dilihat hanya sebagai suatu peralihan (transisi). Kita harus mengalihkan fokus perhatian pada dampak-dampak yang disebabkan transisi itu, dan menemukan hambatan-hambatan yang ada, bukan bagi kapital, tetapi bagi upaya pengembangan sistem pertanian pangan yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Pemahaman yang berlaku lazim mengenai masalah agraria berfokus pada "cara kekuatan-kekuatan dan relasi-relasi produksi dalam memfasilitasi (atau tidak memfasilitasi) suatu transisi agraria" (Akram-Lodhi dan Kay 2009: 336). Pemahaman secamam ini membangun narasi kapital, sekalipun sifatnya sementara dan sewaktu-waktu. Pemahaman konvensional ini memang bisa membuahkan analisis terperinci tentang transformasi struktural dalam sektor agraria seiring "perjuangan atas tanah, tenaga kerja, dan penghidupan yang terus berlangsung" (Akram-Lodhi 2009: 336), namun bisa juga keliru dalam menjelaskan perjuangan-perjuangan tersebut ketika ditafsirkan melalui sudut pandang pembentukan tatanan oleh kekuatan kapital. Akan tetapi, jika perjuangan-perjuangan itu diberi kesempatan bersuara, penerabasan epistemik/nilai dalam analisis struktural cukup bisa dibungkam sedemikian rupa agar kita bisa mendengar bagaimana orang-orang yang mengalami transformasi sosial menafsirkan keadaan mereka.

Korban pertama kemungkinan adalah konsep "transisi agraria"—hukum tentang nilai tidak memadai bagi gerakan-gerakan perjuangan yang menyuarakan nilai-nilai alternatif. Bukan berarti gerakan perlawanan petani tidak tahu cara kerja hukum nilai yang ada. Tetapi sebagai satu gerakan tandingan, perjuangannya bertujuan untuk menggoyahkan hukum tersebut dan ciri-ciri yang secara otomatis dirujuk oleh hukum itu sedemikian rupa sehingga produsen pedesaan terlihat sebagai sisi-sisa masa lalu. Kalau kapital dijadikan titik berangkat metodologis, kita berisiko terjebak dalam suatu logika pikir yang memandang perjuangan petani melulu sebagai perlawanan terhadap transisi agraria,

bukan sebagai perwujudan dari, atau pembuka jalan menuju, konsep agraria alternatif.

Gerakan perlawanan petani mengubah kerangka pemahaman mengenai masalah agraria melalui sudut pandang kedaulatan pangan. Sudut pandang ini meletakkan transformasi struktural rezim pangan korporat sebagai dasar pijakan untuk suatu pergeseran ontologis. Maka bersamaan dengan konferensi Rio +20 UN (2012), Vía Campesina (2012) mendeklarasikan:

> 20 tahun setelah KTT Bumi, hidup di planet ini menjadi teramat sulit. Jumlah orang kelaparan naik hampir semiliar, berarti satu dari enam orang sedang kelaparan, sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan di pedesaan. Pengusiran dari tanah dan wilayah kami berlangsung semakin cepat, tidak lagi hanya karena keadaan-keadaan tidak menguntungkan yang dipaksakan kepada kami oleh kesepakatan-kesepakatan dagang dan sektor industri, tetapi juga oleh bentuk-bentuk baru monopoli kendali atas tanah dan air, oleh penerapan rezim HKI secara global yang telah mencuri benih-benih kami, oleh serbuan benih transgenik, dan oleh perluasan ladang-ladang monokultur, proyek-proyek raksasa, dan tambang.
>
> Kita harus menggati sistem pertanian pangan berorientasi ekspor yang bersifat industrial dengan suatu sistem yang berlandaskan kedaulatan pangan, yang mengembalikan tanah kepada fungsi sosialnya sebagai produsen pangan dan penopang kehidupan, yang mengutamakan produksi pangan secara lokal serta pasar lokal dan pengelolaan pangan secara lokal. Kedaulatan pangan me-

> mungkinkan kita untuk mengakhiri sistem monokultur dan agrobisnis, untuk menguatkan sistem produksi berbasis petani kecil yang ditandai dengan intensitas dan produktivitas lebih besar, yang menciptakan lapangan kerja, merawat tanah dan berproduksi dengan cara memulihkan dan beragam. Pertanian berbasis petani kecil dan lokal juga punya kemampuan untuk menyejukkan planet [Bumi], dengan kapasitas menyerap atau mencegah nyaris 2/3 gas rumah kaca yang dibuang saban tahun.

Dalam membahas transformasi global yang disebabkan oleh rezim pangan, gerakan kedaulatan pangan tidak saja menjadikan relasi-relasi produksi sebagai isu politis, tetapi juga menjadikan relasi-relasi sirkulasi yang mengepung sekaligus meminggirkan budaya produsen skala kecil sebagai masalah politik. Ini memungkinkan gerakan kedaulatan pangan untuk merumuskan strategi politik global yang tidak ditemukan dalam pendekatan *nasional* berbasis kelas. Sebagaimana masalah agraria akhir abad XIX menyoroti politik agraria di Eropa, masalah agraria awal abad XXI kini membahas politik agraria di bawah rezim pangan *global* (dengan efek kelas yang berbeda namun dirasakan bersama dalam sistem antarnegara). Kontradiksi-kontradiksi kapital dan rezim pangannya bukan sekadar menyangkut relasi-relasi kelas tetapi juga menyangkut ekspresi politiknya dalam sistem peredaran pangan secara global. Relasi-relasi produksi dan peredaran pangan berjalan bersamaan dalam membuat derap kapital jadi isu politik—dan mengungkap fakta bahwa ini merupakan kerja genius gerakan kedaulatan pangan.

Politik agraria kini berpusat pada masalah petani, mengingat semakin memburuknya krisis pertanian industrial da-

lam dunia di bawah ancaman perubahan iklim dan kekurangan gizi yang meluas. Sementara masalah agraria awal menyoroti laju hilangnya petani kecil tradisional, persoalan agraria masa kini membahas kemunculan "kaum tani baru" dengan kemampuannya untuk mengelola usaha tani secara berkelanjutan (van der Ploeg 2009; Altieri dan Toledo 2011)—sebuah produk yang dihasilkan rezim pangan.

Asal-usul slogan "kedaulatan pangan" menjadi penting di sini, mengingat slogan ini telah menjadikan klaim-klaim "keamanan pangan" dari rezim pangan korporat menjadi isu politik (McMichael 2003). Penyediaan pangan melalui pasar global yang dikelola oleh korporasi transnasional tidak hanya terbukti tidak memadai, tetapi juga telah menjadi alat meminggirkan produsen kecil lewat apa yang disebut Peter Rosset sebagai "rezim pangan murah" (2006). Vía Campesina mencatat pada 2000: "pergerakan pangan besar-besaran di seluruh dunia telah memaksa meningkatnya pergerakan manusia." Artinya, pasar tidak berurusan untuk memberi makan dunia, melainkan tentang konsolidasi kekuasaan agrobisnis untuk mewujudkan "pertanian tanpa petani". Krisis agraria global yang dihasilkannya—sebuah ladang subur bagi lahirnya gerakan kedaulatan pangan—telah membuka tabir kekeliruan klaim-klaim neoliberalisme. Pada pertemuan tingkat menteri WTO tahun 1999 di Seattle, Vía Campesina (2011) mendeklarasikan: "kebijakan-kebijakan pertanian neoliberal membawa ke arah kehancuran ekonomi kami yang berbasis pertanian rumah tangga, menuju krisis mendasar di masyarakat kami, dan bahkan mengancam eksistensi masyarakat kami." Pernyataan seperti ini mempertanyakan klaim bahwa pasar telah "memberi makan dunia" (dikonfirmasi oleh krisis pangan 2007–2008). Pertanyaan ini memi-

liki kekuatan, dengan menempatkan masalah pangan sebagai masalah peradaban, jauh mendahului munculnya banyak laporan selama dekade 2000-an—dari *Millennium Ecosystem Assessment* UN (2005), *Organic Agriculture and Food Security* FAO (2007), Laporan UN/World Bank *International Assessment of Agricultural Science, Technology and Development* (2008)—dalam konteks gabungan krisis pangan, energi, iklim, dan keuangan (Araghi 2009; Bello 2009; Houtart 2010; Rosin, Stock, dan Campbell 2012; McMichael 2012).

Dalam rangka meletakkan kembali pertanaian dan pangan sebagai pusat perhatian, gerakan kedaulatan pangan menjalankan dua misi sekaligus: menghambat penggusuran petani dari tanah, dan memulihkan basis agraria peradaban manusia. Ini bukan hanya soal "transisi", melainkan tentang keselamatan umat manusia yang butuh pangan cukup dan mudah didapat serta bergantung pada cara-cara bercocok tanam yang memperbaharui daur ekologis. Kedaulatan pangan adalah perjuangan ekonomi-politik representasi/pengungkapan (Patel 2006). "Inilah sebuah gerakan rakyat yang mengolah tanah, yang sama-sama mengusung agenda progresif. Artinya, kita memiliki pandangan yang sama bahwa rakyat—petani kecil, orang-orang yang mengolah tanah—punya hak untuk berada di sana …. Bahwa tugas kitalah menjaga bumi dan rakyat kita. Kita benar-benar harus mempertahankan agenda itu, dan kita harus mempertahankannya dalam konteks global" (Nettie Wiebe, dikutip dalam Desmarais 2002: 98).

Mempertahankan tanah dalam konteks global berarti membalikkan masalah agraria klasik dalam dua pengertian: memulihkan kepelakuan (agensi) petani sebagai produsen pangan, dan membayangkan sebuah jalur pascakapitalis.

Dalam masalah agraria klasik, pangan tidak terlihat. Yang tampak hanya harganya—di mana pangan memberi efek terhadap relasi-relasi politik dan pola-pola akumulasi (kendati tetap berdampak terhadap rezim pangan dalam masalah agraria melalui pangan murah). Apa pun politik yang berlaku, kerangka pikir masalah agraria klasik ini menyoroti kondisi-kondisi yang memungkinkan reproduksi kapital. Apa yang terjadi dengan tanah dianggap kurang penting dan tanpa konsekuensi terhadap tanah itu sendiri. Dan inilah yang terjadi baik ketika mengulas sosialisme akhir abad XIX ataupun tentang sarana-sarana untuk bertahan hidup bagi surplus tenaga kerja. Kerangka pikir alternatif yang diusung oleh gerakan kedaulatan pangan menyoroti reproduksi sosial di atas tanah dan reproduksi sosial tanah itu sendiri, sebagai sebuah tindakan ekologis. Dengan demikian, hal ini meletakkan produksi pangan kembali sebagai tindakan sosial-ekologis ketimbang tindakan industrial. Kedaulatan pangan mendorong sekolah-sekolah pertanian ekologis dan perluasan metodologi *campesino-á-campesino* ('dari petani ke petani') dalam bentuk berbagi benih dan informasi (Holt-Giménéz 2006; Rosset dan Martinez-Torres 2012; Massicotte 2013). Sebagaimana dilaporkan Rosset dan Martinez-Torres, Vía Campesina "belakangan mulai melakukan identifikasi, kaji-diri, dokumentasi, telaah, dan secara horizontal berbagi pelajaran dari kasus terbaik praktik pertanian ekologis dan kedaulatan pangan yang dipimpin petani dan ramah iklim. La Vía Campesina telah membuka sekolah-sekolah pelatihan pertanian ekologis dan/atau perguruan tinggi-perguruan tinggi petani di Venezuela, Paraguay, Brasil, Nikaragua, Indonesia, dan India, dan yang lain sedang direncanakan di Mozambik, Zimbabwe, Niger, dan Mali. Ini masih ditambah

dengan pendirian lusinan sekolah-sekolah di level nasional dan daerah" (Vía Campesina 2012: 17).

Kesimpulan

Gagasan mengenai "masalah agraria terkait pangan" menggemakan perhatian gerakan kedaulatan pangan untuk menjadikan "keamanan pangan" berbasis pasar bukan sebagai sesuatu yang bersifat alamiah, juga untuk melekatkan relasi-relasi pangan dalam praktik-praktik ekologis yang terorganisir secara demokratis. Rumusan ini bukan sekadar tentang pangan atau gerakan petani. Alih-alih demikian, gerakan kedaulatan pangan secara mendasar mengubah cara kita berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan bagi masa depan yang berkelanjutan secara sosial dan ekologis. Ini bukan sekadar gerakan tentang pangan; gerakan ini mengajukan klaim lebih besar tentang peradaban karena kian mendalamnya kontradiksi-kontradiksi yang disebabkan oleh rezim pangan. Gerakan ini menjadikan kondisi agraria sebagai masalah politis dalam kaitannya dengan struktur sosial yang menyokong akumulasi kapital. Jika kita melihat dinamika ini hanya melalui kacamata kapital/buruh, relasi-relasi pangan dan ekologis yang mendasar akan dianggap tidak berhubungan atau tidak terlihat sama sekali. Karenanya, dibutuhkan suara dari gerakan petani kecil dan buruh tani untuk merumuskan masalah agraria yang lebih kompleks mengenai krisis kapitalisme kontemporer, juga untuk mengajukan jalur ontologis alternatif.

BAB 5

Merumuskan Ulang Rezim Pangan

KEMBALI ke *proyek* rezim pangan, bab ini menjajaki kemungkinan-kemungkinan untuk melihat "rezim pangan" dalam dimensi-dimensi yang lebih luas. Suatu perbedaan pokok perlu dibuat di sini, yakni antara menunjukkan momen-momen dalam rezim pangan (periode-periode akumulasi dan transisi-transisi yang menyertainya), dan menggunakan analisis rezim pangan untuk menunjukkan hubungan-hubungan dan kontradiksi-kontradiksi penting dalam sejarah politik kapital yang melintasi ruang dan waktu. Bab ini akan menjelaskan hal itu. Dengan begitu, konsep rezim pangan meletakkan komoditas sebagai relasi (ketimbang sebagai objek), yang padanya melekat relasi-relasi geopolitik, finansial, sosial, ekologis, dan nutrisi yang tampak pada momen-momen historis penting.

Analisis Rezim Pangan Tingkat Kawasan

Asia Timur

Kawasan Asia Timur mau tidak mau sudah menjadi bagian dari rezim pangan sejak pertengahan abad XX. Terbentuknya pola relasi-relasi pangan dalam rezim pangan Asia Timur menyediakan lensa untuk menyelidiki transisi antara rezim pangan di bawah Amerika Serikat dan rezim pangan korporat, dan sekarang, pembentukan ulang struktur rezim pangan korporat. Pembentukan pola relasi ini berpusat di Jepang pada transisi pertama dan Tiongkok pada transisi kedua, masing-masing

merupakan kutub impor yang melekat pada momen-momen berbeda dalam evolusi rezim pangan secara luas.

Sistem/konstelasi impor pangan Asia Timur pascaperang, yang berpusat di Jepang, merupakan bagian dari pembentukan ulang struktur rezim pangan di tingkat regional. Jepang dan Korea Selatan tidak hanya menjadi penerima utama bantuan pangan Amerika Serikat, dan berikutnya impor pangan komersial, tetapi juga sebagai simpul regional bagi Amerika Serikat, yang mana keduanya mempersiapkan transisi dari rezim pangan bilateral yang berpusat di Amerika Serikat ke rezim pangan korporat yang kian bersifat multilateral (McMichael 1987, 2000). Rekonstruksi pascaperang di dua negara ini, yang melibatkan reforma agraria dalam skala luas, telah menghasilkan kebijakan-kebijakan petanian yang diarahkan untuk mendukung industrialisasi dengan impor pangan dari Amerika Serikat dan kemudian dari Asia Tenggara untuk melengkapi kebutuhan akan beras karena menu makan di Asia Timur sudah berubah.

Konstelasi impor ini bermula pada 1930-an ketika pemerintah Jepang mengorganisir imperium regional yang diberi nama "Wilayah Persemakmuran Asia Timur Raya", di mana Korea dan Taiwan ditempatkan sebagai koloni-koloni pertanian, dan Jepang menguasai akses atas sumberdaya alam di Manchuria dan Asia Tenggara karena sumberdaya ekologis Jepang terbatas. Strategi mencari sumberdaya dari negara lain setelah perang telah memperdalam ketergantungan terhadap bahan pangan (memasuki abad XXI Jepang mengimpor separuh asupan kalorinya), diiringi bertambahnya kawasan-kawasan tanaman pangan berorientasi ekspor yang menyaingi peran Amerika Serikat sebagai lumbung pangan dunia. Sepanjang 1961–1989, hutan bakau Thailand berkurang separuh, dengan "revolusi biru" yang mengekspor udang ke Jepang; pada pertengahan 1990-an, sebanyak 55% lahan pertanian di Filipina

diperuntukkan bagi komoditas budidaya ekspor, termasuk pisang dan nanas untuk konsumen Jepang (McCormack 1996: 133); sementara industri daging sapi Australia dikonversi menjadi kandang penggemukan ternak intensif untuk memasok pasar Jepang (Lawrence dan Vanclay 1994).

Transformasi menu makan di Jepang melewati tiga fase. Pertama, Undang-Undang Keamanan Bersama Amerika Serikat-Jepang 1954 telah melengkapi kebijakan beras Jepang di mana Jepang melakukan impor konsesional atas surplus biji-bijian Amerika Serikat (Ohno 1988). Dana-dana pendamping dari hasil penjualan telah memperkuat kebiasaan orang-orang Jepang mengonsumsi produk-produk olahan gandum, selain memperkuat unit-unit agrobisnis terkait (Shinohara 1964). Hasilnya, konsumsi gandum membengkak dan konsumsi beras susut 30% dari 1960 hingga 1983 (Coffin *et al*. 1991: 5).

Fase kedua ditandai meluasnya konsumsi protein hewani. Produksi ternak meningkatkan nyaris sepertiga hasil pertanian Jepang selama 1950–1985, konsumsi ayam naik 32 kali lipat, dan produksi beras mengecil dari 49% menjadi 33% (Riethmuller, Wallace, dan Tie 1988: 154; Taha 1989: 9). Dengan liberalisasi perdagangan pada 1961, bahan pakan seperti jagung (dan kedelai) melengkapi impor bahan pangan, nilai impor pertanian Jepang (dan Korea Selatan) melipatgandakan angka impor pangan dunia selama 1961–1987 (Huang dan Coyle 1989: 42). "Modernisasi" menu Jepang ditandai dengan intensifikasi produksi ternak domestik diiringi ledakan pakan ternak impor oleh perusahaan pangan seperti Cargill dan pedagang-pedagang raksasa pemasok pakan (*soga shosha*) skala besar (Rothacher 1989: 64).

Fase ketiga transformasi menu makan terjadi seiring dengan pembentukan ulang struktur pertanian global, bermula dari internasionalisasi sistem produksi daging intensif (Berlan

1991). Dalam konteks embargo kedelai Amerika Serikat 1973 dan embargo gandum/beras Amerika Serikat 1979 terhadap Uni Soviet, Jepang meluncurkan strategi diversifikasi bahan pakan, yang mendorong kerjasama bisnis pemerintah-swasta untuk mengonsolidasikan sumber-sumber bahan pakan alternatif: jagung dari Thailand dan Indonesia, kedelai dari Brasil, dan bijibijian dari Afrika, Tiongkok, Argentina, dan Australia (Hillman dan Rothenberg 1988: 46–47). Pembiayaan dari Jepang malah menjadi pendorong awal perubahan padang rumput Brasil menjadi ladang-ladang kedelai (de Sousa dan Vieira 2008: 236). Strategi pencarian sumberdaya berskala global ini merupakan tahap awal bagi munculnya apa yang disebut "ekspor nontradisional" (*nontraditional exports*, NTES) seperti bahan-bahan pakan, daging, buah-buahan dan sayuran (eksotis), serta berbagai macam makanan olahan. Lebih penting lagi, pencarian sumber pangan secara global menandai dimulainya transisi dari perdagangan produk pertanian bilateral menjadi multilaterisme yang dipraktikkan oleh rezim pangan korporat yang digerakkan dari zona-zona pemasok di "Negara-Negara Pertanian Baru" (Friedmann 1993).

Seiring mematangnya pembentukan ulang struktur pertanian global, sejak 1980-an, bisnis peternakan dipindahkan ke negara-negara berpendapatan menengah seperti Thailand, Taiwan, Meksiko, dan Brasil, di mana perusahaan-perusahaan agrobisnis menggabungkan tempat-tempat produksi pakan dan penggemukan (McMichael 1993: 111). Sejumlah perusahaan agrobisnis beroperasi secara regional—seperti Charoen Pokphand (CP) Thailand, dengan delapan puluh anak perusahan di Tiongkok, termasuk pabrik pakan, pembibitan, peternakan ayam potong, pabrik-pabrik pengolahan, dan deretan gerai ayam cepat saji (Gargan 1995: D4). Pabrik pengolahan daging intensif yang "terdesentralisasi" seperti itu muncul untuk memasok

daging dengan kualitas prima ke pasar regional dan global guna memenuhi kebutuhan kelas konsumen berpendapatan menengah yang sedang meningkat, termasuk di Jepang.

Thailand mengalami transisi ini, sebab produk-produk tropis Thailand yang diekspor bertambah, dari biasanya beras, gula, nanas, dan karet, bertambah dengan ekspor nontradisional berupa singkong (pakan), tuna kaleng, udang, unggas, daging olahan, serta buah dan sayuran yang segar maupun olahan (McMichael 1993: 112). Ekspor sereal yang ada sebelumnya (khususnya jagung dan sorgum) kemudian menjadi sumber pakan ternak intensif, hingga turut membentuk wajah baru Thailand sebagai "supermarketnya Asia". Investasi Jepang dalam sektor pertanian Thailand telah bermula pada 1970-an, yang meluaskan kawasan-kawasan produksi pakan (kedelai dan jagung) dan pemasok produk perikanan (akuakultur) bagi pasar Jepang (Suthy dan Sontepertkwong 1986: 193). Perusahaan-perusahaan agrobisnis Jepang menjalin usaha patungan dengan agrobisnis Thailand; kerjasama ini menggabungkan fasilitas-fasilitas produksi berteknologi tinggi dengan akses pasar luar negeri (Suehiro 1989: 270).

Dengan dukungan pemerintah Thailand, kerjasama bisnis itu mencolok dalam subsektor unggas, di mana porsi impor ayam potong Jepang yang berasal dari Thailand meningkat menjadi 41% hingga melampaui ekspor Amerika Serikat yang turun dari 59% menjadi 40% selama 1980–1987 (Bishop *et al*. 1990: 23). Pada 1994, produk unggas Tiongkok menggeser posisi Thailand sebagai pemasok utama, khususnya ke Jepang dan secara umum ke Asia. Seiring melonjaknya ongkos pakan Thailand, produsen pakan Thailand berinvestasi di negara-negara tetangga. Maka Charoen Pokphand, dengan investasi US$1 miliar dalam sejumlah usaha patungan di Tiongkok, memproduksi 300 juta ayam, dari total 3 miliar ayam yang di-

konsumsi Tiongkok pada 1994, dan ekspor daging unggas dari Tiongkok ke Jepang berlipat nyaris empat kali selama 1988–1993 (Handley 1990: 56). Selama 1990-an, Tiongkok menjadi tujuan utama Jepang untuk investasi luar negeri langsung (*foreign direct investment* [FDI]) dalam produksi makanan beku, produk-produk ikan, dan pengolahan sayuran untuk konsumen Jepang, sehingga kini Tiongkok menjadi sumber pangan impor terbesar kedua setelah Amerika Serikat bagi Jepang (Hall 2006: 200–202).

Dengan demikian, tatanan kompleks impor pangan Asia Timur yang berporos di Jepang telah mereproduksi rezim pangan secara umum, merintis strategi-strategi penyediaan bahan pangan secara global. Proses ini digerakkan sebagiannya oleh strategi Jepang dalam memberagamkan sumber pangan karena keterbatasan Jepang secara ekologis (Bunker dan O'Hearn 1993), dan sebagiannya lagi oleh industrialisasi Jepang (serta konsumerisme yang mengiringinya) sebagai negara penting di garis depan Perang Dingin (Cumings 1984). Sistem regional seperti ini memainkan peran kunci pada 1980-an, ketika banjir pangan murah yang menjadi ciri rezim pangan pascaperang digantikan oleh produk-produk pangan bernilai tinggi yang merupakan ciri dari berkembang pesatnya "ekspor nontradisional". Dalam pengertian ini, tatanan kompleks impor pangan Asia Timur merupakan pilar utama rezim pangan global yang lebih menyuburkan pasar-pasar produk pangan yang dikuasai korporasi ketimbang yang dikendalikan negara.

Transisi Asia Timur kedua merupakan kelanjutan dari yang pertama. Tiongkok tampil sebagai pemasok penting pangan impor Jepang, selain berkembang menjadi pengimpor pangan yang porsinya mencapai 9% impor pertanian dunia pada 2010. Di dalam konstelasi impor ini, kedelai menyumbang 38%, sawit 8%, dan produk susu 4%—di mana komoditas-komoditas ini menjadi bahan dasar untuk sektor makanan olahan, pakan

ternak, dan energi. Peralihan paling dramatis sejak Tiongkok menerapkan Program Reformasi dan Keterbukaan 1978 adalah impor kedelai—pada 2012 Tiongkok memangkas tarif impor kedelai dari 114% menjadi 3% (Smaller *et al*. 2012: 3). Meski impor kedelai (melalui empat pedagang biji-bijian terbesar dunia) membengkak sepuluh kali lipat pada dekade pertama abad XXI, pola seperti ini merupakan pengulangan saja dari konsolidasi tatanan kompleks peternakan global sebagai jangkar rezim pangan korporat.

Reformasi Tiongkok telah mendorong peningkatan angka kelas menengah dan mendorong proses 'dagingisasi' (*meatification*) (Weis 2007). Di sini daging babi menggeser sapi dan ayam sebagai daging yang paling banyak dikonsumsi di dunia pada 1979 (Scheneider 2013: 12). Pada awal 1990-an, Tiongkok mengubah kedelai dari tanaman pangan menjadi tanaman industri, demi mempertahankan akumulasi dalam industri ternak—sebuah langkah yang mengorbankan produsen kedelai skala kecil dan menengah dalam negeri demi kedelai impor yang lebih murah (Olmstead 2011). Pada akhir 1990-an, World Bank menggelontorkan pinjaman kepada Tiongkok sebesar US$93,5 juta untuk mendukung industri sapi di sana; pinjaman itu untuk disalurkan kepada 130 unit penggemukan sapi dan lima pusat pengolahan daging sapi (McMichael 2001: 217). Antara 1994 dan 2004, perdagangan kedelai meningkat dua kali lipat, dengan Tiongkok menyumbang 70% dari peningkatan itu, kira-kira setara dengan seluruh jumlah ekspor kedelai dari Brasil dan Argentina (Bello 2009: 86). Hasilnya, pada 2011–2012, impor kedelai Tiongkok menyumbang 59% pasar kedelai dunia (Schneider 2013: 13). Jagung (sumber karbohidrat) sebagai pelengkap kedelai (sumber protein) boleh jadi kini sedang mengalami pendefinisian ulang sebagai tanaman industrial, dengan tahun 2010 sebagai titik balik meledaknya impor ja-

gung. Sebagaimana ditunjukkan Mindi Schneider, Tiongkok bisa saja menggeser definisi resmi mengenai "keamanan biji-bijian" sebagai swasembada nasional (95%), dari awalnya untuk ketersediaan jagung menjadi ketersediaan beras dan gandum; ini sangat mungkin mengisyaratkan berubahnya jagung menjadi pakan yang memasok subsektor pangan bernilai tinggi dan dengan begitu menyokong berkembangnya pemilahan menu antarkelas, antara "daging untuk elite [konsumen urban], dan biji-bijian untuk orang kebanyakan" (2013: 14).

Dapat dikatakan bahwa pembentukan pola ini bertolak belakang dengan relasi rezim pangan sebelumnya. Di dua rezim awal, pergerakan biji-bijian memasok pangan yang terjangkau upah buruh di wilayah-wilayah yang sedang mengalami industrialisasi pada masa tersebut. Inggris mengimpor biji-bijian untuk menyubsidi upah dalam negeri, dan Amerika Serikat mengekspor gandum untuk menyubsidi upah di negara-negara garis depan Perang Dingin, sedangkan Tiongkok mengimpor kedelai dan jagung untuk memasok daging bagi kelas menengahnya yang membengkak serta untuk mendorong ekspansi perusahaan agrobisnis dalam negerinya (*"dragon-heads"*). Tiongkok memberi makan 21% penduduk dunia yang menghuni 9% lahan dunia. Dan dengan akar yang kuat dari era revolusi, masih tetap ada komitmen terhadap keamanan pangan dalam negeri (lihat Bello 2009: 87; Schneider 2013). Meski begitu, konsep "keamanan pangan" menjadi rumit karena, di satu sisi, definisi "keamanan biji-bijian" telah berubah untuk mengakomodasi peningkatan impor kedelai dan jagung, sementara di sini lainnya, strategi "Menuju Global" sejak 2008 secara terbuka telah memprioritaskan investasi pertanian di luar negeri (Smaller *et al.* 2012: 4). Kendati masih lebih kecil dibanding investasi luar negeri di sektor lain, investasi pertanian Tiongkok di luar negeri menempati peringkat ketiga di bawah

Amerika Serikat dan Kanada (Smaller *et al*. 2012: 5). Laporan-laporan tentang perampasan lahan skala besar cukup beragam dan mungkin dilebih-lebihkan (Hoffman dan Ho 2012). Smaller *et al.* (2012: 8) mencatat 54 proyek berbasis tanah yang mencakup 4,8 juta hektare lahan di luar negeri—sekitar separuhnya ada di Asia, lima di Amerika Latin, dan satu proyek kedelai besar-besaran seluas 1 juta hektare di Kazakstan yang dijalankan oleh perusahaan negara Jilin Grain Group.

Memang Tiongkok telah mengikuti langkah negara-negara yang sebelumnya merupakan pusat seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang dalam hal menu makan berbasis kelas sosial serta model akumulasi agroindustri Amerika Serikat. Namun di tingkat global, Tiongkok memilih model restrukturisasi yang bersifat multipusat, yang sesuai dengan rezim pangan korporat (lihat Bab 6). Lebih jauh lagi, restrukturisasi ini tidak melulu bersifat geoekonomis; penggeraknya adalah strategi-strategi akumulasi agrobisnis, dalam hal ini sepanjang relasi Selatan-Selatan. Empat korporasi pangan—ADM, Bunge, Cargill, dan Dreyfus (ABCD)—menata pergerakan kedelai Brasil (juga Amerika Serikat dan Argentina) ke Tiongkok, dengan mengontrol keseluruhan prosesnya, dari kredit dan input sampai pengolahan (dengan pabrik penggilingan berada di Tiongkok) dan pengapalan. Terlepas dari tidak direalisasikannya usulan-usulan para pemimpin Brasil dan Tiongkok agar transaksi dagang dilaksanakan dalam yuan, ketimbang dolar, serta visi Tiongkok mengenai investasi luar negeri di sektor fasilitas produksi kedelai (dengan tanggapan negatif Brasil), satuan rantai kedelai-babi (sebagai sebuah "rangkaian perakitan protein global") tetap merupakan pertukaran Selatan-Selatan di dalam sebuah sistem yang dikendalikan oleh korporasi transnasional (Peine 2013: 9). Maka, dalam konteks semakin mapannya pola di mana pangan diperoleh lewat sistem global di

bawah rezim pangan, Tiongkok kini tampil sebagai salah satu kutub impor global yang baru, yang memenuhi kebutuhan golongan konsumen yang tengah bertumbuh di dalam populasinya yang sangat besar.

Amerika Latin

Dalam satu edisi khusus *Canadian Journal of Development Studies* (*CJDS*), Gerardo Otero (2012) mencoba menggunakan analisis rezim pangan di tingkat kawasan, menggeser fokus perhatian dari ekonomi dunia ke negara, mengingat negara adalah pusat dari "rezim pangan neoliberal di Amerika Latin." Minat Otero adalah mempertanyakan penggunaan bioteknologi pertanian: "sebanyak apa pun komoditas budidaya transgenik digunakan di Meksiko atau negara-negara Amerika Latin lainnya, tidak ada kepastian bahwa itu akan membantu pemenuhan pangan rakyat di negara-negera tersebut" (Otero 2012: 289), sebab komoditas budidaya itu utamanya diarahkan untuk ekspor. Dia memberi penekanan pada sektor publik (negara dan sistem Consultative Group on International Agricultural Research [CGIAR]) dalam mengembangkan bioteknologi yang dijalankan oleh perusahaan agrobisnis di bawah aturan-aturan WTO dan protokol-protokol HKI ("neoregulasi"). Artinya, negara menyokong bioteknologi dan menerapkan rezim-rezim akumulasi model swasta untuk keuntungan korporasi dan petani bermodal besar yang "tujuannya bukan produksi nilai guna bagi konsumsi manusia" serta meraup laba dari pakan dan bahan bakar nabati (Otero 2102: 289). Singkatnya, "rezim pangan neoliberal" beroperasi melalui negara yang telah menerapkan sepenuhnya prinsip-prinsip pasar, sebagaimana dirumuskan dalam konsep rezim pangan korporat.

Di Argentina, misalnya, melalui proyek "ekspor pangan nontradisional", lembaga-lembaga keuangan internasional

mengucurkan dana kepada pemerintah untuk mendorong investasi pertanian di perusahaan bioteknologi asing. Menyusul kemudian, pada 1996, pemerintah menyetujui benih kedelai *Roundup Ready* produksi Monsanto. Sejak itu, produksi kedelai transgenik telah meluas pada kecepatan nyaris 1 juta hektare per tahun (hingga 2010/2011), dengan sektor peternakan Tiongkok sebagai tujuan utama ekspor kedelai. "Konstelasi kedelai" (biji, minyak, dan pakan ternak buatan [*pellet*]) menyumbang 70% pendapatan pertanian Argentina (ekspor pertanian menyumbang lebih dari 50% dari total ekspor). Dampak buruk terhadap tenaga kerja dan tanah akibat industrialisasi pertanian semacam ini telah mengurangi populasi pedesaan dari 13% pada 1995 menjadi 7% pada 2010, dan monokultur kedelai transgenik memperparah deforestasi dan degradasi hutan serta menurunnya kesuburan tanah. Dengan hadirnya "tumbuhan tahan racun" (*superweed*), meningkat juga penggunaan input kimia dalam pertanian, yang mengakibatkan penurunan kualitas kesehatan masyarakat. Meskipun terjadi dampak-dampak sosial, ekologis, dan krisis finansial yang menyusul pada 2001, pemerintah Argentina di bawah Presiden Cristina Fernández de Kirchner malah makin memperkuat model monokultur kedelai transgenik sebagai strategi pembangunan utama, dan berusaha melegitimasi dampaknya dengan menggunakan sebagaian pendapatan negara untuk belanja sosial dan infrastruktur publik (Leguizamon 2013). Sebagaimana dicatat Teubal (2008), mirip dengan pendapat Otero, kultur kedelai transgenik jelas merongrong keamanan pangan dalam negeri.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, Pechlaner dan Otero (2008: 2) berpendapat bahwa model rezim pangan neoliberal akan menjadi sasaran perlawanan lokal yang meluas—sebagaimana diungkapkan dalam dua studi kasus dengan basis teori yang kuat, dalam terbitan *CJDS*, yang merupakan

dokumentasi beragam bentuk perlawanan terhadap tanaman transgenik: yang pertama tentang gerakan petani yang berhasil melawan jagung transgenik di Guatemala (Klepek 2012) dan yang kedua tentang berbaliknya para bekas petani tanaman transgenik di Brasil ketika menyuarakan protes terhadap relasi ketergantungan terhadap Monsanto (Preschard 2012). Kasus-kasus seperti ini memperhadapkan wajah negara dengan "beragam cara perlawanan terhadap rezim pangan korporat," yang dilakukan oleh "beragam produsen pertanian di seluruh dunia," yang bersatu di bawah visi Vía Campesina sebagai "inti perlawanan terhadap rezim pangan korporat" (McMichael 2005: 295).

Tersebar di kawasan Amerika Latin, Vía Campesina menjadi bagian dari koalisi anti-jagung transgenik di Meksiko (Fitting 2011: 111). Penemuan gen-gen hasil rekayasa dari varietas jagung lokal pada 2011 telah memicu debat tentang rapuhnya budaya pertanian jagung di Meksiko di dalam konteks lebih luas rezim pangan korporat. Mengenai debat ini, Lauren Baker menjelaskan, tanggapan yang muncul adalah desentralisasi "gerakan sosial yang mengakar di dalam komunitas di seluruh Meksiko tetapi terhubung dengan upaya-upaya kedaulatan pangan global" (2013: 3), contohnya adalah jaringan-jaringan pangan alternatif seperti Itanoní Tortillería, Nuestro Maíz, dan Michoacán Centre for Agribusiness (2013: 4). Buku Baker, *Corn Meets Maize*, memotret kontradiksi utama rezim pangan korporat: "jagung (*corn*) digunakan sebagai simbol untuk upaya komoditisasi pangan dan kendali korporasi atas produksi, pengolahan, dan konsumsi pangan. Di sisi lain, jagung lokal (*maize*) digunakan sebagai simbol untuk menggambarkan praktik pertanian dan pangan berdasarkan pengetahuan praktis bercocok tanam, tradisi kuliner, dan pertukaran dalam ekonomi lokal" (2013: 3). Dalam etnografi Baker, pertentangan yang

terus berlangsung antara jagung lokal yang melestarikan hidup berikut para inovatornya dengan ekonomi jagung neoliberal yang bersifat ekstraktif merupakan metafora efektif untuk menggambarkan suatu era ketika harga pasar tidak memenuhi nilai ekologis—ketegangan kunci dalam rezim pangan global yang barangkali paling cocok disebut sebagai pertarungan untuk memenangkan logika reproduksi (sosio-alamiah) dalam peradaban umat manusia (lihat Bab 7).

Studi kasus Elizabeth Fitting, *The Struggle for Maize* (2011), menyajikan kesaksian mengenai konteks pertarungan seperti di atas, pertarungan yang terbentuk (dengan efek penting terhadap petani jagung lokal) melalui NAFTA lewat suatu "rezim jagung neoliberal" yang praktiknya berlangsung di seputar impor jagung dan ekspor tenaga kerja (Fitting 2006). Fitting menawarkan perspektif etnografis yang berharga untuk melihat efek dan dampak dari rezim pangan di lembah Tehuacán, sebuah wilayah petani jagung lokal, suatu perspektif yang berhasil memperlihatkan sifat dari ikatan-ikatan antara komunitas-komunitas tani dan koalisi aktivis dalam perjuangan melawan "liberalisasi perdagangan, ekspansi pertanian korporat, pemangkasan subsidi pedesaan, dan migrasi sirkular dan migrasi keluar pedesaan" (2011: 234). Fitting memperlihatkan kepekaan terhadap lapisan-lapisan makna yang terlibat dalam pembentukan ulang struktur budaya jagung lokal yang berlangsung di bawah tekanan kebijakan-kebijakan neoliberal, juga terhadap cara pemahaman berciri esensialis yang melihat masyarakat tani (*campesinos*) sebagai kelompok yang takefisien dan terbelakang. Dengan cara itu, dia merekonstruksi kontradiksi yang melekat pada relasi-relasi gender dan antargenerasi yang membentuk dinamika rezim pangan di "level terbawah". Fitting (2011: 5) mengklaim bahwa "masa depan perlindungan jagung lokal di tempat asalnya bergantung pada

regulasi impor transgenik, bahkan yang lebih penting lagi bergantung pada praktik-praktik penghidupan orang pedesaan Meksiko," yang relasi-relasi produksi dan reproduksinya berdampak pada keanekaragaman jagung lokal serta, tentu saja, berdampak pada kokoh atau tidaknya jagung lokal sebagai budaya pangan di masa depan.

Di sini kontradiksi utama terjadi antara, di satu sisi, beraneka ragam pemanfaatan jagung lokal (putih) sebagai pangan, pakan, dan bahan bakar dalam ekonomi skala kecil dan, di sisi lain, industrialisasi tepung tortila dan tepung jagung berbahan jagung (kuning) impor ("pangan dari antah-berantah"), yang berujung pada terkikisnya "swasembada jagung lokal Meksiko untuk konsumsi pangan domestik" (Fitting 2011: 18). Melalui penelitian terperinci atas perubahan strategi-strategi penghidupan di kalangan produsen skala kecil, Fitting meletakkan budaya jagung lokal dalam konteks sejarah, lalu menunjukkan bahwa perjuangan yang dilancarkan koalisi nasional 'Mempertahankan Jagung Lokal' (*In Defence of Maize*) untuk melawan tanaman transgenik membutuhkan pemahaman lebih kaya dan teliti mengenai praktik-praktik budaya para *campesino* yang rentan berubah dan berlangsung dalam konteks transnasional, praktik-praktik yang tidak bisa dipadatkan sekadar sebagai "budaya orang asli atau petani kecil yang sudah berlangsung ribuan tahun" (2011: 236).

Nilai penting kajian Baker dan Fitting tidak hanya bahwa mereka membumikan analisis rezim pangan dalam kehidupan dan perlawanan para penghasil pangan dan pendukung gerakan mereka dalam menantang sekaligus turut membentuk kebijakan neoliberal dan pasar korporat, di dalam kasus satu negara. Masing-masing dari mereka juga meletakkan relasi-relasi sosial dalam konteks historis, yang memengaruhi tindakan para pembuat kebijakan, produsen, pekerja, dan akti-

vis. Dengan begitu mereka menghindari cara penggambaran yang berwatak esensialis mengenai ekonomi dan budaya, serta menunjukkan bagaimana rezim pangan secara umum mewujud dalam ruang politik-kelembagaan dan material tertentu.

Timur Tengah

Sebagaimana di wilayah lain, Timur Tengah juga mengalami surutnya kemampuan swasembada pangan seiring meningkatnya ketergantungan terhadap impor pangan selama masa menguatnya rezim pangan korporat. Secara keseluruhan, negara-negara Arab bergantung pada impor pangan, yaitu sekitar 60% dari kebutuhan pangannya, juga merupakan importir biji-bijian terbesar di dunia (Babar dan Kamrava 2013: 12). Kenyataan ini bisa dijelaskan dalam konteks regional, khususnya selama masa kemunduran Kesultanan Ottoman, ketika imperialisme perdagangan bebas mengintegrasikan wilayah ini ke dalam pasar dunia melalui tanaman ekspor kolonial (kapas dan gandum), yang berujung pada konsentrasi penguasaan lahan (Woertz 2013b: 31, 34). Para penyakap atau penggarap bagi hasil mengolah lahan-lahan sempit yang terpencar untuk menghasilkan sereal sebagai makanan pokok. Setelah Perang Dunia I, Anatolia, Irak, Transjordan, dan Mesir mengekspor biji-bijian, dalam posisinya sebagai bagian dari wilayah pinggiran rezim pangan (Woertz 2013b: 39).

Selama berlangsungnya proyek pembangunan baru seusai Perang Dunia II, reforma pertanahan yang gagal di seluruh Timur Tengah (akibat buruknya sistem kepemilikan tanah dan kurangnya dukungan terhadap sektor pertanian) terjadi bersamaan dengan impor pangan untuk mencukupi kebutuhan buruh perkotaan seiring perkembangan industrialisasi. Di bawah rezim pangan Amerika Serikat seusai Perang Dunia II, Mesir merupakan importir pangan per kapita terbesar di dunia

antara 1958 dan 1965. Pada 1964 saja, sebanyak 91% impor biji-bijian Mesir berasal dari bantuan pangan Amerika Serikat. Tetapi, satu dekade kemudian, impor biji-bijian Mesir didominasi bahan pakan guna memasok industri peternakan yang tengah berkembang untuk konsumen kaya; antara 1966 dan 1988, konsumsi biji-bijian untuk pakan meningkat 268% yang ditopang subsidi dari USAID sebesar US$3 miliar, jumlah yang setara dengan pembelian biji-bijian dari Amerika Serikat sejak 1975, dan pemerintah menarik pajak dari petani Mesir yang menamam biji-bijian, juga menyubsidi produksi protein hewani (Mitchell 1991: 21).

Ketergantungan pangan telah menjadi situasi yang menentukan bagi kawasan Timur Tengah. Terlepas dari meningkatnya pemasukan dari minyak bumi pada 1970-an untuk membiayai impor pangan yang kian mahal (seiring berakhirnya rezim pangan pascaperang), pengalaman Mesir dengan embargo pangan oleh Presiden Amerika Serikat Lyndon Johnson pada 1960-an karena konflik dengan Israel telah menjadi pengingat untuk mengatasi masalah ketergantungan pangan. Ancaman kedua oleh Amerika Serikat untuk menggunakan "senjata pangan" pada 1970-an selama boikot minyak Arab membuat Negara-Negara Teluk lebih serius memberagamkan pasokan pangan (Woertz 2013a: 88). Kegagalan berikutnya di Sudan dengan proyeknya menjadi "lumbung pangan Arab" telah memicu munculnya upaya menuju kemandirian oleh Negara-Negara Teluk, khususnya Arab Saudi (Woertz 2013b: 47, 48).

Pada 1980-an, Amerika Serikat dan Uni Eropa bersaing memperebutkan tempat untuk melempar surplus biji-bijian, tetapi para penguasa Saudi menolak tawaran kemudahan dari Amerika Serikat untuk tujuan itu, dan memilih "menggunakan program gandum mereka sendiri untuk sarana pembagian hasil minyak bumi dan menghadiahi para kroni," dengan begitu

menguntungkan pihak-pihak tertentu saja dalam budidaya gandum domestik yang disubsidi besar-besaran. Selama 1990-an, subsidi berkurang, dan pada akhir dekade berikutnya, orang-orang Saudi mengurangi budidaya gandum di padang pasir karena alasan ekologis, juga melancarkan penguasaan lahan di luar negeri untuk produksi pangan. Pola ini berulang di banyak tempat di kawasan Timur Tengah, dan Eckart Woertz (2013b: 49, 52) menyimpulkan: "Sebagai pengimpor biji-bijian terbesar di dunia, negara-negara Timur Tengah berada di tengah pusaran rezim pangan global yang tengah berubah. Ketersediaan surplus yang dapat diekspor pada skala global dan pendapatan domestik untuk membayar impor adalah dua hal krusial bagi mereka." Impor ini termasuk gandum dan beras untuk makanan pokok, serta jelai dan alfalfa untuk pakan di industri ternak (Woertz 2013a: 89).

Solusi beragam diterapkan di kawasan ini, sebagaimana dibahas dalam buku *Food Security in the Middle East* (Babar dan Mirgani 2013). Dewan Kerjasama Teluk—beranggotakan Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab—tengah mengusahakan strategi diversifikasi, termasuk investasi saham dalam perusahaan agrobisnis global, membangun "ikatan biji-bijian" dengan eksportir hasil pertanian utama (khususnya Amerika Serikat dan negara-negara Amerika Latin), juga investasi untuk tanah di luar negeri—seperti penguasaan lahan di Etiophia oleh Arab Saudi dengan kesepakatan bagi hasil (Tetreault *et al*. 2013: 333). Pada 2008, di tengah krisis pangan, Arab Saudi meluncurkan Prakarsa Raja Abdullah untuk Investasi Pertanian Arab Saudi di Luar Negeri; proyek ini diarahkan untuk menyokong investasi tanah di luar negeri guna memproduksi padi, gandum, jelai, jagung, gula, pakan hijauan serta ternak, dan dimungkinkan karena dukungan dana negara yang sangat besar (Green 2012). Prakarsa ini dapat menda-

ur ulang renten minyak bumi dari investasi pertanian domestik ke produksi di luar negeri, dengan bantuan dana negara, dan tentu saja Kamar Dagang Riyadh, sehingga memungkinkan peralihan seperti itu dengan membayarkan kompensasi untuk lahan-lahan gandum dalam negeri yang dibiarkan bera demi kepentingan ekologis (Woertz 2013a: 92–93).

Sementara itu, Qatar punya Rencana Induk untuk keamanan pangan, berdasarkan sistem hidroponik dan desalinasi dengan tenaga matahari, untuk "memproduksi hingga 70% pangan negeri ini pada 2023, sementara saat ini masih mengimpor 90% seluruh kebutuhan pangan," namun masih bergantung pada impor sereal (Woertz 2013a: 92). Menciptakan ceruk kecil dalam produksi hasil pertanian bernilai tinggi dan berorientasi ekspor adalah alternatif bagi beberapa negara Timur Tengah untuk menghasilkan pemasukan guna mengimbangi ketergantungan pangan. Lebanon dan Yordania, karena tidak sanggup mencapai swasembada pangan oleh keterbatasan sumberdaya, sangat mungkin akan bersandar pada ekspor hasil pertanian bernilai tinggi untuk menggantikan pemasukan dari minyak bumi (Harrigan 2013). Demikian pula Mesir yang mengembangkan ceruk serupa untuk menggantikan sektor usaha tani skala kecil domestik yang bergairah kendati tertekan oleh para pemburu renten yaitu pedagang dan pemilik lahan pertanian yang tinggal di kota (Bush 2013). Sementara Iran, sebuah negara minyak, punya kemandirian pangan yang cukup kuat karena sejarah isolasi geopolitik dan ekonomi (Salami *et al.* 2013). Sedangkan Yaman bergantung pada remitansi (kiriman uang para pekerja migran) untuk membiayai ongkos impor pangan (Mundy *et al.* 2013).

Negara-Negara Teluk yang sangat bergantung pada impor pangan menitikberatkan perhatian mereka pada pembentukan ulang struktur rezim pangan korporat. Bila akuisisi lahan luar

negeri oleh Tiongkok memuat kepentingan akan bahan bakar nabati dan penanaman pohon, Negara-Negara Teluk (yang mengandalkan pemasukan dari renten) kini sepenuhnya fokus menangani penyediaan pangan, termasuk di dalamnya menata ulang lumbung-lumbung penyimpan biji-bijian (Woertz 2013a: 99). Karena itu, bagi Negara-Negara Teluk, pencaplokan lahan skala besar di luar negeri memang ditujukan untuk pangan dan akses atas air—khususnya sejak advokasi untuk hak-hak negara importir pangan di forum-forum multilateral semakin lemah (Woertz 2013a: 96). Pada saat bersamaan, Abu Dhabi mendirikan perusahaan perdagangan di sektor pangan dan menanamkan investasi di perusahaan dagang komoditas internasional Glencore, bersama investor Teluk lainnya, dan dengan begitu bisa mengakses perusahaan dagang biji-bijian terbesar Kanada, Viterra (Woertz 2013a: 97). Dengan beragam cara ini, manuver Negara-Negara Teluk memperlihatkan suatu keadaan khas di mana rezim minyak tidak lagi dapat mengandalkan sistem yang diwariskan oleh rezim pangan korporat, dan membutuhkan cara-cara baru untuk mendapatkan pangan bagi warganya (sebagaimana dibahas pada bab selanjutnya).

Relasi-relasi bentukan rezim pangan dapat diurai pada level kawasan, tetapi juga menyediakan perspektif regional untuk melihat rezim pangan secara umum. Dengan demikian, pengalaman Asia Timur memberi gambaran jelas munculnya prinsip pengelolaan alternatif ketika rezim pangan bilateral di bawah Amerika Serikat sedang memasuki periode transisi menuju rezim pangan korporat yang berwatak multilateral. Pengalaman Amerika Latin memberi potret mengenai kontradiksi-kontradiksi yang mengiringi munculnya tanaman-tanaman transgenik berikut ancamannya terhadap budaya dan lingkungan pangan setempat, juga memperlihatkan karakter sosial dan politik gerakan-gerakan kedaulatan pangan se-

tempat. Dalam pengertian ini, rezim pangan berproses secara dialektis ketimbang linear. Akhirnya, pengalaman Timur Tengah menunjukkan bentuk dan kekhasan relasi ketergantungan pangan yang dialami negara-negara tertentu, dan bagaimana solusi masing-masing negara secara bersamaan memperlihatkan dengan jelas keseluruhan tantangan yang melekat pada proses penataan ulang struktur rezim pangan korporat.

Relasi-Relasi Rezim Pangan

Gender, Ras, dan Tenaga Kerja

Analisis rezim pangan punya kecenderungan mengutamakan relasi-relasi nilai sedemikian rupa hingga menganggap kurang penting bagaimana relasi-relasi komoditas dialami secara sosial di lapangan—baik dalam aktivitas di "sektor informal" maupun dalam aktivitas reproduksi sosial. Relasi komoditas ini mencakup serangkaian bentuk kerja secara sosial yang berlangsung dalam rumah tangga, usaha mandiri dan pekerjaan informal, serta usaha perdagangan. Rantai pangan korporat membangun ikatan kerja kontrak dan subkontrak dengan petani, buruh harian, dan juga pekerja informal, yang menggunakan perantara untuk menjual produk mereka di sektor informal (seperti kios-kios dan pedangan keliling). Sebagaimana ditunjukkan Marion Dixon (2013: 138), perusahaan-perusahaan unggas menjual anakan ayam kepada peternak kontrak untuk pembesaran, lalu dijual dalam keadaan hidup di pasar-pasar Kairo. Di satu sisi, beragam jenis pekerja kelas bawah dalam jumlah besar menjadi bagian dari proses penumpukan laba korporasi, dan di sisi lain korporasi menjadi kekuatan yang mengarahkan perempuan untuk selamanya berperan memenuhi kebutuhan-kebutuhan reproduksi sosial—di perkotaan dan pinggiran kota maupun di pedesaan.

Di sebagian besar negara-negara di Selatan, perempuan "punya tanggung jawab utama untuk memberi makan keluarga, dan diperkirakan memproduksi 60%–80% makanan hasil budidaya" (FAO, dikutip dari George 2010: 84), selain juga terlibat dalam pertarungan terus-menerus untuk mendapatkan keamanan akses atas tanah (Agarwal 1994; Deere 2003; Razavi 2009; O'Laughlin 2009) serta kedaulatan atas tanah (Patel 2006; Monsalve Suarez 2012: 20–25; Kerssen 2013: 91). Selain itu, proses semiproletarisasi dan 'penyusutan kaum tani' yang diakibatkan oleh rezim pangan telah menyebabkan feminisasi tenaga kerja pertanian di seluruh belahan dunia (Shiva 1988; Mackintosh 1989; Raynolds 2001; Mooij, Bryceson, dan Kay 2000; Deere 2005; Barndt 2002; Garikipati 2009).

Feminisasi tenaga kerja memberi keuntungan lebih bagi kekuatan kapital yang memanfaatkan tenaga kerja yang sangat rentan dan tergantung. Misalnya, Laura Raynolds (1997: 129) mencatat bahwa para petani miskin yang menerima kontrak produksi pisang di Republik Dominika "biasanya melibatkan istri dan anak-anak perempuan yang bekerja di gudang pengemasan dan anak-anak laki-laki bekerja di kebun pisang." Di Kenya, tempat hampir 90% holtikultura ditanam untuk diekspor ke Eropa (khususnya Inggris Raya), produksi dengan kontrak petani kecil telah beralih menjadi usaha tani skala besar dan gudang-gudang pengemasan terpadu dengan pekerja upahan pada pertengahan 1990-an; peralihan ini bergantung pada tenaga kerja perempuan yang bermigrasi untuk kerja musiman demi membantu pendapatan keluarga mereka, sebuah peralihan yang menunjukkan "keunggulan komparatif dari lemahnya posisi perempuan" (Dolan 2004). Jane Collins mendokumentasikan bagaimana perusahaan-perusahaan agrobisnis mempekerjakan perempuan sebagai strategi memadukan kerja-berkualitas-tinggi dengan biaya murah, yang

merupakan ciri dari sistem kerja perempuan yang fleksibel, kaitannya dengan tanggung jawab utama perempuan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi keluarga. Maka, "agrobisnis menggunakan ideologi-ideologi berbasis gender untuk menggerus kepastian kerja dan hak-hak buruh perempuan. Tak kalah pentingnya, mempekerjakan perempuan memberi para majikan cara untuk memanfaatkan pranata-pranata di luar tempat kerja, untuk memperluas lingkup dan makin menguatkan disiplin pekerja" (Collins 1995: 217). Deborah Brandt (2002: 182) memaknai ulang unit keluarga pedesaan menjadi "ekonomi keluarga berbasis upah," di mana tenaga pertanian keluarga disokong oleh "uang kiriman dari anggota keluarga yang bermigrasi, dan keluarga yang bermigrasi sering menawarkan beberapa anggota keluarganya sebagai pekerja upahan kepada agrobisnis." Di sini, nilai atau harga sesuatu tidak ditentukan melulu oleh sistem atau relasi pasar, tetapi juga berimplikasi pada relasi-relasi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan reproduktif keluarga-keluarga itu.

Penelitian Brandt atas "rantai komoditas" menelusuri perjalanan tomat yang dikelola korporasi dari Meksiko ke gerai makanan cepat saji dan toko-toko pengecer di Amerika Utara. Dengan memberinya nama Tomasita untuk menandai asal-usul etnik dan gender pekerjanya, Brandt menggambarkan tanaman Sayula milik eksportir besar produk pertanian Santa Anita Packers yang mempekerjakan lebih dari 2.000 pemetik dan 700 pengepak di masa-masa sibuk. Varietas benih hasil rekayasa yang dibudidayakan berasal dari Meksiko, tetapi dikembangkan dan dipatenkan di Israel atau Amerika Serikat. Benih-benih itu membutuhkan pestisida dosis tinggi, tetapi perusahaan tidak menyediakan pendidikan mengenai kesehatan atau keamanan kerja atau tentang alat-alat pelindung. Perusahaan

itu mempekerjakan ratusan perempuan muda yang berpindah secara musiman dari satu tempat ke tempat lain, sebagai:

> *Maquiladora* berpindah ... input yang berasal dari Meksiko hanyalah lahan, matahari, dan pekerja .... Dunia Selatan telah menjadi sumber benih, sementara negara-negara Utara punya bioteknologi untuk mengubahnya ... para pekerja yang memproduksi tomat-tomat itu tidak mendapat keuntungan. Peran mereka dalam produksi tanaman ekspor juga menutup partisipasi mereka dalam pertanian subsisten, khususnya sejak krisis peso pada 1995 yang telah memaksa para pekerja migran untuk bergerak ke tempat-tempat kerja yang lebih terpencar. Sekarang mereka harus berpindah nyaris sepanjang tahun—dengan sedikit sekali waktu untuk membudidayakan tanaman pangan di lahan sendiri di kampung mereka ... dengan hilangnya kendali ini, sirna pula spiritualitas, dan hilang juga pengetahuan tentang benih, pupuk dan pestisida organik, praktik-praktik berkelanjutan seperti rotasi jenis tanaman atau pemberaan lahan selama setahun—praktik-praktik pemeliharaan lahan yang sudah berlangsung selama bermilenium. (Brandt 1997: 59–62)

Dialektika "kekenyangan dan kelaparan" Raj Patel berlangsung di sini, di mana konsumen di Utara bergantung pada pasokan tenaga kerja yang bersumber dari proses pemiskinan reproduksi sosial dan kekerasan dalam mekanisme pasar (keduanya berbau rasial), memadukan akibat-akibat berkarakter gender dari proses itu sehingga memungkinkan sifat kerja rentan dalam bentuk kerja tanpa upah dan berupah taktetap (Patel 2007; McMichael 1999). Dalam karyanya *Strawberry Field*, mengenai kembali munculnya sistem bagi hasil di California,

Miriam Wells (1996: 238) membantah "pandangan ekonomi tradisional dan kaum Marxis, yang keduanya mengasumsikan lenyapnya sistem bagi hasil dan meningkatnya dominasi pekerja upahan dalam pertanian kapitalis yang rasional." Dia memaknai sistem bagi hasil sebagai suatu strategi berbasis kelas yang dilakukan oleh para petani untuk melemahkan kekuatan kelompok pekerja ladang yang terorganisir, yaitu "para pekerja yang punya ciri bagi-hasil dalam kontrak upah mereka" (Wells 1996: 302), jenis kontrak berbasis upah di mana pihak kontraktor bagi-hasil menyewa tenaga kerja berupah rendah dan rentan.

Di sini, sistem bagi-hasil memuat bentuk-bentuk relasi khusus dalam sejarah dunia: surutnya sistem kontrak upahan dan bangkitnya sistem bagi-hasil adalah cermin dari memburuknya hubungan-hubungan kerja di bawah neoliberalisme; ini terlihat pada fakta bahwa sektor ekonomi subsisten atau informal di Meksiko menyubsidi para pekerja berupah sangat rendah dengan waktu-kerja sangat kecil di petak-petak ladang bagi-hasil (Wells 1996: 285). Fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari relasi-relasi berbasis ras/etnik yang menjadi faktor penentu dalam sirkuit tenaga kerja transnasional, para tenaga kerja yang mempertahankan keberadaan kawasan yang dianggap "pusat" dan "pinggiran" di dunia. Relasi seperti ini mendefinisikan "peralihan besar": negara-negara Eropa selatan yang tadinya menjadi sumber pekerja migran ke pusat-pusat industri di Eropa utara dan di luar negeri sekarang menjadi tujuan bagi pekerja migran. Alessandra Corrado (2011) melaporkan bahwa 13% pekerja ladang di Italia adalah orang asing, dengan para migran mengerjakan "penggembalaan musiman di banyak daerah di Italia selatan," bergantung pada musim panen, dan hidup sangat rentan dalam hal materi, hukum, maupun ras.

Industri pertanian dengan karakter khasnya secara historis di dunia (atau "pertanian dunia") mengacu bukan pada pertanian secara utuh, melainkan pada suatu ruang transnasional bagi relasi-relasi pertanian dan pangan korporat dalam hal produksi dan reproduksi yang berlangsung mapan di bawah sirkuit komoditas. Reproduksi sosial yang sudah mapan itu memungkinkan bekerjanya suatu "bentuk kuasa-atas-jasad-hidup (*biopower*) yang paradigmatik" (Hardt dan Negri 2000: xv), di mana kekuatan kapital membentuk ulang manusia lewat penataan ulang alam atas nama keamanan pangan. Hal ini utamanya berlaku bagi para buruh pertanian yang setengahnya adalah perempuan, dan merupakan sepertiga dari 1,3 miliar orang yang terlibat aktif dalam produksi pertanian (setengah dari tenaga kerja dunia), sebagian besar berada di belahan dunia Selatan, dan di beberapa negara jumlahnya mencapai hingga 80% dari total tenaga kerja (IUF 2002: 3). Mereka bekerja dalam kondisi sangat berbahaya (dengan paparan bahan kimia, benda tajam, suhu ekstrem), dan dipekerjakan dalam hubungan kerja yang takpasti dan eksploitatif. Sebuah survei yang diselenggarakan Food Chain Workers' Alliance atas pekerja di sepanjang rantai pangan Amerika Serikat (17% dari seluruh angkatan kerja), melaporkan bahwa hanya sekitar 13,5% dari mereka yang menerima upah layak, mengingat dominannya pekerjaan musiman dalam sektor pertanian, maraknya pemotongan upah sewenang-wenang, pekerja migran dan tanpa dokumen, serta peralihan ke penataan kerja nonstandar pada 1990-an (2012: 32–34). Ironi utama rezim pangan adalah bahwa sebagian besar orang yang menderita kekurangan pangan adalah para pekerja penghasil pangan. Seorang pekerja Karibia mengatakan: "di banyak kesempatan, kami memakan pangan impor, kami tidak memakan apa yang kami tanam. Ka-

mi memproduksi makanan, tetapi kami tidak sanggup membeli makanan untuk memberi makan diri kami sendiri" (dikutip dari IUF 2012).

Finansialisasi

Salah satu aspek penting yang membentuk struktur relasi-relasi rezim pangan korporat adalah keuangan (*finance*); aspek ini mendorong terjadinya integrasi dan penyusunan ulang unsur-unsur dalam rantai pangan yang melintasi ruang dan waktu. Vía Campesina (2004: 2) mencatat bahwa "kini kapital tidak hanya membeli tenaga kerja dan menguasai tanah sebagai kepemilikan pribadi, tetapi juga hendak mengubah pengetahuan, teknologi, teknologi-teknologi bercocok tanam dan benih menjadi milik pribadi sebagai bagian dari strategi menyatukan sistem pertanian pangan di seluruh dunia." Akan halnya penyusunan ulang unsur-unsurnya, Luigi Russi (2013: 39) mencatat makin kuatnya pengaruh kapital finansial dalam rezim pangan dengan masuknya perusahaan pembiayaan ke dalam bisnis pangan, dan diterapkannya hitung-hitungan finansial murni dalam bagaimana korporasi-korporasi pangan beroperasi.

Bagi para pialang pembiayaan, penguasaan posisi strategis dalam aliran rantai pangan dapat mengubah relasi pangan menjadi relasi finansial: "dari mengubah pangan menjadi satu lagi komoditas dagang yang diperebutkan dalam pasar finansial, menjadi ekstraksi nilai secara progresif lewat rantai pangan untuk membuka ruang baru bagi perolehan laba korporat" (Russi 2013: 30). Wajah pasar finansial dan pangan seperti itu tidak hanya mengubah pangan menjadi objek spekulasi, tetapi juga menjadikan pangan semakin berjarak dari relasi organiknya dengan manusia (dan ternak)—khususnya karena makanan dipilah-pilah menjadi produk-produk pangan yang ditata ulang sebagai sumber akumulasi kapital.

Salah satu tanda finansialisasi industri pangan adalah fakta bahwa petani Amerika Serikat menerima 37 sen dari pangan pada 1973, sedangkan pada 2000 mereka memperoleh kurang dari 20 sen—sisanya diambil oleh bisnis pertanian dan kapital finansial (Roberts 2008: 114). Jagung mungkin tanaman pangan (juga pakan dan bahan bakar) yang dapat menjadi contoh paling mewakili dari tanaman yang dibudidayakan untuk pemaduan ulang industrial. Relasi jagung dengan sistem pangan cukup luas. Jagung ditanam sebagai tanaman pakan untuk produksi sapi, unggas, telur, susu, dan babi, juga digunakan sebagai tambahan pemanis untuk permen, sereal, minuman ringan, dan makanan pokok lain yang dijual di supermarket (Philpott 2006). Menurut Michael Pollan (2002): "sepotong Chicken McNugget adalah bertumpuk-tumpuk jagung, dimulai dengan ayam yang diberi pakan jagung hingga bahan tambahan pangan yang takjelas dan pati jagung yang membungkusnya. Seluruh daging di McDonald sebenarnya adalah jagung. Ayam telah menjadi mesin untuk mengolah 1 kilogram jagung menjadi setengah kilogram daging ayam." Dengan kata lain, menelusuri bahan dasar pangan tertentu melalui pabrik penghasil protein hewani dan gerai makanan-makanan cepat saji dapat menggambarkan bagaimana pola makan diubah secara mendasar, dan semua ini semakin memperlihatkan dan terlihat jelas dalam konglomerasi finansial.

Fondasi bagi finansialisasi telah diletakkan selama masa rezim pangan sebelumnya. Ketika itu industrialisasi sektor pertanian makin menguatkan watak linear produksi pangan sebagai operasi input-hasil, dari benih hibrida dengan input kimia pertanian hingga bahan baku industri pengolahan pangan—tempat hasil panen digunakan sebagai input (gula, minyak, biji-bijian) untuk produksi makanan tahan lama (Friedmann 1994). Sebagai contoh, penggantian mentega dengan minyak

nabati untuk membuat margarin berarti pembentukan ulang pangan melalui suatu proses industrial yang terus-menerus direplikasi dalam industri pengolahan pangan kontemporer. Kecenderungan ini menggambarkan logika di balik finansialisasi pangan, yaitu kemampuan untuk selalu memperkuat dirinya sendiri (Russi 2013). Sebagai suatu proses industrial, pemilahan dan pengolahan ulang memang sudah sejalan dengan logika finansial dalam restrukturisasi relasi-relasi pangan. David Burch dan Geoffrey Lawrence memberi gambaran yang mengisyaratkan munculnya sebuah "finansialisasi rezim pangan":

> sejumlah lembaga dan instrumen keuangan yang punya kapasitas untuk menata ulang pelbagai tahap dalam rantai pasokan pangan, juga untuk mengubah syarat dan ketentuan yang mengatur keterlibatan aktor-aktor lain di dalam rantai itu. Dalam kasus perusahaan ekuitas swasta, misalnya, kita melihat adanya tipe kapital yang menganggap perusahaan pangan hasil pertanian—baik berupa auditor pihak ketiga, pemasok input, operator perkebunan, manufaktur pangan maupun pengecer—sebagai sehimpunan sumberdaya yang memberi peluang untuk mendapatkan laba secara cepat. (Burch dan Lawrence 2009: 275)

Menurut Burch dan Lawrence, finansialisasi adalah wabah endemik bagi industri pangan. Banyak supermarket mendirikan perusahaan jasa finansial mereka sendiri dengan menggandeng bank-bank, bertindak seperti perusahaan ekuitas swasta yang meraih nilai saham yang diinginkan para pemegang saham dengan mengeksploitasi dan mengolah aset-aset korporasi. Dan perusahaan-perusahaan pengolahan pangan menghasilkan pemasukan dengan menjual merek untuk memproduksi "makanan kebugaran" (*wellness food*) seperti makanan kesehatan (*nu-*

traceuticals) dan fungsional yang mengaburkan perbedaan antara makanan dan produk farmasi" (Burch dan Lawrence 2009: 277). Merujuk praktik-praktik ini sebagai rekayasa pangan yang disetir lembaga keuangan, Russi (2013: 65) mencatat bahwa investor "mampu membentuk ulang pola arus produksi secara paksa yang berujung pada semakin artifisialnya makanan yang—akan tetapi—memungkinkan para investor tersebut … mengambil keuntungan dari cara-cara bagaimana sumber pangan itu didapatkan secara global. Wayne Roberts (2008: 122) mengklaim: "Orang di Barat tidak lagi membeli makanan. Mereka membeli makanan olahan yang diolah dari berbagai bahan atau input." Strategi-strategi pengambilan bahan pangan berskala global berkonsentrasi untuk mengemas sebagai paket—ketimbang memproduksi—bahan-bahan yang diperoleh dari berbagai tempat sebagai pangan global (Roberts 2008: 123). Makanan yang dibuat dari campuran bahan-bahan dari seluruh dunia ("pangan dari antah-berantah" [*food from nowhere*], menurut istilah Jose Bove) bukan satu-satunya jenis pangan yang tersedia, sebab makanan dari satu tempat tertentu masih tersedia bagi siapa pun yang sanggup membelinya.

Dengan menggabungkan dan terus-menerus mentransformasi rantai pangan di seluruh dunia, kapital finansial bertujuan mengubah corak produksi petani kecil di mana pangan, ekosistem, dan penghidupan merupakan ranah produksi-bersama yang sejalan dengan tujuan ekonomis; dengan begitu, kapital finansial memisahkan tanah dari bagian produksi-bersama "dengan maksud menjadikan tanah sebagai bagian dari faktor-faktor lain yang berfungsi sebagai sumber penghisapan laba secara berkelanjutan" (Russi 2013: 82). Dalam hal ini, Jan Douwe van der Ploeg mencatat bahwa kapital (sebagai imperium pangan) tidak melekat pada aktivitas *yang sudah ada*, melainkan "memaksakan aturan sendiri" kepada

petani kecil (yaitu mengubah petani menjadi pekerja kontrak) dengan gaya predator, menghisap dan mengangkut keluar sumberdaya lokal (bandingkan, McMichael 2013b). Di sini, kapital "nyaris tidak menciptakan tambahan kekayaan; kapital hanya memanfaatkan kekayaan yang dihasilkan secara lokal untuk mengumpulkannya dan menggunakannya kembali seturut logikanya sendiri," sedemikian rupa sehingga "nyaris tidak ada kapital yang dibawa dari luar masuk ke dalam situasi lokal. Kapital pada dasarnya berputar di pasar modal nasional dengan menjanjikan bahwa aliran uang yang tercipta lewat perusahaan-perusahaan baru akan mendatangkan keuntungan dan keamanan (ekonomi) yang berarti. Situasi lokal berikut sumberdaya dan potensi yang ada di dalamnya digunakan sebagai *agunan*" (van der Ploeg 2009: 77–78). Gaya predator seperti inilah yang menjadi asal mula untuk apa yang disebut Russi sebagai "kapital yang lapar", dengan kecenderungannya untuk "melepas-bebaskan" nilai dengan cara menata ulang relasi-relasi ekstraekonomi "menjadi suatu susunan tertentu yang tunduk pada hitung-hitungan finansial" (2013: 94). Konsekuensinya adalah makin buruknya 'metabolisme' antara petani dan ekosistem, serta pembentukan ulang nilai dengan prinsip-prinsip jual beli. Setelah mereduksi bahan pangan menjadi sesuatu yang dapat ditukar-fungsikan alih-alih sebagai relasi yang dikonstruksi secara sosial, finansialisasi bermaksud memperdalam proses ini dan mempercepat kehancuran proses-proses alamiah dengan mengubahnya menjadi "sumberdaya" untuk tujuan spekulasi.

Penggizian (Nutritionalization)

Jane Dixon memasukkan perspektif gizi ke dalam analisis rezim pangan, menggunakan "transisi gizi" sebagai tolok ukur modernisasi dan pembangunan nasional. Transisi ini—dari menu

berbasis tanaman menuju konsumsi protein hewani, minyak dan lemak, gula olahan dan karbohidrat olahan—biasanya dikaitkan dengan meningkatnya kemakmuran. Skenario linear ini berfokus pada kebijakan pembangunan nasional mengenai pencukupan gizi dalam pasokan pangan, yaitu idealnya menu yang lebih beragam dan lebih banyak sumber tenaganya yang menghasilkan peningkatan kesehatan masyarakat. Ada dua kekuatan penting yang melawan cita-cita ideal ini: menu yang berbeda menurut kelompok sosial/kelas dan artifisialisasi pangan seiring berkembangnya industrialisasi pertanian. Mengenai artifisialisasi pangan, kita tahu bahwa meningkatnya panenan memang menaikkan kuantitas pangan tetapi mengorbankan kualitas (yaitu kepadatan gizi). Sebagai misal, "varietas baru jagung, gandum, dan kedelai, yang dimuliakan untuk meningkatkan hasil panen, memiliki kandungan protein dan minyak lebih rendah, dan tomat bibit unggul mengandung lebih sedikit vitamin C, likopen, dan beta-karoten." Pada saat bersamaan, patahan metabolis akibat pertanian industrial melenyapkan kandungan unsur hara tanah, sehingga mengurangi nutrisi mikro bagi tanaman (Albritton 2009: 116).

Sementara konsumen kaya lebih punya peluang untuk mengakses menu yang sehat (organik), struktur rezim pangan mendistribusi makanan berkalori tinggi yang melewati berlapis-lapis pemrosesan bagi penduduk yang lebih miskin. Merebaknya gizi buruk (terkait dengan obesitas) yang dihasilkannya sejalan dengan kekurangan gizi yang dialami sejumlah besar penduduk dunia—WHO memperkirakan lebih 3 miliar (hampir 50% populasi dunia). Bagi Dixon, fenomena kekurangan gizi ini mencerminkan krisis dalam tahapan transisi gizi, dengan "penyakit kemakmuran" muncul berbarengan dengan kelaparan global di berbagai tempat. Di dasar krisis ini adalah suatu ekonomi yang sudah menyatu dalam budaya

yang melibatkan 'penggizian' (*nutritionalization*) dalam sistem pangan modern. Hal ini bersandar pada sains tentang "takdir metabolis makanan", yaitu semacam tata kelola—dalam rumusan Dixon (2009: 322): "kooptasi oleh sains gizi dengan tujuan mendapatkan nilai lebih dan mengendalikan relasi kuasa melalui pangan ... ini paling terlihat dari bagaimana sains gizi menilai strategi-strategi korporasi dan kebijakan publik dengan tolok ukur dampaknya terhadap penyakit akibat gizi buruk dan apakah kesehatan dan kemakmuran meningkat."

Analisis rezim pangan Dixon menemukan bagaimana penggizian sistem pangan dijelaskan dalam kerangka "revolusi kemutakhiran teknis dan pengetahuan" yang dimulai dengan ditemukannya kalori pada akhir abad XIX. Yaitu, "kemampuan untuk menghitung kebutuhan energi manusia telah memperkenalkan gagasan 'makan secara ilmiah' ke dalam kebijakan publik dan memberi pembenaran bagi tatanan ekspor-impor pangan hasil pertanian yang menjadi dasar bagi rezim pangan pertama dan kedua" (Dixon 2009: 331). Dia mengingatkan kita betapa makin kuatnya penolakan terhadap "usaha mengejar keamanan ontologis yang mengandalkan menu makanan dan pengaturan gizi" di dunia yang ditandai dengan semakin surutnya keberagaman menu dan sumberdaya alam; hal ini memperlihatkan krisis legitimasi (otoritas) yang dialami ilmu gizi dan penggizian ala korporasi (versus makanan terjangkau atau berbasis kultural) seiring menumpuknya efek samping yang tidak diinginkan.

Aya Hirata Kimura mengembangkan kerangka Dixon dalam suatu studi kasus mengenai program "nutrisionisme" di Indonesia sebagai bagian dari rezim pangan korporat (2013: 10). Hirata Kimura memberi judul pada kajiannya *Hidden Hunger: Gender and the Politics of Smarter Food* ('Kelaparan Tersembunyi: Gender dan Politik Pangan Cerdas'). Dalam kajian tersebut,

Kimura mendokumentasikan bagaimana kekurangan zat gizi mikro yang tersamar telah menggiring para ahli ilmu gizi untuk melihat kekurangan gizi sebagai persoalan perilaku konsumsi individual, bukan sebagai soal kondisi sosio-ekologis yang terkait erat dengan pemiskinan penduduk dan memburuknya ekosistem. Dengan begitu, kerangka kebijakan untuk keamanan pangan yang digunakan berfokus pada pengelolaan asupan gizi perorangan, dan diarahkan utamanya untuk menempatkan perempuan sebagai pihak yang "bertanggung jawab karena tidak memberi makan anak-anak dan keluarganya dengan baik, sementara itu industri pangan tampil sebagai penyelamat orang-orang kelaparan"—kalau tidak begitu, tentu saja, krisis pangan menciptakan inflasi harga komoditas seperti gandum, minyak goreng, dan gula yang digunakan untuk pengayaan nutrisi (fortifikasi) pangan, sehingga bahan-bahan pangan tersebut terlalu mahal untuk orang miskin (2013: 165–166).

Nutrisionisme mencakup fortifikasi pangan olahan (misalnya, produk-produk tepung terigu, makanan bayi) dan fortifikasi biologis melalui tanaman transgenik (misalnya Padi Emas)—keduanya melibatkan logika korporat pasar untuk mengatasi masalah kekurangan asupan pangan, menyulapnya menjadi persoalan teknis dan dengan begitu memereteli aspek politis dari isu kelaparan. Menurut Hirata Kimura (2013: 6), nutrisionisme adalah "teknik kekuasaan" yang menyasar perempuan dalam suatu model tata kelola yang "secara sistematis mengelola pengetahuan mengenai pangan dan tubuh, mengistimewakan pandangan para ahli sembari membungkam" perempuan yang berada di garis depan dalam produksi, pembuatan, dan penyediaan makanan di dunia Selatan. Sebagai bentuk 'kuasa atas jasad hidup' (*biopower*) berbasis gender yang dijalankan melalui kerjasama pemerintah dan swasta untuk membereskan problem gizi, nutrisionisme merupakan penanda kuat

era neoliberal yang mereduksi pangan menjadi sekadar "kendaraan bagi kandungan gizi ... [untuk mengapitalisasi] keahlian yang dimiliki perusahan-perusahaan pangan-hasil-pertanian" (Hirata Kimura 2013: 11). Secara kontekstual, "revolusi" zat gizi mikro muncul bertepatan dengan susutnya dukungan negara untuk penelitian pertanian secara internasional pada era neoliberalisme pasca-revolusi hijau, karena "keamanan pangan" telah diprivatisasi dan dilembagakan sebagai relasi pasar internasional dalam Kesepakatan Pertanian (AoA) WTO (Hirata Kimura 2013: 10).

Pengenalan Padi Emas di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan Hirata Kimura, diliputi kontradiksi—menegaskan terjadinya ketegangan dalam rezim pangan korporat antara mengikuti aturan pasar dan mendukung kedaulatan pangan. Secara kultural, "beraslah barangkali jenis pangan di Indonesia yang paling kusut dan rumit pemaknaannya," karena selain berhubungan dengan dewa-dewi, beras terkait erat dengan identitas etnis dan seksual (Hirata Kimura 2013: 157). Pemaknaan seperti itu akan luput (atau tersamarkan) dari cara pandang ahli gizi, yang secara kebetulan menjadikan beras sebagai masalah politik—sedemikian sehingga banyak perusahaan dipaksa berfokus pada "kemampuan meraup laba ketimbang penetrasi," dan dengan begitu meletakkan prioritas pada jagung dan kedelai hibrida di Indonesia, dengan lebih menganggap Padi Emas sebagai sebuah simbol diskursif daripada perwujudan tanaman hasil modifikasi biologis (Hirata Kimura 2013: 156–157). Ironisnya, dalam konteks di mana negara-negara Selatan digambarkan sebagai distopia yang akan diberi makan oleh utopia pangan bergizi, para pendukung tanaman transgenik malah berhadapan dengan kuatnya perlawanan terhadap risiko dan reduksionisme dalam pangan

transgenik; di sini terlihat bagaimana rasionalitas ilmiah di balik pangan yang telah mengalami medikalisasi telah berubah menjadi gerakan mobilisasi berbasis moral yang ditopang oleh jargon "memberi makan dunia" (Hirata Kimura 2013: 159–160).

Ekologi

Rezim pangan memiliki dampak ekologis. Dalam rumusan awalnya, analisis rezim pangan menggunakan suatu perspektif ekonomi-politik yang hampir seluruhnya mengabaikan dimensi lingkungan. Rumusan ini tidak bertahan lama. Karena itu, dengan menimba ilham dari kepekaan Friedmann (2000, 2003) terhadap dampak ekologis, Hugh Campbell (2009) memperkenalkan konsep "ekologi di tempat jauh" (*ecologies at a distance*) dan "tanggapan ekologis" (*ecological feedback*) ke dalam analisis rezim pangan untuk melawan kecenderungan rezim pangan dalam menyamarkan dampak ekologisnya. Hugh Campbell mengembangkan gagasan bahwa suatu sistem pangan yang berkelanjutan mengharuskan langkah membumikan kembali produksi pangan ke dalam ekosistem lokal, dan dengan begitu membongkar klaim "jarak dan daya awet" pertanian industrial (Friedmann 1994); dengan gagasan itu, dia menekankan fenomena kekinian mengenai peralihan ke arah lokalitas dan watak musiman tanaman, seiring meningkatnya persoalan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Bagi Campbell, narasi tentang imperium dan pembangunan yang menjadi ciri dari kultur rezim pangan yang mengejar legitimasi dan stabilitas "memiliki kemampuan untuk menyamarkan apa yang telah Marx ... gambarkan sebagai patahan metabolis yang tak dapat diperbaiki yang semakin mengganggu interaksi antara manusia dan alam" (2009: 312). Lebih jauh, sebagaimana fetisisme komoditas dan patahan metabolis "yang telah me-

nyamarkan kondisi-kondisi kekerasan sosial dalam produksi komoditas, patahan metabolis juga telah menyamarkan bencana-bencana ekologis" (Campbell 2009: 315).

Sebagai ilustrasi: bagi rezim pangan kedua, bagaimana pestisida dikerangkai secara kultural dalam optimisme teknologi mulai terbongkar dengan munculnya kritik dari buku *Silent Spring* karya Rachel Carson (1962). Dengan mengembangkan pendapat Friedmann bahwa gerakan-gerakan sosial dapat melegitimasi atau menantang kultur-kultur rezim, Campbell memusatkan perhatian pada kecenderungan-kecenderungan yang saling bertolak belakang seputar "rezim pangan-dari-antah-berantah". Rezim pangan ini, yang dibangun di atas legitimasi kultural "pangan murah", menghadapi "masalah legitimasi kultural akut" dari surutnya kepercayaan akan sains, mobilisasi gerakan lingkungan, komunikasi terkait "relasi-relasi tipikal 'Pangan dari Antah-Berantah' yang sebelumnya tak terlihat," ketakutan akan risiko politis dan kelangkaan pangan, kekuatan ritel dan prarasa konsumen, serta krisis gizi yang berkaitan dengan makanan cepat saji (Campbell 2009: 312–313). Dengan demikian, Campbell (2009: 318) mengklaim: "Pangan dari Tempat Tertentu"—seperti 'Makanan Lambat Saji' dan pertanian yang didukung komunitas—muncul dari dinamika kultural seperti ini. Konsep 'Pangan dari Tempat Tertentu' menampilkan suatu logika tandingan terhadap pangan konvensional yang dikembangkan rezim pangan pertanian industrial, logika yang "merentang melampaui patahan metabolis."

Warisan Campbell, yang dibangun dari perspektif lingkungan yang terinspirasi oleh Friedmann, tidak hanya kembali meletakkan analisis rezim pangan secara eksplisit dalam ekologi-politik, tetapi juga menggarisbawahi ketegangan yang sedang berlangsung antara gagasan besar mengenai kultur pangan dan situasi nyatanya dalam konteks pertarungan un-

tuk memenangkan model pertanian dan sistem pangan berkelanjutan. Lebih jauh, dengan menekankan konsep "tanggapan ekologis", Campbell menguatkan kontribusi Weis terhadap analisis mengenai kontradiksi-kontradiksi ekologis yang melekat pada "ekonomi pangan global" di mana biaya mendatangkan pangan, meningkatnya kandungan racun, dan tingginya "jejak tapak ekologis" melekat erat dengan "dagingisasi". Weis (2007: 171) mengajukan bahwa "meninggalkan pola konsumsi berbasis daging adalah faktor mendasar untuk mereduksi ruang kolektif manusia di biosfer sehingga memberi ruang bagi spesies lain di abad ini, sementara menu makan seimbang yang berbasis tumbuh-tumbuhan juga menjanjikan beragam manfaat kesehatan bagi masyarakat"—suatu gagasan yang menggemakan seruan Lang dan Heasman (2004) agar prinsip "kesehatan masyarakat yang ekologis" dijadikan prinsip yang mengatur sistem pangan, suatu seruan yang menentang rute penggizian ala sains pangan modern. Dengan begitu, perspektif ekologi atas rezim pangan mengaitkan pembelahan zat dasar (*fractionation*), pencampuran (*adulteration*), dan finansialisasi pangan modern dengan patahan metabolis, yang di dalamnya terjadi pemisahan kehidupan sosial dari alam dan penyederhanaan radikal pertanian menjadi melulu urusan jumlah panenan, di mana input teknologi menggantikan relasi ekologis.

"Patahan metabolis" menandai subordinasi pertanian oleh kapital, mereduksi daur alamiah unsur hara di dalam tanah dan air, juga menggantikan input pertanian seperti pupuk kimia dan benih hibrida untuk mengubah polikultur menjadi monokultur (Foster 2000). Pemisahan kehidupan kota dari desa yang terjadi secara menyejarah adalah produk dari patahan metabolis ini, di mana sektor pertanian dikhususkan hanya untuk tujuan ekonomi (Moore 2000). Tercerabut dari siklus biologis,

pertanian industrial secara mendasar berwatak menyimpang secara spasial, sebab "kualitas-kualitas intrinsik tanah dianggap kurang penting" (Duncan 1996: 122) dalam sistem yang mensyaratkan "penerabasan biofisik" (Weis 2007). "Pertanian padat energi fosil" modern (Walker 2005) memperparah patahan metabolis dengan meningkatkan input pupuk, pestisida, herbisida nonorganik, dan mekanisasi. Model pertanian ini menaikkan penggunaan bahan bakar dan input pertanian penghasil emisi karbon, ditambah lagi dengan pelepasan karbon tanah ke atmosfir bersamaan dengan dinitrogen oksida (*nitrous oxide*) yang bahkan lebih berbahaya dari penggunaan pupuk, serta dari limbah ternak di peternakan. Model pertanian industrial menggeser kedudukan pertanian-pertanian berbasis ekosistem yang sesungguhnya mampu membalikkan patahan metabolis, menguatkan keanekaragaman hayati, menggunakan energi antara enam hingga sepuluh kali lebih rendah dari pertanian industrial, selain mendukung pertanian petani kecil (Pretty *et al*. 2006; Apfelbaum dan Kimble 2007).

Kembali menekankan aspek ekologi tidak hanya karena dampak lingkungan dari "ekologi di tempat jauh" dan "tanggapan ekologis", tetapi juga sebagai bukti kesadaran bahwa rezim pangan kapital bekerja menghapus pertanian hayati, menghilangkan peluang pertanian berkelanjutan di masa depan. Ketegangan utama yang menghantui rezim pangan korporat adalah antagonisme antara 'pangan dari antah-berantah' versus 'pangan dari tempat tertentu', juga antara mencemari atau memulihkan ruang hidup manusia. Perubahan iklim menjadi "tanggapan ekologis" utama sebab di dalamnya melibatkan kegaduhan luar biasa, juga patahan.

Kesimpulan

Bisa disimpulkan bahwa konsep "rezim pangan" adalah suatu bentuk metode historis. Metode ini dapat digunakan dengan berbagai cara untuk menjelaskan proses lokal, nasional, regional, dan global yang digerakkan oleh dinamika rezim pangan baik secara umum maupun pada periode-periode tertentu yang seluruhnya cenderung bersifat kontradiktif. Pada awalnya, proyek analisis rezim pangan berupaya memetakan keterkaitan antara sistem negara dan sirkuit pangan internasional yang berlangsung dalam tatanan dunia tertentu. Tetapi kini proyek ini menghadirkan rumusan-rumusan baru yang memperkaya dan melebarkan cakupannya, mengungkap yang tadinya terbungkam, dan menimbang dimensi-dimensi yang baru muncul.

Catatan

BAB 6

Krisis dan Restrukturisasi

POLA-POLA yang dibentuk oleh beberapa rezim pangan, secara sangat fenomenal, digambarkan sebagai serangkaian struktur pengaturan yang menentukan relasi-relasi produksi dan peredaran pangan. Struktur-struktur pengaturan tersebut melekat pada tahap-tahap dalam dinamika akumulasi yang polanya bersifat ekspansif dan rentan krisis. Tiap rezim memiliki bentuk akumulasi tertentu: akumulasi ekstensif pada rezim pertama, akumulasi intensif pada rezim kedua, dan akumulasi finansial pada rezim pangan korporat. Bentuk-bentuk ini turut menentukan tata hubungan geopolitik dan kelembagaan, di mana komodifikasi pertanian dan pangan semakin mendalam. Dengan begitu, tiap episode rezim pangan ini adalah bagian dari suatu rangkaian menuju terbentuknya suatu konjungtur yang tengah menguat dalam sejarah—era pertanian industrial. Sementara masing-masing rezim bergantung pada ekspansi geografis untuk menggiatkan kembali akumulasi lewat penyediaan sumberdaya, pada saat bersamaan juga berlangsung memburuknya keberlanjutan ekosistem secara *kumulatif*. Ancaman terhadap keberlanjutan itu kini mengemuka pada pengakuan secara luas bahwa kondisi ekologis, energi, dan iklim telah mendekati ambang batas. Pertanyaannya di sini, bagaimana bentuk hubungan antara ambang batas ini dan krisis rezim pangan korporat? Meskipun terlalu dini untuk menentukan rezim pangan ini sedang berada dalam transisi

atau hanya sedang membentuk ulang strukturnya, ada tidaknya krisis akumulasi dapat diperiksa melalui lensa analisis rezim pangan.

Krisis? Krisis yang Mana?

Pertanyaan di atas menyoroti dimensi waktu. Secara metodologis, rezim pangan selalu merupakan wujud dari cara kapital menata ulang relasi-relasi pertanian yang melintasi ruang dan waktu, sebagai fondasi bagi akumulasi dan proses produksi dan reproduksi tenaga kerja. Secara substantif, rezim pangan *korporat* adalah bentuk kelanjutan dari rezim pangan yang sudah ada sejak lama, sebagai sarana yang digunakan oleh kapitalisme untuk mengubah tatanan pertanian dunia. Rezim pangan korporat ini adalah wujud dari proses-proses serta kontradiksi yang bersifat sinkronis sekaligus diakronis, dan keduanya telah menyebabkan krisis penyediaan pangan. Dari perspektif ini, sebagaimana dikatakan Braudel (1969), inflasi harga pangan saat ini merupakan suatu *peristiwa*, di dalam *konjungtur* politik neoliberalisme, di dalam *longue dureé* (ruang dan waktu yang berlangsung panjang) dari kapitalisme. Artinya, yang disebut sebagai "krisis pangan dunia" sejatinya adalah relasi-relasi dalam ruang dan waktu yang berlapis-lapis—khususnya siklus berjangka panjang industrialisasi pertanian yang melibatkan proses penyederhanaan melalui budidaya monokultur dan meningkatnya ketergantungan pada minyak bumi, yang dibarengi penurunan hasil produksi pangan, serta kampanye bahan bakar nabati yang berujung inflasi dan spekulasi keuangan. Melonjaknya biaya-biaya, terkait dengan puncak jenuh produksi minyak (*peak oil*) dan tanaman-tanaman pengganti bahan bakar, ditambah dengan monopoli harga oleh agrobisnis yang menyebabkan inflasi harga pangan, seca-

ra global menyebar melalui liberalisasi finansial, perdagangan, dan keamanan pangan.

Krisis rezim pangan korporat tampak di ranah publik dalam dua bentuk: lonjakan harga pangan pada 2007–2008 dan gelombang "kerusuhan pangan" (*food riots*), paling mencolok di Haiti, Italia, Uzbekistan, Maroko, Guinea, Kamerun, Yaman, Yordania, Arab Saudi, Mesir, Meksiko, dan Argentina—dengan tiga puluh negara mengalami berbagai macam protes pangan selama periode ini (Jafri 2008). Selama delapan tahun pertama dekade tersebut, produksi biji-bijian dunia secara konstan tertinggal di belakang angka konsumsi (Cribb 2010: 3), selama 2005–2007 harga pangan meningkat 75% dan cadangan biji-bijian dunia mencapai level terendah (Holt-Giménéz dan Kenfield 2008: 3). Pada paruh 2009, hampir seperenam manusia (sekitar 1 miliar) tercatat mengalami kelaparan atau kurang gizi, khususnya perempuan, dan nyaris tiga perempatnya tinggal di pedesaan. Pada 2011, krisis pangan berulang dengan kekuatan lebih besar, ketika harga pangan melampaui harga-harga pada 2008. Perhatian dunia kembali memusat ke pertanian, setelah sekian lama diabaikan dan masuk ke dalam buaian rezim pangan yang mengaku tengah "memberi makan dunia."

Di satu level, inflasi harga pangan menandai berakhirnya "rezim pangan murah" (Rosset 2008), yaitu rendahnya harga pangan pokok selama 25 tahun yang dimungkinkan oleh rezim subsidi WTO dan korporatisasi pasar-pasar pangan dunia. Di level lain, level politis, ada kerusuhan pangan yang terjadi bukan melulu karena harga dan akses atas pangan, tetapi juga soal ekonomi-politik penyediaan pangan (Patel dan McMichael 2009). Kerusuhan pangan muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan-kebijakan penyesuaian struktural neoliberal yang didesakkan sejak 1980-an oleh lembaga-lembaga keuangan internasional; kebijakan-kebijakan itu melucuti kapasitas pa-

ngan-hasil-pertanian negara seperti kredit pedesaan, perlindungan harga, cadangan pangan (World Bank 2007: 138). Selain itu, kerusuhan pangan juga bersumber dari kian besarnya ketergantungan pangan di negara-negara Selatan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan pertimbangan finansial dijalankan atas nama "keamanan pangan"—kebijakan yang dipahami sebagai kebaikan bagi pasar di mana harga menggantikan pertimbangan-pertimbangan politik dan menggeser pemahaman tentang penyediaan pangan dari keharusan publik (*public necessity*) menjadi suatu hak pribadi (McMichael 2003: 173). Karena liberalisasi yang diusung WTO melucuti hak negara atas kemandirian pangan, "keamanan pangan" kemudian melekat pada slogan "memberi makan dunia" ala korporasi transnasional. Hal ini dimungkinkan oleh kapasitas korporasi transnasional untuk menata relasi-relasi produksi dan peredaran pangan secara global.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, sementara wacana "keamanan pangan" mengusahakan legitimasi bagi rezim pangan korporat, slogan itu menjadi sasaran tembak bagi gerakan kedaulatan pangan sejak pertengahan 1990-an. Gerakan ini mengusung privatisasi pangan menjadi isu politik sebagai kritik langsung terhadap rezim pangan korporat, dengan memobilisasi petani yang tengah mengalami beratnya krisis agraria global berupa pengabaian publik dan serangan harga oleh para pedagang biji-bijian (Nicholson 2008: 456). Krisis panjang agraria ditandai "deflasi pendapatan" akibat kebijakan-kebijakan neoliberal, yang membuat reproduksi sosial kaum tani kian sulit dipertahankan. Bentuk "akumulasi lewat penggerogotan" (*accumulation by enchroachment*) seperti itu juga turut memperparah mandeknya pasokan pangan, selain memperparah ketaksanggupan petani kecil untuk merespons

melonjaknya harga dengan menanam lebih banyak tanaman pangan (Patnaik 2008: 311).

Krisis agraria diperburuk oleh anjloknya panen biji-bijian dari pertanian berbasis industri (agroindustri)—dari peningkatan 5% dan 10% pada masa jaya Revolusi Hijau (1960-an) menjadi 1% atau bahkan lebih rendah pada milenium baru (Cribb 2010: 8); selain itu, "volume per kapita produksi biji-bijian di skala global terus mendatar sejak mencapai puncak [pertumbuhan] pada 1986" (Weis 2010: 327). Keterbatasan material semacam itu tentu saja merupakan konstruksi sosial, termasuk di dalamnya: tergerusnya tanah yang tidak bisa ditanggulangi melalui asupan pupuk yang ditaburkan di seluruh dunia dengan kecepatan setiap tahunnya sangat mungkin akan menghancurkan dua pertiga tanah produktif dunia pada 2050; rusaknya siklus nutrisi global dengan cadangan fosfat susut setengahnya pada 2030; meningkatnya perebutan air yang masih tersisa bagi pertanian, di mana pertanian telah menghabiskan 70% dari seluruh cadangan; habisnya cadangan tangkapan ikan diprediksi akan terjadi pada 2040, cadangan fosfat dunia telah berakhir masa puncaknya pada 1989, padahal sangat penting bagi tanaman dan pertumbuhan rumput (makanan ternak) dan tidak ada penggantinya; dan sejak 1960-an terjadi inflasi kalori 20% per warga dunia (Cribb 2010: 10–11, 54, 76; Cordell 2009).

Keterbatasan material yang dikonstruksi secara sosial itu terjadi bersamaan dengan perbedaan dampak antara kebijakan komodifikasi dan regulasi pangan. Harga beras meningkat di seluruh Asia Tenggara pada 2008, meski kurang tampak di Indonesia karena kontrol harga dan perdagangan yang memperlambat inflasi (Nielson dan Arifin 2012: 163). Sementara itu, harga-harga tetap stabil di Asia Timur, sebab: "Pertama, mereka punya produk domestik. Kedua, mereka melengkapi pro-

duksi domestik dengan cadangan biji-bijian domestik. Ketiga, keadaan seperti itu terjaga hanya karena mereka merupakan negosiator agresif dan kuat dalam kesepakatan-kesepakatan dagang internasional. Jepang telah lama meyakini bahwa beras bukan hanya komoditas tetapi juga jalan hidup" (Patel 2008). Ironisnya, Jepang baru mau bergabung dalam Putaran Uruguay GATT kalau para anggotanya sepakat untuk "memangkas kapasitas negara guna membatasi ekspor pada masa kelangkaan yang parah" (Ritchie 1988: 3). Aturan ini ternyata tergoyahkan oleh fakta adanya pelarangan ekspor pada era puncak "krisis pangan"; hal ini sepertinya bakal menjadi semacam gambaran nyata beberapa saat kemudian.

Pembatasan ekspor yang tadinya merupakan pengecualian kini telah menjadi praktik lazim. Pada 2008, pelarangan dan pembatasan ekspor gandum di Kazakstan, Rusia, Ukraina, dan Argentina telah menutup sepertiga pasar global, sementara mengenai beras, pelarangan atau pembatasan ekspor dari Tiongkok, Indonesia, Vietnam, Mesir, India, dan Kamboja hanya menyisakan segelintir pemasok ekspor, khususnya Thailand dan Amerika Serikat (GRAIN 2008a: 2). Nyatanya, kecenderungan ini bisa jadi merupakan suatu *penanda krisis*, yaitu ketakberdayaan WTO sebagai pemain utama dalam rezim pangan korporat, yang terjadi karena ketakpatuhan anggota-anggotanya terhadap aturan perdagangan bebas WTO terkait pelarangan ekspor, dan hal ini melengkapi ketakpatuhan sebelumnya terhadap G-20 dalam hal relasi perdagangan yang takadil.

Selain krisis agraria berkepanjangan bagi petani, inflasi harga pangan memperlihatkan wajah nyata rezim pangan dan minyak. Sementara industrialisasi pertanian telah lama bergantung pada minyak bumi, penataan ulang jaringan minyak bumi, yang dipimpin Amerika Serikat, pada periode pascaperang, telah mengubah lanskap ekonomi-politik internasional

secara mendasar; dengan penataan ulang itu, nilai dolar lantas bergantung pada aliran minyak—suatu keadaan yang menggerakkan ekonomi kapitalis dan mengabaikan susutnya cadangan energi (Mitchell 2009: 418), sehingga menyokong rezim pangan-hasil-pertanian yang ekstraktif dan intensif. Tetapi pada 2000-an, beriringan dengan naiknya harga pangan, harga minyak melonjak enam kali lipat antara 2003 dan 2008, sehingga menciptakan inflasi terhadap ongkos produksi pangan (Cribb 2010: 6) dan membangkitkan perhatian pada potensi bahan bakar nabati sebagai sumber energi peralihan.

Namun, dalam wacana umum, bahan bakar nabati dihubungkan langsung dengan inflasi pangan. Antara 2006 dan 2007, permintaan atas jagung dari pabrik distilasi etanol Amerika Serikat meningkat dua kali lipat. Kenaikan ini sama besarnya dengan kenaikan permintaan jagung secara global, yang berdampak terhadap pasar global, karena Amerika Serikat memproduksi 40% jagung dunia (Holt-Giménéz dan Kenfield 2008: 3). Pada 2007, kebijakan Standar Bahan Bakar Terbarukan (*Renewable Fuels Standards*) di bawah pemerintahan Bush dan mandat-mandat bahan bakar hayati Eropa (10% dari bahan bakar kendaraan pada 2020) menggelontorkan subsidi besar-besaran untuk etanol jagung, sehingga mengalihkan 'tanaman untuk pangan' menjadi 'tanaman untuk bahan bakar'. Permintaan atas jagung menggeser popularitas gandum dan kedelai, dan mengingat posisi penting jagung dan kedelai sebagai bahan utama pengolahan pangan dan pakan ternak, inflasi jagung memicu inflasi harga pangan di seluruh dunia (Holt-Giménéz dan Kenfield 2008: 3). Jacques Berthelot mengidentifikasi kebijakan-kebijakan bahan bakar hayati Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai kebijakan yang berkontribusi pada "defisit besar-besaran perdagangan pangan di kedua kawasan," dan juga sebagai "penyebab utama

melambungnya harga-harga komoditas pertanian dewasa ini" (2008b: 26). Lebih jauh, "etanol berbahan dasar jagung di Amerika Serikat menjadi faktor untuk sepertiga kenaikan harga jagung dunia menurut FAO, dan 70% menurut IMF. World Bank memperkirakan bahwa kebijakan Amerika Serikat bertanggung jawab pada 65% kenaikan harga-harga produk pertanian, dan bagi ... mantan ahli ekonomi Kepala United States Department of Agriculture (USDA), hal itu menyebabkan 60% kenaikan harga" (Berthelot 2008b: 27).

Pada level lebih dalam, berlangsungnya proyek bahan bakar nabati memperlihatkan menyatunya pasar minyak dan pangan, sebab tanaman untuk pangan dan bahan bakar (jagung, tebu, sawit, jarak) jadi bisa dipertukar-fungsikan (McMichael 2010). Maka, sawit yang "kini banyak digunakan dalam produk pangan dari mi instan hingga biskuit dan es krim, telah sangat terintegrasi ke dalam pasar energi sehingga harganya bergerak beriringan dengan harga minyak mentah (Greenfield 2007: 4). Dampaknya, tentu saja, beragam mengikuti menu di kelas-kelas masyarakat. Di puncak "krisis pangan", *The New York Times* (2008) melaporkan: "Minyak goreng bisa jadi tampak sebagai belanja kecil bagi masyarakat di negara-negara Barat. Tetapi di negara-negara berkembang, minyak goreng menjadi sumber kalori yang penting dan mewakili salah satu belanja tunai terbesar bagi keluarga miskin yang menanam sendiri sebagian besar pangan mereka tetapi harus membeli minyak goreng untuk bisa memasaknya." Kerentanan pola-pola reproduksi sosial paling dasar yang disebabkan oleh privatisasi, yang sering dibarengi kerusuhan pangan, telah mendorong pemerintah untuk menerapkan kembali sejumlah subsidi pangan dasar, mendesakkan kontrol harga, dan membatasi ekspor pangan. Maka, "krisis pangan" memperlihatkan bertemunya krisis agraria berkepanjangan, integrasi pasar pangan dan energi, dan

pemerintah-pemerintah yang memanfaatkan keadaan untuk kepentingan jangka pendek dengan mendorong proyek bahan bakar nabati sehingga memperparah krisis.

Krisis Akumulasi Kapital

Krisis akumulasi yang berlangsung sekarang merupakan gabungan suatu ciri struktural kapitalisme dalam jangka panjang (pemiskinan reproduksi) dengan suatu bentuk konjungtur (finansialisasi). Pemiskinan reproduksi berhubungan dengan pengabaian oleh kapital dan penggerusan terus-menerus atas syarat-syarat yang memungkinkan produksi kapital; finansialisasi mengacu pada kapitalisme neoliberal di mana, ketika tatanan moneter internasional yang stabil tidak hadir, kekuatan kapital mengabaikan aspek produksi demi sirkulasi, dengan melakukan sekuritasisasi dan menyebarkan risiko kerakusan di pasar modal melalui beragam instrumen keuangan (Hoogvelt 2010). Pertautan antara masing-masing ciri ini merupakan sifat unik rezim pangan korporat. Kita akan melihatnya masing-masing pada penjelasan selanjutnya.

Secara historis, patahan metabolis adalah wujud dari proses dengan mana kekuatan kapital merongrong syarat-syarat produksinya dengan cara merusak daur nutrisi alami yang memperbaharui kesehatan tanah dan air, dengan demikian memisahkan produksi kapitalistis dari prasyarat alamiahnya, serta menghapus pengetahuan-pengetahuan ekologis (Foster 1999; Schneider dan McMichael 2010). Pertanian industrial menjadi tuan rumah dan sumber input maupun hasil komoditas bagi sektor manufaktur dengan cara mengeksploitasi tenaga kerja dan tanah. Dari hubungan inilah Moore menghasilkan konsep tentang kapitalisme sebagai "rezim ekologi-dunia" (2011), dan Araghi (2003) mengajukan konsep tentang "relasi-

relasi nilai global", di mana rezim pangan merupakan suatu proyek yang didedikasikan bagi reduksionisme ekologis dengan maksud mengurangi biaya tenaga kerja melalui pangan murah.

Bagi Moore maupun Araghi, produksi komoditas oleh kekuatan kapital sudah semakin bergantung pada sumberdaya alam (tanah dan bahan bakar fosil). Kapitalisasi terhadap alam nonmanusia selama ini, untuk kepentingan akumulasi, bergantung pada penggerusan "modal ekologis" yang dimiliki bumi. Bagi Araghi, ini adalah "surplus alam," dan bagi Moore ini memperlihatkan "pemiskinan reproduksi alam", yaitu bahwa kekuatan kapital yang menghisap alam telah menghancurkan sumberdaya-sumberdaya tertentu atau menghilangkan proses-proses tertentu. Meskipun masing-masing konsep yang diajukan Moore dan Araghi ini memiliki kekhasannya masing-masing, keduanya sama-sama menggambarkan dilema lingkungan dewasa ini. Maka ketergantungan kapital pada surplus alam sama artinya dengan penguasaan sepihak atas ruang dan proses-proses di alam dengan mengorbankan keberlanjutan, menandakan kemungkinan terkurasnya "layanan" ekosistem *secara absolut*. Gagasan Moore tentang 'pemiskinan reproduksi alam' mengacu pada proses terkurasnya layanan ekosistem secara *nisbi*, melalui kolonisasi tiada henti atas wilayah-wilayah akumulasi baru yang dimaksudkan sebagai solusi sementara bagi rentetan krisis akumulasi. Di sini kekuatan kapital menunda situasi terkurasnya daya dukung alam dengan cara berpindah ketika reproduksi ekosistem sudah terkuras di satu wilayah ke wilayah rintisan baru, begitu seterusnya sampai tidak ada lagi wilayah baru yang dapat dibuka (terkuras secara absolut).

Dapat dikatakan bahwa krisis yang tengah terjadi merupakan gabungan unik dua bentuk keterkurasan tersebut. Hal ini terlihat secara fenomenal dalam inflasi harga pangan yang me-

micu memumpunnya perhatian terhadap keamanan pangan. Pada saat bersamaan, serangkaian laporan terkini—seperti *Millennium Ecosystem Assessment* (2005) dan *IAASTD Report* (2008)—telah mengaitkan antara krisis lingkungan yang kian mendalam (dan dengan begitu kerawanan pangan) dengan terkikisnya kondisi-alamiah-produksi pertanian industrial. Hal ini jelas diperburuk oleh proyek bahan bakar nabati yang semakin menggiatkan "urbanisasi wilayah pedesaan" (Marx), seiring gerak kapital mencari wilayah-wilayah akumulasi baru (McMichael 2010). Berhubung tanaman pangan dan bahan bakar telah menjadi "tanaman serbaguna" (*flex crops*) yang dapat saling bertukar-fungsi (Borras *et al*. 2012: 6), tanaman-tanaman itu jadi punya dimensi spekulatif—antara 2004 dan 2007, penanaman modal ventura dalam bahan bakar nabati naik 800% (Holt-Giménéz 2007: 10). Bisa dibilang, produksi bahan bakar nabati memperlihatkan suatu upaya untuk menunda terkurasnya sumberdaya alam (kondisi susutnya cadangan minyak bumi setelah puncak eksploitasi), sekalipun International Energy Agency memperkirakan bahwa pada 2030 bahan bakar hayati akan "sulit menyurutkan permintaan minyak tahunan secara global" (Holt-Giménéz 2007), dan seluruh energi terbarukan, termasuk bahan bakar nabati, hanya akan mencapai 9% dari konsumsi energi global (GRAIN 2007: 6).

Skenario ini menggarisbawahi pendapat Moore bahwa akumulasi kapital adalah *penghasil* sekaligus *peredam* krisis ekologis. Tercapainya puncak eksploitasi minyak bumi (*peak oil*) adalah suatu wujud pengurasan (pemiskinan reproduksi) alam nonmanusia, keadaan yang hanya bisa diatasi dengan sumber energi hayati (*bio-energy*) lainnya sebagai strategi peredam krisis. Dialektika antara menghasilkan dan meredam krisis—proses yang didorong oleh abstraksi dinamika relasi nilai (menganggap batas-batas kemampuan alam melulu se-

bagai efek samping)—semakin terlihat jelas dalam serbuan penanaman modal untuk bahan bakar nabati dan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Bahan bakar nabati menyebabkan alam mengalami pemiskinan reproduksi dalam suatu daur keterkurasan nisbi. Prihatin terhadap terkurasnya sumberdaya alam secara absolut yang lantas melahirkan kebijakan-kebijkan "ramah lingkungan", para pendukung bahan bakar nabati mencoba mencari pembenaran bagi babak baru akumulasi kapital atas nama keberlanjutan. Berdasarkan beberapa takaran, pertanian industrial saja sudah dianggap menyumbangkan sepertiga emisi gas rumah kaca, karena itu bahan bakar nabati hanya mendaur ulang masalah yang seolah-olah muncul sebagai solusi.

Bagaimanapun, bahan bakar nabati tetaplah merupakan suatu rintisan baru bagi kapital (Houtart 2010). Di sini, kapitalisasi wilayah rintisan mungkin menjadi sumber penting terakhir bagi kapital finansial yang sulit bertahan menciptakan nilai melalui relasi upah, menyusul perpindahan sektor manufaktur di kawasan-kawasan berburuh "murah" dalam kancah perokonomian dunia (McMichael 1999). Mendapatkan nilai melalui sarana-sarana finansial hanya dapat dicapai melalui sekuritisasi dan spekulasi (dari utang sampai keamanan pangan). Di awal abad XXI, kapital finansial bergerak di seputar investasi dalam ventura-ventura spekulatif di sektor pertanahan dan tanaman serbaguna, khususnya menyusul keruntuhan pasar derivatif keuangan (*derivative financial*) pada 2009. Perdagangan surat-surat berharga dan instrumen derivatif lain di sektor pertanian meningkat 32% pada 2007, dan "jumlah saham bertambah 65% antara Oktober 2007 dan akhir Maret 2008 di pasar modal Chicago Mercantile Exchange, tanpa peningkatan dalam produksi riil yang seharusnya mengiringi" (Bank of International Settlement, dikutip dalam Ernst dan

Wahl 2010: 13). Jennifer Clapp menghubungkan kecenderungan baru ini dengan melemahnya dolar Amerika Serikat, mencatat bahwa begitu para investor saham berbasis dolar mengalami penurunan nilai riil investasi, "mereka malah bergerak ke produk finansial lain yang berhubungan dengan komoditas fisik" untuk meraup keuntungan (*return*) yang tengah menanjak (2012: 137). Bukannya merespons meningkatnya permintaan pangan itu sendiri, aktivitas finansial tersebut melihat sektor pertanian sebagai tempat pelarian yang aman dan/atau wilayah baru investasi komoditas, dan dengan begitu melihatnya sebagai sumber renten spekulatif. Kapital ekuitas swasta, yang memang berwatak spekulatif, telah menerima dukungan teknis dan pasar lokal secara langsung dari International Finance Corporation, sayap korporasi keuangan milik World Bank, atas nama pembangunan (Daniel 2012: 714, 722).

Spekulasi pangan mengalami intensifikasi melalui dana-dana investasi sektor komoditas, di mana para investor menyasar "saham-saham di sektor pertanian" (bersama sektor energi dan logam industrial), begitu kontrak-kontrak di sektor pertanian dikonversi menjadi saham derivatif (mengikuti deregulasi kontrak bisnis komoditas pada 1990-an). Sejak itu para spekulan bergabung dengan para pemain produk pertanian dalam pasar saham sektor pertanian. Apa yang dulunya adalah pasar produk pangan telah dikonversi menjadi pasar surat-surat berharga terkait produk pangan yang punya cara kerja sendiri, bergantung pada peningkatan harga derivatif, sebab surat-surat berharga diperdagangkan berkali-kali (Kaufman 2010). Dengan begitu, pembelian dan penjualan surat-surat berharga terkait komoditas pangan berkembang menjadi pasar derivatif yang kemudian menciptakan inflasi harga pangan. Dengan kata lain, "mekanisme yang diciptakan untuk menstabilkan harga biji-bijian malah menjadi mekanisme yang menimbulkan inflasi

harga biji-bijian" (Kaufman 2010: 34). Para ekonom World Bank memperkirakan bahwa spekulasi menjadi biang di balik 37% inflasi harga pangan (Mahon 2012: 91).

Dengan demikian, krisis akumulasi secara umum, yang terlihat dalam bertemunya krisis pangan, energi, dan keuangan, telah membuat pasar modal internasional menyerbu pertanian sebagai investasi yang nisbi aman untuk jangka panjang, sehingga memicu "pencaplokan lahan besar-besaran secara global" (McMichael 2012b). Pada saat yang sama, negara-negara Selatan menanamkan investasi pada tanah di luar negeri untuk mengamankan pasokan pangan dan bahan bakar untuk menghadapi kecenderungan naiknya harga-harga, kerusuhan pangan, dan tergerusnya ekosistem di dalam negeri (simak penjelasan berikutnya). Rancangan investasi luar negeri itu menerabas tatanan perdagangan bebas ala WTO, menandakan berpindahnya lokasi industri pertanian dari Utara ke Selatan, seiring melebarnya ketimpangan harga tanah, menandakan pula suatu transformasi geografis rezim pangan.

Restrukturisasi Rezim Pangan Korporat

Pembentukan ulang pola sirkuit perdagangan dalam rezim pangan melalui pencaplokan lahan besar-besaran berlangsung bersamaan dengan penggeseran fokus perhatian ke arah para petani kecil Selatan dalam konteks krisis agraria yang meletus dalam bentuk krisis pangan global. Pada 2008, laporan pembangunan World Bank, *World Development Report*, tentang "pertanian untuk pembangunan" menjadi kerangka dasar bagi Konferensi Tingkat Tinggi Pangan Dunia (*World Food Summit*) FAO di Roma, tempat para elite kelembagaan, korporasi, dan filantrofi bersepakat untuk mengatasi krisis pangan dengan cara menggeser fokus investasi agar memasukkan petani ke-

cil ke dalam rantai-nilai perusahaan agrobisnis; dalam hal ini petani kecil adalah wilayah baru bagi penyerapan modal dalam bentuk input pertanian dan infrastruktur pemasaran (McMichael 2013b). Visi bersama itu memandang tanah yang sedang dikelola (lahan pertanian dan ternak) atau yang sedang diakses (sumberdaya bersama) oleh petani kecil dan para penggembala sebagai tanah yang tidak begitu menghasilkan dan kurang dimanfaatkan. Karena itu, dengan kapitalisasi, tanah-tanah itu dapat meningkatkan pendapatan di pedesaan dan keamanan pangan dunia. Pengelolaan minat baru terhadap tanah-tanah di Selatan ini dikerangkai dalam aturan-aturan yang longgar seperti Prinsip-Prinsip Investasi Pertanian yang Bertanggung Jawab (*Responsible Agriculture Investment* [RAI]) yang dikembangkan oleh World Bank. Aturan-aturan ini dirancang untuk membenarkan dan memungkinkan eksklusi dan pembagian tanah-tanah petani kecil dan tanah-tanah komunal (Borras dan Franco 2010). Pada saat bersamaan, konservasi keanekaragaman hayati dan investasi lahan di luar negeri semakin menggalakkan proses eksklusi atas tanah ketika Protokol Kyoto tentang Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism* [CDM]) dan protokol baru tentang Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (*Reduced Environmental Degradation and Deforestation* [REDD]) mengkhususkan lahan dan hutan untuk penyerapan karbon (Fairhead, Leach dan Scoones 2012; McAfee 2012; Lohmann 2006).

Di satu sisi, pencaplokan lahan besar-besaran di masa kini mengulang pola serupa yang dilakukan Inggris di tanah-tanah jajahan maupun pendudukan dalam usahanya membangun rezim pangan awal. Di sisi lain, sebagaimana diingatkan Kautsky, dampaknya berupa krisis agraria (bagi petani Eropa) yang semakin parah secara global, saat pembagian lahan,

subsidi, dan finansialisasi terkait dengan pencaplokan lahan besar-besaran itu menandakan surutnya produktivitas di Utara serta terus merambah kawasan rintisan (yang murah) hingga menyentuh titik kritis daya dukung ekologisnya. Kautsky merumuskannya sebagai berikut: "Negara-negara tropis yang tidak cocok dengan budidaya gandum—Amerika Tengah, Brasil Utara, sebagian besar Afrika, India, Asia Tenggara—juga bakal membentuk barisan sebagai pesaing bagi petani biji-bijian bangsa Eropa" (Kautsky 1988: 252).

Meskipun rezim pangan awal berpusat pada gandum, apa yang diperdagangkan telah berkembang semakin banyak, mencakup tanaman serbaguna seperti kedelai, jagung, sawit, dan tebu. Berangkat dari atau melengkapi pola investasi sebelumnya pada tanaman bernilai ekspor tinggi, pola investasi baru di Selatan lebih mengutamakan komoditas mentah—sehingga, bagi Asia Tenggara, "83% lahan pertanian yang diperoleh atau disewakan untuk jangka panjang diperuntukkan bagi produksi tanaman bahan baku utama (biji-bijian penghasil minyak, jagung, gandum, dan biji-bijian bahan pakan)" (Borras dan Franco 2010: 13). Di kawasan Amerika Selatan di mana kedelai menempati 50% lahan pertanian Argentina dan 80% di Paraguay, revolusi kedelai mengokohkan sistem monokultur, sebab kedelai hanya menguntungkan jika diproduksi secara industrial (Wald *et al*. 2012: 168–169). Secara umum, investasi-investasi tanah skala besar di Afrika "mengikuti model sederhana yaitu memusatkan produksi dengan sistem perkebunan besar" (Committee on World Food Security 2011: 34). Para ekonom World Bank menyampaikan pembenaran atas pola ini:

> Inovasi-inovasi mutakhir dalam pemuliaan benih, pembajakan tanah, dan teknologi informasi boleh jadi akan mempermudah pengawasan tenaga kerja dan mengurangi

> pemborosan dalam usuha-usaha berskala besar. Varietas-varietas yang tahan hama dan toleran terhadap herbisida telah mempermudah penerapan sistem pengelolaan tanpa pembajakan lahan, juga telah memungkinkan pengelolaan lahan lebih luas dengan mengurangi tahapan dalam proses produksi dan intensitas kerja dalam bercocok tanam. (Deininger dan Byerlee 2011: 13–14)

Sejalan dengan hal itu, laporan High Level Group on Competitiveness of the Agro-Food Industry (HLGCAI) Uni Eropa tahun 2008—mewakili kalangan agrobisnis, korporasi transnasional, European Commission, pemerintah negara-negara anggota, dan beberapa organisasi masyarakat sipil—mencatat bahwa tanaman protein domestik Eropa telah tergusur oleh impor kedelai murah yang dimungkinkan oleh pencaplokan lahan besar-besaran, utamanya dengan sistem monokultur di Amerika Latin. Ini berarti telah terjadi penataan ulang rezim pangan secara geografis. Laporan HLGCAI di atas, misalnya, mencatat peningkatan kompetisi di pasar pangan bagi Uni Eropa (juga Amerika Serikat) dalam hal ekspor hasil pertanian dari Brasil, Tiongkok, Argentina, Thailand, Indonesia, dan Malaysia, dengan Brasil nyaris melipatgandakan ekspor pangannya sejak dekade sebelumnya (Fritz 2011: 10–11). Dengan kata lain, sebagaimana diantisipasi Kautsky, tatanan ekspor produk pertanian Eropa yang mendapat perlindungan dari rezim WTO tengah kehilangan ceruk pasar secara global ketika kawasan-kawasan pengekspor pangan bergeser ke negara-negara berpendapatan menengah—situasi yang membuat kalangan pemerintahan dan swasta tertarik untuk menperoleh pangan dan bahan bakar lebih murah dari luar negeri. Meskipun mengakui multilateralisme WTO, laporan HLG itu juga merekomendasikan agar negosiasi-negosiasi perdagangan bilateral antara Uni Eropa

dan negara-negara penghasil pangan yang tengah berkembang itu disepakati (Fritz 2011: 10), dengan demikian mencerminkan pelemahan multilateralisme WTO serta berpindahnya pertanian dari Utara ke wilayah lain yang lebih mudah.

Bioekonomi

Berpindahnya pertanian negara-negara Utara ke wilayah di luar negeri melalui pencaplokan lahan besar-besaran membawa serta pengembangan 'ekonomi berbasis proses-proses hayati' (bioekonomi) (Levidow 2011), yaitu suatu paradigma kuat yang memberi pembenaran atas "aktivitas-aktivitas ekonomi yang mengambil 'nilai laten' yang ada dalam proses-proses hayati dan berbagai sumberdaya hayati terbarukan guna mencapai perbaikan kesehatan serta pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan" (OECD 2005: 22). Konversi "pasar bahan bakar cair ke biomassa" menunjukkan pembelokan awal bioekonomi (ETC 2010: 3), dan dapat disebut sebagai manifestasi paling jelas dari "penaksiran-ulang nilai" (*revaluation*) atas tanah, yang disetir oleh proses neoliberalisasi terhadap alam (Birch *et al*. 2010). Sebagaimana dicatat ETC (2010: 6):

> Bioekonomi baru, sebagaimana kini dibayangkan oleh kalangan rimbawan, agrobisnis, perusahaan-perusahaan bioteknologi, energi, dan kimia, membuat pencaplokan tanah dan degradasi lahan terus berlanjut dengan menguasai zarah tanaman untuk ditransformasikan menjadi komoditas industrial, merekayasa sel-sel agar punya kinerja menyerupai pabrik-pabrik industrial, dan mengubah-sesuaikan ekosistem agar menjadi "layanan-layanan" pendukung bagi industri.

Para pengusung bioekonomi menyasar negara-negara Selatan, sebagaimana diamati Stephen Chu, Sekretaris Energi Amerika Serikat, pada 2006: "Tanah yang paling cocok untuk menghasilkan biomassa (Amerika Latin, Afrika Sub-Sahara) adalah yang paling sedikit dimanfaatkan" (dikutip dalam ETC 2010: 15). Sebuah laporan dari Eropa tahun 2004 mengklaim: "Satu prasyarat bagi potensi energi hayati di seluruh kawasan adalah ... bahwa sistem pengelolaan pertanian yang efisiensi dan intensitasnya sekarang masih rendah digantikan pada 2050 oleh sistem manajemen dan teknologi pertanian terbaik" (Smeets *et al*. 2004). Amatan ini menggemakan retorika World Bank tentang "ketimpangan panen" sebagai pembenaran bagi pengenalan pertanian berbasis rantai-nilai. Lahan petani kecil maupun tanah komunal, berikut kandungan karbon-hidupnya, kini menjadi target baru bagi para pemburu biomassa, seiring kian jelasnya keterbatasan karbon-mati (bahan bakar fosil). Sejalan dengan itu, Rachel Smolker (2008: 519) mencatat bagaimana "secara unik, pertanian diposisikan secara sejajar di kedua 'ujung' debat mengenai kebijakan pangan dan energi, sebagai penyebab sekaligus jalan keluar bagi masalah yang tengah dihadapi."

Sebagai faktor penting di balik penataan ulang rezim pangan, pencaplokan lahan besar-besaran skala global menjadi pembuka bagi naiknya nilai biomassa-hidup sebagai sumber bahan bagi bioekonomi; pada saat yang sama, "inovasi dalam biologi sintetis memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk memodifikasi ekonomi hidrokarbon guna mengakomodasi bahan pangan karbohidrat" (ETC 2010: 11). Departemen Energi Amerika Serikat mengklaim bahwa "sangat sedikit produk yang saat ini dibuat dari bahan bakar minyak, yang tidak dapat dibuat dari biomasssa, termasuk cat, tinta, perekat, plastik,

dan produk-produk bernilai tambah lainnya" (dikutip dalam Smolker 2008: 520). Dengan kata lain, proyeksi (perolehan laba) dan berbagai teknologi bioekonomi bergantung pada meningkatnya akses atas produksi biomassa di luar negeri dalam rangka menggerakkan ekonomi di kawasan yang sudah makmur.

Ekonomi energi-hayati yang tengah menanjak, di mana "ekologi global" (Sachs 1993) dan ekonomi-politik bersenyawa, bergantung pada finansialisasi yang bisa berperan mengelola suatu pergeseran ruang-sektoral dalam akumulasi kapital menuju sebuah rezim ekstraktif baru di sektor pangan/bahan bakar/biomassa, sebuah rezim yang mensyaratkan perampasan tanah dan air dunia yang tersisa. Apakah dan sejauh mana pergeseran itu dapat menjamin berlangsungnya suatu revolusi dalam akumulasi kapital, masih merupakan spekulasi (bandingkan Moore 2012), sebab perubahan iklim mengancam daya tahan perkembangan semacam itu.

Prospek (dan realitas) terjadinya krisis iklim mendorong tumbuhnya bioekonomi maupun intensifikasi sistem monokultur dengan mengorbankan habitat dan mata pencaharian. 'Pertanian cerdas' (*smart agriculture*), atau "intensifikasi berkelanjutan" (Royal Society 2009; FAO 2010) menjadi sekutu erat rezim pangan/bahan bakar/biomassa ekstraktif, dan menurut perusahaan seperti Monsanto, yang dibutuhkan adalah teknologi pertanian baru sedemikian rupa sehingga "ada lebih banyak produksi pada lebih sedikit lahan, dan secara keseluruhan mengurangi jumlah sumberdaya untuk satu unit produksi" (dikutip dalam Abergel 2011: 267). Elizabeth Abergel menyebut hal ini sebagai darurat iklim, mencatat bahwa: "dengan menjelaskan problem lingkungan yang berhubungan dengan iklim secara sempit hanya berdasarkan kemungkinan-kemungkinan tekno-saintifik dan isolasi terhadap aspek-

aspek hayati, penelitian bioteknologi mengenai perubahan iklim secara mendasar gagal menemukan alternatif bagi ketergantungan kita terhadap paradigma pertanian-tanaman-pangan konvensional" (2011: 261). Menjelaskan krisis itu lebih lanjut, dia memperlihatkan bahwa wacana mengenai perubahan iklim mendorong penerapan logika pasar terhadap relasi-relasi ekologis (Abergel 2011: 262). Hal ini mendorong "teknologisasi alam" sebagai ciri khas dari apa yang disebut Moore sebagai strategi "penyamaran krisis" yang dijalankan oleh sebuah "rezim akumulasi berbasis teknologi" yang baru; rezim inilah yang mengarahkan inovasi saintifik untuk memungkinkan penetrasi logika pasar ke dalam seluruh aspek kehidupan, individual maupun kolektif. Rezim baru ini pada gilirannya "menyediakan sarana untuk menguasai kekayaan yang melekat pada sistem-sistem kehidupan melalui sertifikasi, paten, tata kelola, dan instrumen-instrumen semilegal lain di dalam rezim perdagangan neoliberal yang menjamin pertumbuhan modal" (Abergel 2011: 262).

Dengan kata lain, suatu rezim pangan yang digerakkan ke arah penciptaan tanaman-tanaman 'ramah iklim' di dalamnya termuat aspek "penataan ulang batas-batas antara sains dan pertanian selain juga pemahaman baru mengenai tanaman pangan dan praktik pertanian." 'Kapitalisme berbasis proses-proses hayati' (biokapitalisme) mengorganisasikan pencaplokan lahan secara besar-besaran melalui kemampuannya mengonversi *alam*, menjadikannya sebagai *kapital intelektual* (Abergel 2011: 263). Hasilnya, yakni "nilai hayati" (*bio-value*), muncul dalam wujud "pertanian cerdas" yang dirancang bagi bioekonomi, dengan mengandalkan pencaplokan lahan yang "kurang termanfaatkan".

Premis seperti itu sangat ramah bagi pencaplokan lahan secara besar-besaran. World Bank mengklaim: "di antara ne-

gara-negara Afrika yang paling diminati oleh investor, tidak ada yang bisa mencapai lebih dari 30% potensi panen dari seluruh lahan yang saat ini digarap" (Abergel 2010: vii). Dan European Commission mendukung reformasi pertanahan untuk mengatasi ketimpangan ini: "akses dan penguasaan lahan yang terjamin adalah prasyarat bagi produktivitas yang lebih tinggi bagi para petani skala kecil" (dikutip dalam Borras dan Franco 2011: 40). Namun dalam kenyataannya, langkah 'dari atas' seperti itu tidak mungkin sanggup mengendalikan gelombang perampasan tanah yang lebih didorong oleh hitung-hitungan keuangan ketimbang hitung-hitungan produktivitas, meskipun hitungan produktivitas tetap ditampilkan sebagai kebaikan-bersama-dunia (panen tanaman pangan, bahan bakar ramah lingkungan, dan bahkan pengendalian karbon). Sebagaimana terlihat dalam banyak laporan di media, jurnal, dan terbitan ORNOP, perampasan lahan secara besar-besaran melibatkan pemerintah yang mengesahkan pemindahan warga pedesaan dalam skala besar dari tanah-tanah milik nenek moyang. UN melaporkan: "Pengalaman dengan perkebunan kelapa sawit yang ada sekarang dan yang semakin meluas di … Indonesia dengan jelas menunjukkan bahwa properti masyarakat adat dan hak-hak lain telah dilanggar, hak mereka untuk setuju atau menolak diabaikan, sebagian dari mereka digusur, dan mereka dibiarkan tanpa pilihan lain kecuali menjadi pekerja yang *de facto* terpaksa melakukan kerja mengumpulkan buah kelapa sawit untuk disetor ke perusahaan-perusahaan pengelola perkebunan" (dikutip dalam Smolker *et al*. 2008: 30).

Dalam proses seperti itu, pencaplokan lahan besar-besaran untuk proyek-proyek biomassa, yang menikmati subsidi sangat besar, menempatkan pengelolaan krisis akumulasi sebagai isu yang lebih penting ketimbang isu keberlanjutan umat manusia dan alam. Pada 2011 *The Guardian* melaporkan:

> Setengah dari anak balita [Guatemala] menderita kekurangan gizi—salah satu yang tertinggi di dunia. Padahal pangan di negara ini cukup melimpah. Negara ini merupakan pengekspor terbesar kelima komoditas gula, kopi, dan pisang. Kawasan pedesaannya segera mengalami serbuan kelapa sawit ketika para pedagang internasional berusaha meraup keuntungan dari permintaan akan bahan bakar hayati, permintaan yang diciptakan oleh keputusan-keputusan dan kebijakan subsidi Amerika Serikat dan Uni Eropa. Akan tetapi, meskipun posisinya sebagai salah satu eksportir hasil pertanian yang utama, setengah dari 14 juta penduduk Guatemala berada dalam kemiskinan parah, hidup dengan kurang dari US$2 per hari. (Lawrence 2011)

Menjadikan pasar sebagai patokan objektivitas, laporan World Bank *World Development Report* 2008 membuat prediksi mengenai masa depan (yang tidak berkelanjutan dan timpang): "Untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan, produksi sereal harus dinaikkan hampir 50% dan produksi daging 85% dari 2000 ke 2030. Selain itu, permintaan akan tanaman pangan sebagai bahan pembuatan bahan bakar hayati juga meningkat" (2007: 8). Dengan kata lain, komoditas seperti gandum, jagung, padi, kedelai, tebu, dan sawit adalah bagian tak terpisahkan dari masa depan pertanian industrial, atau rezim biomassa, yang didorong oleh "permintaan" yang disubsidi besar-besaran. Pelarian sementara ini menjadi alasan bagi kapital (yang menunda hancurnya ekosistem) untuk mensyaratkan perampasan tanah dan/atau proses dimasukkannya produsen kecil ke dalam rantai-nilai, di mana seluruh tanaman dapat ditukar-fungsikan dan pada akhirnya menjadi sepenuhnya tunduk pada perhitungan keuangan alih-alih pertimbangan sosial. Gambaran seperti ini mensyaratkan adanya rezim pangan/

pakan/bahan bakar yang dapat dipertukarkan, yang ditopang oleh pencaplokan lahan besar-besaran tanpa henti, dan juga ditopang oleh munculnya sistem peredaran pangan, bahan bakar, dan biomassa dengan simpul-simpul baru Selatan-Utara, Timur-Utara, Timur-Selatan, dan Selatan-Selatan.

Wilayah Rintisan bagi Kapital

Susutnya persediaan minyak bumi dan pangan, kewajiban-kewajiban mengurangi emisi, dan macetnya dana investasi, seluruhnya terjawab oleh pencaplokan lahan besar-besaran, dan dilegitimasi oleh ideologi eksklusi ruang hidup ("ekologi global") sebagai upaya membela harkat kemanusiaan (pangan) dan lingkungan (bahan bakar hijau). Selain slogan terkenal 'memberi makan dan menyediakan bahan bakar dunia', bentuk-bentuk lain perampasan ruang hidup juga menjadi ciri periode ini: perampasan sumber air (Mehta, Veldwisch dan Franco 2012), "perampasan hijau" (*green grabbing*) (Leach *et al*. 2012; Corson dan MacDonald 2012), perampasan tanah-tanah perorangan oleh produsen pangan skala besar (R. Hall 2012) maupun kecil (D. Hall 2011), dan kehutanan karbon (Osborne 2011). Di level yang paling lokal, misalnya, perempuan pedesaan Afrika Barat yang harus menyewa lahan dari kerabat atau warga desa laki-laki bisa saja kehilangan tanah ketika pemiliknya memutuskan "menjual tanahnya ke pemerintah atau perusahaan asing karena lebih menguntungkan" (Ndiaye dan Ouattara 2011: 60; lihat juga Behrman, Meinzen-Dick, dan Quisumbing 2012; dan Razavi 2009: 212–213).

Pada skala dunia, masih jadi pertanyaan sejauh mana perambahan wilayah rintisan baru dapat mengatasi krisis akumulasi kapital, tetapi tidak bisa diragukan bahwa logika finansialisasi mengutamakan hasil saham berjangka ketimbang

produktivitas. Setuju dengan laporan badan-badan pembangunan mengenai "ketimpangan panen" antara hasil yang diperoleh dan potensi hasil di pertanian negara-negara Selatan, World Bank mengklaim "di antara negara-negara Afrika yang paling diminati oleh investor, tidak ada yang bisa mencapai panenan 30% lebih besar dari potensi panenan lahan-lahan yang saat ini digarap" (2010: vii). Namun, pandangan tentang "ketimpangan panen" ini berpijak pada suatu pemahaman linear dan ekstraktif tentang pertanian yang bakal semakin membuat kelompok produsen kecil mengalami pemiskinan reproduksi (Araghi 2009). Asumsi bahwa "intensifikasi berkelanjutan" bakal mengatasi "ketimpangan panen" sungguh menyesatkan, sejauh paradigma bioekonomi tetap saja menawarkan solusi-solusi agregat dan generik yang menerabas ekosistem dan keberlanjutannya (Marsden 2012: 263).

Berinvestasi di tanah-tanah rintisan baru melalui industrialisasi pertanian dan bisnis bioekonomi semakin memperburuk kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk produksi kapital dan kemampuan kapital untuk mengatasi krisis akumulasinya (O'Connor 1998; Moore 2010). Pada awalnya, berinvestasi di kawasan padang rumput dan hutan dengan input-input pertanian merusak basis produksi yang alamiah. Secara global, produksi pupuk meningkat di atas 31% sejak 1996—suatu kecenderungan yang kini semakin intensif oleh kampanye bahan bakar nabati dan penghilangan unsur-unsur penyubur alami dari lahan (ETC 2009). Tambah lagi, masih jadi pertanyaan apakah ada cukup biomassa yang tersedia untuk diubah menjadi bahan kimia, plastik, dan bahan bakar terbarukan sedemikian rupa untuk mewujudkan cita-cita bioekonomi sebagaimana diklaim oleh lembaga-lembaga seperti pemerintah, militer Amerika Serikat, dan industri-industri kimia dan listrik (ETC 2009). Ketika tanaman pangan digusur oleh bahan bakar na-

bati berlangsung bersamaan dengan aksi-aksi spekulasi saham berjangka di sektor pangan, peluang untuk perambahan wilayah baru dalam skala besar, yang menyediakan sumber-sumber energi dan pangan murah guna memangkas biaya produksi dan reproduksi kapital, akan berlangsung singkat saja, tetapi dampaknya sangat menghancurkan bagi habitat alam dan penghuninya.

Ketika konsep "sumberdaya bersama dunia" (*global commons*) menjadi modus operandi (Sachs 1993; Corson dan MacDonald 2012), akuisisi lahan yang dilakukan berbagai badan, pemerintah, dan investor segera menggerus fungsi-fungsi kultural dan sosio-ekologis tanah. Pengusiran penduduk "tidak produktif" menjadi bagian dari "perencanaan rasional"—atas nama peningkatan produktivitas, pengurangan utang, penguatan ekspor, dan pembangunan pedesaan. Pengusiran adalah implikasi dari pencaplokan lahan yang dikelola negara, yang memperluas pemberian subdisi tanah murah/gratis bagi investor dengan mengorbankan hak-hak reproduksi sosial para petani kecil. Subsidi-subsidi negara untuk pencaplokan lahan berskala besar membuat serangkaian risiko lingkungan, sosial, kultural, dan hak asasi manusia jadi bersifat "sampingan". Penghilangan nilai sosial dan nilai intrinsik dari habitat semacam ini kemudian didaur ulang sebagai biaya-berbentuk-uang dari pemukiman ulang, kelangkaan pangan, dan kemerosotan ekosistem untuk diurus pemerintah dan badan-badan pembangunan. Biaya-biaya yang diangap "eksternal" dalam pengembangan agrobisnis telah berlipat ganda, dengan pemanasan global dan kerusakan ekosistem (menyusul kapitalisasi alam melalui pencaplokan lahan besar-besaran, perkebunan kelapa sawit, benih transgenik, dsb.) bersatu padu merongrong syarat-syarat yang diperlukan untuk akumulasi kapital dalam jangka panjang.

Merkantilisme Keamanan Pertanian

Kendati merupakan reaksi cepat kapital terhadap krisis akumulasi, penguasaan kawasan-kawasan rintisan hanya dimungkinkan oleh subsidi negara-negara Utara bagi perusahaan-perusahaan agrobisnis, energi, dan transportasi, serta oleh konsesi-konsesi dari negara-negara Selatan bagi para investor. Dengan kata lain, masih sejalan dengan analisis rezim pangan awal, perubahan tatanan seperti ini menunjukkan simpul baru negara/kapital, dalam berbagai formasi. Salah satu bentuknya adalah "merkantilisme keamanan pangan" di mana sejumlah negara berusaha memastikan pasokan pangan dan bahan bakar nabati dengan secara langsung mendukung akuisisi lahan di luar negeri. Dengan kata lain, di luar investasi swasta, penggunaan dana negara untuk pencaplokan lahan skala besar menerabas sistem perdagangan multilateral yang dibangun WTO, mengutamakan akses langsung ke tanah-tanah produktif untuk mendapatkan pasokan pangan dan bahan bakar ketimbang lewat mekanisme pasar. Bagi pemerintah, inti dari pencaplokan lahan seperti ini adalah dialektika "teritorialisasi ulang" yang terjadi melalui investasi negara atas tanah-tanah di luar negeri untuk pertanian berorientasi ekspor pangan, pakan, dan energi, juga "de-teritorialisasi" yang terjadi saat negara tuan rumah menyerahkan tanah dan air demi kepentingan ekspor ke negara-negara yang (sangat) bergantung pada impor pangan.

Seperangkat data yang baru-baru ini dirilis memuat empat ratus pencaplokan tanah berskala besar, menyebutkan bahwa banyak di antaranya diprakarsai oleh perusahaan negara atau pemerintah sendiri, sebagian besar berasal dari Asia Timur (misalnya, perusahaan negara Tiongkok Beidahuang Land Cultivation Group) dan Timur Tengah beserta Gulf Cooperation Council milik mereka (GRAIN 2012). "Teritorialisasi ulang" ini

menghindari ketergantungan terhadap pasar, atau lebih tepatnya terhadap para perantara pasar, seperti pedagang komoditas macam Cargill dan Bunge (Pearce 2012: 202). Selain investasi negara, Tiongkok juga mengirim warga mereka ke Afrika untuk membangun operasi-operasi pertanian, dan Prakarsa Raja Abdullah milik Arab Saudi menyokong investasi tanah di luar negeri untuk memproduksi beras, gandum, jelai, jagung, tebu, pakan-ternak hijau, dan ternak sendiri, serta memfasilitasi perampasan tanah/air oleh perusahaan-perusahaan Arab Saudi (Green 2012), sementara Uni Emirat Arab, Qatar, dan Mesir secara langsung mengakuisisi tanah pertanian, utamanya di Afrika.

Negara-negara BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China [Tiongkok]) dan negara-negara berpendapatan menengah lainnya juga menguasai lahan di luar negeri (Middle East Business News 2012). Investasi semacam ini tidak hanya digerakkan oleh "merkantilisme keamanan pangan", tetapi juga siasat menangkap peluang jadi pemasok untuk pasar dunia terbesar ketiga dalam jangka panjang (Middle East Business News 2012; Pearce 2012: 202)—suatu perkembangan yang menekankan penyebarluasan zona pemasok dan jalur-jalur distribusi pangan/pakan/bahan bakar, suatu fakta yang menjadi ciri dari transisi penting rezim pangan secara geografis (McMichael 2012b). Maka, kesepakatan harga secara simbolis antara Brasil dan Mozambik atas lahan seluas 6 juta hektare menandai mulai beroperasinya ekspor produk pertanian Brasil—sebagaimana disebutkan oleh presiden Mato Grosso Cotton Producer Association: "Mozambik bisa diibaratkan Mato Grosso di tengah Afrika, dengan tanah gratis, tanpa hambatan lingkungan berarti, dan ongkos lebih murah untuk pengapalan ke Tiongkok. Kini, selain harganya sudah teramat mahal, juga tidak mungkin mendapatkan izin di Mato Grosso untuk membuka lahan" (dikutip dalam MercoPress

2011). Selain investasi langsung negara, mandat-mandat seperti Skema Perdagangan Karbon (*Emission Trading Scheme* [ETS]) Uni Eropa jadi pendorong ekspansi kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia, Guatemala dan Kolombia, di mana negara setempat dan investor swasta turut serta dalam pengembangan tatanan ekspor pangan/bahan bakar untuk pasar nasional dan global (Borras *et al*. 2012: 863; McMichael 2010).

Maka, ketimbang menggunakan prinsip pasar di bawah kendali WTO yang dijalankan oleh korporasi transnasional di seputar prinsip "keunggulan komparatif" (yang disubsidi), geografi rezim pangan yang berkaitan dengan "merkantilisme keamanan pangan" tampil menyerupai serangkaian tara aturan bilateral yang dikelola oleh negara dan/atau badan pengelola investasi negara. *Menyerupai* adalah istilah operasionalnya, sebab meskipun laporan World Bank menemukan perusahaan-perusahaan agrobisnis dan dana-dana investasi sebagai pelaku utama dalam akuisisi lahan (Deininger *et al*. 2011), Lorenzo Cotula mengingatkan akan kecenderungan terlalu melebih-lebihkan pemilahan antara swasta/negara, sebab "pemerintah-pemerintah di negara asal investor dapat memainkan peran besar bagi inisiatif-inisiatif yang dijalankan oleh sektor swasta, menyediakan dukungan diplomatis, keuangan, dan bantuan lainnya kepada kesepakatan-kesepakatan bisnis swasta …. Selain itu, batas-batas antara investor negara dan swasta bisa sangat cair, sebab implementasi kesepakatan yang ditandatangani antarpemerintah dapat juga digerakkan oleh para pelaku swasta" (2012: 660).

Walaupun begitu, tampak pola tersendiri dalam pencaplokan lahan sekala besar yang dijalankan oleh negara, dapat dikatakan sebagai fenomena "pelaku pembangunan yang muncul belakangan". Dalam fenomena seperti itu, negara-negara Utara bergantung pada jaringan rantai pasokan pa-

ngan milik korporasi—Carrefour, misalnya, punya 1.500 cabang di 35 negara (Fritz 2011: 11)—sedangkan negara-negara di Asia, Timur Tengah, dan Afrika Tengah (Asian and Middle East and North Africa [MENA]) lebih bergantung pada badan pengelola kekayaan negara, badan usaha milik negara, dan bank-bank pemerintah untuk mendapatkan tanah di luar negeri. Korea Selatan, salah satu importir pangan besar (90% dari gandum dan jagung yang mereka konsumsi), pada 2008 "tiba-tiba mengetahui bahwa pemasok luar negeri terpenting mereka melarang ekspor dalam rangka mencukupi pangan di negara sendiri. Di Seoul, pemerintah membentuk kebijakan pengamanan pangan nasional (National Food Strategy) untuk menyubsidi perusahaan dalam negeri yang bersedia menguasai lahan di luar negeri guna mengamankan pasokan-pasokan penting … untuk menanam seperempat pangan mereka di atas tanah di luar negeri yang dimiliki atau disewa oleh perusahaan-perusahaan Korea" pada 2030 (Pearce 2012: 204–205). Dengan begitu, wujud dari ketergantungan pangan dan energi adalah menguatnya merkantilisme keamanan pangan (utamanya di negara-negara Selatan), yang membuat pencaplokan lahan besar-besaran oleh negara-negara Utara menjadi sempurna. Keduanya memberi andil terhadap restrukturisasi rezim pangan/energi korporat yang multipusat (melampaui relasi "lumbung" negara-ngera Utara), sehingga makin meneguhkan keberadaan model ekspor pertanian yang terbentuk oleh liberalisasi WTO dan aturan-aturan penyesuaian struktural yang ditentukan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional.

Penting disebutkan bahwa ekspor hasil pertanian bergantung secara langsung pada dukungan negara Selatan terhadap praktik pencaplokan lahan berskala besar (Fairbairn 2013; Lavers 2012). Pola peredaran pangan/energi yang sedang berubah ini membentuk ulang kontur rezim pangan—semakin me-

negaskan tata aliran komoditas yang "terliberalisasi" bentukan WTO. Mengingat posisi penting ekspor hasil pertanian, pencaplokan secara langsung zona-zona pemasok makin mengukuhkan posisi rezim korporat (tentu dengan bantuan negara dalam menetapkan tanah dan air sebagai komoditas), tanpa secara nyata beralih menjadi rezim selanjutnya.

Dari perspektif rezim pangan, "merkantilisme keamanan pangan-hasil-pertanian" melanggar tata aturan WTO mengenai Kesepakatan Pertanian (AoA). Sementara aturan-aturan dagang WTO dan mandat-mandat penyesuaian struktural membutuhkan pelonggaran proteksi pertanian guna memapankan pertanian ekspor, pada saat bersamaan sekarang tata aturan dan tata kerja berbasis privat dan sukarela yang dikerangkai dalam perundang-undangan lunak (*soft laws*) mempermudah pencaplokan lahan skala besar (sirkulasi pangan berbasis non-perdagangan). Tata aturan seperti ini kemudian beroperasi di bawah proteksi tata hukum internasional yang telah kian mapan selama era liberalisasi ekonomi-politik. Karena itu: "menjamurnya jumlah perjanjian dagang (lebih dari 2.600 pada 2010), serta semakin banyaknya negara yang memilih menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase internasional ketimbang melalui pengadilan-pengadilan dalam negeri, telah begitu memperkuat pengamanan secara internasional bagi para pelaku-asing pencaplokan lahan" (Anseeuw *et al*. 2011: 53). Sebaliknya, ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur hak-hak masyarakat dan komunitas adat atas tanah terbilang sangat lemah dibanding aturan perundang-undangan untuk investasi. Di Asia dan Afrika, situasi ini diperburuk karena negara memiliki dan menguasai tanah-tanah yang secara tradisional telah dimanfaatkan oleh para produsen—situasi yang "mengesahkan-demi-hukum bagi pemerintah untuk menjual atau menyewakan tanah tempat warganya hidup atau yang

mereka garap. Hal ini penting bagi para calon penguasa lahan" (Anseeuw *et al*. 2011: 50–52).

Menyangkut tata laksana 'hukum lunak', rezim pangan/energi menggabungkan kerangka privat dengan kode etik kesukarelaan yang diajukan oleh badan-badan pembangunan (khususnya RAI dari World Bank) dengan maksud memberi pembenaran dan mempermudah restrukturisasi yang dibutuhkan untuk pencaplokan lahan skala besar. Protokol-protokol baru menyangkut akuisisi lahan membuka jalan menuju perampasan akses tanah secara global atas nama komodifikasi—"[keadaan yang] bertanggung jawab atas hancurnya dunia kaum tani," dalam ungkapan Olivier De Schutter (2008). Hal ini melibatkan kemitraan pemerintah-swasta untuk memodali agrobisnis; kesepakatan-kesepakatan bilateral tentang akses tanah; protokol-protokol mengenai iklim yang membenarkan pengalokasian lahan dan hutan sebagai penyerap karbon; dan rencana-rencana kerja untuk bahan bakar hijau (termasuk pertemuan-pertemuan 'meja bundar' untuk mengusahakan sertifikasi).

Kesimpulan

Jelas sudah bahwa negara-negara Utara kehilangan posisi sentral dalam mengelola dan menguasai rezim pangan/bahan bakar—tidak hanya karena tantangan G20 terhadap aturan-aturan WTO dan menjamurnya ekspor hasil pertanian dari negara-negara Selatan, tetapi juga karena negara-negara tertentu (khususnya negara-negara Asia dan MENA) melanggar multilateralisme WTO dengan secara langsung mengendalikan pemasokan hasil-hasil pertanian. Pencaplokan lahan skala besar melahirkan ruang untuk melembagakan bentuk-bentuk tata kelola semipemerintah (*parastatal*) dan swasta. Bisa di-

katakan bahwa perkembangan baru ini menandai peralihan dari "pergerakan pangan secara besar-besaran" menuju fenomena yang menyertainya, yaitu "pergerakan kapital secara besar-besaran di seluruh dunia ... yang memaksa meningkatnya mobilitas penduduk," pendapat Vía Campesina dalam bahasa yang berbeda.

"Layanan-layanan" untuk pembangunan seperti itu menyediakan sistem kelembagaan yang mendukung pencaplokan lahan skala besar—secara material maupun ideologis. Selama rezim pangan punya kerangka kelembagaan yang dijalankan melalui aturan-aturan tersirat (Friedmann 2005: 234), layanan-layanan semacam itu, yang didukung dengan "panduan-panduan pelaksanaan", merupakan wujud pembaharuan kelembagaan rezim pangan korporat, yang di dalamnya termuat gambaran normatif mengenai modernisasi pertanian, perbaikan produksi pangan, penggabungan produsen kecil ke dalam rantai-nilai, lapangan kerja di pedesaan, dan teknologi pertanian-cerdas (McMichael dan Scheneider 2011; Marsden 2012).

Sementara aturan-aturan WTO mengukuhkan "rezim pangan murah" yang mengatur subsidi-subsidi bagi korporasi (mengukuhkan dumping pangan negara-negara Utara), kecenderungan kelembagaan dewasa ini mengubah secara mendasar kerangka kerja rezim dalam empat aspek penting. Pertama, sistem aturan dan kode etik yang multipusat muncul melalui lembaga-lembaga pembangunan secara umum (termasuk banyak ORNOP yang berpengaruh), namun mengacu pada organisasi-organisasi UN (utamanya FAO) dan lembaga-lembaga keuangan internasional (terutama World Bank), dalam hal tata cara akuisisi lahan pertanian dan bantuan teknis. Kedua, kerangka kerja yang sedang menguat ini mematangkan pola sirkulasi yang berpusat pada ekspor pangan, bahan bakar, dan biomassa dari Selatan, ketika kalangan perusahaan dan inves-

tor mengusahakan kawasan-kawasan baru untuk ekspor hasil pertanian. Ketiga, komoditas yang beredar semakin beragam peruntukannya, yaitu sebagai bahan pangan, pakan, energi, dan makanan olahan. Keempat, komoditas yang beredar dihasilkan dari tanah, air, dan tenaga kerja murah yang diperoleh melalui kesepakatan-kepakatan atas tanah yang dilahirkan oleh simpul antara negara dan kapital finansial yang keberadaannya secara khusus dimaksudkan untuk menemukan ruang-ruang baru bagi akumulasi.

Catatan

BAB 7

Rezim Pangan dan Relasi Nilai: Nilai yang Mana?

BAB terakhir ini mengulas masalah nilai kaitannya dengan rezim pangan. Selama ini, analisis rezim pangan menggunakan kerangka pikir yang berpusat pada kapital. Analisis demikian memang menunjukkan pentingnya pertanian sebagai sumber bahan baku dan pangan yang menjadi penopang bagi berlangsungnya industri beserta tenaga kerjanya dan kekuasaan negara. Namun, analisis seperti itu menjelaskan pembentukan dunia modern dari satu sisi saja. Ini menggemakan pendapat James Scott (1998: 295) bahwa dalam budaya jagung-lokal (*maize*), jagung (*corn*) mempunyai makna lebih dari sekadar bijinya, mengingat keragaman nilai guna dan nilai simbolisnya (lihat juga Baker 2013). Dengan kata lain, proyek analisis rezim pangan memerinci bagaimana "jagung" (*corn*) disederhanakan, tetapi dengan mengorbankan dimensi kultural dan ekologisnya. Dimensi-dimensi ini muncul ke permukaan ketika dominasi manusia atas alam (*Anthropocene*) menghadapi hambatan-hambatan nyata, ketika manusia merasakan perlunya restorasi karbon hayati dan gaya hidup "rendah karbon".

Proyek rezim pangan telah mengistimewakan "serangkaian relasi yang koheren, kohesif, dan teratur secara kaku," yang dirumuskan dan dibuat "dalam kerangka oposisi biner" (Le Heron dan Lewis 2009: 346), sehingga proyek ini mengesampingkan budaya-budaya pangan yang masih dipraktikkan oleh mayoritas penduduk dunia. Dalam pemahaman ini, pertanian industrial dipandang sebagai alternatif, bukannya sebaliknya, selain sebagai standar analisis. Budaya-budaya pangan ini masih

menyediakan logika reproduksi relasi sosial dan ekologis yang sehat, yang bertolak belakang dengan kekuatan pertanian kapitalis yang mengeksploitasi tenaga kerja dan ekosistem. Gerakan kedaulatan pangan secara umum memperlihatkan beragam keterlibatan dan eksperimen penting untuk memulihkan kapasitas yang berkelanjutan dalam reproduksi sosial dan alam. Hal ini memerlukan upaya mendalami dan menemukan kembali nilai-nilai yang mendukung keberagaman untuk menggantikan keseragaman dalam rezim yang berbasis nilai-tukar.

Konsep Araghi tentang "relasi-relasi nilai global" sangat penting dalam mengembalikan fokus teori rezim pangan secara historis, tetapi juga memunculkan pertanyaan ontologis mengenai "nilai". Penghisapan bahan pangan oleh kekuatan kolonial, misalnya, barangkali telah mengurangi ongkos untuk upah tenaga kerja bagi kapitalis, tetapi konsekuensinya bagi budaya dan ekologi pangan kolonial juga penting dikemukakan untuk melengkapi ceritanya—darinya kita bisa memahami masalah-masalah "tanggapan ekologis" (Campbell 2009) dan gerakan-gerakan terkait hak atas tanah, hak-hak buruh/pekerja sektor pangan, gerakan-gerakan maupun kerusuhan terkait pangan (lihat, misalya, Holt-Giménez 2011; Borras *et al*. 2008; Patel dan McMichael 2009; Borras dan Franco 2012). Tekanan-balik (*push-back*) niscaya muncul dari relasi-relasi dalam kekuatan kapital, tetapi tuntutan-tuntutan yang diusung oleh tekanan-balik itu belum tentu dapat dipahami melalui perspektif berbasis kapital (Beverly 2004; van der Ploeg 2009). Bab ini akan mengulas masalah nilai dengan dua cara. Pertama, bab ini menawarkan kerangka interpretatif untuk memasukkan dimensi-dimensi yang mesti ditambahkan ke dalam analisis rezim pangan guna mempertanyakan ontologi rezim ini serta memperkaya perspektif dalam melihat dampak politis dan analitisnya. Kedua, bab ini mengembangkan pertanyaan

tentang peran gerakan sosial, dengan memperhatikan implikasi-implikasi gerakan kedaulatan pangan kekinian.

Relasi-Relasi Nilai

Rezim pangan korporat telah semakin maju membangun model pertanian yang menilai produknya melulu sebagai komoditas. Dalam hal ini, bioekonomi adalah tahapan tertinggi komodifikasi, dan ini tampak dari fakta bahwa tanaman dapat sangat beragam peruntukannya. Di sini nilai tukar menghapus nilai guna, dan tanaman-tanaman budidaya menjadi sasaran investasi yang sangat variatif—sebagaimana terlihat dalam pemanfaatan jagung, kedelai, sawit, dan tebu untuk diolah menjadi pangan, pakan, bahan bakar, kosmetik, penstabil, dan sebagainya. Alih fungsi tanaman-tanaman tersebut dari makanan menjadi nilai-tukar merupakan puncak dari proses fetisisme (*fetishization*) atas pertanian, sebagai suatu proses input-hasil yang digerakkan oleh produksi komoditas secara seragam demi meraup laba. Bagi Vía Campesina, inilah yang disebut "pertanian tanpa petani", di mana industrialisasi pertanian pada hakikatnya adalah pemaduan beragam input pertanian yang terkomodifikasi (benih, pupuk, antibiotik, material genetik milik swasta, pestisida, dan sebagainya) dengan tanah atau air atau usaha-usaha pertanian ala pabrikan yang hasil panennya dijadikan bahan dasar bagi komoditas-komoditas olahan untuk menggerakkan tenaga kerja atau mesin, tanpa menimbang konsekuensi-konsekuensi sosial atau ekologis. Dengan kata lain, proses abstraksi ini tidak hanya tentang tujuan akhir produk, tetapi juga tentang relasi biofisik. Kemampuan tanaman untuk dipertukar-fungsikan bergantung pada proses "penerabasan biofisik" (Weis 2007), yang mengabaikan atau menganggap dampak-dampak lingkungan sebagai efek samping belaka. Da-

lam kasus bahan bakar nabati, dampak-dampak itu bukan lagi sekadar suatu "kejahatan kemanusiaan" karena menggusur budaya-budaya pangan, menurut mantan Pelapor HAM untuk UN Jean Ziegler, tetapi juga merusak lingkungan. Singkatnya, tanaman bahan bakar mengancam reproduksi sosial (ekologi produksi dan manusia), dan kendati mendorong suburnya portofolio investasi (khususnya melalui subsidi besar-besaran) tanaman seperti itu mengancam keberlanjutan planet bumi dan umat manusia sekaligus.

Fetisisme atas relasi-relasi nilai (tukar) memperlihatkan suatu krisis irasionalitas, baik secara material maupun epistemik. Bahan bakar nabati, misalnya, justru meningkatkan emisi, tidak dapat mengatasi krisis energi, serta mengancam tanah-tanah komunal, padang gembalaan, dan hutan yang masih tersisa, ruang hidup bagi sejumlah besar (dan akhirnya nanti semua) manusia dan tempat produksi sebagian besar pangan dunia (ETC 2009). Krisis epistemik tampak dalam serangkaian perkembangan—menurut laporan Kaji Cepat Sains dan Teknologi Pertanian untuk Pembangunan (*Assessment of Agricultural Science and Technology for Development* [IAASTD]), laporan UN, serta ORNOP dan gerakan-gerakan agraria—seluruhnya mengisyaratkan bahwa bahan bakar hayati industrial merupakan bagian dari masalah ketimbang solusi (lihat, misalnya, Borras, McMichael, dan Scoones 2011). Lebih jauh, kontribusi mereka terhadap krisis pangan pada 2007–2008 telah merangsang munculnya gelombang pemikiran kedua terkait "tekno-birokrasi global" (Wilkinson 2009: 91), yang meliputi IMF, lembaga penelitian pangan dan kebijakan dunia International Food and Policy Research Institute (IFPRI), FAO, World Bank, dan U.K. Gallagher Report (2008), sekalipun kebimbangan (jangka pendek) itu telah berkurang dengan adanya proposal-proposal baru untuk menyusun serangkaian

kode etik dan skema sertifikasi (bandingkan Borras dan Franco 2010). Bisa dikatakan bahwa kekhawatiran itu menandakan munculnya gelombang perubahan epistemik. Kemungkinan akan munculnya pergeseran epistemik juga terjadi di seputar masalah agraria abad XXI, yang bukan lagi menyangkut kontribusi politis pertanian bagi pembentukan negara, tetapi lebih soal nilai pertanian. Yaitu, pertanyaan epistemik tentang bagaimana kita memahami "nilai".

Dalam perspektif relasi nilai yang awal mengenai rezim pangan, lensa akumulasi kapital mengaburkan konsekuensi-konsekuensi sosial dan ekologis dari pengerukan dan alih fungsi pangan, yang tadinya bersifat ekologis menjadi dapat dipertukar-fungsikan. Ini adalah proses akumulatif namun taklinear, di mana kapital berupaya mengatasi berbagai hambatan untuk berakumulasi. Hasil terkemuka dari proses ini (industrialisasi pertanian, rantai pasokan global, sistem kompleks protein hewani, supermarketisasi) menyembunyikan mekanisme subordinasi, dengan risiko melanggengkan narasi-narasi dominan, serta apa yang disebut Araghi (2009) sebagai "ilusi keberlimpahan". Demikian pula, bentuk-bentuk perlawanan dan pengalaman-pengalaman pemiskinan/perampasan masih sering diabaikan. Dan, sebagaimana konsep "transisi nutrisi" menggambarkan kemajuan menu masyarakat hingga ke sebuah rantai pangan modern sembari mengabaikan kemunduran menu bagi mereka yang terpaksa kehilangan ekologi pangan, rezim pangan lebih berfokus hanya pada sisi "yang dikenyangkan" ketimbang pada sisi "yang dikenyangkan dan yang kelaparan" (Patel 2007).

Pada saat bersamaan, lensa akumulasi kapital mengukuhkan suatu ontologi sosial, suatu prinsip pengorganisasian, yang menempatkan relasi-relasi ekologis sebagai aspek eksternal (McMichael 2011b). Campbell mengusulkan agar

analisis rezim pangan diletakkan kembali dalam ekologi-politik, usulan yang menekankan adanya berbagai ketegangan di dalam rezim-rezim pangan antara abstraksi dan situasi nyata dari budaya-budaya pangan. Usulan ini mengemukakan masalah ontologis, menegaskan bahwa dunia yang berbeda itu tidak hanya mungkin diwujudkan, tetapi memang sudah ada—khususnya yang menjawab krisis lingkungan tanpa "mengorbankan" lingkungan, namun justru memulihkan dan melestarikan pertukaran metabolis manusia dengan alam (bandingkan, Schneider dan McMichael 2010; Perfecto, Vandermeer, dan Wright 2009). Dan di titik inilah interpretasi atas "nilai" memainkan peran.

Sebagaimana disebut sebelumnya, Araghi (2003) menekankan bahwa rezim pangan lebih tepat dipandang sebagai suatu "rezim politis dari relasi-relasi nilai global." Karena posisinya sangat penting bagi reproduksi buruh upahan dan bentuk-bentuk tenaga kerja lain, kedudukan pangan sangat mendasar dalam relasi-relasi nilai kapital global. Demikianlah sehingga rezim pangan menjadi suatu mekanisme politis untuk pengurangan ongkos bagi kapital dengan cara menekan harga 'pangan yang dibeli dengan upah' (khususnya bijibijian dan daging) sebagai suatu input dan/atau nilai tambah yang penting bagi pangan olahan. Rezim ini juga mengonsumsi secara berlebihan "'surplus alam' dengan mengorbankan terkurasnya sumberdaya alam di masa depan dan rusaknya kehidupan biosfer yang tidak dapat diperbaiki" (Araghi 2009: 121). Yang dimaksud dengan surplus alam di sini adalah "potensi surplus waktu-kerja di masa depan" (Araghi 2009: 121), karena kesuburan alami berdampak terhadap jumlah waktu-kerja (nilai) yang dibutuhkan untuk reproduksi sosial. Dengan

demikian, rezim pangan kapital adalah suatu "bentuk transfer nilai dari surplus alam dan penduduk miskin dunia kepada para pelanggan yang lebih makmur" (Araghi 2009: 137).

Dengan demikian, analisis relasi nilai mengungkap bagaimana rezim pangan di bawah kuasa kapital mengeksploitasi tenaga kerja dan alam sekaligus. Menekankan bahwa tindakan bekerja secara bersamaan adalah transformasi alam, Araghi meruntuhkan oposisi biner masyarakat/alam, dengan menyatakan bahwa eksploitasi atas tenaga kerja manusia dan alam pendukungnya adalah satu kesatuan. Dengan cara ini, 'nilai' menjadi suatu konsep metodologis, yang memungkinkan Araghi (dan Marx) untuk memperlihatkan bahwa harga (dan pembiayaan untuk memulihkan daya dukung lingkungan) hanyalah cerminan dari fetisisme atas relasi-relasi sosial dan ekologis yang melekat dalam produksi komoditas. Di sini nilai menjadi suatu relasi historis yang dijadikan sarana bagi kapital untuk menggerakkan produksi, sirkulasi, dan akumulasi. Nilai menjadi faktor penjelas yang kuat mengenai bagaimana rezim kapital bekerja, termasuk relasi-relasi kontradiktif yang melekat pada kapital seperti eksploitasi berlebih atas tenaga kerja dan alam. Akan tetapi, justru karena konsep nilai yang digunakan Marx (dan Araghi) menekankan kesatuan asali antara tenaga kerja dan alam, konsep ini secara tersirat mengakui kemungkinan wujud-wujud lain dari hubungan ini. Yaitu, "nilai" menempatkan kapitalisme sebagai wujud historis dari suatu reproduksi sosial yang teralienasi. Dengan demikian, nilai memungkinkan adanya transendensi, yaitu mengekspresikan nilai bukan hanya dalam bentuk harga.

Meninjau Ulang Masalah Agraria

Transendensi berarti juga merumuskan ulang masalah agraria sebagai suatu masalah "pangan", dengan mengakui bahwa sebagai suatu nilai guna, pangan punya kapasitas metabolis yang menghubungkan manusia dengan lingkungannya. Penilaian ulang atas pertanian seperti ini adalah praktik transendensi atas kalkulasi berbasis pasar yang abstrak di bawah rezim pangan, juga atas bagaimana rezim pangan mengabaikan nilai ekologi dan budaya-budaya lain demi menciptakan layanan dari pemampatan ruang-waktu. Dalam hal ini, Joan Martinez-Alier mengamati bahwa keniscayaan pengerukan oleh kapital menghasilkan ketegangan "antara waktu ekonomis, yang bergerak dalam ritme cepat seiring sirkulasi kapital dan suku bunga, dan waktu geokimia-biologis yang dikendalikan oleh ritme Alam, ... yang mewujud dalam kerusakan tak terpulihkan pada Alam dan pada budaya-budaya lokal yang punya cara pandang berbeda perihal nilai yang melekat pada sumberdaya mereka" (2002: 215). Kontradiksi seperti ini mengemuka pada tambak udang industrial, di mana ketegangan-ketegangan antara pelestarian bakau dan ekspor udang merupakan wujud ketegangan antara bahasa-bahasa (pe)nilai(an) yang berbeda (ekologi-politik). Demikianlah, Martinez-Alier lantas mengklaim bahwa tambak udang industrial "menghilangkan mata pencaharian orang-orang yang hidup langsung dari, dan menjual, produk-produk berbasis [hutan] bakau. Selain sebagai sumber mata pencaharian, fungsi-fungsi lain bakau juga hilang, mungkin tak dapat dipulihkan lagi, seperti perlindungan pantai dari naiknya muka air laut, pembenihan ikan, penyerapan karbon, lumbung keanekaragaman hayati (misalnya, sumberdaya genetis yang tahan salinitas), serta nilai estetis" (2002: 80).

Di sinilah beragam nilai praktis dihapus oleh abstraksi harga pasar ("semua udang bisa kau makan"—ilusi keberlimpahan). Konsumerisme yang tersertifikasi dan/atau "hijau" bisa saja mensyaratkan bahwa konsumenlah yang membayar seluruh "biaya" (lingkungan) melalui subsidi harga, tetapi berapa ongkos "praktis" yang harus dibayar oleh para petambak yang kehilangan sumberdaya? Maka, sifat kapital yang senantiasa memperbesar diri memaksakan suatu ontologi kekerasan yang mengutamakan narasi pembangunan tertentu dan menyalahpahami atau mengabaikan klaim-klaim kultural lain yang memiliki beragam pengalaman praktis berbeda. Ketika kapital memecah belah ekologi dan menjadikannya komoditas, maka proses-proses hayati menjadi samar (abstrak) dan hilang dalam logika harga. Tentang abstraksi semacam ini, Marx (1990: 376) mencatat:

> Kapital tidak bertanya tentang berapa lama tenaga kerja bisa hidup. Kapital hanya tertarik pada berapa besar kekuatan maksimum tenaga kerja yang dapat dikerahkan dalam seharian kerja. Karena mengejar tujuan ini, kapital mengorbankan usia tenaga kerja, serupa seorang petani serakah merampas sebanyak-banyaknya hasil bumi dengan menguras kesuburannya.

Dengan cara ini, rezim pangan kapital melakukan "penerabasan nilai" di bawah rasionalitas "modern". Sementara praktik-praktik ekologis bergerak untuk pemulihan, praktik-praktik ekonomi bergerak untuk merampok. Praktik-praktik ekologis menghargai waktu dalam proses-proses hayati (*biological time*), dan praktik-praktik ekonomi hanya memperhatikan kecepatan sirkulasi nilai. Akibatnya, praktik-praktik ekologis (bukannya ekonomi) dibuat tampak anakronistik dan kedap-perubahan.

Logika pikir ekonomi ini secara rutin mengesampingkan bentuk-bentuk reproduksi sosial masyarakat tani. Maka: "cara bertani seperti yang dilakukan kaum tani sering hadir sebagai *praktik-praktik tanpa penjelasan teoretis*. Itu sebabnya praktik-praktik seperti itu tidak dapat dipahami secara memadai, sehingga wajar kalau muncul kesimpulan bahwa praktik-praktik itu tidak ada atau sekedar anomali yang takrelevan" (van der Ploeg 2009: 19, penekanan saya tambahkan).

Masalah agraria kontemporer, karenanya, berkepentingan melakukan transendensi atas logika kalkulasi nilai tukar, sebagaimana diterapkan pada pertanian. Ini merupakan suatu isu metodologis, terkait teori Marx yang menempatkan nilai sebagai relasi sosial yang mewujud dalam harga, yang menempatkan relasi-relasi sosial (dan ekologis) melulu sebagai objek kalkulasi. Nilai tidak melekat pada kerja, atau alam, tetapi diproduksi melalui perpaduan tenaga kerja/alam sebagai komoditas yang memiliki nilai tukar. Bagi kapital, nilai hanya berupa nilai uang (yang ditentukan oleh pertukaran komoditas pada waktu tertentu), namun teori nilai membongkar pemiskinan makna seperti itu, dan membuka kemungkinan kritik dan perlawanan terhadapnya. Apa yang tampak sebagai rasionalitas universal hanyalah suatu upaya pengaburan dan penyangkalan atas nilai praktis yang berbasis ruang. Dengan kata lain, teori tentang nilai menyiratkan (tetapi menyembunyikan) adanya ikatan-ikatan lain dengan ragam bentuk dan pemahaman yang berbeda tentang nilai. Di bagian selanjutnya saya memaparkan argumen bahwa "praktik-praktik kaum tani" mendesakkan pengakuan seperti itu melalui upaya-upaya mereka untuk mengatasi masalah agraria dengan berusaha memperbaiki "patahan metabolis".

Salah satu segi dalam peninjauan ulang atas masalah agraria adalah pengajuan gagasan "keanekaguaan" (*multifuncti-*

onality) pertanian dalam laporan IAASTD. Akan tetapi, setelah secara resmi diajukan di OECD, FAO, dan Council of Europe selama 1990-an, sebagai suatu penamaan bagi pertanian berkelanjutan, konsep ini tidak luput dari masalah. Selama proses penyusunan AoA-nya WTO, Uni Eropa telah mencoba namun gagal untuk memasukkan "keanekagunaan" sebagai salah satu prinsip tata kelola lingkungan. Konsep ini merupakan upaya untuk melampaui simplifikasi mendasar yang terjadi dalam pertanian industrial, dan menyebutkan bahwa pertanian "bisa saja memiliki beragam hasil, dan karena itu, dapat membantu mewujudkan beberapa tujuan sosial sekaligus" (OECD 2001). Istilah "hasil" menyiratkan aspek kegunaan pertanian—berkontribusi terhadap berbagai tujuan seperti pengelolaan bentang alam, lapangan kerja pedesaan, keamanan pangan, dan perlindungan lingkungan. Tetapi dalam konteks pasar, yang akan segera dilakukan adalah penghitungan kinerja keuangan (audit) dan komodifikasi atas hasil-hasil itu, dan menempatkan sebagian di antaranya (misalnya pelestarian lingkungan, lapangan kerja pedesaan) ke dalam kotak "hijau" dan "biru" agar memenuhi persyaratan untuk pengurangan subsidi di WTO, sembari terus mengalirkan uang kepada pengusaha pertanian korporat (McMichael 2011a).

Bagaimanapun juga, keanekagunaan telah tampil sebagai "narasi tandingan atas visi neoliberal dalam pertanian Eropa" (Potter dan Tilzey 2005: 590) di kalangan koalisi petani dan aktivis lingkungan. Sebagai narasi tandingan, keanekagunaan dipahami sebagai prinsip pemulihan dan pelestarian. Ketimbang mematok ruang-ruang konservasi tersendiri (lewat proses audit) untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan penyerapan polusi, keanekagunaan di sini berarti menjadikan pemulihan dan pelestarian ekologis sebagai bagian tak terpisahkan dari praktik pertanian itu sendiri (bandingkan dengan Perfecto,

Vandemeer, dan Wright 2009). Termasuk dalam koalisi ini adalah gerakan kedaulatan pangan Eropa, *Nyéléni Europe*, yang mengangkat keanekagunaan sebagai isu politis dengan menggunakan bahasa yang berbeda mengenai nilai. Perannya sangat menentukan bagi masalah agraria kontemporer.

Reproduksi Sosial versus Reproduksi Kapital

Kalau masalah agraria yang klasik berfokus pada reproduksi kapital, gerakan kedaulatan pangan membalikkannya menjadi masalah tentang reproduksi sosial yang melekat pada praktik-praktik pertanian. Dengan begitu, kedaulatan pangan merumuskan ulang makna modern, melampuai batas-batas rasionalisme saintifik, untuk mengatasi darurat sosial dan lingkungan dewasa ini. Visi modernitas seperti ini mengusung konsep keanekagunaan yang khas secara historis: "reforma agraria dapat menghentikan eksodus terpaksa yang terjadi besar-besaran dari pedesaan ke kota, yang membuat kota-kota berkembang secara tidak berkelanjutan dan tidak manusiawi" (Vía Campesina 2006). Jauh dari sekedar memperjuangkan redistribusi tanah, visi ini juga berupaya membongkar pandangan bahwa kemajuan itu identik dengan perkotaan, mempertentangkan antara "planet ladang" dengan "planet kumuh" sebagai suatu bencana dari kapitalisme neoliberal (Ajl 2011), serta menempatkan pertanian kembali pada posisinya sebagai kunci bagi reproduksi sosial dan ekologis secara umum. Kedaulatan pangan bergaung di Tiongkok, di mana tengah berlangsung juga pengorganisasian kekuatan sosial kaum tani untuk menghadang langkah-langkah negara dan pasar yang mengomodifikasi pertanian sebagai sektor industri dalam rangka mendorong pertumbuhan industri berbasis perkotaan. Rekonstruksi Pedesaan Baru, sebuah gerakan sosial

dan koperasi yang meluas muncul di pedesaan sebagai respons terhadap kian parahnya ketimpangan antara kota dan desa serta tergerusnya budaya pedesaan; gerakan ini merupakan rajutan pengorganisasian dan kerja-kerja yang berupaya membangun kemandirian berbasis tanah melalui praktik-praktik agroekologi dan pemasaran alternatif (Wen 2007; Day 2008; Hale 2013).

Sebagai suatu visi, kedaulatan pangan sejalan dengan alternatif-alternatif "kedaulatan atas tanah" (Borras dan Franco 2012). Joao Pedro Stedile, pemimpin Movimiento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) atau Gerakan Pekerja Tunakisma, mengatakan:

> Sejak Zapatista di Meksiko, atau Julio di Brasil, cita-cita reforma agraria didasarkan pada gagasan bahwa tanah adalah milik mereka yang menggarapnya. Sekarang, gerakan kami mesti jauh melampaui itu. Argumen bahwa 'jika Anda menggarap tanah maka Anda punya hak atas tanah tersebut' tak lagi cukup …. Kami menginginkan suatu transformasi di sektor pertanian yang menempatkan petani sebagai penjaga tanah, suatu cara bertani yang beda, yang memastikan keseimbangan ekologis dan menjamin bahwa tanah tidak dilihat sebagai hak individual. (2002: 100)

Dalam pemahaman ini, gerakan kedaulatan pangan menjadi bagian dari upaya menyusun suatu narasi alternatif (secara historis) di dalam konteks rezim pangan korporat tetapi tidak tunduk pada logika rezim itu (McMichael 2005, 2009d). Ini bukanlah visi yang bersandar pada konsep nilai (pasar) yang abstrak, namun menandakan munculnya sebuah ontologi politik yang secara langsung memberi arti penting bagi bentuk-bentuk swa-pengorganisasian melalui jaringan-jaringan kerjasama (Holt-Giménéz 2006), termasuk meruntuhkan pemilahan

kota/desa dan memulihkan patahan metabolis (Schneider dan McMichael 2010). Ontologi semacam ini dirumuskan dengan baik oleh Jésus Léon Santos dari Centro de Desarollo Integral Campesino para la Mixteca (CEDICAM), sebuah lembaga pusat pengembangan petani di Mixteca, Meksiko, saat menjelaskan pertanian ladang jagung (*milpa*) sebagai: "Bukan sebuah cara memperbaiki kondisi alam—tetapi cara untuk semakin dekat dengan proses-proses yang alamiah, menjadi sedekat mungkin dengan apa yang dilakukan alam" (dikutip dalam Canby 2010: 36). Cara bercocok tanam *milpa* adalah bentuk pertanian keluarga bersifat agroekologis pada lahan-lahan yang nisbi kecil berbasis pada siklus tanam jagung, labu, dan kacang-kacangan, serta sistem bera yang dilengkapi tanaman sela untuk mengusahakan keanekaragaman hayati dan pemberagaman menu.

Ontologi tentang swa-pengorganisasian yang berlangsung di berbagai komunitas dan jaringan petani berangkat dari praktik-praktik yang sedang berkembang di seluruh dunia. Di selatan Brasil (Rio Grande du Sol), misalnya, pertanian kedelai yang situasinya terus memburuk telah memicu munculnya perlawanan otonom oleh mayoritas petani (Preschard 2012). Perlawanan ini diwujudkan dengan menjadikan pemenuhan kebutuhan sendiri sebagai prioritas baru, yang "merupakan cara bercocok tanam yang ekonomis karena mengandalkan sumberdaya internal, memaksimalkan sumberdaya yang tersedia dalam unit keluarga, dan produksi-bersama sebagai keterampilan khas tenaga kerja keluarga (Scheneider dan Niederie 2010: 394). Berkembangnya pengolahan pangan langsung di ladang (*on-farm*), yang ditemukan pada sepertiga dari 608 ladang yang disurvei, berhasil memperbaharui struktur pasar di tingkat regional dan lokal (Scheneider dan Niederie 2010: 396). "Pluriaktivitas berbasis pertanian" ditemukan di hampir

setengah dari ladang-ladang tersebut, selain pendapatan dari luar sektor pertanian. Pendapatan dari aktivitas bercocok tanam komersial semakin ditentukan oleh bagaimana sumberdaya-sumberdaya ladang (yang semakin tidak berciri komoditas) dikelola secara padu.

Di Honduras, gerakan petani Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), sejak krisis pangan 2007–2008, telah mencoba menyeimbangkan kembali antara tanaman untuk dijual dan tanaman untuk dikonsumsi sendiri. Ini melibatkan penggeseran fokus dari tanaman sawit ke tanaman biji-bijian pokok (jagung dan kacang-kacangan) sebagai proyek kemandirian pangan lokal, lalu diperluas hingga meliputi tanaman-tanaman yang sudah ada sejak lama seperti yucca, pisang raja, dan nanas—inilah yang disebut Kerssen (2013: 116) sebagai "bentuk investasi atas lahan berjangka panjang." MUCA juga telah mengembangkan jaringan pasar-pasar pangan skala kecil untuk mendistribusikan hasil panen lokal yang diproduksi dengan biaya murah. Tanya Kerssen (2013: 217) mencatat bahwa koperasi-koperasi ini memang tetap menjual buah sawit sebagai sebuah "sarana pembangunan", dengan menggunakan keuntungannya untuk membiayai produksi biji-bijian pokok, ternak, perikanan, pembuatan roti dan pertukangan kayu, pengelasan dan bengkel mobil, sebagai "proyek pemberagaman ekonomi yang bertujuan untuk meletakkan seluruh ekonomi kembali ke tangan komunitas dan keluarga lokal."

Di Meksiko, kebijakan pemerintah dalam era NAFTA cenderung mengarah ke penghapusan sektor pertanian skala kecil. Tujuannya untuk mengurangi subsidi bagi "kemiskinan" 2,5 juta keluarga petani jagung lokal. Makin hari makin banyak petani lokal yang terlempar dari ekonomi formal, "makin melepas ketergantungan dari pupuk kimia yang mahal dan mencukupkan diri dengan jagung yang dapat mereka tanam,

panen, dan jual melalui barter" (Canby 2010: 30). Sementara para ekonom neoklasik menganggapnya sebagai "mundur ke subsistensi," langkah ini menganggap sangat bernilai sistem produksi dan reproduksi benih-benih lokal yang menjadi bagian dari budaya jagung lokal mereka (Barkin 2002). Langkah ini juga yang telah memancangkan perladangan *milpa* yang "telah diupayakan sedemikian rupa agar bisa tumbuh dari lingkungan mereka yang berkeanekaragaman hayati melalui pemeliharaan secara seksama dan tekun" (Canby 2010: 31), sebagai benteng yang kokoh untuk melawan perubahan iklim dan penyakit tanaman yang dampaknya bersifat global ketimbang hanya lokal. Dengan kata lain, pelestarian sumberdaya genetik, sebagai suatu praktik yang ditempa secara lokal, sangat berpotensi menjadi lebih berguna secara global (pada waktunya) ketimbang klaim-klaim universal para pengusung agroindustri.

Di berbagai dataran tinggi Guatemala, pelestarian keanekaragaman genetik di ladang yang dilakukan petani sangat mengandalkan pasar di luar ladang, migrasi lintas-negara, dan pekerja ladang upahan untuk mendukung pertanian model *milpa*, "bahkan ketika lebih hemat untuk membeli makanan di pasar [menyiratkan] bahwa pertanian untuk kebutuhan sendiri menghasilkan keuntungan-keuntungan yang melampaui nilai pasar dari tanaman tersebut" (Isakson 2010: 740). Data dari 120 unit ladang, di mana 97% menerapkan sistem cocok tanam *milpa* untuk konsumsi sendiri, menunjukkan bahwa seluruh pemilik lahan juga mencari pendapatan di luar ladang. Kerja di luar sektor pertanian seperi itu (termasuk migrasi) dan penanaman tanaman komersial itu menguatkan pertanian *milpa*, "praktik yang tidak bisa diukur melulu dari nilai pasar hasil panennya" (Isakson 2010: 735–737). Artinya, bertani dengan pendekatan keanekaragaman hayati seperti itu lebih

dari sekadar memproduksi nilai tukar. Pendapatan dari kerja di luar pertanian, termasuk yang berasal dari produksi komoditas skala kecil (khususnya barang-barang kerajinan) dilihat sebagai pelengkap bagi pemenuhan kebutuhan sendiri (Isakson 2010: 738, 743)—bertolak belakang dengan Kementerian Pertanian yang mengklaim bahwa "Jagung lokal tidak menguntungkan. Kami mencoba untuk menghambat pembudidayaannya. Kami ingin agar para petani kecil punya lebih banyak macam tanaman" (dikutip dalam Isakson 2010: 749).

Penelitian Ryan Isakson mengingatkan kita bahwa nilai *milpa* lebih dari sekadar nilai pasar jagung lokal dan tanaman lain, juga bahwa *milpa* diarahkan oleh relasi-relasi sosial di mana ladang itu berada, termasuk misalnya, berlangsungnya diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja sedemikian rupa sehingga "banyak pihak menilai penggunaan tenaga kerja perempuan di *milpa* adalah bentuk pemanfaatan sumberdaya rumah tangga secara rasional" (Isakson 2010: 752). Berlawanan dengan klaim bahwa subsistensi adalah sebuah langkah mundur atau tindakan putus asa, para petani kecil menjalankan *milpa* "sebagai ungkapan identitas kultural, sebagai sarana untuk menguatkan ikatan sosial, sebagai bentuk pemenuhan pangan yang melawan mekanisme pasar yang mudah berubah dan tak menentu, dan sebagai penolakan atas komodifikasi pangan secara menyeluruh" (Isakson 2010: 755).

Dalam kondisi krisis, tekanan pemerintah untuk mengomodifikasi pangan secara global adalah tindakan menyepelekan gelombang besar swa-pengorganisasian sebagai bentuk pertahanan terhadap pasar global—dan ditambah lagi kini dengan perubahan iklim—yang dipraktikkan oleh kaum tani di seluruh dunia (McMichael 2010). Pertanian untuk perlindungan alam, yang mengembalikan kesuburan ke tanah melalui kompos, tanaman penyubur, dan penggunaan tanaman sela adalah cara

lazim dalam pengolahan tanah. Di Afrika timur dan selatan, di lingkungan dengan curah hujan lebih rendah, lembaga pelestarian alam Africa Center for Holistic Management (ACHM) memelopori pemanfatan ternak untuk memulihkan tanah, dan "memperlihatkan kembali apa yang telah dihasilkan oleh kawanan hewan liar seperti kerbau dan kambing Afrika (*wildebeest*) selama ribuan tahun" (Wilson 2012: 79). Di wilayah Tahoua, Niger, para petani kecil (utamanya perempuan) telah mengklaim kembali 280.000 hektare tanah yang sudah rusak, menyusul krisis lingkungan pada 1980-an dan krisis politik pada 1990-an, dan dengan tindakan itu mereka telah meningkatkan keamanan pangan keluarga dan mengembangkan teknik-teknik bercocok tanam pada musim kering, sehingga "menurut statistik FAO, Niger memproduksi 100.000 ton bawang kering pada 1980, namun mencapai 270.000 ton pada 2004, tahun yang dilanda kemarau panjang" (Reij 2006).

Sementara reproduksi sosial selalu diabaikan oleh korporasi, lembaga-lembaga pembangunan, dan negara, karena mereka menganut perspektif pasar, bisa juga dikatakan bahwa dimensi gender dari reproduksi sosial senantiasa diabaikan dalam penelitian ekonomi-politik (termasuk penelitian rezim pangan) (Razavi 2009: 207). Sekurang-kurangnya ada dua dimensi yang diabaikan di sini: pertama, dominannya jumlah perempuan yang bekerja di ladang (70% dari produksi dan pengolahan pangan di Afrika); dan kedua, buruknya mekanisme redistribusi di bawah neoliberalisme telah menyebabkan semakin banyak perempuan mesti bekerja di sektor informal atau sektor yang tidak terkomodifikasi, guna memenuhi kebutuhan keluarga (Whitehead 2009)—satu contoh nyata dampak dari cara kerja kapital yang bertumpu pada "pemiskinan reproduksi". Shahra Razavi mencatat bahwa argumen-argumen yang mendukung

redistribusi tanah untuk perempuan, sebagai petani yang lebih "efisien", mengabaikan aspek ketimpangan gender (misalnya, bahwa petani perempuan relatif tidak punya akses atas input pertanian), sehingga efisiensi petani perempuan "sudah pasti berarti derita dan terkurasnya tenaga kerja keluarga" (2009: 204).

Peran khusus perempuan dalam reproduksi sosial dan ekologi punya nilai universal. Di forum Terra Preta (Roma 2008), seorang perwakilan dari Jaringan Organisasi Petani dan Produsen Pertanian Afrika Barat melaporkan bahwa benih hasil pemilahan secara fleksibel oleh petani perempuan telah mampu bertahan di musim kering, juga bahwa praktik-praktik dan capaian-capaian ini sedang didokumentasikan. Dalam kajiannya mengenai pengelolaan keanekaragaman benih di Dataran Tinggi Deccan yang kering, di India Selatan, Carine Pionetti (2005) mendokumentasikan nilai kerja perempuan dalam membangun suatu "ekonomi benih tingkat lokal" melalui pertukaran benih, suatu praktik yang sangat berarti secara ekologis, ekonomis, sosial, dan kultural. Bertolak belakang dengan monopolisasi benih di bawah sistem paten yang disukai industri pembangunan:

> Pertukaran benih varietas tanaman lokal yang berlangsung tanpa henti membuat sumberdaya genetik hidup terus dari satu ladang ke ladang lain dalam lingkup satu desa atau lebih luas. Pengelolaan sumberdaya genetik secara dinamis seperti ini membuat sistem pertanian tradisional lebih stabil, meningkatkan daya adaptasi tanaman lokal terhadap kondisi lingkungan yang terus memburuk, dan mengurangi risiko penggerusan genetik. Pertukaran benih juga membantu memastikan bahwa tanah tidak akan menganggur

> karena kekurangan benih, sehingga menghindari penggerusan tanah serta meningkatkan unsur organik tanah dan kapasitasnya menyimpan air. (Pionetti 2005: 154)

Pemuliaan benih meminimalisir risiko, meningkatkan keanekaragaman tanaman dan nutrisi; memberi perempuan "kemandirian dan daya tawar di dalam keluarga" (Pionetti 2005: xiv); memungkinkan perempuan hanya menanam benih yang sesuai kebutuhannya, kondisi lingkungan, dan iklim tertentu; memungkinkan penanaman dilakukan pada saat yang tepat; dan menghasilkan aset (benih bisa menjadi alat tukar, khususnya bagi perempuan dengan sedikit sumberdaya). Benih berarti keamanan "pengetahuan bersama" (Holt-Giménez 2006: 97)—sebuah pertahanan melawan serangan agrobisnis dan negara yang dipaksa mengadopsi pertanian berorientasi "rantai nilai", dan karenanya benih telah menjadi "arena pertarungan" (Bezner Kerr 2010). Begitu tergabung ke dalam "rantai nilai", petani jadi tergantung pada sebuah rantai produksi "di mana pilihan-pilihan input dan penggunaan hasil panen sedari awal telah ditentukan oleh perusahaan-perusahaan kimia-pertanian dan pengolahan pangan" (Pionetti 2005: xv). Penelitian Elisa Da Via (2012) di Eropa menggarisbawahi kaitan antara jejaring pemulia benih dan maraknya promosi pertanian ekologis dalam menguatkan keterpaduan, daya lenting, dan terjaminnya mata pencaharian.

Laporan ActionAid berjudul *We know what we need: South Asian women speak out on climate change adaptation* ('Kami tahu yang kami butuhkan: Perempuan Asia Selatan berbicara tentang adaptasi perubahan iklim') mencatat bagaimana petani di lembah Sungai Gangga di perbatasan Nepal, India, dan Bangladesh mengelola mata pencaharian dalam kondisi musim angin yang tak menentu. Hal ini membuktikan "bahwa

perempuan di wilayah miskin telah mulai beradaptasi terhadap perubahan iklim dan sangat paham apa yang mereka butuhkan untuk menjamin dan mempertahankan penghidupan mereka secara lebih efektif" (2007: 4). Biasanya, lembaga-lembaga pembangunan tidak diarahkan untuk mendukung kecerdasan petani kecil, sebab agen-agen ini umumnya merasa sudah tahu "apa yang *mereka* butuhkan." Di zona ekologis lain, di tanah-tanah kering Dataran Tinggi Deccan, di mana berbagai macam varietas tanaman tadah hujan tumbuh, termasuk sorgum, jawawut, kacang-kacangan, dan biji-bijian penghasil minyak, "hubungan simbiotik antara tanaman-tanaman ini memberi solusi bagi banyak masalah yang dihadapi pertanian India masa kini semisal pengolahan tanah dan kesuburannya, pengendalian hama serta peredaman risiko dan ketakmenentuan" (DDS Community Media Trust *et al.* 2008: 35). Sementara keanekaragaman hayati itu memungkinkan masyarakat-masyarakat tani untuk mengelola kondisi iklim di lingkungan yang rapuh, logika pikir nilai berbasis pasar mengabaikan "betapa bernilai keanekaragaman hayati yang ada bagi petani dalam memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan obat-obatan." Demikianlah:

> Jumlah jenis tumbuhan pangan "liar" yang dipanen di distrik Medak (Andhra Pradesh) jauh melampaui jumlah spesies tanaman yang sudah dibudidayakan. Sekitar 80 spesies tumbuhan yang belum dibudidayakan digunakan untuk pangan lokal, dan lebih banyak lagi spesies tumbuhan itu termasuk akar, umbi-umbian, dan buah-buahan. Spesies "liar" yang sangat beraneka jenis ini termasuk daun-daunan hijau, jenis beri, dan buah-buahan merupakan sumber banyak jenis nutrisi .... Sebagian besar dari tumbuhan itu kaya akan kalsium, besi, karoten, vitamin C, riboflavin,

> dan asam folat. Dengan begitu, tumbuh-tumbuhan itu merupakan anugerah bagi ibu hamil dan baru melahirkan serta bagi anak-anak. Karena tersedia tanpa memerlukan biaya, tumbuh-tumbuhan ini adalah anugerah bagi kaum miskin. Kaum Dalit tahu mengenai hal ini dan telah menjadikan bahan-bahan makanan ini bagian terpadu dari sistem pangan mereka. (DDS Community Media Trust *et al*. 2008: 35)

Problem utamanya di sini, pada akhirnya, bersifat epistemik. Praktik-praktik lokal menganggap sangat bernilai, dan bergantung pada, ekosistem setempat dan jejaring tenaga kerja. Sebagai contoh, untuk mereklamasi Kawasan-kawasan Sahara, "tingginya jumlah penduduk bukanlah suatu beban (*liability*), melainkan faktor mendasar bagi penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengolah lahan, membangun terasering, dan menghimpun air di embung-embung untuk irigasi, dan untuk mengendalikan rumput, merawat lahan, memberi makan ternak dan menebar kotorannya [di ladang]" (Lim 2008). Logika pikir modernitas mengabaikan pentingnya tenaga kerja dan pengetahuan praktis petani, dan mengharapkan petani melebur ke dalam wilayah-wilayah perkotaan dan/atau pekerjaan upahan. Pandangan awam yang menganggap pertanian skala kecil sudah usang berasal dari anggapan lazim bahwa pertanian subsisten atau nyaris-subsisten adalah wajah kemiskinan, yang berarti mereka tidak punya atau nyaris tidak punya pendapatan. Adalah menyesatkan jika kita berasumsi bahwa pertanian ala kaum tani (*peasant farming*) merupakan tahap perkembangan awal pertanian, seolah-olah kondisi agraria tidak pernah berubah sepanjang waktu. Bercocok tanam dan tenaga kerja pertanian terus-menerus beradaptasi, terlebih saat menghadapi kondisi-kondisi yang terus memburuk. Kendati bukan keadaan yang romantis, ketangguhan para petani kecil

yang mengelola lahan kecil, atau bahkan tunakisma, adalah alasan mengapa mereka masih bertahan hingga kini (Holt-Giménez 2006; Desmarais 2007: 19). Bahkan, kajian ekstensif van der Ploeg (2009) di Peru, Italia, dan Belanda, menunjukkan bahwa kini sedang terjadi proses "pembentukan kembali kaum tani" (*repeasantization*), mirip dengan contoh-contoh di atas, yang terjadi di Meksiko, Brasil, dan Burkina Faso (lihat juga Altieri dan Toledo 2011; Corrado 2010; Vanhaute 2008).

Pembentukan Kembali Kaum Tani: Menilai Ulang Masalah Agraria?

Van der Ploeg membedakan konseptualisasinya mengenai kaum tani atau kepetanian (*peasantry*) dari konsep yang bersifat historis yang membatasi kaum tani atau kepetanian sebagai sesuatu yang hanya ada di masa lalu dan/atau di pinggiran, yang merujuk pada "kondisi petani" (2009: 34). Kondisi ini disebabkan oleh krisis rezim pangan korporat, atau apa yang ia anggap sebagai sistem rezim pangan yang digerakkan oleh logika rantai-pasokan. Kondisi ini berpusat pada praktik produksi-bersama antara kaum tani dan alam, yang "dimaksudkan untuk dan mewujud sebagai *penciptaan dan pengembangan basis sumberdaya yang dikuasai dan dikelola secara mandiri*," yang dapat diperkuat dengan keterlibatan dalam pluriaktivitas/aktivitas-aktivitas nonpertanian lainnya (van der Ploeg 2009: 23, 33). Dengan demikian, sementara su-dut pandang pasar menggambarkan pertanian kaum tani seba-gai sesuatu yang mandek, nyatanya reproduksi dan pemba-ngunan basis sumberdaya merupakan faktor pembentuk kaum tani *dan* menjadi prasyarat bagi pembebasan mereka.

Dalam hal ini, van der Ploeg (2009: 40) menekankan bahwa "kaum tani Eropa jauh lebih 'petani' daripada banyak petani

di negara-negara berkembang, dan ini menjelaskan mengapa mereka relatif lebih sejahtera." Karena itu, ia merumuskan kategori universal atas kondisi petani, berbeda dengan asumsi awam yang menempatkan kaum tani pada posisi pinggiran di kawasan-kawasan rintisan bercorak kapitalis (*capitalist frontier*) yang terus menguat di negara-negara Selatan. Ia memberi tempat bagi kaum tani modern pada masa kini, dan pada saat yang sama merobohkan makna peyoratif tentang "petani" dalam ontologi-ontologi bercorak modernis yang menghapus kondisi petani karena menganggapnya terbelakang atau pramodern.

"Corak produksi pertanian kaum tani" modern didefinisikan sebagai "penciptaan dan peningkatan sebanyak mungkin nilai tambah"—menghasilkan pendapatan dengan cara memelihara dan memperbesar sumberdaya-sumberdaya yang dikelola secara mandiri (van der Ploeg 2009: 24). Corak produksi ini berbeda dengan "pertanian wirausaha" yang diarahkan untuk merebut sumberdaya milik orang lain dan juga nilai tambah dari sumberdaya yang dikuasai, juga berbeda dari "pertanian kapitalis" yang mengutamakan pencarian laba (van der Ploeg 2009: 42–43). Corak produksi pertanian kaum tani mengaktifkan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia (yaitu sumberdaya yang diproduksi dan direproduksi melalui daur produksi sebelumnya) melalui intensifikasi berbasis tenaga kerja, yang diperkuat oleh hubungan timbal-balik di dalam jaringan kaum tani yang memang dijalankan demi penambahan nilai. Kemungkinan beralih dari nilai-tambah ekonomis ke nilai-tambah ekologis berpijak pada prinsip: "semakin usaha tani tidak terhubung dengan pasar-pasar besar di hulu (dan kontrol kekuatan imperial yang mengakar di dalamnya), semakin besar ruang manuver untuk menciptakan alternatif baru di sisi hilir" (van der Ploeg 2009: 20).

Transisi semacam itu memberi ruang bagi klaim epistemik: bahwa pertanian kaum tani berbeda dari bentuk-bentuk usaha tani lain dalam hal mengutamakan nilai ekologis. Dalam pemahaman ini, corak bertani seperti ini tak terpikirkan dalam cara pandang modernis, dengan posisi penting tenaga kerja sebagai sifat utamanya. Sementara itu, kegiatan-kegiatan komersial diarahkan melulu untuk berakumulasi dengan mengganti tenaga manusia dalam proses produksi. Sehingga, pertanian industrial melihat tenaga petani kecil sebagai pemborosan, dan merampas pengetahuan praktis dengan memiskinkan keterampilan petani melalui penggunaan input-input olahan industri, terutama dalam hal teknologi benih yang menerabas kekayaan ekologis setempat dan mengurangi kebutuhan tenaga kerja (Kloppenburg 1988). Bagi van der Ploeg, tingginya penggunaan tenaga kerja adalah ciri pembeda corak produksi pertanian kaum tani. Sebaliknya, cara pandang modernis menganggap kerja ala kaum tani sudah ketinggalan zaman dan terhambat oleh keterbatasan sumberdaya (fisik, alih-alih biofisik), sehingga pertanian subsisten yang dihasilkannya "tidak sanggup menggerakkan pembangunan" (van der Ploeg 2009: 46). Sebagai tanggapan, "intensifikasi berbasis tenaga kerja muncul sebagai satu jalur pembangunan strategis, jika bukan keniscayaan" (van der Ploeg 2009: 48), di mana nilai ekologis punya logika positifnya tersendiri:

> Pertukaran dengan alam yang tidak tunduk pada logika komoditas adalah argumen pembelaan penting: semakin besar usaha tani mengandalkan modal ekologis, semakin murah biaya produksinya. Modal ekologis, bila dipelihara dengan baik, juga memungkinkan pola pertumbuhan yang terlepas dari pasar-pasar utama penyedia faktor-faktor produksi dan input-input lainnya: ternak dikembangkan

> dan diperbaiki kualitasnya melalui pengembangbiakan dan seleksi benih di ladang; ladang terolah dengan baik dan menjadi lebih subur; pengalaman-pengalaman baru diterjemahkan ke dalam pengetahuan yang terus meluas. (van der Ploeg 2009: 4–5)

Konsep "modal ekologis" menganggap pertambahan nilai sebagai tujuan sekaligus hasil dari pertanian kaum tani. Nilai di sini bergantung pada *pengurangan* input-input yang mesti dibeli, khususnya ketika sumberdaya-sumberdaya pertanian telah digerakkan kembali oleh nilai-guna ketimbang nilai-tukar. Sebagai praktik, di sini pertanian tidak tunduk pada logika komoditas—mengalami dekomodifikasi—bahkan jika tanaman dan ternak tetap dijual, dan dengan begitu membuat petani mencapai emansipasi karena terbebas dari utang dan input-input pertanian yang dibakukan. "Penambahan nilai" melipatgandakan nilai reproduktif sumberdaya-sumberdaya pertanian, alih-alih berkontribusi pada akumulasi kapital dalam rantai-nilai eksternal. Dengan begitu, "modal ekologis" merupakan bentuk alternatif pertambahan nilai yang merupakan inti dari usaha tani (walaupun pertanian ini mungkin menghasilkan nilai-tukar berbasis pasar, namun kini syarat-syaratnya ditentukan oleh petani sendiri).

Kedaulatan Pangan

Bisa dikatakan, "modal ekologis" sejalan dengan "kedaulatan pangan". Karena menggunakan bahasa konvensional, kedua istilah ini terkesan problematis. "Kedaulatan pangan" adalah bentuk strategi politik bernuansa esensialisme, yang menggunakan idiom 'kedaulatan' untuk mendapatkan kembali dalam jangka pendek basis yuridis yang telah hilang, namun

merumuskan ulang makna istilah itu dalam jangka panjang (McMichael 2006). Hal yang sama bisa berlaku bagi istilah "modal ekologis". Artinya, masing-masing konsep ini mengangkat ketegangan yang terjadi dalam kapital sebagai isu politik, yakni arena ketegangan perihal bagaimana nilai dipahami, dengan menawarkan pemahaman lebih kokoh tentang "nilai guna" yang menggarisbawahi pentingnya reproduksi ekologi dan budaya (ketimbang kapital). Singkatnya, konsep "pembentukan kembali kaum tani" ala van der Ploeg menyarankan sebuah teori sosial tentang suatu kebangkitan, yang berlangsung bersamaan dengan politik kedaulatan pangan yang membebaskan, yang dipicu oleh kondisi-kondisi pemiskinan (material dan epistemik) di bawah proyek neoliberal (McMichael 2008).

Ketika meletakkan "penambahan nilai" dan "modal ekologis" secara berdampingan, van der Ploeg menunjukkan sifat cair dan tumpang-tindih tiga tipe usaha tani yang ia kategorikan (pertanian ala kaum tani, pertanian wirausaha, dan pertanian kapitalis). Dalam ranah praktis, ini memungkinkan terjadinya mutasi (dan saling memengaruhi) antara tipe-tipe tersebut, khususnya antara pertanian ala kaum tani dan pertanian wirausaha. Penelitiannya menempatkan "kaum tani" dalam ruang/waktu yang agak spesifik. Semakin penting posisi "modal ekologis", di mana keluarga petani mampu mengelola sumberdaya di luar dan dalam usaha tani dan posisinya menjadi stabil secara material, semakin besar pula kemungkinan emansipasi dan dampak dari sistem pertanian ala kaum tani secara sosial-politik—berikut konsekuensi-konsekuensinya terhadap pembangunan. Setidaknya di Eropa, bila pertanian kaum tani "dengan mudah dikembangkan sebagai pertanian beraneka guna … pertanian wirausaha akan jauh lebih sulit melakukan hal serupa … akan dibutuhkan penciptaan lapangan kerja dan tingkat upah yang tinggi di wilayah pedesaan baru

Uni Eropa yang tengah membesar …. Pembentukan kembali kaum tani akan terjadi sebagai suatu kebutuhan material (jika belum demikian)" (van der Ploeg 2009: 285). Jaringan serikat tani Eropa Coordination Paysanne Européene (2003) menegaskan, "mempertahankan jumlah orang yang bekerja di sektor pertanian bukan pertanda 'keterbelakangan' ekonomi, melainkan suatu nilai tambah."

Dalam pengertian yang lebih visioner, penggunaan istilah "modal ekologis" menegaskan pentingnya penilaian ulang atas masalah agraria kontemporer. Dengan demikian:

> Dalam hal ini, permulaan abad XXI menampakkan suatu patahan yang jelas: tanah kembali menjadi isu utama. Ini jelas terlihat dari bagaimana tanah kembali menjadi objek perjuangan kaum tani … juga objek "pencaplokan lahan besar-besaran" …. Lebih daripada itu, posisi penting tanah juga tampak dari fakta bahwa tanah kini dilihat sebagai modal ekologis. Usaha tani sekali lagi dipahami, dan dipraktikkan, sebagai produksi-bersama: interaksi dan saling mengubah antara manusia dan alam-hidup. Usaha tani tidak hanya bersandar pada "pertukaran ekonomis", tetapi juga pada "pertukaran ekologis". (van der Ploeg 2010: 4)

Intinya, kalau para produsen menjalankan pertaniannya dengan prinsip "pertukaran ekologis", maka "pertukaran ekonomis" yang mengikutinya kemungkinan hanya akan berlangsung dalam pasar lokal dan regional, dan dengan begitu menempatkan agroekologi dan reorientasi nilai nonpasar pada posisi sangat penting.

Penilaian ulang (*revaluation*) di sini bermaksud bahwa pertarungan penting yang kini berlangsung di dalam masalah agraria memiliki keterkaitan dengan kedaulatan atas ta-

nah (Borras dan Franco 2012). Bagi kaum tani abad XXI yang sedang bangkit, pertarungannya tidak hanya mengamankan kepemilikan tanah, tetapi juga kembali menguasainya (melalui pemulihan hayati dan praktik-praktik pertanian ekologis yang mengembalikan kesuburan tanah) agar sumberdaya yang ada dibangun dan dipahami sebagai "modal ekologis". Semua ini bertujuan untuk memulihkan hak-hak (termasuk hak-hak perempuan) atas tanah, menjamin identitas teritorial/kultural (bandingkan Escobar 2008), juga untuk meneguhkan kembali kedaulatan pangan. Perebutan-kembali (reklaim) tanah meliputi upaya mengamankan konsepsi baru tentang "kewargaan agraria" (*agrarian citizenship*) (Wittman 2009), suatu usulan yang diajukan oleh MST Brasil dalam upaya meninjau ulang posisi tenaga kerja pertanian dalam politik ketubuhan (kewarganegaraan tidak dipahami melulu dalam bias urban), serta menjadikan pemeliharaan lingkungan (*environment stewardship*) bagian dari pemahaman kolektif tentang kewarganegaraan.

Bentuk reklaim tanah politis seperti itu, yang dimaknai sebagai "kedaulatan atas tanah", menggabungan reaksi "kaum tani baru" akan otonomi dengan mobilisasi kaum tani dan tunakisma, sebagai bentuk politik emansipatoris dalam gerakan kedaulatan pangan (Desmarais 2007, Borras 2004). Emansipasi yang ingin dicapai di sini adalah pembebasan dari relasi-relasi nilai neoliberal yang kian mendalam, yang menggiring dan menyingkirkan produsen kecil serta merusak ekosistem. Kedaulatan tidak hanya bermakna hak untuk berproduksi, tetapi juga untuk mengontrol produksi, dan kedaulatan pangan "adalah suatu prinsip dan gaya hidup etis yang tidak berkorelasi dengan denifisi akademis melainkan muncul dari proses kolektif dan partisipatif" (Stedile dan de Carvalho 2011: 25; lihat juga Patel 2009).

Pada titik ini, pertanyaan perihal hak menjadi sangat penting secara moral maupun politis. IAASTD memandang kedaulatan pangan sebagai "suatu upaya moral yang bertolakbelakang dengan proses ekonomi globalisasi yang digerakkan pasar," suatu upaya merebut kekuasaan dari kendali korporat/saintifik agar kekuatan rakyat sendiri melakukan "produksi pengetahuan sosial dan ekologis" (dikutip dalam Ishii-Eitemann 2009: 691). Sebagaimana dicatat Sofia Monsalfe (2012: 13): "umum diketahui bahwa WTO dan rezim perlindungan investasi internasional punya kuasa atas mekanisme sanksi, sementara sistem milik lembaga HAM UN (UNCHR) tidak memilikinya. Selain itu, rezim hukum perdagangan dan investasi masih belum menerima supremasi hukum HAM internasional."

Secara konkret, menurut Deklarasi Nyéléni (2007), kedaulatan pangan adalah "hak rakyat atas pangan sehat dan layak secara kultural, yang diproduksi melalui metode-metode yang benar secara ekologis dan berkelanjutan, juga hak untuk merumuskan sistem pangan dan pertanian mereka sendiri" (2009: 673). Sembari berjuang untuk Konvensi Internasional Hak-Hak Petani, yang meliputi petani, tunakisma, dan masyarakat adat yang menggarap lahan, Vía Campesina mengakui bahwa nama "Vía Campesina" berarti "*proses* budaya petani, 'jalan' petani." Paul Nicholson (2009: 678–680), seorang anggota pendiri La Vía Campesina, menambahkan:

> Debatnya bukan pada istilah "pengusaha tani" (*farmer*) atau "petani" (*peasant*). Debatnya lebih tentang proses kohesi .... Suatu proses akumulasi kekuatan dan fakta-fakta yang terhimpun dari warga di seluruh planet Bumi. Kedaulatan pangan bukan sekadar perlawanan, sebagaimana ribuan perlawanan yang ada, melainkan sekaligus usulan yang mengemuka dari gerakan-gerakan sosial, dan tidak terba-

> tas pada gerakan petani. Dari gerakan-gerakan lingkungan, misalnya, muncul banyak inisiatif untuk menyusun rancangan mengenai pemulihan hak-hak maupun kebijakan-kebijakan. Prosesnya berlangsung secara otonom dan independen. Tidak ada komite pusat, dan kedaulatan pangan bukanlah warisan organisasi apa pun. Ini bukan proyek La Vía Campesina, bahkan bukan juga proyek kaum tani saja. Ini adalah suatu prakarsa strategis, berdasarkan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan-tujuan jelas, yang datang dari gerakan-gerakan sosial, bukan dari institusi atau organisasi tertentu. Ini dibangun dari tingkat lokal, dan kami akan terus menghimpun kekuatan menuju terbentuknya gerakan nasional dan ekspresi internasional.

Singkatnya, kedaulatan pangan adalah suatu gerakan peradaban, yang menggabungkan dua hal: kritik atas konsep "keamanan pangan" neoliberal (sebagai permainan kuasa korporat dan siasat penuh percaya diri dalam menganggap ekspor pertanian identik dengan "memberi makan dunia"), dan prinsip-prinsip bersifat jangka panjang tentang 'penentuan nasib sendiri' yang dirumuskan kembali sebagai hak demokratis bagi dan milik warga dan umat manusia. Etika inti—pangan sebagai hak, bukan komoditas—adalah ekspresi kontemporer dari upaya menjadikan "keamanan pangan" sebagai isu politis. Pada saat bersamaan, kedaulatan pangan menantang rezim pangan kapital secara umum, sebagai sebuah rezim yang mewujud sebagai struktur yang menundukkan keragaman nilai-guna di bawah kendali tata politik yang berorientasi pada nilai-tukar, yang dalam prosesnya menciptakan "rezim kelaparan".

Gerakan kedaulatan pangan semakin matang dengan makin kuatnya komitmen terhadap pertanian agroekologis.

Miguel Altieri mendefinisikan agroekologi sebagai suatu ilmu pengetahuan dan serangkaian praktik yang khas di tiap-tiap tempat. Prinsip intinya adalah "mendaur ulang unsur hara dan energi di ladang, ketimbang mengenalkan input dari luar; menguatkan unsur hara tanah dan aktivitas biologis tanah; mendiversifikasi spesies tanaman dan sumber genetik dalam pertanian agroekosistem sepanjang ruang dan waktu; memadukan tanaman dan ternak serta mengoptimalkan interaksi dan produktivitas usaha pertanian sebagai sistem yang menyeluruh, ketimbang produktivitas berbasis hasil dari masing-masing spesies" (Altieri dan Toledo 2011: 588).

Sejumlah kajian menyimpulkan bahwa panenan pertanian organik/agroekologis (versus pertanian nonorganik) cukup untuk memenuhi rata-rata konsumsi kalori harian di seluruh dunia saat ini (Pretty dan Hine 2001; Pretty, Morison, dan Hine 2003; Badgley *et al*. 2007). Jules Pretty *et al*. (2006) membandingkan 286 proyek di atas 37 juta hektare lahan di 57 negara Selatan, dan menemukan bahwa teknik-teknik agroekologi meningkatkan produktivitas tanaman rata-rata 79% di lebih dari 12 juta ladang, ditambah perbaikan daya dukung lingkungan secara luas. Catherine Badgley *et al*. (2007) meneliti 293 kasus berdasarkan data global, dan menemukan bahwa pertanian organik di negara-negara Utara rata-rata menghasilkan panenan sebesar 92% dari seluruh panenan pertanian konvensional, tetapi di negara-negara Selatan pertanian organik menghasilkan 80% *lebih banyak* panenan daripada pertanian konvensional. Lebih jauh, mereka menemukan bahwa pangan yang cukup dapat diproduksi secara organik untuk memberi makan dunia, bahkan tanpa menambah luasan lahan, dan bahwa tanaman pelindung jenis polong-polongan dapat memastikan kecukupan nitrogen untuk menggantikan penggunaan pupuk sintetis

yang berlangsung saat ini (yang karena digunakan secara berlebihan telah memperburuk kesehatan tanah).

Kuba menawarkan contoh yang layak menjadi panutan, setelah kehilangan akses atas impor minyak bumi, agrokimia, dan peralatan mesin pertanian menyusul jatuhnya Uni Soviet pada 1990. Pertanian Kuba bertahan dari krisis ini dengan mengembangkan pertanian organik, kebun-kebun kota, pembajakan tanah menggunakan ternak, dan pengendalian hama secara hayati. Sebuah penelitian terkini menemukan bahwa dalam waktu kurang dari satu dekade, berbeda-beda di tiap wilayah, 46%–72% lahan petani kecil menjalankan praktik-praktik agroekologi, memproduksi 60% sayur, jagung, kacang-kacangan, buah, dan babi yang dikonsumsi di negara-pulau itu. Menyusul Badai Ike pada 2008, ditemukan bahwa tingkat kerusakan lahan-lahan agroekologis hanya sebesar 50%, sementara kerusakan pertanian monokultur mencapai 90%–100%. Lahan-lahan agroekologis pulih lebih cepat, dan sekitar 80% dari lahan itu sudah berproduksi kembali hanya 40 hari setelah badai menerpa (Altieri dan Toledo 2011). Di sebuah negeri dengan 75% penduduk tinggal di kota, pertanian-kota di Kuba sangat kokoh: memanfaatkan sekitar 35.000 hektare lahan di Havana dan sekitarnya. Pertanian ini menyumbang 60%–90% hasil pangan yang dikonsumsi di kota tersebut (Ergas 2013: 48).

Deretan kajian dan contoh mengenai suksesnya eksperimen pertanian ekologis yang terus bertambah, termasuk wanatani (*agro-forestry*) (lihat, misalnya, De Schutter 2011; Lin *et al*. 2011), menegaskan "prinsip teguh bahwa perlindungan atas kawasan-kawasan alami akan berhasil dalam jangka panjang hanya ketika kawasan-kawasan itu menjadi bagian tak terpisahkan dari … ekonomi yang memberi ruang lebih besar bagi keanekaragaman ekonomi, daya lenting, keamanan, dan partisipasi poli-

tik. Satu caranya yang utama ... adalah mengawinkan pertanian produktif dengan konservasi" (Perfecto *et al*. 2009: 124). Prinsip ini, sangat penting bagi cita-cita praktis kedaulatan pangan, telah disuarakan oleh Pelapor HAM untuk UN Olivier De Schutter (2011) di hadapan komisi UN untuk HAM (UNCHR): "Pertanian secara mendasar mesti diarahkan kembali ke corak produksi yang lebih berkelanjutan dan adil secara sosial ... [Agroekologi] membantu para petani kecil yang pasti bisa mempraktikkan pertanian yang biayanya lebih murah tetapi lebih produktif. Pertanian seperti itu menguntungkan kita semua karena memperlambat pemanasan global dan kehancuran ekologis."

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa usaha tani skala kecil lebih ramah iklim, karena memelihara tanah dengan pupuk organik yang mampu menyerap dan menyimpan karbon lebih efektif ketimbang pertanian industrial. Dengan demikian, "mengubah 10.000 unit usaha tani berukuran kecil dan menengah menjadi lahan produksi organik akan menyerap karbon ke dalam tanah, yang setara dengan melenyapkan 1.744.400 unit mobil dari jalanan" (Altieri 2011). Bagi gerakan kedaulatan pangan, lahan tidak dilihat dari lensa komoditas melainkan dari lensa ekologis, budaya, dan/atau keanekagunaan, sebuah lensa yang mendukung pertanian agroekologi yang (nisbi) padat karya dan rendah input. Berbasis prinsip mendasar inilah gerakan perlawanan terhadap rezim pangan mengalami penguatan, dengan Komite Perencanaan Internasional untuk Kedaulatan Pangan (International Planning Committee for Food Sovereignty [IPC]) menegaskan bahwa kaum tani dunia memberi makan dunia sembari membuat bumi tetap sejuk.

Perluasan Skala

Tentu gerakan kedaulatan pangan masih harus menempuh jalan panjang, khususnya dalam membangun aliansi (Rose 2012). Tetapi ruang telah memampatkan waktu sedemikian rupa, seiring memburuknya ekosistem bumi dan kian intensifnya pencaplokan lahan, sehingga mempercepat pembentukan jejaring pangan alternatif dan aliansi-aliansi strategis di Selatan maupun Utara (Holt-Giménéz dan Patel 2009; Holt-Giménez 2011; Borras, Edelman, dan Kay 2008; Andrée *et al.* 2013). Sementara itu, sebagaimana diklaim Nora McKeon (2011: 265), "pertama kalinya dalam sejarah, komunitas internasional telah membentuk sebuah forum global untuk membahas kebijakan terkait isu-isu pangan di mana gerakan rakyat dapat mempertahankan usulan-usulan strategis mereka."

Terlepas dari ketaktegasan posisi FAO dalam hal pencaplokan lahan berskala besar, dan dukungannya terhadap benih transgenik dan Aliansi untuk Revolusi Hijau di Afrika (Alliance for a Green Revolution in Africa [AGRA]), gerakan sosial telah mampu memperkuat IPC untuk Kedaulatan Pangan dalam rangka mengusung isu ini agar dibahas oleh "kementerian pertanian" dalam sistem UN, sebagai suatu forum kebijakan antarpemerintah yang merupakan alternatif bagi lembaga-lembaga Bretton Woods dan WTO (Nora McKeon 2011: 265). IPC telah memfasilitasi keikutsertaan lebih dari 2.000 perwakilan organisasi produsen kecil di forum-forum kebijakan FAO, dan dengan berlangsungnya krisis pangan 2007–2008, sebuah celah telah terbuka dalam "praktik kepengaturan internasional" mengingat "terlihat jelasnya kekosongan kebijakan global" (Nora McKeon 2011: 266) dan bukti nyata "mandeknya pasar-tanpa-kontrol" (Wilson 2010: 8). Guncangan akibat krisis pangan dunia telah mengembalikan perhatian pada isu-isu keamanan

pangan, yang tercermin dalam slogan baru World Bank "pertanian untuk pembangunan," dan memperbaharui komitmen terkait kelaparan dunia dan penanganannya. Penanganan kelaparan dunia kemudian menjadi isu pokok reformasi FAO, khususnya Komite Keamanan Pangan Dunia (Committee on World Food Security [CFS]) yang telah dikonsolidasikan pada November 2009. Selain merevitalisasi struktur satu-negara-satu-suara diperkuat, posisi penting organisasi-organisasi masyarakat sipil juga diakui oleh negara-negara anggota dalam reformasi dan rencana tindak lanjut (Duncan dan Barling 2012). IPC untuk Kedaulatan Pangan berperan penting dalam memastikan bahwa Hak atas Pangan dijadikan tujuan utama, dan menggeser pusat perhatian para peserta dari lembaga-lembaga keuangan internasional ke organisasi masyarakat sipil yang mewakili ragam pemangku kepentingan kunci termasuk petani skala kecil, nelayan, penggembala ternak, tunakisma, kaum miskin kota, pekerja pertanian dan pangan, perempuan, kaum muda, konsumen, masyarakat adat, dan ORNOP-ORNOP terkait (Wilson 2010: 20).

Reformasi di tubuh CFS-nya FAO membuka kemungkinan untuk meletakkan mandat baru pada rezim dagang di bawah WTO agar membangun suatu tatanan sistem pangan global yang mampu mendukung seruan Pelapor HAM UN mengenai pentingnya langkah-langkah mempromosikan keamanan pangan dalam negeri, yang berbasis pertanian skala kecil (agroekologis). Dengan demikian CFS "memungkinkan partisipasi para aktor nonnegara pada tingkat dan kualitas yang belum pernah ada sebelumnya, dengan perhatian khusus pada organisasi-organisasi yang mewakili produsen pangan skala kecil dan konsumen miskin kota … [serta mengakui] hak organisasi masyarakat sipil untuk secara otonom membentuk suatu mekanisme global guna memfasilitasi partisipasi me-

reka dalam CFS" (McKeon 2011: 15). Meskipun intervensi CFS masih lemah, jelas bahwa guncangan harga pangan dunia (yang berlangsung terus-menerus bagi penduduk rentan) telah menimbulkan pergeseran dalam perimbangan kekuatan moral, sebab institusi-institusi neoliberal telah dilemahkan dan kepentingan mayoritas para produsen pangan skala kecil setidaknya menemukan suara mereka terlembagakan dalam FAO. Efeknya, situasi ini menguatkan klaim untuk memapankan langkah-langkah yang bertujuan mencapai keamanan pangan dalam negeri, juga untuk meneruskan politik kedaulatan pangan.

Sementara itu, setidaknya dua lusin negara telah mengakui hak atas pangan, dengan setengah lusin (Ekuador, Venezuela, Bolivia, Nepal, Mali, dan Senegal) memasukkan kedaulatan pangan dalam perundang-undangan—hal ini menyiratkan berlangsungnya pergeseran normatif (dan epistemik) (Rose 2012: 174). Di Ekuador misalnya, Undang-Undang Pokok, yang diberlakukan berkat tekanan politik Konfederasi Masyarakat Adat Ekuador, merumuskan cita-cita kedaulatan pangan sebagai berikut: kemandirian pangan nasional dan pengurangan ketergantungan pangan; mengutamakan dan mendukung pertanian dan nelayan kecil; mempromosikan keanekagunaan, reforma agraria redistributif, dan pembangunan desa; menerapkan cara-cara organik dan agroekologi guna melindungi keanekaragaman hayati; meningkatkan kesehatan masyarakat dalam sistem pangan; memangkas rantai pangan; melindungi pengetahuan tradisional; serta melarang benih transgenik (Rose 2012: 175–176). Di Venezuela, langkah-langkah menuju kedaulatan pangan telah diterapkan, melalui redistribusi tanah, perluasan kredit pedesaan dan bantuan-bantuan teknis, jaringan distribusi untuk petani dan nelayan kecil, program nasional (penyediaan) makan siang di sekolah, dapur komunitas untuk

orang miskin, pencapaian kemandirian bahan pangan pokok pada 2008, dan nyaris mandiri dalam hal protein hewani (Schiavoni dan Camacaro 2009).

Tentu saja inisiatif-inisiatif seperti ini tidak berlangsung singkat karena dalam perkembangannya kadang terdapat hambatan dan dibutuhkan pembaharuan-pembaharuan. Banyak hal juga yang dilakukan di wilayah perkotaan, yang bergerak dari kawasan-kawasan di perkotaan menuju jaringan pedesaan. Sebagaimana dicatat Terry Marsden (2012: 271), di Inggris "kebanyakan kota besar kini punya semacam 'strategi pangan'—baik yang dibentuk di seputar kesepakatan tentang pangan (Brighton), dewan-dewan pangan (Bristol), atau pengembangan bermacam-macam simpul atau badan perwalian pangan (Plymouth, Exeter Stroud)." Harriet Friedmann, salah seorang penggerak utama Dewan Kebijakan Pangan Toronto (Toronto Food Policy Council), mencatat:

> Bagi saya, komunitas praktisi pangan Toronto mencakup lebih dari sekadar jaringan antarindividu, dan lebih dari sekadar wujud kemampuan teknis mengakses sumberdaya-sumberdaya kelembagaan. Komunitas ini juga menjadi bagian dari peran tertentu sebuah badan pemerintahan kota, yaitu Dewan Kebijakan Pangan Toronto, dan bagian dari sebuah jaringan yang cukup hidup dari ORNOP keamanan pangan, khususnya yang terbesar, FoodShare. Organisasi-organisasi ini telah menyediakan berbagai sumberdaya strategis, juga peluang-peluang untuk melakukan eksperimen dan belajar dari eksperimen pihak lain, kepada beragam orang yang bersentuhan dengan mereka, biasanya dengan mewariskan proyek-proyek dan gagasan baru. Institusi-institusi ini memiliki keunikan tersendiri dalam merajut banyak sekali inisiatif dari atas maupun dari bawah yang la-

> hir dan berkembang dengan melibatkan banyak "sektor"—publik, sukarela (ORNOP), dan pasar. (2010: 68)

Namun Friedmann membedakan "perluasan skala" (*scaling up*) dengan "keniscayaan pertumbuhan" (*growth imperative*), juga mencatat bahwa di daerah sekitarnya, Golden Horseshoe, "petani dan lahan pertanian sedang berkurang, tetapi Greenbelt dan banyak inisiatif lain tengah bekerja untuk memperbaharui petani dan menyelematkan lahan pertanian. Para konsumen pangan tidak setara dan tidak sehat pada usia muda, dan jumlahnya sedang meningkat. Kondisi ini menghadirkan tantangan besar ... kedaulatan pangan telah menjadi kerangka bagi banyak pihak" (2011: 185–186). Membangun lanskap kedaulatan pangan sama sekali bukan proses yang linear, melainkan inspirasi yang mengalir tanpa henti dari generasi baru para produsen, warga, dan konsumen, juga dari kian meluasnya pengakuan bahwa rezim pangan korporat melakukan tindakan kekerasan (dalam arti sebenarnya).

Kesimpulan

Membongkar secara politis penundukan epistemik terhadap relasi nilai dalam rezim pangan membuka kemungkinan akan nilai-nilai alternatif. Bab terakhir ini menilai bahwa hal itu telah dilakukan oleh petani kecil atau gerakan kedaulatan pangan berkat pengalaman mereka hidup bersama nilai-tukar. Krisis agraria pada awal 1990-an menjadi momen penting bagi mobilisasi internasional untuk menyingkap relasi kuasa dan ilusi dalam jargon "keamanan pangan". Setelah menegaskan bahwa pasar neoliberal bukan sesuatu yang alamiah, gerakan kedaulatan pangan berkembang dan membesar menjadi praktik-praktik yang menjalankan, memulihkan, dan

mengembangkan nilai-nilai yang mendukung relasi-relasi yang positif dalam reproduksi sosial dan ekologis, sebagai tandingan terhadap kecenderungan pemiskinan reproduksi di bawah kapitalisme.

Maka bisa dikatakan bahwa rezim pangan korporat melahirkan suatu kontradiksi: ketegangan antara alur berpikir abstrak dalam industrialisasi pertanian (produk pangan/bahan bakar "dari antah-berantah") dan bentuk-bentuk pertanian agroekologis berbasis ruang ("pangan dari tempat tertentu") yang dukung oleh politik kedaulatan pangan—suatu politik modernitas yang muncul dari moral ekoekonomi global. Artinya, gerakan kedaulatan pangan merupakan reaksi terhadap proyek neoliberal, sekaligus sebuah ontologi politik alternatif dan formatif, suatu gerakan yang mengembangkan nilai-nilai yang bertolakbelakang dengan kapital yang cenderung melipatgandakan diri dengan segala cara. Gerakan ini merupakan wujud jelas dari tuntutan lama akan kedaulatan di tengah situasi parahnya kerusakan syarat-syarat yang dibutuhkan bagi akumulasi kapital, seiring status ekologis yang mengharuskan dihentikannya perambahan kawasan-kawasan rintisan, pada saat pencaplokan lahan secara besar-besaran mencapai batas-batasnya dengan penuh keputusasaan.

Orang mungkin bisa menganggap bahwa rezim pangan secara umum telah berhasil mengekang dan melunakkan perlawanan terhadapnya selama ini—bedanya sekarang adalah bahwa rezim pangan telah menjadi benar-benar mendunia, semakin menyesakkan ruang, dan karenanya menjadi ladang subur bagi lahirnya sederet cita-cita yang bisa diwujudkan. Ini merupakan transisi ontologis jangka panjang, di mana kekerasan yang melekat pada abstraksi (nilai) ditantang oleh konsep-konsep baru seperti keanekagunaan, kedaulatan pangan, dan kewargaan agraria, serta praktik-praktik baru yang ber-

upaya memperlambat laju dan mengatasi darurat lingkungan dan sosial yang sedang melanda dunia.

Catatan

GLOSARIUM

Agroekologi atau **Pertanian ekologis** (*agro-ecology*)

Ilmu pengetahuan dan praktik bercocok tanam, yang diarahkan untuk mendaur ulang unsur hara dan energi di atas lahan secara langsung tanpa rekayasa (*on-farm*), dengan mengolah tanah agar tetap subur, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mengoptimalkan peningkatan produktivitas usaha tani sebagai suatu sistem terpadu, daripada sebagai kepingan-kepingan unsur alam yang terpisah-pisah.

Bahan bakar nabati (*agro-fuel*)

Merujuk pada bahan bakar yang dibuat dari bahan dasar tanaman industri (jagung, sawit, kedelai, jarak, tebu); tanaman-tanaman ini biasanya dibudidayakan di lahan hutan, yang dengan demikian menggusur keberadaan tanaman pangan.

Bank for International Settlements (BIS)

Bank yang mengoordinasikan regulasi keuangan dan kerjasama bank-bank sentral, dan berperan sebagai bankir penjamin terakhir.

Bioekonomi

Ekonomi berbasis proses-proses hayati, yaitu usaha meningkatkan penggunaan pakan ternak yang berasal dari tanaman untuk menggantikan komoditas industri berbasis minyak bumi (plastik, bahan bakar minyak, dsb.).

City of London

Distrik pusat keuangan di Kota London, yang beroperasi sebagai simpul transaksi keuangan internasional dan pemberesan neraca perdagangan.

***Committee on World Food Security* (CFS)**

'Komite Keamanan Pangan Dunia', organisasi kunci dalam FAO yang melakukan monitor dan membahas berbagai macam isu keamanan pangan, yang kini menerima masukan dari organisasi masyarakat sipil dengan status resmi, selain dari anggota perwakilan negara.

Dagingisasi (*meatification*)

Intensifikasi atau penggenjotan konsumsi daging, yang dibarengi konsentrasi dan pemusatan produksi ternak, dengan mengandalkan proses penyempitan landasan genetik.

Deagrarianisasi (*de-agrarianization*)

Proses menyusutnya jumlah penduduk pedesaan karena petani atau anggota keluarga tani berpindah ke pusat-pusat perkotaan.

Dekomodifikasi (*de-commodification*)

Tindakan mengurangi ketergantungan usaha tani pada input atau asupan komersial dari luar, dengan cara memperbaiki kekayaan ekologis di lahan.

Ekologi global (*global Ecology*)

Upaya rasionalisasi secara mendikte (*top down*) dari proyek-proyek perlindungan lingkungan global (keanekaragaman hayati, pengurangan polusi, kesehatan laut, 'pertanian cerdas iklim') demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ekologi-politik (*political ecology*)

Upaya menjadikan relasi-relasi ekologis sebagai isu politik.

Ekspor nontradisional (*non-traditional exports*)

Ekspor produk pertanian dari negara-negara Selatan yang menggantikan atau melengkapi ekspor komoditas budidaya dari kawasan beriklim tropis (misalnya singkong, unggas, sayuran).

Elitisme buruh (*aristocracy of labor*)

Bagian dari kelas pekerja perkotaan yang punya posisi istimewa di dalam sistem ekonomi penjajahan yang mengeksploitasi tenaga kerja kasar di seberang lautan maupun di dalam negeri.

Fetisisme komoditas (*commodity fetishism*)

Menjadikan relasi-relasi komoditas (pertukaran di dalam pasar) melulu sebagai pertukaran barang tanpa mememdulikan orang yang terlibat/terdampak dalam proses produksinya, dengan menutup-nutupi kenyataan relasi-relasi sosial dan ekologis tentang bagaimana sesungguhnya komoditas diproduksi.

Finansialisasi (*financialization*)

Proses akumulasi kapital melalui transaksi-transaksi keuangan, baik dalam jasa keuangan, sekuritas, spekulasi, maupun dalam merger dan akuisisi perusahaan, daripada melalui kegiatan produksi itu sendiri.

Fortifikasi biologis (*biofortification*)

Pengayaan nutrisi (fortifikasi) tanaman budidaya melalui rekayasa genetika (misalnya Padi Emas difortifikasi dengan vitamin A dari beta-karoten buatan).

Gerakan tandingan (*counter-movement*)

Aksi perlawanan atau oposisi spontan terhadap suatu rezim ekonomi-politik.

Hegemoni

Kemampuan untuk mendominasi melalui persetujuan (dari pihak yang lemah) kepada kepemimpinan pihak yang kuat sebagai akal bulus menutupi penindasan.

Imperium pangan (*food empire*)

Himpunan lembaga, perusahaan, dan produsen sektor pangan yang mendahulukan kepentingan akumulasi, konsentrasi, dan sentralisasi berbasis korporasi.

Intensifikasi berkelanjutan (*sustainable intensification*)

Istilah yang menjawab kebutuhan untuk mengembangkan metode bercocok tanam (baik pertanian ekologis maupun bioteknologi) yang melestarikan tanah dan alam.

Keanekagunaan (*multifunctionality*)

Merujuk pada potensi sifat multiguna dari kegiatan pertanian, dalam memproduksi pangan, menciptakan lapangan kerja, menjaga budaya bertani tetap hidup, memulihkan keanekaragaman hayati, melestarikan bentang alam, dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Kedaulatan atas tanah (*land sovereignty*)

Sebuah gerakan politik yang dibangun di atas hak-hak atas tanah, termasuk mengamankan kendali dan identitas kewilayahan, pemulihan sumberdaya hayati, dan kemandirian pangan.

Kedaulatan pangan (*food sovereignty*)

Sebuah gerakan tandingan terhadap kebijakan-kebijakan pangan neoliberal, yang secara politis mengkritisi privatisasi "keamanan pangan", dan mencanangkan visi pemanfaatan lahan dan penyediaan pangan secara demokratis.

Kepemilikan berbasis tanah (*landed property*)

Relasi-relasi kepemilikan atas tanah, dengan berbagai macam implikasi pada bentuk-bentuk produksi pertaniannya sesuai dengan sistem sosial yang berlaku.

Kesehatan masyarakat yang bersifat ekologis (*ecological public health*)

Suatu prinsip alternatif untuk pemeliharaan kesehatan yang bertumpu pada proses penggizian (*nutritionalization*) yang memproduksi pangan dengan mengedepankan metode pertanian ekologis demi menjaga kesehatan tanah dan menghasilkan pangan sehat (bebas racun dan kaya gizi).

Kesepakatan Pertanian (*Agreement on Agriculture* [AoA])

'Kesepakatan dagang global perihal produk pertanian', sebuah protokol dari WTO mengenai liberalisasi perdagangan produksi pertanian dan pengurangan proteksi produksi pertanian.

Ketergantungan pangan (*food dependency*)

Ketergantungan suatu negera pada impor bahan pangan, acap kali dengan mengorbankan sistem pangan lokal.

Kewargaan agraria (*agrarian citizenship*)

Praktik dan visi mengenai kedaulatan pangan berbasis pemeliharaan tanah, yang memproduksi pangan untuk sesama warga serta memaknai kembali nilai pertanian di zaman modern.

Latifundia

Perkebunan skala besar atau hamparan lahan pertanian/peternakan (*estate*) yang, dalam sejarah kolonial, diperkenalkan oleh para pemukim asing dari Jasirah Iberia (penjajah Spanyol dan Portugis) di Dunia Baru (Benua Amerika), yang pengerjaannya mengandalkan tenaga pribumi atau kerja paksa.

Liberalisasi

Penundukan lembaga-lembaga, dari kuasa negara ke kuasa pasar, ke deregulasi perdagangan dan kebijakan ekonomi, serta privatisasi (swastanisasi) aset-aset publik.

Logika pikir (*episteme*)

Suatu pendekatan terhadap pengetahuan akan dunia, yang bersandar pada inti serangkaian asumsi yang muncul sebagai anggapan umum (*common sense*).

Makanan awet (*durable food*)

Makanan yang diolah secara industrial dengan kadar minyak, lemak, dan gula yang tinggi, hingga mampu bertahan lama.

Masalah agraria (*agrarian question*)

Teori klasik tentang transformasi struktural pertanian sebagai akibat sistem kapitalisme, dan tentang nasib buruk kaum tani secara ekonomi-politik.

Masalah petani (*peasant question*)

Bagian dari masalah agraria, yang terfokus pada nasib kaum tani, acap kali digambarkan sebagai suatu diferensiasi sosio-ekonomi (misalnya, luas penguasaan tanah) atau keterbelahan belaka (transformasi kelas).

Merkantilisme keamanan pertanian (*agro-security mercantilism*)

Kecenderungan baru dari negara-negara kawasan (Timur Tengah dan Asia Timur) untuk mengerahkan dana-dana investasi pemerintah dan dukungan keuangan bagi usaha-usaha pengusaan lahan di negara-negara lain guna menyediakan pangan bagi negera-negara asal modal itu, tanpa melalui mekanisme perdagangan.

Modal ekologis (*ecological capital*)

Merujuk pada daya-lenting/kekayaan proses dan daur ekologis.

Monokultur

Pengkhususan produksi tanaman berjenis tunggal.

Negara-Negara Pertanian Baru (*New Agricultural Countries*)

Negara-negara Dunia Ketiga yang muncul sebagai pengekspor hasil pertanian yang layak diperhitungkan sejak era 1980-an dan seterusnya—mereka menjadi tandingan bagi Negara-Negara Industri Baru (*Newly Industrialized Countries*).

Neoliberalisme

Kebijakan ideologis yang mengasumsikan efisiensi pasar dan produktivitas bisa dicapai melalui privatisasi yang memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, dengan menggulung peran negara dan menghapus kontrak-kontrak tenaga kerja serta perlindungan lingkungan sebagai konsekuensi logisnya.

Nutrisionisme (*nutritionism*)

Penerapan ilmu gizi pada kasus kurang gizi yang muncul dalam sistem pangan industrial, yang mengabaikan arti penting unsur hara mikro dalam tanah dan keanekaragaman makanan.

Ontologi

Tatanan tersirat tentang dunia dan penghuninya.

Pabrik Dunia (*Workshop of the World*)

Pusat pabrik bagi perdagangan internasional. Inggris, seiring Revolusi Industri, telah menjadi pabrik-dunia pertama dengan merintis produksi pangan mereka di seberang lautan guna memberi makan kelas-kelas masyarakat industrinya yang semakin tumbuh.

Patahan metabolis (*metabolic rift*)

Penundukan pertanian di bawah relasi-relasi komoditas monokultur, di mana input pertanian (pupuk kimia, benih hibrida) menggantikan metabolisme alamiah dari daur unsur hara di dalam tanah dan air.

Pembagian kerja internasional (*international division of labor*)

Diferensiasi atau pemilahan lintas-negara atas keterampilan kerja dan bahan bagi kegiatan produksi komoditas untuk pasar dunia.

Pembangunanisme (*developmentalism*)

Suatu visi ideologis yang berusaha melumrahkan pembangunan kapitalis.

Pembentukan kembali kaum tani (*re-peasantization*)

Usaha mengurangi input komersial dalam usaha tani guna memulihkan "praktik-praktik petani kecil", berupa pertanian ekologis yang mengorganisasikan dirinya sendiri dengan tujuan membangun kembali kekayaan ekologis.

Pembentukan negara (*state building*)

Proses membentuk cengkeraman kuasa politik atas satuan teritori, atas alasan melaksanakan proyek nasional yang diorganisasikan demi pertumbuhan ekonomi dan kompetisi internasional.

Pemiskinan reproduksi (*under-reproduction*)

Pengurasan energi, gizi, atau hak upah (jatah hidup) manusia, juga penggerusan atas proses dan daur ekologis, sampai ke titik keterkurasan.

Pencaplokan lahan skala besar (*land grab*)

Pematokan/pemagaran/penutupan akses atas lahan, hutan, air, dan habitat oleh kekuasaan-kekuasaan penjajah atau penjajah-baru (negara, perusahaan, lembaga-lembaga keuangan, dan para tuan tuan tanah tetangga).

Penerabasan biofisik (*biophysical override*)

Tindakan menggantikan proses ekologis dalam pertanian dengan rekayasa kimia pertanian, yang mensyaratkan pengorbanan terus-menerus berupa hilangnya kesuburan tanah serta kontaminasi hama dan gulma.

Penerabasan nilai (*value override*)

Penundukan relasi-relasi produksi dan sosial di bawah proses komodifikasi dan harga; nilai barang dan jasa ditentukan bukan oleh relasi produksi dan sosialnya, tetapi lebih ditentukan oleh harga dan proses menjadi barang/jasa dagangan.

Penyediaan global (*global sourcing*)

Usaha mendapatkan produk atau komponen produk dari seberang lautan untuk dirakit guna dilempar ke pasar dunia.

Penyesuaian struktural (*structural adjustment*)

Kebijakan-kebijakan neoliberal yang menysaratkan negara-negara agar mengurangi belanja sektor publik dan sosial, upah, dan subsidi pertanian, serta menggenjot ekspor untuk membayar utang.

Penyusutan kaum tani (*de-peasantization*)

Proses aktif pemiskinan dan penggusuran petani berlahan sempit.

Perampasan hijau (*green grab*)

Pematokan/pemagaran lahan hunian dan hutan untuk tujuan konservasi, pariwisata alam, dan penghasil uang dengan jualan izin pengurangan karbon melalui pembukaan perkebunan tanaman pakan ternak secara industrial.

Perdagangan adil (*fair trade*)

Praktik tersertifikasi yang mencakup ongkos sosial dan lingkungan dalam penentuan harga barang dagangan, sedemikian rupa sehingga mampu memberikan ganti rugi kepada produsen maupun komunitasnya, serta mengakibatkan hubungan antara produsen dan konsumen, beserta ketentuan-ketentuan di dalamnya, semakin transparan.

Pertanian industrial atau **Agroidustri**

Industrialisasi usaha tani sebagai sektor ekonomi yang terintegrasi ke dalam tatanan-kompleks industri, yang memproduksi pangan untuk dipasok ke dalam industri pengolahan pangan berskala besar dan dijual ke pedagang besar. Produksi pangan di sini mengandalkan input berbasis industri pula (seperti benih hibrida, bahan kimia, dan mesin), serta mewujud dalam sistem pertanian tanaman sejenis (monokultur).

Pertanian kontrak (*contract farming*)

Pengusaha besar membuat kontrak dengan para petani, di mana para pengusaha besar memasok benih dan berbagai input pertanian beserta akses pasarnya, dengan imbalan para petani menjamin pasokan hasil panen kepada para pengusaha.

Rantai komoditas global (*global commodity chains*)

Hubungan dagang lintas-negara yang diorganisasikan oleh perusahaan-perusahaan transnasional yang terlibat dalam biang produksi, perakitan, dan peredaran produk-produk dunia.

Rantai nilai (*value chains*)

Penggabungan produsen ke dalam relasi-relasi pasar yang diorganisasikan dan didominasi oleh para pelaku agrobisnis yang memasok input.

Regulasi nasional (*national regulation*)

Kompromi sistem demokrasi sosial sebagai ciri khas gejala pascaperang, di mana negara-negara mengadopsi cara-cara mengatur

kegiatan ekonomi, pergerakan kapital, dan hubungan industrial antara kapital dan tenaga kerja.

Relasi nilai (*value relations*)

Suatu sudut pandang metodologis yang menekankan pentingnya relasi-relasi komoditas dalam kecenderungan dan siklus kapitalisme dunia.

Reproduksi sosial (*social reproduction*)

Proses reproduksi tenaga kerja dan kehidupan sosial, yang ciri khasnya bergantung pada relasi kerja tanpa upah dan tanpa fondasi ekologis (termasuk tanah-tanah komunal).

Revolusi hijau (*green revolution*)

Teknologi pertanian industrial untuk meningkatkan hasil panen di lahan-lahan subur, dengan benih rekayasa genetika yang mensyaratkan ketersediaan paket-paket input pertanian yang diproduksi secara industrial serta pasokan air yang berlimpah.

Revolusi Supermarket (*Supermarket Revolution*)

Meluasnya model supermarket dari negara-negara Utara ke belahan dunia Selatan dan Eropa Timur, yang menggeser pedagang-pedagang kecil dan makanan lokal.

Rezim pangan (*food regime*)

Struktur ekonomi-politik perdagangan bahan pangan internasional yang menciptakan pemilahan menu makanan menurut kelas sosial-ekonomi, seraya menggelar kuasa hegemonik.

Rezim akumulasi (*accumulation regime*)

Tata kuasa tekno-politik yang didorong oleh nafsu menumpuk kekayaan yang terkait dengan konjungtur kapitalis.

Semiproletarisasi (*semi-proletarianization*)

Merosotnya pertanian kaum tani, yang diikuti timbulnya buruh di luar sektor pertanian atau relasi-relasi usaha tani bersistem kontrak.

Sistem Bretton Woods (*Bretton Woods system*)

Rezim moneter pasca-Perang Dunia II (1944) yang bersandar pada tarif-tetap nilai-tukar dan kontrol terhadap pergerakan kapital internasional.

Sistem Dunia (*world system*)

Konsep tentang pasar-dunia yang dikendalikan oleh akumulasi kapital, yang diatur oleh suatu tatanan menurut azas tunggal pembagian kerja, yang tersusun sebagai sebuah sistem antar-negara secara berjenjang (hierarkis), mulai dari kelompok negara inti, semipinggiran, dan pinggiran, semuanya berebut sisa-sisa pasar di sekitar perusahaan-perusahaan, dan ini berlangsung menurut pembabakan cengkeraman kekuasaan (hegemoni) politik.

Standar emas (*gold standard*)

Standarisasi harga emas sebagai satuan dasar nilai untuk semua mata uang negara-negara yang berlaku dalam sistem perdagangan internasional; standar ini pertama kali digunakan oleh negara Inggris pada abad XIX, dan standar tersebut menuntut semua negara mitra dagang agar menyesuaikan neraca perdagangannya sedemikian rupa sehingga kurang lebih setara.

Struktur sosial akumulasi (*social structure of accumulation*)

Tatanan sosial seputar relasi-relasi antara produsen dan konsumen, yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan (geo)politik dan teknologis.

Tanaman serbaguna (*flex crops*)

Keadaan di mana tanaman-tanaman budidaya bisa dipertukargunakan untuk, khususnya, pangan, pakan, dan bahan bakar nabati, yang lebih mengikuti perhitungan untung rugi ketimbang perhitungan sosial.

Tanaman-tanaman ramah iklim (*climate-ready crops*)

Tanaman-tanaman hasil rekayasa biologis yang dirancang agar mampu bertahan terhadap efek-efek pemanasan global.

Tatanan kompleks industri kedelai (*soy complex*)

Industrialisasi budidaya kedelai untuk memasok industri peternakan atau bahan bakar nabati, yang dari hari ke hari semakin mempergunakan berbagai teknologi transgenik.

Tatanan kompleks industri peternakan (*livestock complex*)

(Lihat tatanan kompleks industri protein hewani).

Tatanan kompleks industri protein hewani (*animal protein complex*)

Penyatuan lintas-negara dari sumber-sumber pakan ternak dan produksi protein hewani yang terkonsentrasi (kompleks produksi daging sapi, kompleks peternakan unggas, kompleks budidaya perikanan (akuakultur).

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)

Protokol dalam WTO seputar hak atas kekayaan intelektual dalam transaksi dagang oleh perusahaan-perusahaan transnasional.

Transisi gizi (*nutrition transition*)

Peralihan dari menu makanan berbasis tanaman menuju konsumsi protein hewani, minyak dan lemak, gula dan karbohidrat olahan, serta buah-buahan dan sayuran yang dihasilkan oleh pertanian industrial.

Undang-Undang Gandum (*Corn Laws*)

Undang-undang pemerintah Inggris (1804) yang dimaksudkan untuk melindungi tuan tanah agar tetap untung dalam menghadapi serbuan impor gandum.

World Trade Organization (WTO)

Organisasi dagang dunia yang beranggotakan negara-negara, yang didirikan pada 1995 untuk mengendalikan perdagangan internasional menurut prinsip-prinsip keunggulan komparatif, di mana masing-masing negara diharapkan mengkhususkan diri pada kegiatan produksi untuk ekspor produk unggulannya.

DAFTAR PUSTAKA

ABERGEL, E.A. 2011. "Climate-ready crops and bio-capitalism: Towards a new food regime?" *International Journal of Sociology of Agriculture and Food* 18 (3): 260–274.

ACTIONAID. 2007. *We Know What We Need: South Asian Women Speak Out on Climate Change Adaptation*. Brighton (Inggris): Institute of Development Studies, Sussex University.

AGARWAL, B. 1994. *A Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia*. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.

AGLIETTA, M. 1979. *A Theory of Capitalist Regulation*. London (Inggris): New Left Books.

AJL, M. 2011. "Planet of Fields." *Jacobin* 12 (Winter).

AKRAM-LODHI, H. dan C. KAY, penyunting. 2009. *Peasants and Globalization: Political Economy, Rural Transformation and the Agrarian Question*. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Routledge.

ALBRITTON, R. 2009. *Let Them Eat Junk. How Capitalism Creates Hunger and Obesity*. Winnipeg (Kanada): Arbeiter Ring Publishing.

ALMÅS, R. dan H. CAMPBELL, penyunting. 2012. *Rethinking Policy Regimes: Food Security, Climate Change and the Future Resilience of Global Agriculture*. Research in Rural Sociology and Development 18. Bingley (Inggris): Emerald.

ALTIERI, M. 2008. "Small farms as a planetary ecological asset: Five key reasons why we should support the revitalization of small farms in the Global South." *Food First.* Tersedia di: www.foodfirst.org/en/node/2115.

___. 2010. "Scaling up Agroecological Approaches for Food Sovereignty in Latin America." Dalam *Food Sovereignty: Reconnecting Food, Nature and Community*, disunting oleh H. WITTMAN, A.A. DESMARAIS, dan N. WIEBE. Halifax (Kanada): Fernwood.

ALTIERI, M. dan V. TOLEDO. 2011. "The agroecological revolution in Latin America: Rescuing nature, ensuring food sovereignty and empowering peasants." *The Journal of Peasant Studies* 38 (3): 587–612.

AMIN, S. 1974. *Accumulation on a World Scale*. New York (Amerika Serikat): Monthly Review Press.

ANDRAE, G. dan B. BECKMAN. 1985. *The Wheat Trap: Bread and Underdevelopment in Nigeria*. London (Inggris): Zed Books.

ANGUS, I. 2008. "Food crisis. 'The greatest demonstration of the historical failure of the capitalist model'." *Global Research* 28 April.

ANSEEUW, W., E.A. WILY, L. COTULA, dan M. TAYLOR. 2011. *Land Rights and the Rush for Land*. Roma (Italia): The International Land Coalition.

APFELBAUM, S.I. dan J. KIMBLE. 2007. "A dirty, more natural way to fight climate change." *Ithaca Journal* 6 December: 9.

ARAGHI, F. 1995. "Global de-peasantization, 1945–1990." *The Sociological Quarterly* 36 (2): 337–68.

___. 2000. "The great global enclosure of our times: Peasants and the agrarian question at the end of the twentieth century." Dalam *Hungry for Profit*, disunting oleh F. MAGDOFF, J.B. FOSTER, dan F.H. BUTTEL. New York (Amerika Serikat): Monthly Review Press.

___. 2003. "Food regimes and the production of value: Some methodological issues." *The Journal of Peasant Studies* 30 (2): 337–68.

___. 2009a. "Accumulation by displacement: global enclosures, the food crisis, and the ecological contradictions of capitalism." *Review* XXXII (1): 113–46.

___. 2009b. "The Invisible Hand and the Visible Foot: Peasants, Dispossession and Globalization." Dalam *Peasants and Globalization: Political Economy, Rural Transformation and the Agrarian Question*, disunting oleh H. AKRAM-LODHI dan C. KAY. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Routledge.

ARAGHI, F. dan P. MCMICHAEL. 2006. "Regresando a lo histórico-mundial: una crítica del retroceso postmoderno en los estudios Agrarios."

Revista alasru (Asociación Latinoamericana de Sociología Rural) 3: 1–47.

ARRIGHI, G. 1990. "The three hegemonies of historical capitalism." *Review* 13 (3): 365–408.

___. 1994. *The Long Twentieth Century*. London (Inggris): Verso.

BADGLEY, C., J. MOGHTADER, E. QUINTERO, E. ZAKEM, M.J. CHAPPEL, K. AVILES-VAZQUEZ, A. SAMULON, dan I. PERFECTO. 2007. "Organic agriculture and the global food supply." *Renewable Agriculture and Food Systems* 22 (2): 86–108.

BAILEY, M. 2000. "Agricultural trade and the livelihoods of small farmers." *Oxfam GB Discussion Paper*, No. 3/00. Oxfam, GB Policy Department Oxford, Inggris: www.oxfam.ork.uk/policy/papers/ agricul- tural_trade/agric.htm.

BAKER, L.E. 2013. *Corn Meets Maize: Food Movements and Markets in Mexico*. Boulder, Colorado (Amerika Serikat): Rowman and Littlefield.

BARKIN, D. 2002. "The reconstruction of a modern Mexican peasantry." *The Journal of Peasant Studies* 30 (1): 73–90.

BARNDT, D. 1997. "Bio/cultural Diversity and Equity in Post-NAFTA Mexico (or: Tomasita Comes North While Big Mac Goes South)." Dalam *Global Justice, Global Democracy*, disunting oleh J. DRYDYK dan P. PENZ. Winnipeg/Halifax (Kanada): Fernwood.

___. 2002. *Tangled Routes. Women, Work and Globalization on the Tomato Trail*. New York (Amerika Serikat): Rowman & Littlefield.

BEHRMAN, J., R. MEINZEN-DICK, dan A. QUISUMBING. 2012. "The gender implications of large-scale land deals." *The Journal of Peasant Studies* 39 (1): 49–79.

BELLO, W. 2009. *Food Wars*. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Verso.

BELLO, W., S. CUNNINGHAM, dan B. RAU. 1994. *Dark Victory: The United States, Structural Adjustment and Global Poverty.* London (Inggris): Pluto Press.

BERLAN, J-P. 1991. "The historical roots of the present agricultural crisis." Dalam *Towards a New Political Economy of Agriculture*, disunting oleh W.H. FRIEDLAND, L. BUSCH, F.H. BUTTEL dan A. RUDY. Boulder, Colorado (Amerika Serikat): Westview Press.

BERNSTEIN, H. 2003. "Land Reform in Southern Africa in World-Historical Perspective." *Review of African Political Economy* 96: 203–226.

___. 2004. "'Changing before our very eyes': Agrarian questions and the politics of land in capitalism today." *Journal of Agrarian Change* 4 (1–2): 190–225.

___. 2006. "Is there an agrarian question in the 21st century?" *Canadian Journal of Development Studies* 27 (4): 449–460.

___. 2009. "Agrarian questions from transition to globalization." Dalam *Peasants and Globalization: Political Economy, Rural Transformation and the Agrarian Question*, disunting oleh H. AKRAM-LODHI dan C. KAY. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Routledge.

___. 2010. *Class Dynamics of Agrarian Change*. Halifax (Kanada): Fernwood.

BERTHELOT, J. 2008. "The food crisis explosion: Root causes and how to regulate them." *Kurswechsel* 3: 23–31.

___. 2009. "Agribusiness' headlong flight to agrofuels and their impact on food security." *Solidarité*. http://solidarite.asso.fr.

BEVERLEY, J. 2004. "Subaltern Resistance in Latin America: A Reply to Tom Brass." *The Journal of Peasant Studies* 31 (2): 261–275.

BEZNER KERR, R. 2005. "Informal labor and social relations in Northern Malawi: The theoretical challenges and implications of *ganyu* labor for food security." *Rural Sociology* 70 (2): 167–187.

___. 2010. "Unearthing the cultural and material struggles over seed in Malawi." Dalam *Food Sovereignty: Reconnecting Food, Nature and Community*, disunting oleh H. WITTMAN, A.A. DESMARAIS, dan N. WIEBE. Halifax (Kanada): Fernwood.

BIRCH, K., L. LEVIDOW, dan T. PAPAIOANNOU. 2010. "Sustainable capital? The neoliberalization of nature and knowledge in the European knowledge-based bio-economy." *Sustainability* 2: 2898–2918.

BISHOP, R.V., L.A. CHRISTENSEN, S. MERCIER, dan L. WITUCKI. 1990. *The World Poultry Market: Government Intervention and Multilateral Policy Reform*. Washington, DC (Amerika Serikat): USDA: Economic Research Service.

BLOCK, F.L. 1977. *The Roots of International Disorder. A Study of United States International Monetary Policy from World War II to the Present*. Berkeley (Amerika Serikat): University of California Press.

BORRAS, S.M. JR. 2003. "Questioning market-led agrarian reform: Experiences from Brazil, Colombia and South Africa." *Journal of Agrarian Change* 3 (3): 367–394.

___. 2007. *Pro-Poor Land Reform. A Critique*. Ottawa (Kanada): University of Ottawa Press.

BORRAS, S.M. JR., M. EDELMAN, dan C. KAY, penyunting. 2008. *Transnational Agrarian Movements. Confronting Globalization*. Oxford (Inggris): Wiley-Blackwell.

BORRAS, S.M. JR. dan J. FANCO. 2010. "From threat to opportunity? Problems with the idea of a 'code of conduct' for land-grabbing." *Yale Human Rights & Development L.J.* 13: 507–523.

___. 2012. "A 'Land Sovereignty' Alternative? Towards a People's Counter-Enclosure." TNI Agrarian Justice Programme Discussion Paper, Juli.

BORRAS, S.M. JR., J.C. FRANCO, S. GÓMEZ, C. KAY, dan M. SPOOR. 2012. "Land grabbing in Latin America and the Caribbean." *The Journal of Peasant Studies* 39 (3–4): 845–872.

BORRAS, S.M., C. KAY, dan E. LAHIFF, penyunting. 2008. *Market-led Agrarian Reform*. London (Inggris): Routledge.

BOVÉ, J. dan F. DUFOUR. 2001. *The World Is Not for Sale*. London (Inggris): Verso.

BRAUDEL, F. 1969. "Histoire et sciences sociales: La longue durée." Dalam *Ecrits sur l'Histoire*. Paris: Flammarion: 41–83. Diambil dari *Annales E.S.C.*, XIII, 4 (Oktober–Desember) 1958: 725–753.

BROWN, L. 2011. "The new geopolitics of food." *Foreign Policy* Mei/Juni. www.foreignpolicy.com/articles/2011/04/25/the_new_geopolitics_of_food.

BRYCESON, D. 2004. "Agrarian vista or vortex? African rural livelihood policies." *Review of African Political Economy* 102: 617–629.

BUNKER, S. dan D. O'HEARN. 1993. "Strategies of Economic Ascendants for Access to Raw Materials: A Comparison of the United States and Japan." Dalam *Pacific-Asia and the Future of the World-System*, disunting oleh R.A. PALAT. Westport, Connecticut (Amerika Serikat): Greenwood Press.

BURBACH, R. dan P. FLYNN. 1980. *Agribusiness in the Americas*. New York (Amerika Serikat): Monthly Review Press.

BURCH, D. dan G. LAWRENCE. 2009. "Towards a third food regime: Behind the transformation." *Agriculture and Human Values* 26 (4): 267–279.

BUSH, R. 2013. "Food Security and Food Sovereignty in Egypt." Dalam *Food Security in the Middle East*, disunting oleh Z. BABAR dan S. MIRGANI. London (Inggris): C. Hurst and Co. Publishers.

BYRES, T. 1996. *Capitalism from Above and Below: An Essay in Comparative Political Economy*. London (Inggris): Macmillan.

CAMMACK, P. 2003. "The governance of global capitalism: a new materialist perspective." *Historical Materialism* 11 (2): 37–59.

CAMPBELL, H. 2009. "Breaking new ground in food regime theory: Corporate environmentalism, ecological feedbacks and the 'food from somewhere' regime?" *Agriculture and Human Values* 26: 309–319.

CANAK, W. 1989. "Debt, austerity, and Latin America in the New International Division of Labor." Dalam *Lost Promises: Debt, Austerity and Development in Latin America*, disunting oleh W. CANAK. Boulder, Colorado (Amerika Serikat: Westview.

CANBY, P. 2010. "Retreat to subsistence." *The Nation* 5 Juli: 30–36.

CARLSEN, L. 2003. "The Mexican farmers' movement: Exposing the myths of free trade." *Americas Program Policy Report*. Silver City, New Mexico (Amerika Serikat): Interhemispheric Resource Center. www.americaspolicy.org.

CERNY, P. 1995. "Globalization and the changing logic of collective action." *International Organization* 49 (4): 595–625.

CLAPP, J. 2012. *Food*. Cambridge (Inggris): Polity Press.

CLAPP, J. dan D. FUCHS, penyunting. 2009. *Corporate Power in Global Agrifood Governance*. Cambridge (Amerika Serikat): MIT Press.

CLEAVER, H. 1977. "Food, famine, and the international crisis." *Zerowork* 2: 7–70.

COFFIN, H.G., T. KUSANO, A. AKAHO, K. INOUE, T. NSHIHARA, dan T. OKAMOTO. 1991. "Effects of Canadian grain industries on food and nutrition circumstances in Japan." *Journal of International Food & Agribusiness Marketing* 2 (3/4): 1–47.

COLLINS, J. 1995. "Gender and cheap labor in agriculture." Dalam *Food and Agrarian Orders in the World-Economy*, disunting oleh P. MCMICHAEL. Westport (Amerika Serikat): Greenwood Press.

COMMITTEE ON WORLD FOOD SECURITY. 2011. *Land Tenure and International Investments in Agriculture: A Report by The High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition*. Juli. Roma: Committee on World Food Security (FAO).

COTULA, L. 2012. "The international political economy of the global land rush: A critical analysis of trends, scale, geography and drivers." *The Journal of Peasant Studies* 39 (3/4): 649–680.

CORDELL, D. 2009. "A new global challenge for food security: Peak phosphorus." *The Organic Way Magazine* 2: 10–12.

CORRADO, A. 2010. "New peasantries and alternative agro-food networks: The case of Réseau Semences Paysannes." Dalam *From Community to Consumption: New and Classical Themes in Rural Sociological Research*, disunting oleh A. BONNANO, H. BAKKER, R. JUSSAUME, Y. KAWAMURA, dan M. SHUCKSMITH. Research in Rural Sociology and Development 15: 17–30. Bingley (Inggris): Emerald.

___. 2013. "The Differentiated Rurality: Migrations in rural South of Italy." Naskah tidak dipublikasikan.

CORSON, C. dan K.I. MACDONALD. 2012. "Enclosing the global commons: The convention on biological diversity and green grabbing." *The Journal of Peasant Studies* 39 (2): 263–284.

COX, R.W. 1987. *Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History*. New York (Amerika Serikat): Columbia University Press.

COORDINATION PAYSANNE EUROPÉENE (CPE). 2006. *For a Legitimate, Sustainable, and Supportive Common Agricultural Policy*. 15 November. Tersedia di www.cpefarmers.org.

CRIBB, J. 2010. *The Coming Famine: The Global Food Crisis and What We Can Do to Avoid It*. Berkeley (Amerika Serikat): University of California Press.

CUMINGS, B. 1984. "The origin and development of the Northeast Asian political economy: Industrial sectors product cycles and political consequences." *International Organization* 38 (1): 1–40.

CURRAN, S.A., A. LIPTON, A. COOKE, dan A. SCHRANK, penyunting. 2009. *The Global Governance of Food*. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Routledge.

CUTLER, A.C. 2001. "Critical reflections on the Westphalian assumptions of international law and organisation: A crisis of legitimacy." *Review of International Studies* 27 (2): 133–150.

DA VÍA, E. 2012. "Seed diversity, farmers' rights, and the politics of re-peasantization." *International Journal of Sociology of Agriculture and Food* 19 (2): 229–242.

DALY, M.T. dan M.I. LOGAN. 1989. *Brittle Rim: Finance, Business and the Pacific Region*. Ringwood (Australia): Penguin.

DANIEL, S. 2012. "Situating private equity capital in the land grab debate." *The Journal of Peasant Studies* 39 (3–4): 703–730.

DAVIS, M. 2001. *Late Victorian Holocausts: El Niño Famines and the Making of The Third World*. London (Inggris): Verso.

___. *Planet of Slums*. London (Inggris): Verso.

DAY, A. 2008. "The end of the peasant? New Rural Reconstruction in China." *Boundary* 2 (35.2): 49–73.

DDS COMMUNITY MEDIA TRUST, P.V. SATHEESH, dan M. PIMBERT. 2008. *Affirming Life and Diversity: Rural Images and Voices on Food Sovereignty in South India*. London (Inggris): IIED dan the Deccan Development Society.

DE JANVRY, A. 1981. *The Agrarian Question and Reformism in Latin America*. Baltimore (Amerika Serikat): The Johns Hopkins University Press.

DE SCHUTTER, O. 2010a. *Report to the U.N. Human Rights Council by the Special Rapporteur on the Right to Food*. New York (Amerika Serikat): United Nations General Assembly.

___. 2010b. "Responsibly destroying the world's peasantry." 4 Juni. http://farmlandgrab.org/13528.

___. 2012. *Submission to the Consultation on the First Draft of the Global Strategic Framework for Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security*. 8 Mei. Roma (Italia): FAO/ United Nations.

DE SOUSA, I.S.F. dan R.C.M.T. VIEIRA. 2008. "Soybeans and soyfoods in Brazil, with notes on Argentina: Sketch of an expanding world commodity." Dalam *The World of Soy*, disunting oleh C.M. DU BOIS, C-B TAN, dan S. MINTZ. Urbana dan Chicago (Amerika Serikat): University of Illinois Press.

DEERE, C.D. 2003. "Women's land rights and social movements in the Brazilian agrarian reform." *Journal of Agrarian Change* 3 (1–2): 257–288.

___. 2005. "The feminization of agriculture? Economic restructuring in rural Latin America." *Occasional Paper* No. 1. Geneva (Swiss): UNRISD.

DEININGER, K. dan D. BYERLEE. 2011. "The rise of large farms in land abundant countries: Do they have a future?" Policy Research Working Paper 5588. Washington, D.C. (Amerika Serikat): World

Bank Development Research Group Agriculture and Rural Development Team.

DEININGER, K., D. BYERLEE, J. LINDSAY, A. NORTON, H. SELOD, dan M. STICKLER. 2011. *Rising Global Interest in Farmland: Can It Yield Sustainable and Equitable Benefits?* Washington, D.C. (Amerika Serikat): World Bank.

DESMARAIS, A.A. 2002. "The *Vía Campesina*: Consolidating an international peasant and farmer movement." *The Journal of Peasant Studies* 29 (2): 91–124.

___. 2007. *La Vía Campesina: Globalization and the Power of Peasants.* Halifax (Kanada): Fernwood/London (Inggris): Pluto Press.

DEWALT, B. 1985. "Mexico's second green revolution: Food for feed." *Mexican Studies/Estudios Mexicanos* 1: 29–60.

DIXON, J. 2009. "From the imperial to the empty calorie: How nutrition relations underpin food regime transitions." *Agriculture and Human Values* 26 (4): 321–333.

DIXON, M. 2013. "The making of the corporate agri-food system in Egypt." Disertasi di Development Sociology, Cornell University, Amerika Serikat.

DOLAN, C.S. 2004. "On farm and packhouse: employment at the bottom of a global value chain." *Rural Sociology* 69 (1): 99–126.

DOLAN, C. dan J. HUMPHREY. 2000. "Governance and trade in fresh vegetables: The impact of U.K. supermarkets on the African horticulture industry." *Journal of Development Studies* 37: 147–176.

DUNCAN, C. 1996. *The Centrality of Agriculture: Between Humankind and the Rest of Nature*. Montreal (Kanada): McGill-Queen's University Press.

___. 2000. "The centrality of agriculture: History, ecology, and feasible socialism." Dalam *Socialist Register 2000*, disunting oleh L. PANITCH dan C. LEYS. London (Inggris): Merlin.

DUNCAN, J. dan D. BARLING. 2012. "Renewal through participation in global food security governance: Implementing the international

food security and nutrition civil society mechanism to the Committee on World Food Security." *International Journal of Sociology of Agriculture and Food* 19 (2): 143–161.

EDELMAN, M. 2009. "Synergies and tensions between rural social movements and professional researchers." *The Journal of Peasant Studies* 36 (1): 245–265.

EDELMAN, M. dan C. JAMES. 2011. "Peasants' rights and the U.N. system: Quixotic struggle? Or emancipatory idea whose idea has come?" *The Journal of Peasant Studies* 38 (1): 81–108.

ERGAS, C. 2013. "Cuban urban agriculture as a strategy for food sovereignty." *Monthly Review* 64 (10): 46–52.

ERNST, C. dan P. WAHL. 2010. "Simply collateral damage? The financial crisis and the developing countries." Berlin (Jerman): World Economics, Environment and Development.

ESCOBAR, A. 2008. *Territories of Difference: Place, Movements, Life, Redes*. Durham, North Carolina (Amerika Serikat): Duke University Press.

ETC. 2009. *Who Will Feed Us?* ETC Group Communiqué 102 (November). Tersedia di: www.etcgroup.org.

____. 2010. *The New Biomasters: Synthetic Biology and the Next Assault on Biodiversity and Livelihoods*. Tersedia di: www.etcgroup.org.

FAIRBAIRN, M. 2012. "Framing transformation: The counter-hegemonic potential of food sovereignty in the U.S. context." *Agriculture and Human Values* 29: 217–230.

___. 2013. "Indirect dispossession: Domestic power imbalances and foreign access to land in Mozambique." *Development and Change* 44 (2): 335–356.

FAIRHEAD, J., M. LEACH, dan I. SCOONES. 2012. "Green grabbing: A new appropriation of nature?" *The Journal of Peasant Studies* 39 (2): 237–262.

FARGIONE, J., J. HILL, D. TILMAN, S. POLASKY, dan P. HAWTHORNE. 2008. "Land clearing and the biofuel carbon debt." *Science* 7 Februari: 1235–1238.

FAO. 2004. FAOSTAT. Tersedia di: http://faostat.fao.org.

FEDER, E. 1983. *Perverse Development*. Quezon City (Filipina): Foundation for Nationalist Studies.

FITTING, E. 2006. "Importing corn, exporting labor: The neoliberal corn regime, GMOS, and the erosion of Mexican biodiversity." *Agriculture and Human Values* 23: 15–26.

___. 2011. *The Struggle for Maize: Campesinos, Workers, and Transgenic Corn in the Mexican Countryside*. Durham, North Carolina (Amerika Serikat): Duke University Press.

FLOUD, R. 1997. *The People and the British Economy, 1830–1914*. London (Inggris): Weidenfeld and Nicholson.

FOOD CHAIN WORKERS' ALLIANCE. 2012. *The Hands that Feed Us: Challenges and Opportunities for Workers Along the Food Chain*. Los Angeles, Amerika Serikat.

FOSTER, J.B. 1999. "Marx's theory of the metabolic rift: Classical foundations for environmental sociology." *American Journal of Sociology* 105 (2): 366–405.

FRIEDLAND, W. 1994. "The global fresh fruit and vegetable system: An industrial organization analysis." Dalam *The Global Restructuring of Agro-Food Systems*, disunting oleh P. MCMICHAEL. Ithaca (Amerika Serikat): Cornell University Press.

FRIEDMANN, H. 1978. "World market, state and family farm: Social bases of household production in an era of wage labour." *Comparative Studies in Society and History* 20 (4): 545–586.

___. 1982. "The political economy of food: The rise and fall of the postwar international food order." *American Journal of Sociology* 88S: 248–286.

___. 1987. "International regimes of food and agriculture since 1870." Dalam *Peasants and Peasant Societies*, disunting oleh T. SHANIN. Oxford (Inggris): Basil Blackwell.

___. 1991. "Changes in the international division of labor: Agri-food complexes and export agriculture." Dalam *Towards a New Political Economy of Agriculture*, disunting oleh W. FRIEDLAND, L. BUSCH,

F. BUTTEL, dan A. RUDY. Boulder, Colorado (Amerika Serikat): Westview.

___. 1993. "The political economy of food: A global crisis." *New Left Review* 197: 29–57.

___. 1994. "Distance and durability: Shaky foundations of the world food economy." Dalam *The Global Restructuring of Agro-Food Systems*, disunting oleh P. MCMICHAEL. Ithaca (Amerika Serikat): Cornell University Press.

___. 2000. "What on earth is the modern world-system? Foodgetting and territory in the modern era and beyond." *Journal of World-Systems Research* VI (Summer/Fall): 480–515.

___. 2003. "Eating in the gardens of Gaia: Envisioning polycultural communities." Dalam *Fighting for the Farm: Rural America Transformed*, disunting oleh J. ADAMS. Philadelphia (Amerika Serikat): University of Pennsylvania Press.

___. 2005. "From colonialism to green capitalism: Social movements and the emergence of food regimes." Dalam *New Directions in the Sociology of Global Development* 11: 229–267, disunting oleh F.H. BUTTEL dan P. MCMICHAEL. Oxford (Inggris): Elsevier.

___. 2006. "A comment on Henry Bernstein's 'Is there an agrarian question in the 21st century?'" *Canadian Journal of Development Studies* XXVII (4): 461–466.

___. 2009. "Discussion: Moving food regimes forward: Reflections on symposium essays." *Agriculture and Human Values* 26: 335–344.

___. 2010. "Scaling up: Bringing public institutions and food service corporations into the project for a local, sustainable food system in Ontario." Dalam *Imagining Sustainable Food Systems: Theory and Practice*, disunting oleh A. BLAY-PALMER. Aldershot (Inggris): Ashgate.

___. 2011. "Food sovereignty in the Golden Horseshoe region of Ontario." Dalam *Food Sovereignty in Canada: Creating Just and Sustainable Food Systems*, disunting oleh H. WITTMAN, A.A. DESMARAIS, dan N. WIEBE. Halifax (Kanada): Fernwood.

FRIEDMANN, H. dan P. MCMICHAEL. 1989. "Agriculture and the state system: The rise and fall of national agricultures, 1870 to the present." *Sociologia Ruralis* 29 (2): 93–117.

FRIEDMANN, H. dan A. MCNAIR. 2008. "Whose rules rule? Contested projects to certify 'local production for distant consumers'." *Journal of Agrarian Change* 8 (2–3): 408–434.

FRITZ, T. 2011. *Globalizing Hunger: Food Security and the E.U.'s Common Agricultural Policy* (CAP). Amsterdam (Belanda): Transnational Institute.

GARGAN, E.A. 1995. "An Asian giant spreads roots." *The New York Times* 14 November: D1, D4.

GARIKIPATI, S. 2009. "Landless but not assetless: Female agricultural labour on the road to better status, evidence from India." *The Journal of Peasant Studies* 36 (3): 517–546.

GEORGE, S. 1977. *How* the *Other Half Dies: The Real Reasons for World Hunger*. Montclair, New Jersey (Amerika Serikat): Allen, Osmun and Co.

GILBERT, G.N. 1977. "Baltimore's flour trade to the Caribbean, 1750–1815." *The Journal of Economic History* 37 (1): 249–251.

GILLON, S. 2010. "Fields of dreams: Negotiating an ethanol agenda in the Midwest United States." *The Journal of Peasant Studies* 37 (4): 723–748.

GOODMAN, D., B. SORJ, dan J. WILKINSON. 1987. *From Farming to Biotechnology: A Theory of Agro-Industrial Development.* Oxford (Inggris): Basil Blackwell.

GOODMAN, D. dan M. WATTS. 1994. "Reconfiguring the rural or fording the divide? Capitalist restructuring and the global agro-food system." *The Journal of Peasant Studies* 22 (1): 1–49.

___. 1997. *Globalising Food: Agrarian Questions and Global Restructuring*. London (Inggris): Routledge.

GORELICK, S. 2000. "Facing the farm crisis." *The Ecologist* 30 (4): 28–32.

GOSS, J. dan D. BURCH. 2001. "From agricultural modernisation to agri-food globalisation: The waning of national development in Thailand." *Third World Quarterly* 22 (6): 969–986.

GRAIN. 2007. Agrofuels special issue. *Seedling* Juli.

___. 2008a. "Making a killing from hunger." *Against the Grain* April. Tersedia di: www.grain.org.

___. 2008b. "Seized:The 2008 land grab for food and financial security." Briefings, Oktober. Tersedia di: www.grain.org/briefings/?id=212.

___. 2012. "GRAIN releases data set with over 400 global land grabs." 23 Februari. www.grain.org/fr/article/entries/4479-grain-releases-data-set-with-over-400-global-land-grabs.

GREEN, A.R. 2012."Africa: Saudi Agricultural Minister enticed by continent land." *This is Africa* 8 Juni. http://farmlandgrab.org/post/print/20619.

GREENFIELD, H. 2007. "Rising commodity prices and food production: The impact on food and beverage workers." *International Union of Food, Agricultural, Hotel, estaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations* (IUF), Desember.

GRIGG, D. 1993. *The World Food Problem*. Oxford (Inggris): Blackwell.

GUPTA, A. 1998. *Postcolonial Developments: Agriculture in the Making of Modern India*. Durham (Amerika Serikat): Duke University.

HAIVEN, M. dan S. STONEMAN, penyunting. 2009. "Food (and) Sovereignty." *Politics and Culture* 2: Special issue.

HALE, M.A. 2013. "Tilling sand: Contradictions of 'social economy' in a Chinese movement for alternative rural development." *Dialectical Anthropology* 37 (1): 51–82.

HALL, D. 2006. "Regional shrimp, global trees, Chinese vegetables: The environment in Japan-East Asia relations." Dalam *The Dynamics of East Asian Regionalism*, disunting oleh P.J. KATZENSTEIN dan T. SHIRAISHI. Ithaca (Amerika Serikat): Cornell University Press.

___. 2011. "Land grabs, land control, and Southeast Asian crop booms." *The Journal of Peasant Studies* 38 (4): 837–858.

HALL, R. 2012. "The next Great Trek? South African commercial farmers move north." *The Journal of Peasant Studies* 39 (3–4): 823–844.

HALPERIN, S. 2005. "Trans-local and trans-regional socio-economic structures in global development: A 'horizontal' perspective." Dalam *New Directions in the Sociology of Global Development*, disunting oleh F.H. BUTTEL dan P. MCMICHAEL. Oxford (Inggris): Elsevier.

HANDLEY, P. 1990. "Food for thought: Thailand's *Charoen Pokphand* plans London listing." *Far Eastern Economic Review* Oktober 25: 56–58.

HARDT, M. dan A. NEGRI. 2000. *Empire*. Cambridge (Amerika Serikat): Harvard University Press.

HARRIGAN, J. 2013. "An economic analysis of national food sovereignty policies in the Middle East: The case of Lebanon and Jordan." Dalam *Food Security in the Middle East*, disunting oleh Z. BABAR dan S. MIRGANI. London (Inggris): C. Hurst and Co. Publishers.

HARVEY, D. 2011. *The Enigma of Capital*. Oxford (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Oxford University Press.

HELLEINER, E. 1996. *States and the Reemergence of Global Finance: From Bretton Woods to the 1990s*. Ithaca (Amerika Serikat): Cornell University Press.

HERMAN, P. dan R. KUPER. 2003. *Food for Thought: Towards a Future for Farming*. London (Inggris): Pluto Press.

HILLMAN, J.S. dan R.A. ROTHENBURG. 1988. *Agricultural Trade and Protection in Japan*. London (Inggris): Gower Publishing Company.

HIRATA KIMURA, A. 2013. *Hidden Hunger: Gender and the Politics of Smarter Foods*. Ithaca (Amerika Serikat): Cornell University Press.

HOBSBAWM, E. 1969. *Industry and Empire*. Harmondsworth (Inggris): Penguin Books.

HOFMAN, I. dan P. HO. 2012. "China's 'Developmental Outsourcing': A critical examination of Chinese global 'land grabs' discourse." *The Journal of Peasant Studies* 39 (1): 1–48.

HOLT-GIMÉNEZ, E. 2006. *Campesino-a-Campesino: Voices from Latin America's Farmer to Farmer Movement for Sustainable Agriculture*. Oakland (Amerika Serikat): Food First Books.

___. 2007. "Biofuels: Myths of the agrofuels transition." *Food First Backgrounder* 13 (2): 1–4.

___, penyunting. 2011. *Food Movements Unite!* Oakland (Amerika Serikat): Food First Books.

HOLT-GIMÉNEZ, E. dan I. KENFIELD. 2008. "When 'renewable isn't sustainable:' Agrofuels and the inconvenient truths behind the 2007 U.S. energy independence and security act." *Policy Brief* No. 13. Oakland (Amerika Serikat): Institute for Food and Development Policy.

HOLT-GIMÉNEZ, E. dan R. PATEL. 2009. *Food Rebellions! Crisis and the Hunger for Justice*. Cape Town (Afrika Selatan): Pambazuka Press.

HOOGVELT, A. 1997. *Globalization and the Postcolonial World: The New Political Economy of Development*. London (Inggris): Macmillan.

___. 2010. "Globalization, crisis and the political economy of the international monetary (dis)order." *Globalizations* 7 (1–2): 51–66.

HOUTART, F. 2010. *Agrofuels: Big profits, ruined lives and ecological destruction*. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Pluto Press.

HUANG, S. dan W.T. COYLE. 1989. "Structural change in East Asian agriculture." Dalam *Pacific Rim Agriculture and Trade Report*. Washington, D.C. (Amerika Serikat): USDA, Economic Research Service.

IATP. 2004. *United States Dumping on World Agricultural Markets.* Minneapolis (Amerika Serikat): Institute For Agriculture and Trade Policy. Tersedia di: www.tradeobservatory.org.

INTERNATIONAL ASSESSMENT OF AGRICULTURAL KNOWLEDGE, SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT (IAASTD). 2008. Executive Summary of the Synthesis Report. www.agassessment.org/docs/ SR_Exec_ Sum_280508_English.pdf.

ISAKSON, S.R. 2010. "*No hay ganancia en la milpa*: The agrarian question, food sovereignty, and the on-farm conservation of agrobiodiversity in the Guatemalan highlands." *The Journal of Peasant Studies* 36 (4): 725–760.

ISHII-EITEMANN, M. 2009. "Food Sovereignty and the International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development." *The Journal of Peasant Studies* 36 (3): 689–700.

IUF (INTERNATIONAL UNION OF FOOD, AGRICULTURAL, HOTEL, RESTAURANT, CATERING, TOBACCO AND ALLIED WORKERS' ASSOCIATIONS). 2012. "Hungry Workers in the Global Food System." *Righting Food* 31 Mei. www.rightingfood.com/hungry-workers-in-the-global-food-system/.

JAROSZ, L. 2009. "The political economy of global governance and world food crisis: The case of the FAO." *Review* XXXII (1): 37–60.

KABEER, N. dan TRAN THI VAN AHN. 2002. "Leaving the rice fields, but not the countryside: Gender, livelihoods diversification, and pro-poor growth in rural Vietnam." Dalam *Shifting Burdens: Gender and Agrarian Change under Neoliberalism*, disunting oleh S. RAZAVI. Bloomfield, Connecticut (Amerika Serikat): Kumarian Press.

KAMRAVA, M. dan Z. BABAR. 2013. "Food security and food sovereignty in the Middle East." Dalam *Food Security in the Middle East*, disunting oleh Z. BABAR dan S. MIRGANI. London (Inggris): C. Hurst and Co. Publishers.

KAUFMAN, F. 2010. "The food bubble: How Wall Street starved millions and got away with it." *Harper's Magazine* Juli: 27–34.

KAUTSKY, K. 1988 (1899). *The Agrarian Question*, Vol. 2. London (Inggris): Zwan Publications.

KAY, C. 2006. "Rural Poverty and Development Strategies in Latin America." *Journal of Agrarian Change* 6 (4): 455–508.

KERSSEN, T.M. 2012. *Grabbing Power: The New Struggles for Land, Food and Democracy in Northern Honduras*. Oakland (Amerika Serikat): Food First Books.

KIM, C-K. 2006. "The rise and decline of statist agriculture and the farmers' movement in South Korea." *Korea Observer* 37 (1): 129–147.

KLEPEK, J. 2012. "Against the grain: Knowledge alliances and resistance to Agricultural biotechnology in Guatemala." *Canadian Journal of Development Studies* 33 (3): 310–325.

KLOPPENBURG, J.R. JR. 1988. *First the Seed: The Political Economy of Plant Biotechnology, 1492–2000*. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.

KRASNER, S. 1993. "Structural causes and regime consequences: Regimes as intervening variables." Dalam *International Regimes*, disunting oleh S. KRASNER. Ithaca (Amerika Serikat): Cornell University Press.

LANG, T. dan M. HEASMAN. 2004. *Food Wars: The Global Battle for Mouths, Minds, and Markets*. London (Inggris): Earthscan.

LAVERS, T. 2012. "Patterns of agrarian transformation in Ethiopia: State-mediated commercialization and the 'land grab'." *The Journal of Peasant Studies* 39 (3–4): 795–822.

LAWRENCE, F. 2011. "Guatemala pays a high price for global food system failings." *The Guardian* 1 Juni. www.guardian.co.uk/ global-development/poverty-matters/2011/may/31/global-food- crisis-guatemala-system-failure.

LAWRENCE, G. dan F. VANCLAY. 1994. "Agricultural change and environmental degradation in the semi-periphery: The Murray-Darling Basin, Australia." Dalam *The Global Restructuring of Agro-Food Systems*, disunting oleh P. MCMICHAEL. Ithaca (Amerika Serikat): Cornell University Press.

LEGUIZAMÓN, A. 2013. "Modifying Argentina: gm soy and socio-environmental change." *Geoforum*. www.sciencedirect.com/ science/ journal/aip/00167185.

LE HERON, R. 1993. *Globalised Agriculture*. Oxford (Inggris): Pergamon.

LE HERON, R. dan N. LEWIS. 2009. "Discussion: Theorising food regimes: Intervention as politics." *Agriculture and Human Values* 26: 345–349.

LEHMANN, K. dan A. KREBS. 1996. "Control of the world's food supply." Dalam *The Case Against the Global Economy, and for a Turn toward the Local*, disunting oleh J. MANDER dan E. GOLDMSITH. San Francisco (Amerika Serikat): Sierra Club Books.

LENIN, V.I. 1972 (1989). *The Development of Capitalism in Russia*. Moscow (Rusia): Progress Publishers.

LEQUESNE, C. 1997. "The World Trade Organization and food security." Talk to U.K. Food Group, 15 Juli, London, Inggris. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0581e/a0581e03.pdf.

LEVIDOW, L. 2011. "Agricultural innovation: Sustaining what agriculture? For what European bio-economy?" Co-operative Research on Environmental Problems in Europe (CREPE). Open University. Tersedia di: http://dpp.open.ac.uk.

LIN, B.B. *et al*. 2011. Effects of industrial agriculture on climate change and the mitigation potential of small-scale agro-ecological farms." *CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition & Natural Resources* 6 (020): 1–18.

LIND, D. dan E. BARHAM. 2004. "The social life of the tortilla: food, cultural politics and contested commodification." *Agriculture & Human Values* 21: 47–60.

LITTLE, P.D. dan M.J. WATTS, penyunting. 1994. *Living Under Contract: Contract Farming and Agrarian Transformation in Sub-Saharan Africa*. Madison (Amerika Serikat): University of Wisconsin Press.

LLAMBI, L. 1994. "Comparative advantages and disadvantages in Latin American Nontraditional fruit and vegetable exports." Dalam *The Global Restructuring of Agro-Food Systems*, disunting oleh P. MCMICHAEL. Ithaca (Amerika Serikat): Cornell University Press.

LOHMANN, L. 2006. "Carbon Trading: A critical conversation on climate change, privatization and power." *Development Dialogue* 48: 1–358.

LUXEMBURG, R. 1951 (1913). *The Accumulation of Capital*. London (Inggris): Routledge dan Kegan Paul.

LYNAS, M. 2001. "Selling starvation." *Corporate Watch* 7. Spring. Tersedia di: www.corpwatch.org.

MACKINTOSH, M. 1989. *Gender, Class and Rural Transition: Agribusiness and the Food Crisis in Senegal*. London (Inggris): Zed Books.

MADELEY, J. 2000. *Hungry for Trade*. London (Inggris): Zed Books.

MAGNAN, A. 2012. "Food regimes." Dalam *The Oxford Handbook of Food History*, disunting oleh J.M. PILCHER. Oxford (Inggris): Oxford University Press.

MAKKI, F. 2012. "Power and property: Commercialization, enclosures and the transformation of agrarian relations in Ethiopia." *The Journal of Peasant Studies* 39 (1): 81–104.

MANN, S. dan J.M. DICKINSON. 1978. "Obstacles to the development of capitalist agriculture." *The Journal of Peasant Studies* 5: 466–481.

MARSDEN, T. 2012. "Third Natures? Reconstituting space through place-making strategies for sustainability." *International Journal of Sociology of Agriculture & Food* 19 (2): 257–274.

MARTINEZ-ALIER, J. 2002. *The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation*. Cheltenham (Inggris): Edward Elgar.

MARX, K. 1973. *Grundrisse*: *Foundations of the Critique of Political Economy*. Harmondsworth (Inggris): Penguin.

___. 1990 (1867). *Capital*. New York (Amerika Serikat): Vintage.

MASSICOTTE, M-J. 2013. "Beyond political economy: Political ecology and *La Vía Campesina*'s struggle for food sovereignty through the experience of the *Escola Latinoamericana de Agroecologia* (ELAA), Brazil." Dalam *Globalization and Food Sovereignty*, disunting oleh P. ANDREÉ, J. AYRES, M. BOSIA, dan M-J. MASSICOTTE. Toronto (Kanada): University of Toronto Press.

MCAFEE, K. 2012. "The contradictory logic of global ecosystem services markets." *Development and Change* 43 (1): 105–132.

MCCALLA, A. 1999. "World Agricultural Directions: What Do They Mean for Food Security?" Bahan presentasi, Cornell University, Amerika Serikat, dengan CIIFAD, 30 Maret.

MCCORMACK, G. 1996. *The Emptiness of Japanese Affluence*. New York (Amerika Serikat): M.E. Sharpe.

MCKEON, N. 2011. *Global Governance for World Food Security: A Scorecard Four Years After the Eruption of the "Food Crisis."* Berlin (Jerman): Heinrich-Böll-Stiftung.

___. 2011. "Now's the time to make it happen: The U.N.'s Committee on Food Security." Dalam *Food Movements Unite!*, disunting oleh E. HOLT-GIMÉNEZ. Oakland (Amerika Serikat): Food First Books.

MCLAUGHLIN, P. 1998. "Rethinking the agrarian question: The limits of essentialism and the promise of evolutionism."*Research in Human Ecology* 5 (2): 25–39.

MCMICHAEL, P. 1984. *Settlers and the Agrarian Question: Foundations of Capitalism in Colonial Australia*. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.

___. 1987. "Foundations of U.S./Japanese world-economic rivalry in the Pacific Rim." *Journal of Developing Societies* 3 (1): 62–77.

___. 1990. "Incorporating comparison within a world-historical perspective: An alternative comparative method." *American Sociological Review* 55 (3): 385–397.

___. 1993. "World food system restructuring under a GATT regime." *Political Geography* 12 (3): 198–214.

___. 1996. *Development and Social Change: A Global Perspective*. Thousand Oaks (Amerika Serikat): Pine Forge Press.

___.1997."Rethinking globalization: The agrarian question revisited." *Review of International Political Economy* 4 (4): 630–662.

___. 1999. "The global crisis of wage-labour." *Studies in Political Economy* 58: 11–40.

___. 2000. "A global interpretation of the rise of the East Asian food import complex." *World Development* 28 (3): 409–424.

___. 2001. "The impact of globalization, free trade and technology on food and nutrition in the new millennium." *Proceedings of the Nutrition Society* 60: 215–220.

___. 2002. "La restructuration globale des systems agroalimentaires." *Mondes en Developpment* 30 (117): 45–54.

___. 2003. "Food Security and Social Reproduction: Issues and Contradictions." Dalam *Power, Production and Social Reproduction I*, disunting oleh I. BAKKER dan S. GILL. New York (Amerika Serikat): Palgrave Macmillan.

___. 2005. "Global development and the corporate food regime." Dalam *New Directions in the Sociology of Global Development* 11: 229–267, disunting oleh F.H. BUTTEL dan P. MCMICHAEL. Oxford (Inggris): Elsevier.

___. 2006. "Peasant prospects in a neoliberal age." *New Political Economy* 11 (3): 407–418.

___. 2007. "Feeding the World: Agriculture, Development and Ecology." Dalam *Coming to Terms with Nature, Socialist Register 2007:* 170–194, disunting oleh L. PANITCH dan C. LEYS. London (Inggris): Merlin.

___. 2008. "Peasants make their own history, but not just as they please ...." *Journal of Agrarian Change* 8 (2–3): 205–228.

___. 2009a. "A food regime genealogy." *The Journal of Peasant Studies* 36 (1): 139–170.

___. 2009b. "A food regime analysis of the 'world food crisis'." *Agriculture and Human Values* 26: 281–925.

___. 2009c. "Banking on agriculture: a review of the *World Development Report* (2008)." *Journal of Agrarian Change* 9 (2): 235–246.

___. 2009d. "Food sovereignty, social reproduction and the agrarian question." Dalam *Peasants and Globalisation: Political economy, rural transformation and the agrarian question*, disunting oleh A.H. AKRAM-LODHI dan C. KAY. London (Inggris): Routledge.

___. 2010. "Agrofuels in the food regime." *The Journal of Peasant Studies* 37 (4): 609–629.

___. 2011a. "Food system sustainability: Questions of environmental governance in the new world (dis)order." *Global Environmental Change* 21: 804–812.

___. 2011b. "In the short run are we all dead? A political ecology of the development climate." Dalam *The Longue Dureé and World-Systems Analysis*, disunting oleh R. E. Lee. Albany (Amerika Serikat): SUNY Press.

___. 2012a. "Food regime crisis and revaluing the agrarian question." Dalam *Rethinking Agricultural Policy Regimes: Food Security, Climate Change and the Future Resilience of Global Agriculture*, disunting oleh R. ALMAS dan H. CAMPBELL. Bingley (Inggris): Emerald Books.

___. 2012b. "The 'land grab' and corporate food regime restructuring." *The Journal of Peasant Studies* 39 (3/4): 681–701.

___. 2013a. "Land grabbing as security mercantilism in international relations." *Globalizations* 10 (1): 47–64.

___. 2013b. "Value-chain agriculture and debt relations: Contradictory outcomes." *Third World Quarterly* 34 (4): 671–690.

MCMICHAEL, P. dan H. FRIEDMANN. 2007. "Situating the 'retailing revolution'." Dalam *Supermarkets and agrofood supply chains: Transformations in the production and consumption of foods*, disunting oleh D. BURCH dan G. LAWRENCE. Cheltenham (Inggris): Edward Elgar.

MCMICHAEL, P. dan C-K. KIM. 1994. "Japanese and South Korean agricultural restructuring in comparative and global perspective." Dalam *The Global Restructuring of Agro-Food Systems*, disunting oleh P. MCMICHAEL. Ithaca (Amerika Serikat): Cornell University Press.

MCMICHAEL, P. dan M. SCHNEIDER. 2011. "Food security politics and the Millennium Development Goals." *Third World Quarterly* 32 (1): 119–139.

MEHTA, L., G.J. VELDWISCH, dan J. FRANCO. 2012. "Introduction to the Special Issue; Water Grabbing? Focus on the (re)appropriation of finite water resources." *Water Alternatives* 5 (2): 193–207.

MENON, G. 2010. "Recoveries of space and subjectivity in the shadow of violence: The clandestine politics of pavement dwellers in Mumbai." Dalam *Contesting Development: Critical Struggles for Social Change*, disunting oleh P. MCMICHAEL. New York (Amerika Serikat) dan London (Inggris): Routledge.

MERCOPRESS. 2011. "Mozambique offers Brazilian farmers 6 million hectares to develop agriculture." *Mercopress* 16 Agustus. http://en.mercopress.com/2011/08/16/mozambique-offers-brazilian-farmers-6-million-hectares-to-develop-agriculture.

MIDDLE EAST BUSINESS NEWS. 2012. "Great resource rush." 7 Mei. http://farmlandgrab.org/post/view/20448.

MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT. 2005. *Ecosystems and Human Well-Being*. Washington, D.C. (Amerika Serikat): Island Press.

MINTZ, S. 1985. *Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History*. New York (Amerika Serikat): Vintage.

MITCHELL, T. 1991. "American's Egypt: Discourse of the Development Industry." *MERIP* 169: 18–34.

___. 2011. *Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil*. London (Amerika Serikat): Verso.

MONSALVE SUÁREZ, S. 2013. "The Human Rights framework in contemporary agrarian struggles." *The Journal of Peasant Studies* 40 (1): 239–290.

MOOJ, J., D. BRYCESON, dan C. KAY, penyunting. 2000. *Disappearing Peasantries? Rural Labour in Latin America, Asia and Africa*. London (Inggris): ITGG.

MOORE, J. 2000. "Environmental crises and the metabolic rift in world-historical perspective." *Organization & Environment* 13 (2): 123–157.

___. 2010. "The end of the road? Agricultural revolutions in the capitalist world-ecology, 1450–2010." *Journal of Agrarian Change* 10 (3): 389–413.

___.2011."Transcending the metabolic rift: A theory of crises in the capitalist world-ecology." *The Journal of Peasant Studies* 38 (10: 1–46.

MOYO, S. dan P. YEROS, penyunting. 2005. *Reclaiming the Land: The Resurgence of Rural Movements in Africa, Asia and Latin America*. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Zed Books.

MUNDY, M., A. AL-HAKIMI, dan F. PELAT. 2013. "Neither security nor sovereignty: Agriculture and food production in Yemen." Dalam *Food Security in the Middle East*, disunting oleh Z. BABAR dan S. MIRGANI. London (Inggris): C. Hurst and Co. Publishers.

MURPHY, S. 1999. "WTO, agricultural deregulation and food security." *Globalization Challenge Initiative* 4 (34): 1–4.

NDIAYE, T. dan M. OUATTARA. 2011. "Rural women create thriving food systems in West Africa." Dalam *Food Movements Unite*, disunting oleh E. Holt-Giménez. Oakland (Amerika Serikat): Food First Books.

NESVETAILOVA, A. dan R. PALAN 2010. "The end of liberal finance? The changing paradigm of global financial governance." *Millennium* 38 (3): 797–825.

NICHOLSON, P. 2008. "Vía Campesina: Responding to global systemic crisis." *Development* 51 (4): 456–459.

___. 2009. "Interview with Hannah Wittman." *The Journal of Peasant Studies* 36 (3): 676–682.

NIELSEN, J. dan B. ARIFIN. 2012. "Food security and the de-agrarianization of the Indonesian economy." Dalam *Food Systems Failure: The Global Food Crisis and the Future of Agriculture*, disunting oleh C. ROSIN, P. STOCK, dan H. CAMPBELL. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Earthscan.

NYÉLÉNI DECLARATION ON FOOD SOVEREIGNTY. 2009. *The Journal of Peasant Studies* 36 (3): 673–676.

O'CONNOR, J. 1984. *Accumulation Crisis*. New York (Amerika Serikat): Basil Blackwell.

___. 1998. *Natural Causes*. New York (Amerika Serikat): Guilford Press.

OHNO, K. 1988. "Japanese agriculture today: The roots of decay." *Bulletin of Concerned Asian Scholars* 24 (4): 45–57.

O'LAUGHLIN, B. 2009. "Gender, land and the agrarian question in Southern Africa." Dalam *Peasants and Globalization: Political Economy, Rural Transformation and the Agrarian Question*, disunting oleh H. AKRAM-LODHI dan C. KAY. London (Inggris): Routledge.

O'ROURKE, K. 1997. "The European grain invasion, 1870–1913." *Journal of Economic History* 57: 775–801.

ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). 2001. *Decoupling: A conceptual overview*. Paris (Prancis): OECD Publishing.

___. 2005. *The Bio-economy to 2030: Designing a Policy Agenda*. Paris (Prancis): OECD Publishing.

OLMSTEAD, J. 2011. "Feeding the World? Twelve Years Later U.S. Grain Exports Are Up, So Too Is Hunger." Minneapolis (Amerika Serikat): IATP. Tersedia di: www.iatp.org.

OTERO, G. 2012. "The neoliberal food regime in Latin America: State, agribusiness transnational corporations and biotechnology." *Canadian Journal of Development Studies* 33 (3): 282–294.

PARINGAUX, R-P. 2001. "The deliberate destruction of agriculture: India: Free markets, empty bellies." *Le Monde Diplomatique* September: 1–9.

PATEL, R. 2006. "International agrarian restructuring and the practical ethics of peasant movement solidarity." *Journal of Asian and African Studies* 41 (1–2): 71–93.

___. 2007a. "Transgressing rights: La Vía Campesina's call for food sovereignty." *Feminist Economics* 13 (1): 87–93.

___. 2007b. *Stuffed and Starved: Markets, Power and the Hidden Battle over the World's Food System*. London (Inggris): Portobello Books.

___. 2008. "The story of rice." *Raj's Blog* 5 April. Tersedia di: www.stuffedandstarved.org.

___. 2012. "The long green revolution." *The Journal of Peasant Studies* 40 (1): 1–63.

PATEL, R. dan P. MCMICHAEL. 2009. "A political economy of the food riot." *Review* XXXII (1): 9–36.

PATNAIK, P. 2008. "The accumulation process in the period of globalization." *Economic & Political Weekly* 28: 108–113.

PEARCE, F. 2012. *The Land Grabbers: The New Fight Over Who Owns the Earth.* Boston (Amerika Serikat): Beacon Press.

PECHLANER, G. dan G. OTERO. 2008. "The third food regime: Neoliberal globalism and agricultural biotechnology in North America." *Sociologia Ruralis* 48 (4): 1–21.

PEINE, E.K. 2010. "Corporate mobilization on the soybean frontier of Mato Grosso, Brazil." Dalam *Contesting Development: Critical Struggles for Social Change*, disunting oleh P. MCMICHAEL. New York (Amerika Serikat) dan London (Inggris): Routledge.

___. 2013. "Trading on pork and beans: Agribusiness and the construction of the Brazil-China-Soy-Pork commodity complex." Dalam *The Ethics and Economics of Agrifood Competition*, disunting oleh H. JAMES JR. Amsterdam (Belanda): Springer.

PERFECTO, I., J. VANDERMEER, dan A. WRIGHT. 2009. *Nature's Matrix: Linking Agriculture, Conservation and Food Sovereignty*. London (Inggris): Earthscan.

PHILIPS, L. dan S. ILCAN. 2003. "'A world free from hunger': Global imagination and governance in the age of scientific management." *Sociologia Ruralis* 43 (4): 433–453.

PHILPOTT, T. 2006. "Feeding the beast." *Grist* 13 Desember. Tersedia di: www.grist.org.

PINGALI, P.L. 2012. "Green Revolution: Impacts, limits and the path ahead." PNAS. Tersedia di: www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0912953109.

PIONETTI, C. 2005. *Sowing Autonomy: Gender and Seed Politics in Semi-Arid India*. London (Inggris): IIED.

PISTORIUS, R. dan J. VAN WIJK. 1999. *The Exploitation of Plant Genetic Information: Political Strategies in Crop Development*. Oxon (Inggris): CABI Publishing.

POLANYI, K. 1957. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of our Time*. Boston (Amerika Serikat): Beacon Press.

POTTER, C. dan M. TILZEY. 2005. "Agricultural policy discourses in the European post-Fordist transition: Neoliberalism, neomercantilism and multifunctionality." *Progress in Human Geography* 29 (5): 581–600.

PRESCHARD, K. 2012. "Unexpected discontent: Exploring new developments in Brazil's transgenics." *Canadian Journal of Development Studies* 33 (3): 326–337.

PRETTY, J. dan R. HINE. 2001. *Reducing Food Poverty with Sustainable Agriculture: A Summary of New Evidence*. Laporan akhir dari "SAFE World" Research Project, University of Essex, Inggris. Tersedia di: www2.essex.ac.uk/ces/FresearchProgrammes/SAFEWexecsummfinalreport.htm.

PRETTY, J.N., J.J.L. MORISON, dan R.E. HINE. 2003. "Reducing food poverty by increasing agricultural sustainability in developing countries." *Agriculture, Ecosystems and Environment* 95: 217–234.

PRETTY, J., A.D. NOBLE, D. BOSSIO, J. DIXON, R.E. HINE, F.W.T. PENNING DE VRIES, dan J.I.L. MORISON. 2006. "Resource conserving agriculture increases yields in developing countries." *Environmental Science & Technology* 40 (4): 1114–1119.

PRITCHARD, B. 2007. "Food regimes." Dalam *The International Encyclopedia of Human Geography*, disunting oleh R. KITCHIN dan N. THRIFT. Amsterdam (Belanda): Elsevier.

___. 2009. "The long hangover from the second food regime: A world historical interpretation of the collapse of the WTO Doha Round." *Agriculture and Human Values* 26: 297–307.

PRITCHARD, B. dan D. BURCH. 2003. *Agri-Food Globalization in Perspective: International Restructuring in the Processing Tomato Industry*. Aldershot (Inggris): Ashgate.

PUBLIC CITIZEN. 2001a. *Down on the Farm: NAFTA's Seven-Years War on Farmers and Ranchers in the U.S., Canada and Mexico*. Tersedia di: www.citizen.org.

___. 2001b. *Down on the Farm: NAFTA's Seven-Years War on Farmers and Ranchers in Florida*. Tersedia di: http://www.citizen.org.

RAGHAVAN, C. 1990. *Recolonization: GATT, the Uruguay Round and the Third World*. Penang (Malaysia): Third World Network.

RAYNOLDS, L. 1997. "Restructuring national agriculture, agro-food trade and agrarian livelihoods in the Caribbean." Dalam *Globalising Food: Agrarian Questions and Global Restructuring*, disunting oleh D. GOODMAN dan M.J. WATTS. London (Inggris): Routledge.

___. 2000. "Re-embedding global agriculture: The international organic and fair trade movements." *Agriculture and Human Values* 17: 297–309.

___. 2001. "New plantations, new workers: Gender and production politics in the Dominican Republic." *Gender & Society* 15 (1): 7–28.

RAYNOLDS, L.T., D. MYHRE, V. CARRO-FIGUEROA, F.H. BUTTEL, dan P. MCMICHAEL. 1993. "The 'new' internationalization of agriculture: A reformulation." *World Development* 21 (7): 1101–1121.

RAZAVI, S.2009."Engendering the political economy of agrarian change." *The Journal of Peasant Studies* 36 (1): 197–226.

REARDON, T. dan C. TIMMER. 2005. "Transformation of markets for agricultural output in developing countries since 1950: How has thinking changed?" Dalam *Handbook of Agricultural Economics—Agricultural Development: Farmers, Farm Production and Farm Markets*, disunting oleh R. EVENSON, P. PINGALI, dan T. SCHULTZ. Oxford (Inggris): Elsevier Press.

REARDON, T., C.P. TIMMER, C.B. BARRETT, dan J. BERDEGUE. 2003. "The rise of supermarkets in Africa, Asia and Latin America." *American Journal of Agricultural Economics* 85 (5): 1140–1146.

REIJ, C. 2006. "More success stories in Africa's drylands than often assumed." *ROPPA*. http://roppa.info?IMG/pdf/More_success_ stories_in_ Africa_Reij_Chris.pdf.

REVEL, A., dan C. RIBOUD. 1986. *American Green Power*. Baltimore (Amerika Serikat): Johns Hopkins University Press.

RICH, B. 1994. *Mortgaging the Earth: The World Bank, Environmental Impoverishment, and the Crisis of Development*. Boston (Amerika Serikat): Beacon Press.

RIETHMULLER, P., N. WALLACE, dan G. TIE. 1988. "Government intervention in Japanese agriculture." *Quarterly Review of Rural Economy* 10 (2): 154–163.

RIFKIN, J. 1993. *Beyond Beef: The Rise and Fall of the Cattle Culture*. New York (Amerika Serikat): Penguin.

RIOUX, S. 2012. "Labouring Bodies: Living Standards and the Distribution of Food in Britain, 1850–1914." Disertasi, Political Science, York University, Kanda.

RITCHIE, M. 1998. *Impact of GATT on food self-reliance and world hunger*. Minneapolis (Amerika Serikat): Institute for Agriculture and Trade Policy.

___. 1993. *Breaking the Deadlock: The United States and Agricultural Policy in the Uruguay Round*. Minneapolis (Amerika Serikat): Institute for Agriculture and Trade Policy.

___. 1999. "The World Trade Organization and the Human Right to Food Security (General Assembly)." *International Cooperative Agriculture Organization*. 29 Agustus. www.agricoop.org/activities/mark_ritchie.pdf.

ROBERTS, W. 2008. *The No-Nonsense Guide to World Food*. Oxford (Inggris): New Internationalist.

ROSE, N. 2012. "Optimism of the Will: Food sovereignty as transformative counter-hegemony in the 21st century." Disertasi, School of Global Studies, Royal Melbourne Institute of Technology, Australia.

ROSEBERRY, W. 1993. "Beyond the agrarian question in Latin America." Dalam *Confronting Historical Paradigms: Peasants, Labor, and the Capitalist World System in Africa and Latin America*, disunting oleh

F. COOPER, A.F. ISAACMAN, F.E. MALLON, W. ROSEBERRY, dan S.J. STERN. Madison (Amerika Serikat): University of Wisconsin Press.

ROSIN, C., P. STOCK, dan H. CAMPBELL, penyunting. 2012. *Food Systems Failure: The Global Food Crisis and the Future of Agriculture*. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Earthscan.

ROSSET, P.M. 2006. *Food Is Different: Why We Must Get the WTO out of Agriculture*. Halifax (Kanada): Fernwood.

___. 2008. "Food overeignty and the contemporary food crisis." *Development* 51 (4): 46–63.

ROSSET, P.M. dan M.E. MARTINEZ-TORRES. 2012. "Rural social movements and agroecology: Context, theory and process." *Ecology and Society* 17 (3): article 17. www.ecologyandsociety.org/vol17/iss3/.

ROSSET, P., R. PATEL, dan M. COURVILLE, penyunting. 2006. *Promised Land: Competing Visions of Agrarian Reform*. Oakland (Amerika Serikat): Food First Books.

ROSTOW, W.W. 1960. *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.

ROTHACHER, A. 1989. *Japan's Agro-Food Sector. The Politics and Economics of Excess Protection*. New York (Amerika Serikat): St. Martin's Press.

ROYAL SOCIETY. 2009. *Reaping the Benefits: Science and the Sustainable Intensification of Global Agriculture*. London (Inggris): The Royal Society.

RUGGIE, J.G. 1992. "International regimes, transactions and change: Embedded liberalism in the postwar economic order." *International Organization* 36: 397–415.

RUGGIERO, R. 1996. "Trading towards peace?" Address to the MENA II Conference, 11 Desember, Kairo, Mesir.

RUSSI, L. 2013. *Hungry Capital: The Financialization of Food*. Winchester (Inggris): Zero Books.

SACHS, W., penyunting. 1993. *Global Ecology*. London (Inggris): Zed Books.

SALAMI, H., T. MOHTASHAMI, dan M.S.N. NAEINI. 2013. "Prospects for food self-sufficiency in Iran in 2025." Dalam *Food Security in the Middle East*, disunting oleh Z. BABAR dan S MIRGANI. London (Inggris): C. Hurst and Co. Publishers.

SASSEN, S. 2011. "A savage sorting of winners and losers: Contemporary versions of primitive accumulation." *Globalizations* 7 (1): 23–50.

SAUL, S.B. 1960. *Studies on Overseas British Trade 1870–1914*. Liverpool (Inggris): Liverpool University Press.

SCHAEFFER, R. 1995. "Free trade agreements: Their impact on agriculture and the environment." Dalam *Food and Agrarian Orders in the World-Economy*, disunting oleh P. MCMICHAEL. Westport, Connecticut (Amerika Serikat): Greenwood Press.

SCHIAVONI, C. dan W. CAMACARO. 2009. "The Venezuelan effort to build a new food and agriculture system." *Monthly Review* 61 (30: 129–141.

SCHNEIDER, M. 2013. "Modern Meat and Indusdrial Swine: China and the Remaking of Agri-Food Politics in the 21st Century." Disertasi, Development Sociology, Cornell University, Amerika Serikat.

SCHNEIDER, M. dan P. MCMICHAEL. 2010. "Deepening, and repairing, the metabolic rift." *The Journal of Peasant Studies* 37 (3): 461–484.

SCHNEIDER, S. dan P.A. NIEDERIE. 2010. "Resistance strategies and diversification of rural livelihoods: The construction of autonomy among Brazilian family farmers." *The Journal of Peasant Studies* 37 (2): 379–406.

SCOONES, I. 2009. "Livelihoods perspectives and rural development." *The Journal of Peasant Studies* 36 (1): 171–196.

SCOTT, J. 1998. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed.* New Haven (Amerika Serikat): Yale University Press.

SEMMEL, B. 1970. *The Rise of Free Trade Imperialism: Classical Political Economy and the Empire of Free Trade and Imperialism, 1750–1850*. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.

SHELLER, M. 2003. *Consuming the Caribbean*. New York (Amerika Serikat): Routledge.

SHINOHARA, T. 1964. *Japanese import requirements: Projections of agricultural supply and demand for 1965, 1970, and 1975*. University of Tokyo (Jepang): Institute for Agricultural Economic Research, Department of Agricultural Economics.

SHIVA, V. 1988. *Staying Alive: Women, Ecology and Development*. Boston (Amerika Serikat): South End Press.

___. 1991. *The Violence of the Green Revolution*. London (Inggris): Zed Books.

___. 2000. Dikutip dalam *Globalize This! The Battle Against the World Trade Organization and Corporate Rule*.

SCOTT, J. 1998. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven (Amerika Serikat): Yale University Press.

SMALLER, C., QIU W., dan LIU Y. 2012. *Farmland and Water: China Invests Abroad*. Winnipeg (Kanada): International Institute for Sustainable Development.

SMEETS, E. *et al*. 2004. "A quick scan of global bio-energy potentials to 2050." *Bio Energy Trade* Maret. www.bioenergytrade.org/downloads/smeetsglobalquickscan2050.pdf.

SMOLKER, R. 2008. "The new bioeconomy and the future of agriculture." *Development* 51 (4): 519–526.

STEDILE, J.P. 2002. "Landless battalions." *New Left Review* 15 Mei/Juni: 77–104.

STEDILE, J.P. dan H.M. DE CARVALHO. 2011. "People need food sovereignty." Dalam *Food Movements Unite!*, disuntin oleh E. HOLT-GIMÉNEZ. Oakland (Amerika Serikat): Food First Books.

SUEHIRO, A. 1989. *Capital Accumulation in Thailand*. Tokyo (Jepang): Centre for East Asian Cultural Studies.

SUTHY, P. dan K. SONTEPERTKWONG. 1986. "Structural forces behind Japan's economic expansion and the case of Japanese-Thai economic relations." Dalam *The Lion and the Mouse? Japan, Asia and Thailand*, disunting oleh P. PHONGPAICHIT, B. KUNASMIN, dan B. RUCHATORN. Bangkok (Thailand): Chulalongkorn University Press.

TAHA, F.A. 1989. "Patterns of change in Japanese cereal production, consumption, and trade." Dalam *World Agriculture: Situation and Outlook Report*. Washington, D.C. (Amerika Serikat): USDA, Economic Research Service.

TETRÉAULT, M.A., D. WHEELER, dan B. SHEPHERD. 2013. "Win-win versus lose-lose: Investments in foreign agriculture as a food security strategy for the Persian Gulf States." Dalam *Food Security in the Middle East*, disunting oleh Z. BABAR dan S MIRGANI. London (Inggris): C. Hurst and Co. Publishers.

TEUBAL, M. 2008. "Genetically engineered soybeans and the crisis of Argentina's agriculture model." Dalam *Food for the Few: Neoliberal Globalism and Biotechnology in Latin America*, disunting oleh G. OTERO. Austin (Amerika Serikat): University of Texas Press.

TOMICH, D. 2004. *Through the Prism of Slavery: Labor, capital and the world economy*. Lanham, Maryland (Amerika Serikat): Rowman and Littlefield.

___. 2013. "Agricultural Production." Dalam *Princeton Companion to Atlantic History*, disunting oleh J.E. MILLER. Princeton (Amerika Serikat): Princeton University Press.

TUBIANA, L. 1989. "World trade in agricultural products: From global regulation to market fragmentation." Dalam *The International Farm Crisis*, disunting oleh D. GOODMAN dan M. REDCLIFT. New York (Amerika Serikat): St. Martin's Press.

VAN DER PLOEG, J.D. 2009. *The New Peasantries: Struggles for Autonomy and Sustainability in an Era of Empire and Globalization*. London (Inggris): Earthscan.

___. 2010. "The peasantries of the twenty-first century: The commoditization debate revisited." *The Journal of Peasant Studies* 37 (1): 1–30.

VANHAUTE, E. 2008. "The end of peasantries? Rethinking the role of peasantries in a world-historical view." *Review* XXXI (1): 39–60.

VÍA CAMPESINA. 1999. "Seattle Declaration: Take wto out of agriculture." 3 Desember. www.viacampesina.org/welcome_english.php3.

___. 2001. "Our world is not for sale: Priority to peoples' food sovereignty." Bulletin, 1 November. www.viacampesina.org/welcome_english.php3.

___. 2000. "Declaration of the International Meeting of the Landless in San Pedro Sula." Honduras. Juli.

___. 2002. "Proposals of Vía Campesina for sustainable, farmer based agricultural production." Bulletin, Agustus. www.viacampesina.org/welcome_english.php3.

___. 2003. "Statement on agriculture after Cancun." Bulletin, 15 Desember. www.via-campesina.org/welcome_english.php3.

___. 2004. "The domination of capital over agriculture." Bulletin, 18 Juni. www.viacampesina.org/welcome_english.php3.

___. 2005. "Impact of the WTO on Peasants in South East Asia and East Asia." *JI Mampang Prapatan* XIV (5).

___. 2008. "A response to the global food crisis: Sustainable family farming can feed the world." Siaran pers, 15 Februari.

___. 2011. "La Vía Campesina to the ministerial meeting: 'It is time to end the WTO'!" 16 Desember. http://viacampesina.org/en/index.php/actions-and-events-mainmenu-26/10-years-of-wto-is-enough-mainmenu-35/1161-via-campesina-to-the-ministerial-meeting-qit-is-time-to-end-the-wto.

___. 2012. "The people of the world confront the advance of capitalism: Rio +20 and beyond." http://viacampesina.org/en/index. php/actions-and-events-mainmenu-26/-climate-change-and-agrofuels-mainmenu-75/1248-the-people-of-the-world-confront-the-advance-of- capitalism-rio-20-and-beyond.

VIDAL, J. 2012. "Land acquired over past decade could have produced food for a billion people." *Guardian Weekly* 3 Oktober.

WALD, N., C. ROSIN, dan D. HILL. 2012. "'Soyization' and food security in South America." Dalam *Food Systems Failure: The Global Food Crisis and the Future of Agriculture*, disunting oleh C. ROSIN, P. STOCK, dan H. CAMPBELL. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Earthscan.

WALKER, K.L.M. 2008. "From covert to overt: Everyday peasant politics in China and the implications for transnational agrarian movements." *Journal of Agrarian Change* 8 (2 dan 3): 462–488.

WALKER, R.A. 2005. *The Conquest of Bread. 150 Years of Agribusiness in California*. New York (Amerika Serikat): The New Press.

WALLERSTEIN, I. 1974. *The Modern World System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. New York (Amerika Serikat): Academic Press.

WEIS, T. 2007. *The Global Food Economy: The Battle for the Future of Farming*. London (Inggris): Zed Books.

___. 2010. "The accelerating biophysical contradictions of industrial capitalist agriculture." *Journal of Agrarian Change* 10 (3): 315–341.

WEISSMAN, R.T. 1991. "Prelude to a new colonialism: The real purpose of GATT." *The Nation* 18 Maret: 337.

WELLS, M. 1996. *Strawberry Fields: Politics, Class, and Work in California Agriculture*. Ithaca (Amerika Serikat): Cornell University Press.

WEN, T. 2007. "Deconstructing modernization." *Chinese Sociology and Anthropology* 39 (4): 10–25.

WESSEL, J. 1983. *Trading the Future: Farm Exports and the Concentration of Economic Power in Our Food System*. San Francisco (Amerika Serikat): Institute for Food and Development Policy.

WILKINSON, J. 2010. "The globalization of agribusiness and developing world food systems." Dalam *Agriculture and Food Crisis: Conflict, Resistance and Renewal*, disunting oleh F. MAGDOFF dan B. TOKAR. New York (Amerika Serikat): Monthly Review Press.

WILSON, J. 2011. "Irrepressible toward food sovereignty." Dalam *Food Movements Unite!*, disunting oleh E. HOLT-GIMÉNEZ. Oakland (Amerika Serikat): Food First Books.

WILSON, J.B. 2010. *The Reformed Committee on World Food Security: A Briefing Paper for Civil Society*. Bilbao (Spanyol): International Planning Committee for Food Sovereignty.

WINDERS, B. 2009. *The Politics of Food Supply: U.S. Agricultural Policy in the World Economy.* New Haven (Amerika Serikat): Yale University Press.

WITTMAN, H. 2009. "Reworking the metabolic rift: La Vía Campesina, agrarian citizenship and food sovereignty." *The Journal of Peasant Studies* 36 (4): 805–826.

WITTMAN, H., A.A. DESMARAIS, dan N. WIEBE, penyunting. 2010. *Food Sovereignty: International Perspectives on Theory and Practice*. Halifax (Kanada): Fernwood.

WOERTZ, E. 2013a. "The governance of Gulf agro-investments." *Globalizations* 10 (1): 87–104.

___. 2013b. "Historic food regimes and the Middle East." Dalam *Food Security in the Middle East*, disunting oleh Z. BABAR dan S MIRGANI. London (Inggris): C. Hurst and Co. Publishers.

WOODRUFF, W. 1967. *Impact of Western Man: A Study of Europe's Role in the World Economy, 1850–1960*. New York (Amerika Serikat): St. Martin's Press.

WORLD BANK. 2007. *World Development Report, 2008*. Washington, D.C. (Amerika Serikat): World Bank.

ZHANG, F. dan J.A. DONALDSON. 2010. "From peasants to farmers: Peasant differentiation, labor regimes, and land-rights institutions in China's agrarian transition." *Politics & Society* 38 (4): 458–489.

INDEKS

A

Abu Dhabi 151
ActionAid 226
Afrika 188, 194, 197, 200, 203
  Sub-Sahara 191
  Barat 196
Africa Center for Holistic Management 224
agrobisnis/bisnis pertanian 7, 8, 26, 29, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 69, 86, 93, 98, 113, 118, 119, 127, 128, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 149, 153, 154, 174, 187, 189, 190, 198, 199, 201, 204, 226, 257
agroekologi/pertanian ekologis 102, 130, 220, 226, 238–240
air
  perampasan 196, 199, 200
  batas-batasnya 177
akuakultur/perikanan 137
akumulasi
  krisis 59, 61, 131, 174, 181, 182, 186, 194, 196, 197, 199, 245
  dinamika 31, 38, 93
  masalahnya 108
akumulasi kapital 91
  dinamika 31, 38, 52
  bentuk ekstentif 42
  intensifikasi 51
Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) 241
Amerika Latin 53, 54, 55, 57, 85, 117, 141, 142, 144, 149, 151, 189, 191
Amerika Serikat 4–8, 10, 12, 15, 19, 21, 23, 25 29, 32, 40, 42, 44, 47–59, 61, 62, 65, 67, 68, 72, 74, 75, 79–87, 112–118, 133–138, 141, 147–149, 151, 154, 159, 178–180, 185, 189, 191, 195, 197, 206
  rantai pangannya 157
Amerika Tengah 44, 57, 188
Anthropocene 207
Arab 147
Arab Saudi 148
  Prakarsa Raja Abdullah 149, 200
Argentina 43, 50, 53, 57, 86, 136, 139, 141, 142, 143, 175, 178, 188, 189
Asia 202, 203
  Timur 177, 199
  Selatan 226
  Tenggara 57, 112, 134, 177, 188, 206
Australia 7, 25, 50, 135, 136
ayam 77, 86, 135–137, 139, 152, 159

B

babi 139, 141, 159, 239
bahan bakar nabati 142, 151, 174, 179, 180, 183, 184, 197, 199, 210
  proyek 181
Banglades 226
Bank for Interntional Settlements (BIS) 23, 69, 74, 81
Belanda 87, 229
benih
  pemuliaan 226
  teknologi seputarnya 231
benih hibrida 57, 159, 169
bentuk harga 43
beras 34, 84, 87, 134, 135, 136, 137, 140, 149, 166, 177, 178, 200
  keanekaragaman hayati pertanian 222

bioekonomi 190–193, 197, 209
biokapitalisme 193
bioteknologi 78, 142, 143, 155, 193
Bolivia 243
Brasil 34, 36, 44, 53, 69, 86, 112, 116, 130, 136, 139, 141, 144, 189, 200, 206, 219, 220, 229, 235
Bretton Woods 21, 22, 59, 64, 67, 74, 82, 241
BRIC (Brasil, Rusia, India, China [Tiongkok]) 200
budaya jagung lokal 144–146, 207
Burkina Faso 229
buruh pertanian 157

C

Centro de Desarollo Integral Campesino para la Mixteca (CEDICAM) 220
cita-cita yang bisa diwujudkan 246
City of London 15, 30, 66, 74
Committee on World Food Security (CFS) 242–243, 248
Common Agricultural Policy (CAP) 82
Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) 142
Coordination Paysanne Européene (CPE) 234

D

daging 135–140
daging sapi 135, 139
dagingisasi 139, 169
dana dampingan 22, 53, 55, 135, 233
dana negara 149, 201, 202
deagrarianisasi 84, 95
Deccan Development Society (DDS) 225–227
dekomodifikasi 232
Dewan Kebijakan Pangan Toronto 244
Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Cooperation Council) 149, 199
Dewan Pangan Dunia (World Food Board) 50
di luar pertanian
  pendapatan 223
  kerja 84
dinitrogen oksida 170
dumping/pelimpahan 7, 9, 20, 73, 82, 84, 114, 205

E

ekologi-dunia 181
ekologi global 192, 196
ekologis
  modal 42, 182, 231–235
  bencana 48, 168
  pertukaran 234
  tanggapan 167, 169–170, 208
  jejak tapaknya 169
  pengetahuan 181
  praktik 215
  masalah 100
  nilai 231
ekonomi keluarga berbasis upah 154
ekosistem
  keterkurasan/kehancuran 31, 39, 162, 182–184, 186, 195, 197, 212
  layanan/daya dukung 182, 213
ekspor hasil pertanian 25–26, 44, 69, 72, 76, 93, 98, 113, 118, 134, 149, 150, 155, 189, 195, 199, 200, 202–206
ekspor hasil pertanian nontradisional 26, 76, 136
Ekuador 243
emisi gas rumah kaca 184, 206
Eropa 153, 156, 179, 187–188
Etiopia 149

F

Filipina 134
finansialisasi 22, 64, 73–74, 158–162, 181, 188, 192, 196

Food dan Agricultural Organization (FAO) 49, 51, 59–60, 84, 89, 129, 180, 186, 205, 210, 217, 241–243
fortifikasi biologis 165
fosfat 177

G

G-20 69, 70, 148
gandum 15, 23, 25, 36, 40, 42–44, 52–57, 84, 87, 103–104, 109, 112, 135, 140, 147, 149, 150, 163, 165, 178, 188, 195, 200, 202
gender
  ideologi 152, 164–165
  ketimpangan 225
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 2, 30, 50, 60, 79–80, 83
gerakan sosial 19
GLOBAL.G.A.P 64
globalisasi 1–3
Guatemala 144, 195, 201, 222
gula 33–34, 39, 51, 149, 159, 163, 165, 195, 200

H

hak-hak 123
harga pangan dunia 12, 23, 32, 36, 38, 41, 42, 83–84, 94, 103
harga tanah 206
hegemoni 4, 6, 10, 32, 51, 62, 65–66, 68, 69, 75, 81, 91, 93, 110
hidroponik 150
Honduras 117, 206, 221

I

ikan 56, 76, 138, 177, 214
IMF 68, 69, 74, 75, 81, 90, 180, 210
India 44, 45, 85, 109, 116, 130, 178, 188, 200, 225–227
Indonesia 116, 130, 136, 166, 177, 178, 189, 194, 201
industrialisasi pertanian 8, 18, 19, 43, 72, 100, 102, 116, 143, 159, 163, 174, 178, 197, 209
Inggris Raya (U.K.) 153, 244
  U.K. Gallagher Report 210
intensifikasi berkelanjutan 192, 197
International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD) 183, 210, 217, 236
International Food and Policy Research Institute (IFPRI) 210
International Planning Committee for Food Security (IPC) 95, 242
Irak 147
Iran 150
Italia 156, 175, 229

J

jagung 25, 34, 40, 52, 56, 76, 84–87, 110, 135, 137, 139, 140, 144–146, 149, 159, 163, 166, 179, 180, 188, 195, 200, 202, 207, 209, 220, 221, 239, 247
  impor 56
  sirup 52
Jaringan Organisasi Petani dan Produsen Pertanian Afrika Barat (ROPPA) 225
jaringan pangan alternatif 144, 241
Jepang 133–138, 178

K

kalori 164, 177
Kamboja 178
Kanada 86, 151
karbon 170, 187, 191, 194, 196, 204, 206, 207, 214, 240, 247
kaum tani baru 128, 235
Kazakstan 141, 178
keamanan pangan 9, 47, 49, 53, 59, 60, 61, 72, 73, 83, 86, 87, 88, 94, 128, 129, 131, 140, 143, 149, 150, 157, 165,

166, 175, 176, 183, 184, 187, 217, 224, 237, 241–245
keanekagunaan 82, 216–218, 233
keanekaragaman hayati 170, 214
kedaulatan atas tanah 101, 153, 219, 234–235
kedaulatan pangan 9, 27–29, 89–94, 102, 106, 121–124, 126–131, 144, 151, 166, 176, 208, 209, 218, 219, 232–240, 241–243, 245, 246, 248
  Nyéléni Declaration 2007 236
kedelai
  kacang 56, 138, 143, 163, 166
  tatanan kompleks industrinya 143
  impor 56, 139, 140
  minyaknya 52
  revolusi 188
kegunaan tanaman untuk dipertukarfungsikan 162, 195, 206
kekeringan di Amerika 19, 48, 50
kelaparan 44
kelas
  analisis 108, 122, 127
  menu makanan 9, 16, 32, 35, 39, 42, 65, 87, 135, 140, 141, 163
  tuan tanah 98, 110, 119
  petani/kaum tani 95
  politik 14, 41, 45–46, 48, 54, 58, 70, 110, 116, 120, 156
  relasi-relasinya 40, 75, 102, 103, 118, 127, 152
  transformasinya 7, 97, 98, 100, 105, 108, 109, 139
Kenya 76, 116, 153
kerusuhan pangan 175–176, 180, 208
kesehatan masyarakat 9, 20, 46, 82, 89, 124, 143, 163–164, 167, 169, 243, 245
Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) 22, 85, 145, 221
ketimpangan panen 191, 197
keunggulan komparatif 16, 69, 76, 153, 201
kewargaan agraria 92
kimia pertanian 57, 144, 159
kode etik kesukarelaan 203–204
Kolombia 54, 201
koloni/jajahan 7, 17, 33, 34, 38, 134, 187
komodifikasi 1, 10, 16, 18, 31, 37, 43, 46, 173, 177, 203, 209
komoditas
  rantai 154
  fetisisme 167
  stabilisasi 19, 48, 50, 53, 113
Konfederasi Masyarakat Adat Ekuador 243
kontrak
  pertanian 1, 3, 77, 118, 152, 153
  pangan 185
  pasokan 56, 94
  kerja 156, 162
kopi 116, 195
Korea Selatan 55, 135, 202
korporasi transnasional 2, 22, 56, 64, 68, 72, 77, 80, 81, 93, 128, 176, 189, 201
  pedagang besar 200
  pengecer/retail 87
krisis 59, 61, 72–73, 89, 102, 114, 128, 178, 180, 182–183, 186
krisis agraria 29, 176–177, 178, 180, 187, 245
krisis epistemik 210
KTT Bumi 126
KTT Pangan Dunia 59, 89, 186
kuasa atas jasad hidup 157
Kuba 54, 116, 239
kurang gizi 163, 165, 195

L
larangan ekspor 178
Lebanon 150
lemak 51, 163
liberalisasi 24
longue dureé 174, 206, 237
lumbung
  dunia 61, 134
  utara 25, 202

M
Makanan Lambat Saji 168
makanan kesehatan 160
makanan tahan lama/awetan 52
Malaysia 116, 189, 201
Mali 130, 243
masalah agraria 5, 97–109, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 124–131, 211, 214, 216, 218, 229, 234
  terkait pangan 131, 214
masyarakat asli/adat 194
Masyarakat Ekonomi Eropa 56
mata uang internasional 10, 21, 42, 65, 66
Meksiko 50, 53, 76, 85, 86, 136, 142, 144, 146, 154, 155, 156, 175, 219, 220, 221, 229
memberi makan dunia 49, 57, 167, 176, 237
menu makanan 39, 55, 65, 134, 135, 163–166
merkantilisme 29, 39, 114
merkantilisme keamanan pertanian 199–204
Mesir 55, 147, 148, 150, 175, 178
milik bersama (*commons*) 187, 191
  global 198
  pengetahuan 226
Millenium Development Goals (MDGs) 94
Millenium Ecosystem Assessment 129, 183
milpa 220–223
minyak
  puncak eksploitasi 174, 183, 196, 239
  harga 179
  pasar 180
  rezim 178
monokultur 143
Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) di Honduras 221
Mozambik 130, 200
multilateralisme 189, 204

N
Negara-Negara Pertanian Baru 26, 76, 78, 136
Negara-Negara Teluk 150–151
neoliberalisasi alam 190
neoliberalisme 23, 70, 166, 174, 217, 224
Nepal 226, 243
Niger 130, 224
Nigeria 55
Nikaragua 130
nilai
  pertambahan 230, 232
  rantai 29, 187, 226
  ekologis 231
  penerabasan 98–99, 114, 122
  relasi-relasinya 10, 12, 37, 42, 43, 88, 97–98, 103, 154, 183
  teori tentangnya 213
nilai hayati 193
nutrisionisme 164–165

P
pabrik dunia 2, 7, 40, 42, 72, 110
Padi Emas 165, 166
panenan biji-bijian 177
pangan
  bantuan 4, 19, 20, 23, 50–53, 55, 58, 59, 73, 81, 117, 134, 148

komodifikasi 177, 233
krisis 165, 174–175, 178, 180, 241
ketergantungan 86–87, 147–148, 150, 176, 201–202
imperium 161
surat-surat berharga 185
tatanan kompleks impornya 134, 138
pabrik pengolahan 160
olahan 52, 160, 161, 163
hak atasnya 59, 83, 92, 236
spekulasi 185, 198
surplus 8, 9, 48, 72, 77, 113, 114, 135, 148
pangan subtropis 36, 39
pangan tropis 39, 51
pangan murah 16, 26, 38, 41–43, 51, 71, 72, 87–88, 93, 103, 105, 111–112, 114, 121, 138, 168, 212
rezim 128, 175, 205
pangan yang dibeli dengan upah 58, 140
Pantai Gading 116
Paraguay 43, 130, 188
patahan metabolis 28, 101, 163, 167–170, 181, 216, 220
pemanis 51–52, 159
pembagian kerja secara internasional 8, 16, 17, 25, 61, 78, 93
pembangunanisme 5, 121
pembentukan kaum tani 54
pembentukan kembali kaum tani 116, 117, 229, 233, 234
pemburu biomassa (*biomasters*) 191
pemenuhan kebutuhan sendiri 223
pemiskinan/perampasan 9, 71, 83–84, 101, 195, 194, 211
pemiskinan keterampilan (*deskilling*) 231
pemiskinan reproduksi 41, 155, 181, 182, 183, 184, 197, 224, 246
pemukim asing/pendudukan (*settler*) 19, 42–43, 111
petani 15, 29
kawasan/wilayah rintisan 42, 113
kawasan-kawasan 187
negara-negara 2, 4–7, 17, 43
pemulihan hayati 235
pencaplokan/perampasan/penutupan akses atas tanah 13, 198
global 204
pencaplokan/perampasan tanah/lahan skala besar 22, 29, 39, 141, 151, 186–188, 191, 193–194, 196, 198, 199, 234, 241
oleh negara 201
penentuan nasib sendiri 237
penerabasan biofisik 98, 114, 122, 170, 209
penggembala 9, 28, 123, 187, 242
penggizian 162–164, 169
perampasan hijau 196
penyediaan global 26, 77, 80, 136, 138, 141, 161
penyesuaian struktural 22, 23, 24, 25, 70, 74, 82, 93, 175, 202, 203
penyusutan kaum tani 117–119
Perang Dingin 4, 8, 16, 49, 52, 54, 115, 138, 140
perawatan lingkungan 123
perdagangan bebas 42, 60, 82, 83, 107, imperium 4, 103, 147
perempuan 58, 152–155, 165, 175, 196, 224–227, 247
pertanian bagi hasil 155–156
pertanian padat energi fosil (*petro-farming*) 114
pertanian dunia 157
pertanian keluarga 41
pertanian organik
Kuba 239
daya lenting 240
keunggulan 239–240

pertanian untuk perlindungan alam 223
pertanian tinggi 110
pertanian yang didukung komunitas 168
Peru 229
perubahan iklim 124, 128, 170, 193, 223, 226, 227
pestisida 57, 154, 209
petani/kaum tani
  perannya dalam menyediakan pangan 247–248
  pangannya 58
  kondisi 229
  gerakan tandingan 29, 104, 125, 144
  corak bertaninya 230
  praktik-praktiknya 216, 220, 225, 228, 238–239
  masalah seputarnya 108, 115, 120, 127, 229–230, 247
pisang 153, 195, 221
planet kumuh 99, 219
planet ladang 219
pluriaktivitas 220
produksi komoditas skala kecil 55, 116, 117–118, 223, 247
Program PL-480 53
protein hewani 135, 148, 159, 163, 211
proteksionisme 43, 48, 105
Protokol Kyoto
  Mekanisme Pembangunan Bersih 187
  Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan [REDD]) 187
proyek globalisasi 73
proyek pembangunan 5, 52, 73, 118
Proyek Sudan 148
pupuk 44, 50–51, 57, 58, 77, 99, 111, 169–170, 177, 197, 209, 221, 238, 240
Putaran Doha 24
Putaran Uruguay 2, 24, 60, 83, 178

Q

Qatar 149, 150, 200

R

rantai komoditas global 3, 8
rasial 155, 156
reforma pertanahan/agraria 8, 55–55, 115–117, 119, 121, 134, 147, 194, 218, 243
regulasi
  nasional 2
  teori 17, 30
Rekonstruksi Pedesaan Baru 218
relasi nilai global 10, 43, 97, 103, 182, 208, 212
remitansi 150
reproduksi sosial 130, 152, 157, 176, 198, 208, 210, 212, 213, 216, 218, 222, 224, 225, 233, 246
Republik Dominika 153
revolusi biru 134
revolusi hijau 8, 57–58, 77, 98, 118, 177
revolusi zat gizi mikro 166
rezim kelaparan 237
rezim pangan 1, 4, 5, 27, 195
  sebagai metode 3, 9, 10–13, 28, 29, 31–33, 35, 36, 114, 131, 133, 146, 167, 168, 171, 207–208
  berporos Inggris 7, 10, 14, 38
  korporat 8, 10, 22, 25, 26, 63, 71, 72, 73, 88, 144, 158, 166, 174, 181, 203, 219, 245, 246
  korporat-lingkungan 19, 20, 64
  krisis 102, 175
  finansialisasi 160
  dari antah-berantah 168, 170, 246
  dari tempat tertentu 168, 170, 246
  geografi 200–201
  neoliberal 142, 145
  prasejarah 33
  proyek 1, 2, 3, 5, 12, 13, 71, 133, 171, 182, 207

aturan 14, 29, 32, 38
transisi/peralihan 9, 11, 19, 31
berporos Amerika Serikat 8, 48, 55, 57, 58, 151
rezim swasta 62, 68, 70, 73, 204–205
rezim utang 75–76
Rusia 111, 178

S
sawit 180
semiproletarisasi 121, 153
Senegal 243
Serikat Pekerja Tunakisme Brazil (MST) 219
sistem negara-bangsa 5
sistem-dunia 1, 17
slogan kemiskinan 247
Standar Bahan Bakar Terbarukan (Amerika Serikat) 179
standar emas 9, 15, 34, 43, 45, 66–67, 94
strawberry 155
subsidi 7, 8, 23, 25, 50, 73, 81–85, 149, 179, 188, 217
subsistensi/pemenuhan kebutuhan hidup 55, 116, 130, 155, 156, 222, 223, 228, 231, 247
sumberdaya genetik 222, 225
supermarket 160
revolusi 8, 17, 211
surplus alam 182, 206, 212

T
Taiwan 134
tanaman ramah iklim 193
tananam serbaguna 183, 184, 188
tananam transgenik 142, 144, 166
tananam untuk pakan ternak 56, 135, 136, 137, 140, 142, 149, 179
tata kelola/kuasa pengaturan 23, 69, 79, 82, 92, 94, 164, 165, 193, 204, 217
tenaga kerja
musiman 4, 71, 88, 155, 156
komodifikasi 46
gender 154
migrasi 153, 154
swaeksploitasi 42
budak 33, 39
tenaga kerja murah 59
tenaga kerja perempuan 223
ternak 149
tatanan kompleks industrinya 52, 56, 136, 139, 143, 149
Thailand 76, 134, 136–137, 178, 189
Timur Tengah 147–149, 199
dan Afrika Utara (MENA) 202
Tiongkok 8, 44, 52, 95, 116, 133, 136, 137–143, 151, 178, 189, 199, 200, 218
tomat 76, 77, 94, 154, 155, 163
transisi gizi/nutrisi 162, 211
TRIPs 78, 142
tumbuhan pangan yang belum dibudidayakan 227
tumbuhan tahan racun 143

U
udang 134, 214–215
Ukraina 178
Undang-Undang Gandum (*Corn Laws*) 15, 40, 41, 110
Uni Emirat Arab 200
Uni Eropa 148, 189, 217, 234
Skema Perdagangan Karbon 201
High Level Group on the Competitiveness of Agro-Food Industry (HLGCAI) 189
Uni Soviet 58, 136, 239

United Nations (UN) 92–93
FAO 49, 51
Bebas dari Kelaparan 51
Sistem Hak Asasi Manusia 236
Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) 49–50
urbanisasi wilayah pedesaan 183

V
Venezuela 130, 243
Vía Campesina 30, 88, 89, 90, 91, 95, 123, 126, 128, 130, 131, 144, 158, 205, 209, 218, 236–237
Vietnam 178

W
wilayah/kawasan rintisan (*frontier*) 7, 15, 37, 39, 40, 41, 47, 61, 104, 111, 188, 196, 199
bagi kapital 101, 182–185, 196–198, 206
pertanian 113
World Bank 57, 103, 180, 188, 191, 197, 205, 210, 242
Skema Bantuan Kaum Miskin Pedesaan 118
Internasional Finance Corporation 185
Prinsip-Prinsip Investasi Pertanian yang Bertanggung Jawab (RAI) 187, 204
World Development Report 2008 186, 195, 247
WTO 24–25, 38, 71, 79, 81, 90, 142, 175
Kesepakatan Pertanian (AoA) 24, 25, 83, 86, 166, 203, 217
liberalisasi 176
ketakberdayaan 178
rezim 189, 204–205

Y
Yaman 150
Yordania 150

Z
Zimbabwe 130

sekolah

INVOLVEMENT

Indonesian Volunteers for Social Movement

pembukaan pendidikan

Angkatan XI

masa pendidikan 1 tahun: Nopember 2021 - Nopember 2022

pertemuan kelas • penugasan lapangan • evaluasi & penutupan

konsentrasi kecakapan:

Pengelolaan Ruang dan Sumber Penghidupan

insist
PRESS

Rezim Pangan dan Masalah Agraria memperluas konsepsi tentang rezim pangan awal yang telah dirumuskan oleh Harriet Friedmann dan Philip McMichael, dengan merinci dimensi-dimensi baru dari rezim pangan berikutnya yang bersifat imperial, intensif, dan korporat. Dengan mengembangkan metodologi dari analisis rezim pangan, McMichael meninjau ulang masalah agraria secara menyejarah beserta berbagai implikasinya dewasa ini. Ia mengemukakan interpretasi atas rezim pangan berbasis kawasan, dengan memadukan dimensi gender, tenaga kerja, finansial, ekologi, dan gizi ke dalam analisisnya. Dengan demikian, McMichael mendedah berbagai keterkaitan antara krisis pangan, energi, iklim, dan keuangan dengan pembentukan ulang struktur rezim pangan yang mencakup beberapa isu seperti bahan bakar nabati, pencaplokan lahan berskala besar, bioekonomi, merkantilisme keamanan pertanian, dan gerakan kedaulatan pangan.

Dibekali kelihaian sebagai seorang ahli sejarah, geografi, ekonomi dan sosiologi, McMichael mengemas telaah ikhtisar ini dengan konteks global dan kajian yang kekinian ... buku ini adalah bacaan utama bagi siapa saja yang ingin memperdalam pengetahuan untuk memikirkan sistem pangan hari ini serta bagaimana cara mengubahnya.

Raj Patel, penulis buku *Stuffed and Starved: From Farm to Fork, The Hidden Battle for the World's Food System*

McMichael menyuguhkan suatu narasi begitu memikat yang memudahkan kita untuk memandang gambaran besar: dimensi-dimensi geopolitik dan ekonomi-politik dari pangan kita ... memahami bagaimana rezim pangan dominan hari ini menyeruak—yang memosisikan sistem pertanian-pangan sebagai pelayan arus keuangan dan sirkuit komoditas transnasional—adalah langkah awal yang tak bisa ditawar menuju pembaharuan.

Olivier De Schutter, Pelapor Khusus United Nations untuk isu hak atas pangan

ICCO COOPERATION
ISS International Institute of Social Studies
ICAS Initiatives in Critical Agrarian Studies

insist PRESS
www.insistpress.com

INSISTPress
@insistpress
@insistpress

• Sosial • Politik – U 15+
ISBN: 978-602-0857-93-0
9 786020 857930